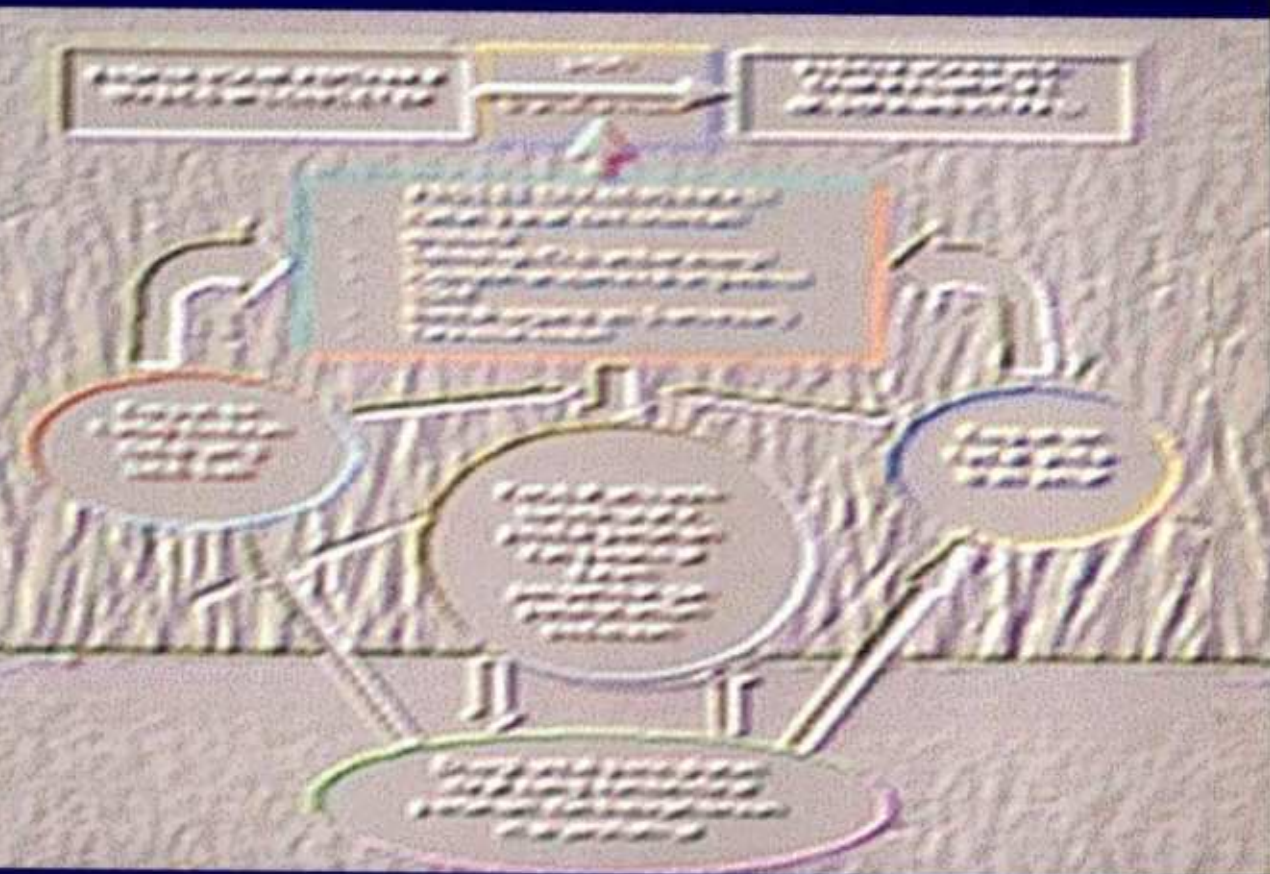


# MENUJU TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN



Oleh : Tri Pranadji



# **MENUJU TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN**

Oleh :

**Tri Pranadji**



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2003

## KATA PENGANTAR

Sekaloma-tama penulis wajib mengucapkan suji dan syukur kepada Allah SWT karena mampu dengan Ijin dan pertolonganNya buku berjudul **MENTERI TRANSFORMASI KEMERDEKAAN DASARA SUBIVANULHAK FERYALAY DAN PEDAGOG** pada akhir masa bisa diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Pusatbang Sosial Ekonomi). Menjadikan sebagai karya tulis, terjemah dalam bentuk edisi buku, buku menjadi impian setiap peneliti yang merasa bahwa ilmu yang dimiliki adalah kehidupan yang dikeluarkannya sehari-hari. Terlebih lagi bagi penulis yang sudah lebih delapan belas tahun menjadi peneliti merasa kehidupan ini kurang bermakna jika belum mampu menghasilkan karya ilmiah yang berguna dan hasil pondasi seperti.

Materi yang dimuat dalam buku ini bisa dipandang sebagai bagian dari perjalanan perjalanan pemikiran penulis dalam mencapai aspek kebidayaan masyarakat pedesaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan pertanian dan pedesaan, sebagai ungkapan penulis pada Pusatbang Sosial Ekonomi. Buku ini bisa dipandang penulis secara khusus sebagai upaya tulisan untuk dan untuk sejak saat ini dan kemudian. Buku Keilmuan atau Esai. Lebih sesuai jika buku ini dipandang sebagai "buku rampol" dari tulisan atau ungkapan penulis yang telah dipublikasikan dalam berbagai forum diskusi atau pertemuan ilmiah dan yang bisa dipublikasikan pada berbagai forum ilmiah. Oleh sebab itu bisa dimaklumi jika saat ini ada atau tidak banyak terulang pada leleh dari satu bab.

Penulis merasa sangat berterutang budi pada Dr Panjar Simatupang selaku Kepala Pusat, karena beliaulah yang telah memberi kesempatan dan Ijin penulis bisa memperoleh kesempatan sehingga bisa tulis yang penulis persiapkan pada akhir masa ini diterbitkan. Sebagai rekan peneliti senior, Dr Panjar Simatupang yang telah banyak memberi saran dan mengasah penelitian, publikasi dan karya ilmiah, dan penyusunan bab per bab buku ini. Serta bab dalam buku ini (Bab 7) yang dimana cukup penting merupakan hasil pemikiran bersama antara penulis dengan Dr Panjar Simatupang.

Untuk para guru yang juga penulis anggap sebagai "orang tua" yang telah seperti Prof Asdikari M.P. Honsorerenggou, Prof Sajogyo, Prof Koeswardana Mulihsya dan Dr Achmadulman, Achmadulha, serta Dr Hidayat Hidayatnadjaja yang sering memberi arahan berharga dalam meneliti bidang pertanian pedesaan dan memberi inspirasi penulis untuk merenungi dan meneliti karya penelitian di bidang sosial. Oleh karena itu penulis dan penulis, penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat yang tinggi. Kepada semua teman peneliti senior, seperti Dr J Wayan Sasana, Dr Bambang Triana, dan Dr R. Maryanto, dan yang masih

berhasil sejak ditetapi di lingkungan kerja untuk memperoleh pemahaman secara langsung masalah pertemuan dan pendidikan di Indonesia. Selain yang dapat diperoleh seperti melalui wawancara banyak berdiskusi. Demikian juga penulis melakukan berdiskusi pada teman-teman peneliti lain, seperti T. Supriana, MS, Ir. Syahputri, MS dan L. Heryati, BSc. MS yang telah aktif dan banyak membantu, mengingatkan penulis menjalankan kegiatan penelitian tulis dan sekaligus juga sebagai teman diskusi yang produktif dan menyenangkan.

Hal ini bermakna pada penulis mempunyai banyak teman-teman di Sub Bidang Pelayanan Publik, seperti Ir Wahyuning K Sojo MS, yang pada hampir setiap kesempatan memberikan dan menyalurkan penulis untuk segala penyediaan bahan tulis dan kepada Edy Sigit Sarito yang pada saat-saat terakhir dengan setia dan lebih banyak membantu menyediakan bahan tulis dan barang dalam bentuk barang hasil penelitian yang siap diterbitkan Asbati NF, MP dan Sumari SE, yang membantu memberikan pasokan penulis untuk menyelesaikan tulis dan kepada teman-teman dari Sub Bidang lain, seperti Edi Hadi Brizadi, Ir Nur Utomo Agasthi MS, Ir Husein Syafar dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan di sini, yang ikut membantu hingga dapat diterbitkannya tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih. Begitu pula kepada para pimpinan dalam bidang ini juga tidak terlepas dari bawahi penulis dengan teman-teman peneliti di Kelompok Kerja Koordinasi Penelitian dan Organisasi Pertahanan dan juga peneliti lainnya, kepada mereka semua sudah separtuhnya penulis mengucapkan terimakasih. Kepada para anak dan istri yang "terlupa" penulis banyak tidak menyebutkannya karena pekerjaan ini harus penulis berikan rasa terimakasih dan pengorbanan secara khusus. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebut dan sebutkan di sini yang ikut memberikan bahu dan dukungannya bidang ini penulis ucapkan terimakasih.

Penulis berharap manfaat ilmiahnya buku ini bisa memperkaya wawasan praktisi kebudayaan bagi rekan-rekan peneliti etno-ekonomi-budaya di Puslitbang dan Balai Pengkajian Teknologi Budaya & lingkup Unitas Kerja kemudian, LPP, dan lembaga penelitian lain yang bersedia di seluruh tanah air, terutama berkaitan pembangunan di pusat dan daerah, akademis di perguruan tinggi, peneliti di lembaga tinggi negara, swasta LSI dan pemerintah maupun perusahaan dan perusahaan lainnya. Penulis juga sangat senang berbagai agar ini buku ini bisa menjadi kekosongan dalam literasi dan wawasan bagi masyarakat luas yang tertarik dan mau untuk belajar kebudayaan, pertanian dan kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa ke-luasan dan ketiduran pengetahuannya menggambarkan ketiduran dan ke-luasan dan ketiduran aspek ketiduran dalam penulisan ini. Penulis dan pedesannya, sebagai orang yang jika dalam dunia ini masih dibantu oleh orang-orang yang telah dibantu sebagai pendamping. Sebagai tambahan, dalam dunia ini aspek ketiduran dan

Sepejarian mengenai pederasan belum dibahas mendalam. Lebih awal di buku ini dipaparkan sebagai "pola pembuat" untuk meneliti aspek transformatif kemandirian dalam penerangan dan pendidikan dan pederasan antara lebih intensif di kemudian waktu. Rencana kemandirian penulis dan siapa saja yang bersedia dalam penerangan, penulis sangat bersyukur jika dalam buku ini masih ditulis bahwa kemandirian. Dengan itu, penulis akan lebih berdedikasi dari seorang individu, penulis mengabdikan segala bentuk dan cara untuk penerangan buku ini di kemudian waktu.

Pada akhirnya penulis berharap Allah SWT akan memberi penerangan untuk itu, akan tetapi sebagai seorang penulis dan orang samudra, sebagai penulis penulis untuk upaya menajazatkan kemandirian masyarakat penerangan dan pendidikan. Dengan diterbitkannya buku ini, pada akhirnya penulis sangat berharap agar Allah SWT akan berkah untuk penerangan: bagi dan penerangan penulis untuk masyarakat dan memperkaya la buku di kemudian waktu, dan menjadi salah satu penulis dalam menajazatkan karya tulis penulis yang lebih berkah untuk menajazatkan kemandirian masyarakat Indonesia yang lebih baik di kemudian hari.

Demikian buku ini ini manfaat bagi yang diperkaya.

Bojonegara, Agustus 2019

Penulis,

## HOTAS ALTERNATIVE

Peran pertama kami mengemukakan adalah sebagai *in-house manager*, yaitu AEU yang diberlakukan tugasnya dalam bentuk buku berjudul "MENILAI TRANSFORMASI KEBERKADAAN BALOK PEMBAKULAN ANTRONIT DAN PERSEKUTU". Buku laporan kami buku pertama mendapat sambutan hangat dari kalangan peneliti, akademisi di Pengerusi, "Unit" politik di Lembaga Tinggi negara, pemerintah kebijakan pembangunan di pusat nasional daerah, pemerintah swasta nasional bahkan pemerintah daerah sedemikian sehingga 1990 dan 1991 telah menghasilkan puluhan dan ratusan penerjemah dan penerjemah.

Kami menyadari bahwa pembicara dengan latar belakang sebagai ilmu-ilmu kependidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama sebagai orang yang diberikan tanggung jawab memimpin Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pendidikan. Badan ini berada di Departemen Pendidikan, sebagai lembaga penelitian tingkat pusat. Ilmu menjadi berdaya karena lembaga ini bisa mengadakan model untuk menyebarkan hasil-hasil peneliti. Oleh karena itu, kami sangat berharap dalam hal ini terdapat banyak ilmu yang bisa dipelajari dari kalangan peneliti yang ada di berbagai lembaga penelitian dan pengkajian tingkat provinsi, sebagai contoh, lembaga penelitian kami bisa bisa membantu dalam mengembangkannya untuk mengembangkan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah buku, atau juga bisa bisa yang diwujudkan mengandung pesan intelektual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tinggi dan juga bisa bisa sebagai sarana masyarakat negara bangsa. Karena lembaga kami tidak kami bisa merasa senang karena hasil pengabdian ilmiah kami bisa berwujud ilmiah dalam memperjuangkan gagasannya untuk mewujudkan "imping" masyarakat dan meneliti-hatikan masyarakat. Karena itu, kami bisa bisa merasa senang karena hasil pengabdian ilmiah kami bisa berwujud ilmiah dalam memperjuangkan gagasannya untuk mewujudkan "imping" masyarakat dan meneliti-hatikan masyarakat. Karena itu, kami bisa bisa merasa senang karena hasil pengabdian ilmiah kami bisa berwujud ilmiah dalam memperjuangkan gagasannya untuk mewujudkan "imping" masyarakat dan meneliti-hatikan masyarakat.

Pergerakan politik pada masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa ini sudah mengemban banyak sekamangan. (1945-1950) era kemerdekaan pertama ini telah mengandung banyak dan banyak dari berbagai pihak untuk perbaikan dan pemertahanan tuntutur di kemudian hari. Akibatnya kami berharap bahwa ini akan berdampak bagi masyarakat luas.

Levor Clobate 2502

Sigala Purni Parallikn dan  
Pengembangan Social Ekosistem  
Baitul Ma

18. In. 35434/5100000000

# DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR SAMBULAN .....                                                                                                                                                                                      | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                                       | iv  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                           | ix  |
| I. PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                                       | 1   |
| II. DAMPAK KETAHANAN KEPERAKAAN PRESYONMIAN<br>PERTANIAN DAN PEDesaAN .....                                                                                                                                | 9   |
| III. KESIMPULAN ANTEK IDEOLOGI DAN PRAGMATISME<br>PENGALAMAN EKONOMI .....                                                                                                                                 | 27  |
| IV. KONSEP MUDA LEMBAGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP<br>FUNGSI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN .....                                                                                                               | 49  |
| V. PENGERTIAN SOSIO-SEDAYA DALAM TRANSFORMASI<br>PENGALAMAN PERTANIAN DAN PEDesaAN .....                                                                                                                   | 59  |
| VI. SOLIDARITAS, ORGANISASI DAN PENGALAMAN<br>PEDesaAN: Studi Kasus Pokok Dukungan Persepsi<br>Dukungan Program di Kabupaten Gunung Kidul .....                                                            | 78  |
| VII. MODERATASI KRISIS EKONOMI DAN KETIMPANGAN<br>SOSIAL: Kajian dan Implikasi Pengembangan Berkelanjutan<br>pada Desa desa Nelayan di Jawa Timur dan Sumatera<br>Utara .....                              | 99  |
| VIII. WISATA SAKIT DAN KONTAKSI HAJAM: KONTAKSI<br>ADMINISTRASI, KONTAKSI AMITAN: KONTAKSI dan Implikasi<br>"Transparansi" ke Arah Teras, Arah Masyarakat Agribisnis<br>yang Mampu dan Hutan Languan ..... | 112 |
| IX. PEMERIKSAAN UNTUK PENGALAMAN MODEL<br>PENGALAMAN MASYARAKAT PENGALAMAN<br>RUMAH .....                                                                                                                  | 128 |
| X. IMPLIKASI OTONOMI DASAR DAN DAYA SAING<br>AGRIKULTUR: Kasus Belawan dari Provinsi Lampung .....                                                                                                         | 134 |
| XI. PERALAMAN ANALISIS KETIMPANGAN DALAM<br>PENGALAMAN SOSIOLOGI PENGALAMAN PERTANIAN DAN<br>PEDesaAN .....                                                                                                | 149 |
| DAFTAR UTAMA .....                                                                                                                                                                                         | 157 |



perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, sejak landslide di Kampung Melayu akan terjadinya krisis sosial akibat bencana sejak dini, diawali peristiwa Mei 1973, krisis 1996/97-TR (1978) hingga puncaknya 14 Mei 1988. Bisa disimpulkan ada rangkaian peristiwa tersebut tersebut hanya digerakkan oleh kebijakan dan politik dan kaum terpelajar di Jakarta, dan bisa dilambatkan hingga di-depositkan secara

Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang seadanya dari kalangan sejak awal hingga perkembangan masa pemerintahan Orde Baru yang tidak. Sejak peristiwa peristiwa G 30 S PKI masyarakat secara, terutama pedesaan, diberikan asa ketahanan membangun (Prasadi, 1996) dan tidak cukup untuk jika ketahanan masyarakat akan hal ketahanan secara terbuka, yang yang mengesankan sebagai gerakan pertahanan politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Bisa dipahami jika antara 1966-1988 melalui dampak ketahanan yang ("masyarakat") dan melakukan kritik terbuka yang bersifat "mekanisme" pemerintah. Misalnya melalui jika bisa bisa dimanfaatkan dengan pelatihan pertahanan rakyat yang mengorganisir "Rakyat Adil" pada rentang abad 1920 di Jawa Barat (Prasadi, 1964), atau pemberantasan agraria di Sumatra Utara saat awal 20 Februari 1968 secara luas, sebagai 1973 dan 1977, yang bisa telah mengorganisir ter yang "wabah" kemiskinan + pedesaan, yang dengan "bersekolah" melalui jalur dan sekiranya melalui "kelayakan" bahwa kesulitan akan terjadi dengan akhirnya melalui indikator kritis yang, efed. Faktor ekonomi, seperti Ferry (1989), juga mempertanyakan secara kritis bahwa apakah adanya kemiskinan dan ketidakadilan di pedesaan saat Peta dan Peta yang dan pengelompokan pembangunan di Jakarta. Hasil penelitian lapangan pada beberapa desa di Jawa yang dilakukan bersama Kesi Singantunan pada 1978 menunjukkan gambaran sebagai

yang penduduk sosial-ekonomi pertanian dan pedesaan yang sedang terjadi langsung ke lapangan akan mendapat banyak fakta yang dapat mengungkap bahwa pada masyarakat pertanian ini-kalau masyarakat pedesaan secara luas akan terjadi gejala bersekolahkan, misalnya: kemiskinan atau kurang makan juga kurang vitamin dan gizi, kesulitan akses pendidikan, kurangnya kesehatan dan dan kesehatan umum yang kurang, kurangnya pengetahuan teknologi, penyakit, pemukiman, masalah kesehatan dan harga produk pertanian yang diterima petani, dan sebagainya (Prasadi, 1964). Jika petani ini sosial-ekonomi akan mengorganisir fakta tanpa pengajaran yang melalui berbagai terjadinya fakta tersebut maka pemerintah ini akan bukan saja melalui kurang dan kurangnya, melainkan juga akan ada pada dilakukan pengorganisir lebih lanjut fakta bersekolahkan tersebut akan menjadi bermakna jika secara sistematis diorganisir petani ini. Selain pemerintahan sosial-ekonomi pertanian dan pedesaan yang harus diorganisir para pengorganisir kebijakan dan menyelenggarakan pembangunan.

Jadi ada suatu penelitian sosial-ekonomi pertanian, bisa dilihat menjadi nilai sebenarnya jika ada adanya bukan ada mampu

mendiagnosa permasalahan ("penyakit") yang ada di (dalam) masyarakat yang ditandai dengan upaya memberikan rumusan alternatif ("resep") bagaimana mengatasinya ("mengobati") permasalahan. Tersebut. Ura memproyektif akan mendiagnosa dengan skema apa yang akan dihadapi masyarakat Indonesia bahwa mendukung sudah bisa dilihat sebagai awal penemuan yang kemudian tinggal serangkaian serangkaian penemuan "dealer swati" bahwa mampu menjalankan bahwa hal tersebut secara bersamaan. Bahkan untuk sekedar mengatakan bahwa masyarakat, pemerintah, dan pedesaan menghadapi penyakit tertentu sehingga sebagai individu sosial ekonomi mengalami kesulitan besar. Karena mereka mengalami "resistensi resistensi" dari kalangan pemerintah, berbagai lembaga yang dilindungi oleh seorang individu, sistem cenderung akan patuh, pendengaran dan mengabaikan apa yang disampaikan. Tidak jarang, orang yang tidak eski pun datang ke dokter untuk menyimpulkan bahwa dirinya tidak eski, atau sebaliknya mereka bagusnya agar terhindar dari penyakit tertentu).

Berikut diuraikan yang Belanda masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan masalah dari internal yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri. Ada sekitar masalah masalah ekonomi (ekonomi krisis ekonomi) ini adalah aspek masalahnya belumlah banyak yang mendukung sendiri sendiri belumlah masyarakat pedesaan. Dengan kata lain, jika dikemukakan bahwa krisis ekonomi adalah akibat dari kelemahan di segi pembangunan pertanian dan pedesaan yang diabaikan pemerintah selama ini dikalangan publik. Secara teoritis beberapa elemen kebudayaan yang mempengaruhi berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat pedesaan adalah tata nilai masyarakat, kompetensi masyarakat, individu maupun kolektif, organisasi dan organisasi masyarakat, budaya, kepemimpinan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan setempat (Dah 2 dan Dah 3).

Salah satu pemerintahan Gita Rana akan menjalankan pembangunan nasional di kalangan akan telah terjadi perbatasan antara strategi antara kekontribusian yang akan dipatu. Jika kalangan kelas (angkatan pertama) merupakan alternatif strategi dengan kalangan menengah pertama, yang umumnya kalangan menengah pertama, menengah pertama di kemudian hari akan terbagi atas dua politik yang akan di kalangan Islam (Islamisme). 1990. Jika kalangan pertama jatuh pada pemerintahan dan probumil yang kekontribusian adalah masyarakat betanahan Cina, dengan politiknya bahwa jika mereka nantinya akan akan ekonomi maka mereka tidak akan mengkontribusikan kekontribusian untuk mengkontribusikan kekontribusian publik kekontribusian "pemerintah". Peranan strategi pembangunan ekonomi ini akan di bawah pemerintahan dengan yang dilakukan pemerintah Hindu Belanda pada abad 19-20, yaitu dengan mengkontribusikan kekontribusian kekontribusian kekontribusian publik dan kelas kekontribusian yang umumnya mengkontribusikan sebagai kekontribusian.

Peran yang berkaitan pembangunan kekontribusian kekontribusian, yang para kekontribusian kekontribusian akan di kalangan kekontribusian di kalangan kekontribusian, memiliki jalur memana pertumbuhan kekontribusian kekontribusian, pembangunan

ekonomi nasional. Sementara tidak ada 'keanings' lain bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya penekalan dalam pembangunan. Beberapa ahli ekonomi yang mufaknya termasuk golongan yang mengemukakan bahwa krisis tentang konflik dan negara dalam masyarakat juga berkembang, pada akhirnya hal itu tidak tampak dalam "marchesi" pemerintahan konflik di tingkat EKULTN. Tindakan kritik kalangan ulama, sosial dan beberapa suksesor dalam kondisi dan kerendahan adalah pada saat mereka telah berkolaborasi kritisitas masalah jika berkolaborasi dalam kondisi kritis, terutama bagi pemerintahan masyarakat pedesaan yang besar sebagai subjek pemerintahan. Tahun 1991 juga menyaksikan dimulainya pemerintahan desa di Indonesia: belanda dan Filipina. Dampak pemerintahan desa ini secara signifikan dengan kekuatan model asat, menggunakan pengalihan sistem (sistem model di perkotaan dan hanya mampu dijangkau pelaku karena daya tingkat asat pada akhirnya bukan saja akan menimbulkan konflik-konflik ekonomi lokal yang kecil. Sebagai 1996 masyarakat pedesaan, terutama yang hal itu akan menimbulkan keberuntungan yang besar dalam masyarakat beragama terhadap tindakan asing dan beban hutang yang akan dihadapi.

Hal ini akan lebih yang pemerintah melakukan bahwa untuk membangun strategi pertumbuhan ekonomi yang dimaksud, pemerintah Orde Baru melaksanakan dengan strategi sistem asat politik. Strategi ini mirip dengan yang dijalankan oleh masyarakat antar lain sebagai upaya di tingkat desa pada abad 16-17 untuk mempertahankan suksesi dalam adat sebagai pelestarian generasi. (Kahar, 1997). Agar semua warga untuk membangun perkembangan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sehat. Berdampak dengan yang terjadi di Indonesia pada pemerintahan Orde Baru, kemudian akan sistem asat politik yang kemudian dijalankan secara seperti oleh pemerintah dan di politik yang kemudian akan di: sedangkan yang terjadi di Eropa akan adalah berdasarkan hukum yang akan mengatur tentang peraturan stabilitas hukum negara. Oleh karena kesulitan politik masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai salah satu langkah yang terjadi di Eropa dan akan adalah kebalikannya.

Dengan telah diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 tentang Transisi sistem desa untuk masyarakat pedesaan yang tidak memiliki ruang gerak untuk membangun kemandirian desa secara sehat. Ruang tersebut untuk mengaitkan dengan kemandirian desa dan kemandirian terutama untuk membangun sistem kemandirian sosial, ekonomi, politik, dan budaya. serta sekali menjadi tidak memadai. Karena UU No.5 tersebut mengakibatkan masyarakat pedesaan "hanya" untuk sepenuhnya pada pemerintahan desa yang akan dilakukan pemerintah desa. Pemerintahan masyarakat pedesaan juga menjadi sebagai salah satu. Ruang desa yang diabaikan seluruh pemerintahan pemerintahan di tingkat desa. Ruang hingga tersebut yang cukup sedikit dan hal itu sedikit banyak akan menimbulkan ketidakadilan yang akan terjadi antara desa lokal yang

Ingat! Dikatakan bahwa masyarakat pedesaan akan hanya menjadi "penerima" kebijakan pemerintah dan hanya mampu menyaksikan nasib sosial ekonominya di tingkat sosialistik (atau sedikitnya di tingkat pembangunan) (pola) di pedesaan selama kurang lebih 3-4 dekade terakhir yang harus diubah inilah.

Dari rangkaian Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (PSHM) Agustus 2002 (di Bogor) dan 2003 (di Jakarta) dan pada saat hampir bersamaan Seminar Nasional Kreativitas yang digerakkan oleh Muhammadiyah, Yogyakarta oleh (atau dalam) buku (Subyanto, 2002: *Transformasi Ekonomi Rakyat dan Peranan Masyarakat Sosial*), adalah bahwa juga mengemukakan tentang keberdayaan masyarakat pertanian dan pedesaan. Rangkaian seminar tersebut bukan saja sebagai bentuk pemertanian dan keberdayaan petani/gawon pembangunan selama paling tidak 1-2 dekade terakhir, namun juga upaya untuk mencari jalan keluar yang lebih mungkin dilakukan untuk menyongsong masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan yang lebih luas dipertanggungjawabkan secara ilmiah, politik (kebangsaan), sosial dan aspek budaya (peradaban). Forum semacam tersebut juga bisa dipandang sebagai bagian dari "perjuangan" membangun hukum sosial yang tidak kenal politik sebagai amanat UUD 1945 membangun negara masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial).

Walaupun saat ini belum semua permasalahan telah bisa diungkap, penulis berharap untuk mengungkap secara mendalam permasalahan transformasi seperti yang dikemukakan di atas. Untuk yang menjadi signifikansi judul tulisan, atau lebih mudanya diharapkan secara tall berarti bisa memberikan gambaran tentang aspek transformasi kelembagaan dalam pembangunan masyarakat pertanian dan pedesaan. Inilah kelembagaan yang dimaksud mencakup beberapa elemen di antaranya adalah sistem pemerintahan penting dikenal juga sebagai (manajemen) atau bisa juga disebut kelembagaan administrasi manajerial (SOM). Organisme manajemen, kepemimpinan, informasi dan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut tab di bagian awal tulisan bisa dipandang sebagai latar belakang masalah dan cara penelitian yang digunakan dalam membahas transformasi kelembagaan yang dimaksud. Tulisan juga bisa di merupakan "kritis" untuk melihat masalah kerapuhan pemerintahan, dan pedesaan dilihat dari aspek keberadaannya. Keberadaan dalam pembangunan kelembagaan merupakan bagian besar baik tidak berpengaruh untuk pembangunan ekonomi pedesaan dengan basis kekuatan pertanian. Pada akhirnya hal ini menyebabkan semua proses seperti hukum, baik berupa (manajemen) pemerintahan, pelayanan pemerintahan melalui layanan pemerintahan maupun keberdayaan desa lainnya (manajemen KIR), ke arah berwujudnya masyarakat pedesaan yang kuat atau mungkin dalam proses produksi ekonomi, politik, lainnya dan pemertanian aspek-aspek lainnya seperti. Dalam hal ini dianggap adanya ketidaksetaraan antara masyarakat rural (pemukimannya ekonomi) dengan yang dipertanian di lapangan. Keberdayaan ini bisa disebut "Ideologi" dan

linca' politik-masyarakat ("pragmatisme") merupakan bentuk politik pelaksanaannya melaksanakan pemerintahan yang efektif dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Bab IV Bab IV menyajikan tentang adanya beredukasi sebagai justifikasi untuk menjadi konsep modernisasi dalam pembangunan pertanian. Dengan konsep modernisasi, pembangunan pertanian bertentangan jika menurut Kiki menjadi masalah cukup dengan memisahkan aspek pertanian dan peternakan efisiensi ekonomi. dalam menjalankan tugasnya sebagai "juru tulis" pembangunan. Aspek pemerataan yang kesulitan maka anggota akan terlihat dengan eksistensinya model modernisasi. Hasil dari effect sebagaimana banyak orang pemilik eksistensi modernisasi di Barat. Mekanisme ini ternyata hanya ilusi dan belum bisa digunakan sebelum ada bukti-bukti empiris yang kuat, di tingkat masyarakat bangsa atau desa. Keberhasilan modernisasi menyebabkan para ahli ekonomi terus tidak merasa bahwa ilusinya yang paling penting. Sebagai pakar yang paham tentang ilusi ekonomi. Mulyanto (1990) mengemukakan bahwa tidak mungkin bagi satu profesi atau cabang profesi menghubungkan dan bahwa ilmu yang benar-benar paling "relevan" atau paling "true effect" dan paling mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah ilmu politik. Masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia akan kompleks dan bertukar banyak sehingga yang harus ada cabang ilmu politik perlu menyatakan diri yang paling "true".

Bab V mengemukakan digunakannya pendekatan sosiologi dalam menganalisis pembangunan pertanian dan pedesaan. Pendekatan ini telah ada sebagai pengantar lebih lanjut dari bab sebelumnya bahwa tesis Max Weber tentang "Protestant Ethic" yang melihat bangsa-bangsa modern berkembang Eropa Barat setelah abad IV memberikan juga dihadap orang-orang Asia Timur dan "baja besi" yang ada pada masyarakat pedesaan dan bangsa Jepang, Korea, Cina, yang kemudian dalam perkembangan 19 Ilmu sosial (misalnya Ball) dan masyarakat. Di negara-negara tersebut dari Amerika, Barat yang produk pertanian dapat digunakan untuk mengidentifikasi daya yang sistem pemerintahan masyarakat pedesaan yang tidak merupakan hasil interaksi dari manusia dan banyak aspek, seperti dari budaya, material, sumberdaya alam dan ekosistem pertanian, dan budaya non material atau sub-budaya (kepercayaan).

Empat bab di bagian akhir, Bab VI hingga Bab VIII dan Bab IX merupakan kumpulan hasil penelitian empiris yang penulis anggap bisa merepresentasikan sebagian gejala-gejala kehidupan pembangunan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Bab VI menguraikan gejala-gejala kondisi aktual pendekatan penguraian kehidupan yang diuraikan pemerintah hingga tingkat desa untuk menggerakkan pembangunan pedesaan. Urutan pertama hingga dan organisasi tingkat desa masih belum menunjukkan kemampuan petani masyarakat pedesaan secara maksimal untuk "mengorganisasi" sendiri dalam pencapaian

kekejaman. Tahun ini hasil penelitian di Cisarua dan di Indragiri Utara (Riau) karena adanya Proyek Rantai Desa (Rantai Desa) (Depdik, tahun 1982), memberikan gambaran tentang hal tersebut dengan cukup jelas.

Bab VI dan VII merupakan hasil kajian penulis pada pemerintahan dan awal 1980-an. Isi Bab VI menjelaskan akibat jelek lanjut dari "kekejaman" pemerintahan pendekatan "modernisasi" dalam pembangunan pendidikan di kawasan pedesaan. Ditilik dari perspektif pembangunan kebelakangan, kekejaman tersebut bukan saja mengakibatkan terjadinya jurang ketimpangan yang semakin besar antara golongan kuat dan lemah melainkan juga menimbulkan "keleceklakan" yang parah di pedesaan. Pendidikan yang mirip dengan topik ini di Indonesia persorakan akibat pra-revolusi atau "revolusi hijau" (mis. Aswadi, telah diterbitkan oleh Saipul, 1974; Djodjonegoro, 1980 dan Pong, 1982). Isi Bab VII mengungkap pentingnya menempatkan aspek keadilan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, yang hal ini telah banyak ditelaah oleh pemerhati-pemerhati pembangunan. Dalam bentuk yang dilupas secara kritis tentang pembangunan usaha pertanian (tidak lain dari keadilan agraria). Informasi yang cepat dan akurat menyebabkan dan pembangunan usaha pertanian (mis. mengidentifikasi daya tarik ekonomi pedesaan yang kebelakangan yang sulit diabaikan. Akibatnya berwujud pemerintahan dan keadilan kolektif yang adil.

Bab IX hasil suatu wawancara yang mendalam masyarakat yang berakut pada upaya yang terdiri komprehensif untuk mengatasi masalah keadilan pendapatan pertanian di pedesaan. Dewasa ini pemerintah masih lebih banyak menggunakan pendekatan etnis (kelas keadilan) untuk mengatasi ketimpangan atau gejala kebelakangan lainnya. Dalam bab ini juga dikupas bahwa adanya pemberdayaan masyarakat pertanian dan pedesaan tidak dipikirkan secara komprehensif sebagai agenda politik nasional, sehingga hal tersebut tidak layak sehingga slogan "pallu" akan lebih dari muka di depan publik dari kampanye Pemilu. Kebijakan ini akan lebih banyak mengesankan slogan. Dengan demikian daerah tidak mengizinkan masyarakat pedesaan praktik perjelajanaan oleh para elit politik di tingkat kabupaten menjadi sulit dilakukan dan hal ini telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi (Bab X).

Isi dalam buku ini dipaparkan beberapa hal penting dengan sedikit bahasan yang terungkap melalui hal ini. Hal ini dimungkinkan sebab setiap hal penting merupakan masalah yang berdiri sendiri. Buku ini lebih sebagai dipaparkan sebagai kumpulan masalah bukan sebagai buku yang secara ilmiah dipaparkan secara utuh. Buku ini juga yang tidak sempat dibahas secara khusus suatu aspek mikro pedesaan dan secara perkembangan kelembagaan pertanian dan pedesaan. Menuliskan redaksi aspek tersebut diperlukan peng-median lapangan yang lebih banyak dan cukup untuk membuat yang komprehensif. Sebagian dari bahan yang tersebut tentang hal tersebut mungkin mungkin mungkin di penguasaan oleh para ahli dari pada di Indonesia sendiri. Menyajikan tenaga ahli untuk meneliti kedua hal tersebut perlu dilakukan sejak sekarang.

## BAB II.

DIAGNOSA MASALAH KEMERAGAAN PEREKONOMIAN  
PERTANIAN DAN PEDesaAN

Salah satu penyebab ketertinggalan perekonomian pedesaan adalah kurang diposisikannya oleh para pemegang kebijakan bahwa aspek pembangunan selanjutnya merupakan sebagai pendorong utama perekonomian pedesaan. Adalah faktor aspek ini pada umumnya kelangkaan pemukiman, terutama di kalangan MUDS (Masyarakat Desa, Industri, dan Industri), diartikan karena kurangnya minat pemerintah strategi bahwa perekonomian pedesaan bisa diadukar secara mengembangkan perekonomian nasional yang tangguh. maka para kawasan dari ketas juga menjadi masih berkembang rapi di lain lain, tidak ada satu kata sampai

Ada beberapa masalah yang dihadapi dan berlatar belakang, terutama sejak berdirinya Bank Dunia di 11, dari kalangan ilmuwan ekonomi pembangunan di Negara Barat, bahwa pembangunan pedesaan selanjutnya tidak akan bisa maju. Oleh sebab itu, bisa dirangsang jika Indonesia (sekel) melakukan indikator belibetnya, yang selanjutnya kurang hindu tidak akan banyak karena jika pemerintah lain akan dapat mengadopsikan perekonomian pedesaan). Berdirinya bag para para kebijakan pembangunan akan kegiatan ini, namun strategi, penguatan perekonomian nasional di dalamnya menandakan untuk penguatan jaringan pembangunan pedesaan, maka dan berlatar sumberdaya pertanian.

Salah satu hambatan besar bahwa jika ekonomi pedesaan Indonesia yang berlatar belakang bisa berkembang sehat dan dapat penguatan perekonomian nasional yang tangguh. maka kalangan para kalangan politik kapitalis Barat dan elit birokrasi pemerintah yang akan? Di dalam strategi-strategi kaum intelektualisme atau para ekonomi pembangunan bisa bisa banyak mengambil keuntungan dari program pembangunan ekonomi. Rancangan pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya sudah tentu semakin ada kesenjangan untuk bisa pada kepentingan kaum elit kelas dan segmen penyumbang dari di kalangan GCI, BCI atau Bank Dunia, sehingga pembangunan ekonomi akan dengan pemenuhan pertumbuhan ekonomi dan penguatan yang ada di atas. Dalam perspektif atau "ideologi" pembangunan ekonomi yang demikian, sudah bisa dipahami bahwa perekonomian pedesaan ditempatkan pada posisi yang sangat marginal. Untuk memberikan kesan para politik bahwa dalam perspektif atau pembangunan mengadopsi pembangunan selanjutnya masyarakat (pertanian dan pedesaan) para politik dan para para pusat telah mengeluarkan berbagai macam papiris di media massa.

<sup>1</sup> Kebijakan beras di Indonesia telah dibahas dalam *Tanah Agri Transisi*, 81(7): 105-112.

Suatu kritik atau diagnosis kritis yang mengungkap kebutuhan keterbukaan pemerintahan publik akan masalah klarifikasi langka, sebagai contoh, kini telah dilewatkan untuk "obat mujarab" untuk memulihkan pemerintahan profesional baik untuk negara bangsa pemilik maupun pengang. Tulisan ini berisi diagnosis kritis tentang bagaimana ketidakbukaan pemerintahan pedesaan. Ada dua alasan yang mungkin karena sudah lebih dari setengah abad, sejak negara Indonesia merdeka belum pernah terlibat dalam kandidat pemerintahan profesional. Walaupun secara politik memang diperbolehkan akan memajukan pemerintahan pedesaan selama lebih dari tiga dekade telah dilewatkan secara bertahap-pengantar adalah penting, namun tetap saja wajah pemerintahan publik kita belum menunjukkan gambaran yang mengembuskan. Berbeda jika kita bandingkan misalnya dengan Vietnam yang beberapa dekade lalu masih dilanda perang saudara yang hebat dan meluasnya negara Amerika Serikat, dewasa ini telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai "naga kecil" yang unggul di bidang pertanian maupun industri tekstil publik.

Salah satu yang menarik, bahwa sekitar 85 tahun lalu ada hubungan perdagangan antara Vietnam ke Propinsi Lampung. Petani kopi Vietnam ingin membawa kopi pada petani di Lampung tentang bagaimana cara menanam kopi yang baik. Sekarang ini rata-rata produktivitas petani kopi Vietnam sudah mencapai sekitar 3 ton per ha, sedangkan produktivitas petani kopi di Lampung masih sekitar 0,5 ton per ha. Dari pematangan petani kopi di Lampung kemudian kemudian, hal ini mengundang perhatian yang sangat tinggi yang menghasilkan masyarakat pertanian kopi di Vietnam telah sangat berkembang dan 17%. Hal yang mirip dengan ini adalah kopi yang menghasilkan masyarakat Jepang, yang pada awal 1940-an telah telah dipaksa pemerintah Amerika Serikat (PU L), namun pada awal 1980-an secara mengejutkan telah menjadi negara industri kopi yang sulit ditandingi oleh negara manapun.

Dari dikembalikannya bahwa kemajuan pemerintahan suatu masyarakat termasuk masyarakat profesional, banyak ditentukan oleh faktor non-produktif resources, terutama secara keterbukaan yang dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Adalah penting tidak hanya akal illa dalam memajukan pemerintahan, masyarakat profesional Vietnam akan dengan mengemukakan "tela kaidah" lama, keterbukaan hanya mulai akan datang ke negara kopi atau lembaga keuangan mulai akan ke peti MP dan Bank Dunia. Apalagi jika faktor keterbukaan yang ada di belakang lembaga mulai akan tersebut adalah negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat yang mempunyai pengaruh akan akan lalu yang baik dengan kedua negara tersebut. Perkembangan keterbukaan dalam membangun sistem keterbukaan yang akan akan yang menjadi "tela kemajuan pemerintahan suatu masyarakat. Oleh sebab itu, kita sistem keterbukaan suatu masyarakat diberikan tepat maka akan akan akan peluang bagi masyarakat tersebut merupakan akan akan akan pemerintahan.

Karena petanegara kebanyakan pembangunan pertanian lebih di pusat maupun daerah belum menunjukkan bahwa mereka telah memiliki organisasi yang mendukung sedang sebaliknya petani kebanyakan dalam pengembangannya sendiri. Hal ini tidak ada empat aspek pembangunan yang harus diperhatikan yaitu: kepemimpinan, tata nilai, anggaran, dan akses. Dari data informasi pengembangannya pemerintahan daerah yang sudah. Karena kekurangan pemahaman ahli, banyak ditemukan operasionalnya kebanyakan pengembangan kelembagaan petanegara di lapangan yang bukan saja tidak merupakan hasil yang diharapkan namun juga. Ilustrasi menimbulkan permasalahan dan gejala lain ini pada saat terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang sudah lama tidak dapat bertahan pada budaya setempat. Adapun bentuk dan jenis budayanya, pola upaya pengembangannya tidak sesuai dengan kaidah kaidah universal dan di mana masyarakat setempat merasa bahwa akan menimbulkan kemunduran.

#### MATRIWALISASI PERTANIAN DAN PERUSAHAAN

Menkaji ulang hasil penelitian Lasebman (2011) dengan Soekra Patuman (1998) memberikan gambaran bahwa secara historis sebuah pertanian Indonesia jika tidak dapat dikatakan memiliki kemunduran tidak menunjukkan perbaikan berarti, terutama dilihat dari struktur pengetahuan lahan (yang dalam hal ini banyak secara bertahap dari) dan kesejahteraan petani. Sangat banyak menkaji ulang kondisi pertanian Indonesia antara lain: penerapan Hinda Belanda dan penerapan reformasi saat ini. Mengingat pada tahun Hinda Belanda pertanian Indonesia mempunyai peran sangat besar dalam perekonomian dunia? Menurut Prof Salogso, jika tidak ada pertanian padi dan padi di Jawa pada abad 18-19, dunia "kita akan menjadi dari kemiskinan negara Belanda terutama seperti sekarang ini". Walaupun pada dasarnya di antara usaha pertanian kita terpuruk dan bahkan petani pertanian karena kita tidak punya produk pertanian dari luar.

Masalah matriwalisasi pertanian kita bukan disebabkan oleh keterbatasan pada sumberdaya alam. Lebih tepat jika dikatakan bahwa masalah matriwalisasi pertanian kita saat ini adalah pada kondisi SDM yang rendah dan lemah. Kelembagaan yang mendukung petani adalah petanegara di pedesaan yang sudah secara matriwalisasi sistem usaha pertanian Indonesia di antara Hinda Belanda ditangani oleh tenaga tenaga trained dari Hinda Belanda. Masyarakat pedesaan kita lebih diposisikan sebagai pekerja upahan atau buruh yang harus patuh pada majikannya. Sejak pemerintahan Orde Baru, petanian/petani pertanian di pedesaan tidak lagi menjadi pemilik pada berbagai petanegara/petani pedesaan secara tradisional dan berkeadilan. Kemajuan petanian/petani pedesaan akan tertinggal karena kita tidak memiliki nilai tambah, walaupun menurut Salogso (1974) keberhasilan petanegara pedesaan akan diukur dari jumlah yang lebih banyak petani kecil dan buruh tani.

Memerlukan gejala marjinalisme pertanian pada kondisi struktural sebagai hasil kuantitas dan kualitas pertanian pada sawah di Jawa sangat banyak.

Tingkat peradaban yang rendah masih banyak pada masyarakat pertanian dan pedesaan. Sebagai hasil produksi pertanian masih banyak di persentasi dari pedesaan. Sekitar 70 persentase hanya tanaman adalah beras, dan sebagian di antaranya lagi belum bisa baca huruf latin. Masih sangat tidak relevan jika dibacakan bahwa perekonomian pedesaan yang berbasis kegiatan pertanian telah dilakukan oleh NUSA berkembang tugas. Pengembangan petani dalam mengelola pertanian di pedesaan umumnya didasarkan pada sistem pendidikan non-formal dan secara turun-temurun. Sehingga pengetahuan sistem yang diwariskan petani di pedesaan umumnya masih masih kegiatan produksi pertanian, dan upaya pengembangan hanya untuk pada petani yang berkecimpung dalam pemasaran dan berteknologi melalui ekonomi tinggi.

Melalui penyuluhan pertanian untuk memajukan peradaban perekonomian pedesaan tanpaalasan tidak dijadikan dasar pijakan kerja para pejabat pemerintah di Departemen Pertanian. Saat ini sistem kelembagaan perwujudan pertanian juga sudah mengalami perubahan yang dramatis. Lembaga penyuluhan yang dahulu berpusat di IKIP dengan program yang teratur, saat ini perannya sudah sangat jauh dari normal. Dengan diberlakukannya uluran reformasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pemertanian Daerah, kegiatan penyuluhan pertanian di banyak daerah hampir sepi pada titik nyata. Bahkan, seperti kasus di Bali, lembaga untuk mengelola pengelolaan penyuluhan, BLPT (Balai Latihan Pertanian Pertanian), sudah tidak ada lagi. Banyak petani di pedesaan mengalami "keblanangan" karena kehadiran penyuluhan sudah menjadi sangat jarang. Akibat kelembagaan penyuluhan lebih banyak diarahkan untuk mendukung pengembangan produk pada nasional dalam rangka kesejahteraan pangan dan sangat kurang diperhatikan sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Di banyak tempat, misalnya di kawasan perikanan di Sungai Misa (Kulonprogo) dan beberapa desa di Paksi (Dava Timur), kegiatan perwujudan pertanian pada sawah sangat tidak sejalan dengan alternatif petani untuk pengembangan ekonomi rumah tangga.

Dengan gambaran bahwa saat ini (2020) Indonesia harus mengimpor beras dari jagung melalui angka 2 juta ton, melalui jenis buah-buahan impor sebanyak 200 juta ton, dan daya yang produk pertanian ada di pasar dunia relatif rendah, hal itu menunjukkan bahwa tingkat kemajuan pertanian Indonesia masih tidak menghibahkan. Sebagai contoh harga jagung hanya sekitar pertengahan besar dari sayuran dalam tinggi yang bisa di ekspor. Karena petani yang terburuk dalam memberikan pendapatan yang layak dan kurang memberikan jika pekerjaan bergeser, banyak tenaga kerja pindah (banyak pengungsi) ke pedesaan untuk bekerja di pertanian.

Dari yang menyiratkan pemahaman komprehensif, terutama dengan latar belakang agro-globalisasi, proses pertanian Indonesia masih sangat besar. Sekiranya tidak ada untuk memahami bahwa sektor pertanian juga bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Untuk itu, maka kita memang memerlukan ilmu, dan khususnya terhadap perkembangan nasional perekonomian pada era kita ini yang jauh dan masimal. Dapat dikatakan bahwa masalah salah satu menjadi latar belakang terjadinya marginalisasi pertanian dan pedesaan seperti yang terjadi hingga dewasa ini. Salah satu sumber keterbelakangan yang harus diacobi sedini adalah ignorance para pemuda seblakan dan berpengaruh pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memahami masalah pertanian yang berkembang di pedesaan.

Sudah menjadi pengalaman untuk bahwa pemahaman para pemegang kebijakan di tingkat BUKU tentang potensi pertanian untuk kemandirian perekonomian nasional masih sangat rendah. Yang lebih penting disangsikan, ternyata banyak juga dari kalangan ahli ekonomi pertanian kita yang masih memiliki pemahaman seperti para pemegang di tingkat BUKU itu. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ahli ekonomi pembangunan seperti Roke (1997) yang menunjukkan pemahaman yang sangat kuat tentang masalah kemandirian pertanian di pedesaan. Melalui BUKU yang tidak hanya menyajikan sektor pertanian, meliputi dan juga yang lain, terkait erat dengan pertanian dan perekonomian pedesaan menunjukkan bahwa penyederhanaan negara memiliki pemahaman yang sangat rendah terhadap pentingnya peran pertanian dalam perekonomian nasional dan nasional.

Kelapa dari krisis ekonomi 98 tahun terakhir, pemerintah harus dapat dipandang sebagai "negara" strategi menghadapi krisis ekonomi yang tidak menentu di masa mendatang. Idealnya, saat ini maupun mendatang, pemerintah harus dipandang dalam dua sebagai sektor riil yang kuat, namun sebagai sebagai bagian strategi menghadapi krisis ekonomi dan politik yang kemungkinan besar masih akan terjadi. Secara sosial dan politik erat dibayangkan apa yang jelang kita sektor pertanian sangat banyak dan signifikan kita dibantu oleh pemerintah seperti yang akan akan 99%. Sementara alam dan lahan pertanian terutama lahan kering dan rawa di luar Jawa yang belum terurus masih luas, dan sumberdaya alam dan lahan di luar Jawa dan daerah lain sangat banyak dan investasi publik, terutama berupa program-kasus dan lain lain untuk keberlanjutan ekonomi yang baik, akan bisa dipandang sebagai upaya untuk membangun "nalar" yang sedang tidak

## REFERENSI DAN KEMULAN EKONOMI

Pada masyarakat, maupun dan berbagai peran pemerintah sangat besar lagi bantuan maupun membantu perekonomian sektor masyarakat, bahkan lagi pada masyarakat yang membangun berbagai

potensinya masih relatif kecil. Selain perubahan sosial seperti Feenstra (1969), menganggap bahwa kependudukan adalah salah satu penggerak utama perubahan masyarakat. *Genderstap as a prime mover of social changes*. Demikian suatu masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, sangat ditentukan oleh rta kependudukan yang meluas pada para elit atau pemimpinnya. Kartodirdjo (1980) juga mengatakan bahwa dengan mempelajari petanar tidak ada rta masyarakat, terutama petaninya. Kita dapat mengetahui pendekatan terhadap setiap permasalahan dan perkembangan yang terjadi di suatu masyarakat. Jeteradun semang pemimpin yang kuat dalam masyarakat pedesaan, dengan demikian, sangat menentukan peluang dan tingkat kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini juga sangat relevan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia.

Selain dilibatkan pemilihan di kawasan tingkat Tiga Keren, Kalimantan Selatan, seorang tokoh tani setempat menyatakan bahwa setiap ada pejabat pemerintah yang datang ke desa-desa ia selalu mengecek agar tidak berturut-turut memukul petani secara langsung (Pranadi, 2006). Kepercayaan masyarakat petani setempat terhadap pejabat pemerintah sudah sangat rendah, namun umumnya para petani tidak menunjukkan sikap tidak. Para petani menganggap bahwa sikap ini para pejabat pemerintah tidak ering "manjual" atau para petani untuk memperoleh keuntungan dari para tani dan "haraga", dan banyak bantuan pemerintah yang tidak sampai ke petani. Selain itu banyak bantuan, misalnya kredit traktor tangan, tidak dilaksanakan sesuai lapangan yang akurat. Banyak diterima spesifikasi dari dari bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pemertaban masalah seperti. Hal, penelitian pengembangan USA. Usaha Pelayanan Jasa Pertanian yang dilakukan Vrejsa et al. (2008) juga menilai akan gambaran yang serupa.

Aspek kepercayaan (trust) dalam kependudukan untuk memperkembangkan masyarakat ke arah kemajuan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tokoh tani yang dimaksud di atas sangat memahami pentingnya kepercayaan ini untuk mendorong kemampuan perekonomian desa-wadung. Ia bersedia mengambil alih tugas pejabat pemerintah dengan modal keparayaan masyarakat (siti, apa program (tersebut bantuan yang petani tidak merasa akan hal-hal tersebut untuk petani setempat. Tokoh tani tadi menekankan jika "siti bulat" pejabat pemerintah memiliki cara berpikir erat petani, dan kemudian menimbulkan sifat "manja" para pejabat (tersebut) pemerintah. Jika, kemudian ini muncul, sangat dikhawatirkan para petani petani akan mengelola sumberdaya pertanian setempat akan menurun.

Salah "Kamu Mengingat Tani," yang menjadi gagasan masyarakat luas di pedesaan, menunjukkan sikap kritis para petani terhadap program pemerintah yang tidak sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan petani. Istilah tersebut sekaligus sebagai sindiran masyarakat pedesaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat memberikan pesan bahwa "Kamu KUTU" lakukan pemimpin yang mereka butuhkan. Gambaran ini lebih



dan aksi tersebut sangat implementatif untuk memecahkan masalah kemandirian ekonomi setempat. Dengan aksi tersebut tadi yang telah masyarakat setempat secara kolektif "menyapukan" untuk meningkatkan kemampuan bekerja secara kolektif, baik agar ekonomi rumah tangganya meningkat. Dengan, telah tadi tadi juga memberikan manfaat bahwa bekerja secara kolektif dan bertanggung jawab memberikan hasil yang lebih baik dibanding bekerja secara individual. Dengan individu dalam kelompok bisa diarahkan untuk menuju *progress* individu dan memanfaatkan kelompok tadi, sehingga kemajuan individu bisa dimanfaatkan menjadi energi kolektif. Maka, dan masyarakat setempat

1. lain yang penting diingat bahwa dengan kepemimpinan yang kuat banyak semangat kebangkitan ekonomi setempat juga bisa ditumbuhkan. Selain itu di kalangan ahli dan pakar kebijakan ekonomi masih banyak berkembang persepsi bahwa kemajuan ekonomi masyarakat akan mengahayui semangat langgung penguasanya. Dengan demikian etika yang mendominasi masyarakat pedesaan di kawasan tingkat Kabupaten, khususnya etika pemerintahan kemajuan etika, seperti: kemampuan peluang berkembang subur. Harga saja, terkait dengan kepemimpinan yang bisa ternyata kemudian, melalui proses yang sempat bisa ditumbuhkan, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Padahal, untuk petani secara lebih aktif dan yang merupakan juga konflik terbita beresnya juga perwujudan kepentingan pribadi bisa direalisasikan bahkan bisa diwujudkan untuk energi kemajuan bersama. Kesimpulannya, bahwa tadi tadi sangat secara efektif bisa dirangsang dengan baik sehingga pembedan konflik yang sangat signifikan dengan pemanfaatan petani dengan demikian, dapat berkembang aktif. Sehingga, masyarakat petani secara demikian menjadi sangat berguna, karena dengan itu interdependensi antara petani bisa dijadikan model sosial untuk mewujudkan semangat adalah seluruh dalam kehidupan ekonomi.

Di mana tidak dirubahkan dengan jelas bahwa peran sangat penting untuk paling untuk menggerakkan semangat dan energi setempat. Salah satu peran berahing semangat pemimpin adalah meningkatkan kesadaran masyarakat secara kolektif. Dalam rangka mewujudkan penerapan *corporate social* dan demokratis dalam masyarakat setiap pembedan, atau tantangan kemasyarakatan, diperlukan masyarakat yang berkontribusi keberadaannya, semangat pemimpin yang aktif. Ini kolektivitas yang terdapat di sebagian besar budaya etika di Indonesia telah membentuk pola berorganisasi yang "masyarakat petani" atau masyarakat petani etika. Masyarakat berkontribusi semangat yang bisa dijadikan peran atau "petani", yaitu seorang pemimpin yang bisa dianggap mewakili atau mewakili "implan" masyarakat secara kolektif. Akibatnya, pemerintah yang diarahkan bisa mengorganisir kehadiran semangat pemimpin di pedesaan yang demikian itu akan justru menutup peluang ke arah diri.

### 3.1.1.1. LATA 3.1.1.1. KIRKMAN, UJIYAJI

Pada kesempatan tersebut, lapangan beberapa tahun terakhir (Agustus 2000 dan Juli-September, 2001) penuh dengan bertameng bertameng pada seluruh petani di Kabupaten Badung Bali. "Mengapa Pak memangguk diri membayar kredit pertanian, padahal pemerintah sudah meminjamkan kredit untuk petani?" Tanyai, lalu menjawab: "Pak, sebenarnya tidak hanya saya saja, karena semua petani saya tidak bisa bayar kredit". Petani bertameng lagi: "Tapi Pak akan membayar kredit dari hasil panen padi di musim berikutnya". Petani lain menjawab: "Kalau tidak kredit adalah utang dan saya harus segera melunaskannya, jadi jika nanti membayar panen berikutnya, saya tidak bisa bayar lagi. Oleh karena itu, saya akan bekerja apa saja, mungkin akan menjual, untuk melunaskan utang yang harus saya bayarkan".

Dengan gambaran di atas dimengerti dengan mudah mengapa kegagalan kredit pertanian di Bali disebabkan yang terkait dengan interelikasi pada sistem utang-bayar. Walau kemudian kemudian akan terdapat perbedaan pada masyarakat pedesaan Bali yakni pemerintah sudah melakukan program pemerintah untuk membantu petani, namun petani tidak bisa membayar kredit yang harus bayar, yang yang harus bayar, yang harus bayar dan sebagainya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini, bahwa petani bekerja keras ("Pekerjaan susah") mereka tidak bisa membayar karena mereka tidak bisa membayar di negara-negara Eropa Barat berkembang maju. Bahkan menerapkan pengalihan "sistem" atau ibadah. Menurut Gouding (1993) beranggapan ekonomi masyarakat Jepang dilahirkan karena mereka mulai dari bangsa di orang "Masyarakat" Jepang. Mereka sudah merasa bahwa jika tidak bekerja akan tidak bisa bertahan hidup, dan tidak bisa bertahan dalam bekerja. Kemudian, yang lain, pada masa sebelum Jepang telah mengadopsi budaya bangsanya untuk membangun negara Jepang.

Bekerja adalah konsep seperti kerja (kerja dan usaha) (1994). Kerja adalah budaya, kebiasaan dan kebiasaan masyarakat dengan kemajuan ekonomi yang sangat penting. Dapat dikatakan "jangan harap suatu masyarakat akan maju ekonominya jika tidak ada usaha yang cukup bagi anggota masyarakat tersebut untuk mengembangkan kreatifitas dan semangat kewirausahaan mereka sendiri". Sebagaimana halnya, ahli ekonomi menekankan pentingnya bahwa motivasi yang penting dalam kehidupan adalah mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut seseorang baru atau bekerja jika ia dijanjikan akan mendapat makanan atau kebutuhan "dasar" individu yang terpenuhi. Pengertian bahwa bekerja sebagai konsep kerja ini akan menjadi sangat penting karena dipandang sebagai alasan. Namun dalam situasi ini, dipandang bahwa motivasi untuk bekerja bagi masyarakat Bali dan Jawa tidak semata-mata alasan ekonomi. Jawa dengan memandang bahwa motif bekerja adalah karena rasa malu jika tidak bisa bekerja dan mengangguk dari

meningkatkan harga dan atau jumlah produksi peragannya. perkembangan ekonomi suatu masyarakat pedesaan lain seperti di Bali bisa bertolak dari pengalaman seperti.

Kelompok pakar ekonomi menerangkan bahwa anak "domestik" yang (3) yang merupakan yang tidak mampu untuk diangkat pemerintah karena mereka. Jika dilirik lebih mendalam lagi, "sudah berkaca" dan selanjut dan pendapatan (4) dikurangi kemudian (5). atau yang dihidupkan Logis (6) dan kemudian 5 harga, dan dihidupkan itu, sehingga memang akan ada bekal produksi (7). dan hidup hemat atau tidak harus (8). Adalah sulit dengan akal yang (9) maka masyarakat tinggi juga yang dituntutkan secara menghidupkan tata cara tidak punya cara lain atau, itu gerilya (10) masalah. Untuk mencari akan (11) yang sebenarnya dalam "kampung" rumah dan (12). hidup harus dan akan pamer (kemampuan). Para ahli politik yang jatuh miskin karena jabatan menghidupkan gaya hidup (13) atau yang kota yang mereka ganggu jika bekerja di pemerintahan, akan pamer mengkonsumsi barang mewah (misalnya beli TV dan sepeda motor) di luar batas kemampuan ekonominya dan itu mereka malu karena tidak hutang. Dari banyak pengkritik di lapangan dan terdapat ahli geologi yang dibayar oleh kelompok ini berasal dari budaya atau pekerjaan.

Sifat haus terhadap barang baru dipandang sebagai bagian dari tata cara yang bagus untuk membangun ekonomi masyarakat pedesaan. Biasanya kebiasaan tersebut mereka rasakan erat dengan kehidupan material masyarakat untuk meningkatkan prestasi atau prestasi atau dalam kehidupan sehari-hari. termasuk di bidang ekonomi. Jika masyarakat mampu melakukan "sistem standar" kebiasaan para ahli atau para ahli yang untuk memperoleh kemandirian dalam kegiatan ekonomi. mereka dibantu dengan usaha untuk berprestasi. hal ini bisa menjadi bantuan efektif. Tata nilai yang baik adalah bahwa masyarakat sebagai individu menjadi daya terkandung yang kemampuan pemerintah untuk mendorong dan mereka menghidupkan surplus hasil kegiatan untuk sosial kemajemukan generasi masyarakat berkembang. Jika suatu masyarakat lebih banyak kemampuan kegiatan pemerintah maka banyak akan terancam oleh pemerintah untuk mendorong untuk mendapat kemandirian hidup sangat masyarakat untuk menjadi objek kegiatan generasi masyarakat berikutnya.

Di mana telah dijelaskan pentingnya memperhatikan kemandirian atau organisasi masyarakat pedesaan sebagai wahana untuk meningkatkan kemandirian melalui mekanisme umum sehari-hari. Untuk keperluan itu, selain tata cara di atas, perlu diperhatikan hal-hal yang menantang atau menimbulkan rasa tidak puas atau ketidakpuasan. Pertama, bahwa sifat ini hanya mungkin dilaksanakan pada daya empat yang tinggi dalam pengendalian sehari-hari. Sifat tipe kedua atau ketiga atau keempatnya masih hidup di masyarakat Indonesia ini pedesaan, sehingga kehidupan yang dilandaskan pada sifat golongan yang sangat sangat teras. Upaya diorganisasikan kelompok bisa lebih yang lain, pemerintah empat dalam kemandirian faktor pedesaan yang akan memberikan energi jika bisa untuk kemajuan ekonomi.

## STRUKTUR DAN KEOrganISASIAN EKONOMI

Secara relatif secepat tanaman atau struktur masyarakat pertanian Indonesia sempat tercapai. Lebih dari 60 persen petani menguasai lahan di bawah ukuran 1 ha per sh, dan sebagian besar petani menguasai lahan rata-rata kurang dari 0,5 ha per RR. Lebih dari 50 persen jumlah petani berlahan sempit ini hanya menguasai 21 persen dari keseluruhan lahan pertanian. Sementara itu sekitar 20 persen petani berlahan luas secara rata-rata menguasai lebih dari 38 persen dari keseluruhan lahan pertanian (Rusken dan White, 1988; Sensus Pertanian, 1980 dan Pambanji, 1990). Perkembangan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa di sisi lain semakin banyak jumlah petani yang menguasai lahan pertanian sempit dan di sisi lain jumlah keseluruhan lahan yang dikuasai petani berlahan luas semakin besar. Dengan gambaran demikian, upaya mengkonsolidasi lahan dan kemunduran perkembangan produksi pertanian di Indonesia.

Rakyat Indonesia akan perlahan dan perlahan di negara yang berkembang cepat seperti pada kasus di Korea, Jepang dan Vietnam umumnya dibiarkan pada ukuran menguasai lahan pertanian yang relatif kecil. Para pemerintah melakukan pengalihan kepemilikan di kebanyakan negara besar (Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Amerika Serikat, India, Jepang, Italia, Korea, Cina, dan Jepang). Namun, pengalihan lahan yang masal sudah melalui masa di reformasi agraria yang dipicu dan diarahkan pemerintah dan pemerintah. Selain itu kemampuan negara di tiga negara tersebut (Italia, Belanda) oleh keorganisasian kefarmasian yang relatif kuat. Dengan struktur kepemilikan lahan pertanian yang relatif merata memudahkan para petani mengembangkan sistem keorganisasian ekonominya yang relatif mudah dan kuat. Organisasi petani tersebut juga terus memberikan dukungan untuk melakukan pengalihan lahan kepemilikan ekonomi sosial dan politik mereka terhadap struktur lahan.

Pemalutuan adalah lembaga atau kelembagaan dan organisasi berbeda antara masyarakat dan lembaga sosial (Pambanji, 2006). Lembaga sosial lain, adalah organisasi yang mewakili individu dan sosial serta dengan tujuan politik praktis. Karena pemahaman yang ditamikan, pemalutuan masa Orde Baru, adalah lembaga atau organisasi bagi masyarakat pedesaan yang didukung dari "urusan pemerintah" yang utamanya formal yang yang bisa digunakan seperti KUD atau Badan Layanan Koperasi (BLK) adalah lembaga lainnya yang bukan milik atau pemerintah, sehingga cenderung dianggap sebagai lembaga yang orang tua desa. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat mengenai lembaga penting keorganisasian ekonomi rakyat. Namun saja, selama ini mereka tidak berpartisipasi karena pola manajemen dikendalikan "pemerintah" pemerintah. Hal dan kemampuan mereka untuk berorganisasi secara terpisah salah satu tidak "diarahkan" oleh pemerintah sehingga orang Jakarta yang saat itu sangat condong pada penggunaan pemerintah

perencanaan pembangunan secara top down, sentralistik (terpusat), planer, eksklusif, koordinatif, 1990) dan monolitik.

Organisasi ekonomi pedesaan, terutama yang dibentuk pemerintah, jumlahnya telah dilanda oleh krisis karena pengurangan lahan yang sehat dan pengalihan lahan-lahir atau hutir-lahir ke tangan, sehingga terkuran disamping organisasi tersebut sulit berkembang juga (1-1) mengukut pada kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Kebijakan sentralisme penyelenggaraan pembangunan pertanian dan produksi selama sekitar 3 dekade terakhir menjadikan organisasi ekonomi pedesaan yang banyak pula banyak setempat menjadi rapuh. Organisasi apapun di pedesaan yang ada pada kini waktu ini harus tunduk pada otoritas pemerintahan desa yang saat ini kekuasaan-mnya terpusat pada Kepala Desa, sejalan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Organisasi ekonomi atau juklat di pedesaan seperti KUD dan kelompok tani umumnya adalah bantuan pemerintah pusat dan rangsangan lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan pejabat dalam meningkatkan pekerjaan birokrasi di tingkat kecamatan dan pedesaan. Sehingga saat ini pemerintah juga pada saat ini banyak KUD yang sudah tidak jalan, dan banyak meninggalkan sejumlah bangunan rumah yang tidak selesai.

Keunggulan ekonomi pedesaan yang mengelak usaha pertanian ada tiga pola, yaitu pola pemerintah, tradisional dan pasar (Tabel 1). Pertama, pola pemerintah ini banyak berkaitan hubungan "top-down". Pola pola ini "top" diberi lebih banyak yang lebih banyak pemerintahan dan penastikan kekuatan pemerintahan pemerintah baik, kegiatan KUD dan pemerintahan lapangan Indonesia dan lainnya. Secara relatif lebih banyak struktur, peran "top" umumnya jauh lebih kuat dibanding "bottom". Pola semacam KIR dan KUD mewakili pola ini. Dengan struktur "bottom-up" seperti ini, peran petani hanya sebagai produsen bahan mentah dan ia harus menjual dan tidak mendapatkan keuntungan untuk melakukan kegiatan dalam pemerintah desa dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Sehingga "top" memiliki "power" sangat besar, dan hal ini akan para pemerintah kebijakan ekonomi sedang dianggap penting.

Kemungkinan lain terdapat horizontal antar sesama petani dalam sistem produksi pertanian tidak bisa berkembang salah, karena hier dan konteks petani dalam pembangunan diambil oleh oleh individu-individu formal yang dimiliki pemerintah. Para tokoh formal cenderung lebih banyak kepentingan pengakuan modal dan pengakuan ekonomi. Keuntungan utama antara tokoh formal dan tokoh KUD lebih kuat dibanding dengan allianse antara petani dan para politika ekonomi pemerintah (para pejabat) di pedesaan. Interdependensi antara petani dan pengakuan modal (1-1) sangat sederhana dan timpang. Kegiatan pembangunan pertanian hanya didasarkan pada peningkatan pengakuan teknologi usahatani, dan bukan pada bagaimana memperkuat pembangunan petani dalam perubahan nilai tambah.

seolah, pola keberagaman ekonomi tradisional yang umumnya mengaitkan pola hubungan 'patron-client'. Pola ini umumnya tidak melibatkan masyarakat komunal yang secara erat dengan pola paternalistik dan umumnya sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan setempat. Sistem ini bergantung yang terbentuk pada pola ini mengaitkan hubungan yang sangat asimetris. Walaupun demikian, umumnya pola ini cukup memberikan ganngsi pada petani memperoleh jumlah penghasilan subsistensinya. Pola ini cukup baik untuk menjaga keberlangsungan hidup petani petani tidak cukup mendorong petani untuk mengembangkan penguasaan teknologi dan peralatan baru tambah untuk petani. Pola ini umumnya lebih lama berkembang. Tanpa bantuan pemerintah pola ini sudah berkembang di berbagai sub-sektor dan sangat berada pada sistem pertanian padi sawah, jagung dan pertanian rakyat lainnya.

Tabel 1. Petak Petak dalam diagram Organisasi (Terstruktur) Petak Pertanian di Pedesaan Menurut kelompok Petani.

| Aspek organisasi          | Pola organisasi ekonomi pertanian |                                |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                           | Paternalistik                     | Tradisional                    | Modernisasi          |
| Struktur ekonomi          | Paternalistik                     | Longgar -<br>Kurang terkontrol | Longgar -<br>Kontrol |
| Diferensiasi kerja        | 1-2                               | 1-2                            | 2-3                  |
| Saluran subsistensi       | 1-2                               | 2-3                            | 0-1                  |
| Saluran intersekt         | Kapalulua                         | Pasokan baru                   | Transaksi            |
| Penggunaan modal          | 1-2                               | 0-1                            | 0-1                  |
| Integrasi teknologi       | 1-2                               | 1-2                            | 0-2                  |
| Saluran agribisnis        | Dimensi                           | Sedang                         | Sangat<br>himpun     |
| Fenomena harga produk     | 1-2                               | 2-3                            | 0-1                  |
| Kontrol ekonomi sumber    | 1-2                               | 2-3                            | 1-3                  |
| Integrasi teknologi       | Lemah-sedang                      | Dimensi                        | Dimensi              |
| Integrasi modal           | Sedang-tinggi                     | Dimensi                        | Lemah-tinggi         |
| Integrasi teknologi modal | 2-3                               | 0-1                            | 0-2                  |
| Saluran modal             |                                   |                                |                      |
| Keterangan                | 0 = Tidak ada<br>1 = Kecil        | 2 = Sedang<br>3 = Tinggi       |                      |

Diferensiasi petakan ekonomi dalam mengaitkan ekonomi 'patron-client' ini relatif sangat kecil, karena posisi petani hanya sebagai penguasai produk pertanian yang nilai tambahnya relatif rendah. Jika demikian, kemudian petakan petakan ini bisa saja berkembang menjadi suatu organisasi produk pertanian yang 'Kongres Petani' untuk

dijualkan pada pedagang atau pembeli dari luar desa. Dikembangkan kerja sama pengangkutan barang-barang tenaga kerja berdasarkan pilihan. Maksud tidak terkendali. Ada itu seperti itu menurut wewenang kerja petani di bidang ekonomi kisang harga ada, karena petani harus di bawah ancaman bahaya kehancuran (Rinal, 1988). Hal ini juga karena itu pada akhirnya integrasi horizontal yang terjadi pada hubungan antara petani. Organisasi ekonomi seperti ini sangat sulit berkembang dan tidak memiliki kesempatan mengembangkan daya cakupannya dalam pertanahan pasar petani.

Keliga pada organisasi pasar yang umumnya memiliki pola hubungan ekonomi: "rasional" dan bergantung secara pada dinamika dan peluang pasar. Interaksi antar petani ekonomi secara dalam proses transaksi dan pembelian barang produk pertanian yang didasarkan. Pemilik modal umumnya sebagai "penguasa" dan berada di posisi organisasi. Sedangkan petani berada di bawah dan "terang berkuasa". Pemilik modal umumnya bukan orang petani sebagai "penguasa" dalam modal petani yang "terang berkuasa" ekonomi rasional mereka. Pengambilan keputusan dalam ekonomi secara rasional dilakukan secara seperti oleh penguasa modal, dan petani seperti itu sebagai pemenuh kebutuhan (perlu pasar). Rentannya sifat produk pertanian sehingga dijadikan alat strategis untuk menekan harga produk pertanian petani. Sehingga petani tidak mempunyai peluang memperoleh pendapatan yang cukup baik.

Kewajiban pengawas modal adalah menjaga agar petani tetap memelihara produk pertanian agar mereka berkembang. Oleh sebab itu umumnya pengawas modal memiliki cara dengan para pedagang untuk secara sistematis menekan harga produk pertanian yang berasal dari petani. Pengawasan modal usahawan tidak menjadi perhatian utama pengawas modal. Bagi pengawas modal yang penting adalah, harga serta menjamin keuntungan yang besar dari penjualan produk pertanian yang telah menjualnya dari petani. Jadi petani, dengan demikian, hanya akan mengabdikan tenaga mereka sebagai pengawas modal dan berusaha untuk harga antara pengawas modal dan para petani.

Keliga pada pemertanian, tradisional dan pasok di desa memiliki kemampuan, yaitu adanya konsentrasi "kekuasaan". Pada pengawas modal. Keliganya, dengan demikian, menjadi petani yang sama dalam mengorganisir petani. Petani tidak mengorganisir bagian nilai tambah yang besar. Hubungan antar petani dan modal yang, kemudian menghasilkan interaksi yang sangat asimetris, dan hal ini dinilai tidak menguntungkan bagi bertumbuh perekonomian petani dan pedesaan. Perlu diungkapkan bahwa ada keterkaitan erat antara lemahnya kekuatan politik petani dan ketidakmampuan ekonomi petani. Dikembangkan ini sebenarnya dibarengi, bahwa karena hak-hak politik petani lemah maka petani sulit mengembangkan tenaga ungu dalam mengembangkan di bidang ekonomi.

## OTONOMI PENYEDIAAN LARANGAN PEMERTAHANAN

Penahanan etnonasi pada pemerintah atau masyarakat daerah seharusnya disediakan. Sedangkan rakyat akan pendidikan standarnya ekonomi setempat. Beberapa orang lain memang pernah di. Bagi masyarakat pada pemerintah, yang harus di TV yang akan Anggoda DPRD sebagai pemerintah telah mendapat masyarakat petani di pedesaan melalui orang. Orang-orang di luar dari Anggoda DPRD mereka ada orang-orang pada Anggoda DPRD DPR di Jakarta. Orang-orang telah mendapat masyarakat kepentingan orang-orang. Petani akan mendapat kekayaan pribadi... Masyarakat petani juga menunjukkan perilaku kolektif yang cukup cerdas. Selama ini dalam melakukan penilaian terhadap kinerja elite politik pusat dan daerah. Hanya saja, lembaga mana yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan hasil berkeadilan tersebut dalam kehidupan politik lokal mereka belum tahu.

Dapat dilihat gambaran bahwa masyarakat petani di Bali sudah mengalami bahwa peran kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sangat terbatas. Hanya saja, seluruh mereka telah menyimpulkan seperti halnya dalam penelitian kegiatan politik (politik) di tingkat kabupaten/kota masih belum jelas. Dalam Seminar ISI tanggal 3 Agustus 2003 telah ada dibahas pada titik mana peranan di tingkat kabupaten/kota tersebut bertanggung jawab politik antara pemerintah kabupaten/kota dan desa masih jauh. Namun tidak berbeda jauh dengan politik politik antara masyarakat pedesaan dan elite politik di kota-kota. Menurut (Sudjana 2003), salah seorang pakar sosiologi yang terkenal mengatakan masalah ekonomi daerah, bahwa konsep ide-nya masih dalam kanvas masa jauh.

Sejarah ideal demokrasi diberlakukan kegiatan politik tentang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Daerah politik masyarakat pedesaan memperoleh perhatian yang lebih baik untuk mengembangkan keadaannya. Termasuk di bidang ekonomi. Dari penelitian Prasetyo (2001) di Bali yang diperoleh gambaran bahwa pemerintah UU No. 22 Tahun 1999 tersebut memuatkan pengesahan kegiatan yang cukup besar. Sehingga para elite politik daerah tingkat II kabupaten dan kota masih menunjukkan gejala belum memiliki kesadaran untuk berperan sebagai "pemerintah daerah". Realitas dari mereka ini masih menunjukkan bahwa hasil bahwa mereka adalah masyarakat kelas menengah yang "baru" yang dari jalaran. Secara resmi hal ini dapat dilihat dari pada kurangnya hanya perhatian mereka terhadap kepentingan masyarakat bawah dan adanya gejala "tongkat kemiskinan" di tingkat daerah. Terlihat dalam pelaksanaan pemerintah daerah dari daerah dan pedesaan.

Dapat dilihat bahwa ekonomi pemerintahan masih belum mampu memberikan perlindungan dan penilaian terhadap pelaku ekonomi yang berjumlah banyak di pedesaan. Bisa dipahami jika dalam masa otonomi daerah sekarang ini para pemerintah kabupaten/kota belum bisa memberikan jaminan politik bagi pemerataan pembangunan

masyarakat pedesaan. Sebelum pengalihan di tingkat desa menjadi berpisah dengan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan otonomi di lapangan masih milih dengan penyelenggaraan "pangguna politik formal" yang pemimpinnya adalah aktor aktor formal seperti Pemda 1999 Lembaga kerangka nasional, dan kelompok-kelompok kecil yang keamatannya terikat pada jaringan representasi atau masih belum mendapat tempat yang layak dalam pemerintahan politik formal di tingkat kabupaten/kota.

Diluar dari segi manajemen sosial, otonomi belum memberikan jeraan nyata pemberdayaan masyarakat pedesaan di bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa alasan pertama, seperti hasil keputusan politik politiknya dalam bentuk Perda atau banyak ditawarkan pada nasionalitas yang belum jelas. Misalnya Perda yang kebanyakan terfokus pada pendirian lembaga atau unit-unit melakukan pengujian di jalan, atau dalam pembentukan PDB (kunjungan oleh pemerintah, atau tindakan oleh suatu produk-produk terhadap pengembangan pemerintahan pedesaan. Harga input pertanian dan biaya tenaga, untuk pengangkutan pertanian di pedesaan menjadi lebih mahal. Biaya pemasaran yang meningkat akibat banyaknya "bungutan liar" berdasarkan Perda (otonomi) banyak ditemui di banyak daerah pedesaan.

Kedua, masyarakat petani di pedesaan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat kabupaten, kabupaten kabupaten keputusan politik tersebut sebagian besar merupakan keputusan masyarakat pedesaan. Padahal ini dapat ditafsirkan bahwa aktualisasi atau representasi dalam pengambilan keputusan politik tidak menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat. Bertujuan pemerintahan pemerintah dan masyarakat petani belum diberikan dalam dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah dan desa. Masyarakat petani sendiri sama sekali tidak dilibatkan dalam pemberian insentif dan argumentasi dalam setiap pengambilan keputusan atau di.

Ketiga, hasil keputusan politik di tingkat kabupaten/kota di desa atau kecamatan menunjukkan kemampuan desa atau peningkatan kesejahteraan para di politik dan pejabat pemerintahannya. Namun di sisi lain masih menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik masih belum merepresentasikan kepentingan nasional yang lebih, terutama masyarakat petani di pedesaan. Selama keputusan ini dilakukan dengan cara yang lebih melibatkan masyarakat (iter demokrasi) juga tidak merujuk pada kepentingan rakyat banyak. Masih terdapat adanya hubungan yang erat (tersebut) antara elit pemerintah lokal dan masyarakatnya.

Kemudian, banyak ditemukan bahwa sistem setiap peraturan atau keputusan lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota cenderung dianggap final. Perubahan atau perubahan atau Perda tidak dilaksanakan secara substansial dari peraturan yang disahkan DPRD. Sedangkan MPR melakukan pada aktivitas anggota partai politik yang menggunakan lembaga DPRD. Keputusan politik yang kebanyakan dilakukan secara berturut-turut banyak yang tidak sesuai dengan perubahan masyarakat dan hukum

pengalangan kasabateraan antaraluar pedesaan, namun hal itu sistem tidak pernah dilakukan karena atau proses pengalihan secara terdistribusi. Jika terdapat upaya sosialisasi atau pemerataan namun itu masyarakat pedesaan hanya dipertakan sebagai pendukung dan tidak dapat melakukan koreksi. Masyarakat pedesaan yang selanjutnya dijadikan "mitra strategis" oleh para politisi lokal dalam sistem pengambilan keputusan, hingga saat ini secara sepihak "suara" hanya dipertakan sebagai pemantau panggung politik yang pasif.

### PELUKUP

- 1) Ada indikator bahwa kebijakan politik pemerintah pusat di bidang ekonomi selama ini telah dikendalikan oleh para ekonom politik dari luar, terutama dari pakar ekonomi politik yang berafiliasi pada lembaga-lembaga internasional atau IMF. Bisa dimengerti jika ada orang kebijakan pembangunan ekonomi negara selama ini tidak menaruhkan pemerintahnya pada kebijakan perkembangan pedesaan. Oleh sebab itu, kerapuhan pemerintahan pedesaan yang mengandung bukan saja sebagai akibat dari "gila uang" atau ke-taliban dalam kebijakan politik di tingkat nasional sehingga melahirkan pengetahuan ekonomi koreksionari, melainkan juga sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah membangun ekonomi dalam ruang andap tekanan politik dan dalam menghadapi kemandirian asistibanya.
- 2) Pemahaman pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional bahwa perkembangan perkembangan pedesaan sangat ditentukan oleh aspek keberdayaan modal sangat lemah, dan hal itu berdampak besar terhadap keseluruhan perkembangan pedesaan. Terperukanya perkembangan nasional sejak 1998 juga tidak lepas rupanya perkembangan pedesaan. Dalam hal ini ada indikasi bahwa kalangan penguasa kekuasaan dalam memilih pakar pemerintah pembangunan memahami nasional masih beres sebakhi kalangan ekonom konvensional dan kalangan ekonom koreksionari dilibatkan.
- 3) Perkembangan perkembangan pedesaan identik dengan perkembangan pertanian Indonesia. Selama sekian puluh tahun pertanian kita belum menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Sehingga pemerintah yang bias pada investasi baik dari pemerintah untuk pemetaan pertumbuhan ekonomi (industri) di pertanian sangat tidak sejalan dengan pengembangan perkembangan pedesaan. Dan hal itu kurang memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan perkembangan nasional di masa datang. Dengan struktur (pemerintahan dan) pertanian di pedesaan yang sangat timpang dan terjadi proses marginalisasi pertumbuhan, hal itu semakin memperlakukan perkembangan pedesaan hanya sebagai
- 4) Kebijakan pemerintah menjadi terlalu banyak didominasi dan dikendalikan oleh kalangan (kementerian) BUMN, dan hal itu

tercapai dalam perantara. Peta memperkuat dukungan kebijakan politik yang memuat. Kalangan kritis secara umum kurang memahami tentang proses dan ketentuan peraturan yang masih sangat besar untuk mendorong perubahan paradigma nasional. Lebih memperlebar lagi bahwa aktivitas kalangan pakar pertanian, terutama pakar ekonomi pertanian, terhadap pentingnya menemparkan kegiatan pertanian di pedesaan sebagai "soko guru" perekonomian nasional juga masih sangat kurang.

- (5) Ketepatan kelembagaan ekonomi pedesaan dapat dibantu oleh keterlibatan dalam pengembangan dan penerapan aspek pengembangan lembaga, penggerak dan mitra masyarakat pedesaan sebagai dalam penerapan pengembangan ekonomi. Pembangunan lembaga sebagai pemimpin harus dipertaya oleh memiliki keaktifan di mitra masyarakat pedesaan, bisa menggerakkan semangat kerja jika bisa inspirasi masyarakat untuk maju, memberikan arahan dalam penerapan inovasi dan pemecahan masalah setempat (sewa dan modal), mengaktifkan pertumbuhan (growth solution) yang terjadi di masyarakat setempat dan melakukan cara pemecahan bila diperlukan secara rasional dan demokratis perlu dipikirkan juga untuk penerapan pengembangan perekonomian pada saat.
- (6) Daya nilai merupakan komponen kelembagaan yang pertama sangat besar untuk menggerakkan kegiatan perekonomian pedesaan baik secara individual maupun kolektif. Ada beberapa daya nilai yang dianggap penting dan bisa diberikan penggerak pembangunan ekonomi pedesaan yaitu, menegakkan rasa malu dan harga diri yang tinggi jika seseorang berbuat curang atau menegakkan pilak lain. Menegakkan diri sebagai "pekerja produktif" adalah bagian dari kebutuhan diri. Menegakkan gaya hidup yang tidak boros dan tidak pamer sehingga menjadi domestic saving yang tinggi, dan anggi atau daya nilai yang tinggi dalam bermasyarakat.
- (7) Struktur organisasi ekonomi masyarakat pedesaan sangat rapih dan terdapat organisasi pada pusat pelaku ekonomi pedesaan yang tidak memiliki "kekakuan" memuat untuk membukakan kelonggaran gerak dengan pelaku ekonomi di luar desa. Biasanya bangunan proses tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain ketidaksihan dalam pengorganisasian kelompok kecil, penguasaan, permodalan usaha, ketidakpercayaan yang sering timbul antara pelaku ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan. Ada keterbatasan yang ada ekonomi ini, yaitu pada pemerintah (top planner) tradisional (paternalisme) dan pasar (market) masih menempatkan petani pada posisi yang terkecil dan secara umum tidak adil.
- (8) Diperlukannya undang-undang otonomi pemerintahan daerah telah di angkat kabupaten/kota. UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah daerah, termasuk dikaitkan dengan perubahan terhadap perlunya meningkatkan perekonomian pedesaan, masih memerlukan penyusunan yang benar. Kedewasaan berpikir para

menjadi modal untuk politik dan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota menjadi di dasar memulainya. Mereka belum mampu mengkomunikasikan kepentingan masyarakat pedesaan dalam sistem pengambilan keputusan politik di tingkat DPRD/Ases keterwakilan, transparansi, akuntabilitas, dan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai mitra dan pelaku strategis dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan masih belum dapat diwujudkan oleh dua partai dan aparat pemerintah di daerah.

- 16) Lemahnya koordinasi pemerintahan masyarakat pedesaan, jika dengan tidak dilaksanakannya hak-hak masyarakat pedesaan dalam berpolitik. Mereka hanya sebagai mitra politik yang agutir. Akibatnya dan kemampuan mereka dalam berorganisasi menjadi berkurang. Sehingga sebagai pemerintahan tidak diberikan hanya sampai di tingkat kabupaten/kota, melainkan sampai desa. Memberikan otonomi sampai tingkat desa diteliti akan memberikan kemampuan bagi masyarakat pedesaan meningkatkan kemandiriannya baik secara individual maupun kolektif. Melalui pengembangan kelompok-kelompok yang lebih diharapkan bisa meningkatkan partisipasi secara nyata, dan dengan landasan itu kemudian pemerintahan pedesaan akan semakin mudah diwujudkan.

## B33111

## KESIMPULAN ANTARA IDEOLOGI DAN PRAGMATISME PENGANGKATAN EKONOMI

Pada masa panjang sosiologi ekonomi berapukan sebagai ilmu yang dapat dipelajari dan digunakan masyarakat umum sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini disadari bahwa di forum peneliti "New Foundation Agro Economic" atau FAE berkeinginan PERSPEKTIF pada akhir 1988 secara intensif dibahas tentang berapukan struktur ekonomi Indonesia. Saat itu telah dibicarakan penyempurnaan akan adanya lafaz ekonomi yang baru "memaknai" ekonomi masyarakat pada umumnya. Ideologi ekonomi yang mengemukakan tujuan pemerintahan dan keadaan tidak mengubah pengaruh ekonomi yang mengarah pada terwujudnya tujuan yang dimaksudkan. Bahkan strategi industrialisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi pedesaan, didukung dengan uang dan tenaga luar negeri dalam jumlah besar, sistem politik yang stabil, dan pemerintahan yang sangat sentralistik telah dilaksanakan secara terencana, pemerataan dan keadilan yang berwujud pada ekonomi pedesaan.

Dalam Jurnal American Sociologist, Volume 33 Juni - Agustus 1994, Hani (1994) menyatakan ".... saat ini kita hidup dalam suatu masyarakat di mana pemerintah ekonomi mendominasi peranan lainnya ...." (today we live in a society where economic roles dominate other roles). Bentuk atau karakter ekonomi, dengan demikian, dapat dijadikan semacam "teudela" untuk melihat apakah suatu sistem masyarakat berkembang ke arah gambaran yang lebih atau tidak. Bentuk atau karakter ekonomi lebih sedikit banyak berkaitan oleh jenis ideologi, baik ideologi atau pemerintahan atau sekular. Ekonomi pilihan atau ideologi jadi mengemukakan bahwa ada suatu yang menyebabkan suatu negara, atau lebih dari "pemerintahan" sebagai suatu sistem masyarakat yang lebih baik dan dengan demikian "ada" dan lebih maju.

Tingkat "keagamaan" suatu pemerintahan daerah, dengan demikian, dapat diukur dari adanya atau terjadinya kesenjangan antara visi kaum urban dengan kelompok masyarakat yang dilaut dengan luas dan penguasaan pembangunan ekonomi yang telah ada sedang dijalankan. Keagamaan pembangunan ekonomi misalnya, tidak dapat berarti saja disediakan dengan mengesampingkan aspek tingkat urban alamiah yang menjadi penyebab. Thang-u mengutip pernyataan Harbers dan (1972), Rodrik (1996) menyatakan "the world is not enough to satisfy every everybody's needs, but not rich in satisfying everybody's greed". Adanya kerusakan habitat masyarakat lingkungan dan kelestarian yang meluas, misalnya, pada akhirnya dapat juga diluluskan dari seberapa besar individu masyarakat, khususnya satu suku

\* Sumber: Hasil wawancara pertama di: Kota Palembang, Sumatera Selatan, 2021: 47  
28 Desember 2021.

kelompok masyarakat telah memanfaatkan dirinya pada saat hidup tanpa banyak mempertimbangkan kepentingan kehidupan kelompok masyarakat lain dan masyarakat mendatang.

Walaupun ini bertujuan untuk mengeliminasi beberapa tentang beberapa gejala kesenjangan yang terjadi antara ideologi dan program-program pembangunan ekonomi pada masyarakat pedesaan Indonesia. Beberapa proposal yang akan efektif secara lebih sebagai berikut:

- (1) Melayati untuk penalaran ekonomi yang menunjukkan kognitif dalam masyarakat akan lebih digambarkan sebagai faktor internalnya (sifatnya), dalam masyarakat tersebut akan dengan mudah dihadapakan pada "krisis" kebutuhan/utangnya dan hal ini sekaligus sebagai indikator adanya gejala kesenjangan ideologi dan program-program ekonomi yang dihindarkan pemerintah.
- (2) Mencegah gejala ketidakefektifan dan kemiskinan yang parah pada masyarakat jika akan dapat dinilai sebagai kegagalan pembangunan (dalam ekonomi dan sosial) yang telah direncanakan sebelumnya, dan hal ini dapat dijadikan petunjuk (masih) besarnya kesenjangan yang tajam antara ideologi dan program-program ekonomi yang dijalankan pemerintah.
- (3) Tidak bertentangan dengan masyarakat pedesaan, terutama lapisan yang rendah, bukan saja hal ini sebagai petunjuk tidak sehatnya perkembangan masyarakat tadi, namun juga sebagai petunjuk tidak berjalannya ideologi ekonomi yang direncanakan oleh masyarakat baik.
- (4) Berkembangnya ekonomi sebagai informal di pedesaan bukan saja dapat dipandang sebagai gejala tidak berjalan sehatnya proses pembangunan yang tepat, namun juga sebagai petunjuk bahwa ekonomi informal di pedesaan yang ada hingga dewasa ini tidak memberi konsekuensi yang cukup memadai bagi perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat pedesaan ke arah yang sehat.

## PENDAKSIAN DAN FUNGSI, MAKSUD BEBERAPA KONSEP

### Ideologi

Definisi ideologi dalam Webster's New World Dictionary (Gersfeld and Gerstle, 1988) mempunyai beberapa arti, pertama sebagai "ajaran tentang gagasan ilahi, alam dan sumber yang memberahikannya. Kedua, ia dapat diartikan sebagai pemikiran atau pernyataan tentang suatu yang berdasar ideal ilahiah, abstrak, tidak praktis, atau (biasanya) berdasar khayalan yang eksklusif. Ketiga, ia juga dapat diartikan sebagai doktrin, agama, atau cara berpikir yang dianut secara individual, kelas atau kelompok dalam suatu sistem sosial, (tetapi) ekonomi atau politik tertentu. Bisa diartikasikan, etika, argum, bahwa dengan mengartikan ideologi yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu, bisa mengartikan juga kebiasaan dan suatu masyarakat dalam mengembangkan keyakinan-

nya; tidak saja di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang budaya, politik dan kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam kalamnya J. Edgar Hughes *Ecocriticism*, Scottsboro (1984) menyatakan secara singkat, bahwa ekologi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang menaiki kemampuan manusia ke dalam pengendalian sosial. Dengan mengikut pengelompokan Dinkins, n. *Ecology* dapat juga diilustrasikan dengan gambar. Hal pertama tadi, penggunaan istilah ekologi mencakup juga "manusia" lainnya seperti Marxisme dan Votcheranisme. Dapat disimpulkan di sini bahwa istilah marxisme, seperti yang diungkapkan Soeharto (1964), tersebut dalam bentuk ekologi. Marxisme sendiri *Sejarah* dianggap lebih cocok untuk menggambarkan perkembangan ekonomi "masyarakat Indonesia" yang secara khusus membahas perkembangan serta bentuk, bentuk merupakan perilaku dan Marxisme atau kapitalismenya masyarakat Eropa.

Pada masyarakat yang telah berwujud relatif lama dan mempunyai budaya atau ideologi kepercayaan yang relatif mapan, menurut pengertian di atas, dapat saja mempunyai semacam ekologi sendiri. Lebih-lebih pada masyarakat yang diwarisi oleh di Indonesia, kehadiran ekologi nasional, yang diwarisi, lalu mengintegrasikan berbagai ekologi di tingkat sub-nasional (dan budayanya) dan agama, kemudian menjadi sangat diperlukan. Barangkali suatu sebabnya, mengapa pada tingkat sendiri negara ini telah merdeka, namun tidak ada ekologi nasional yang masih mempunyai sifat universal, yaitu Pancasila berlandaskan dengan ekologi ekologi lain yang tidak dianggap mapan, seperti Marxisme-Votcherisme dan liberalisme-kapitalisme. Ekologi ini diharapkan bukan saja berperan dalam "pemeran" untuk mewujudkan kondisi di bidang kebudayaan politik, namun juga di bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

Walaupun pada garis masyarakat di tingkat nasional sudah ada ekologi besar, namun di tingkat bawah ini sudah terdapat sub-ekologi atau ekologi kecil, seperti misalnya-lah dan Rasmady yang memprediksi hubungan, perwujudan dalam masyarakat yang menjadi pengungkapan, berwujud perwujudan terhadap realitas sosial. Karena masing-masing individu atau masyarakat menggunakan atau "berteduk" dengan lingkungan ekologi, maka merupakan sesuatu hal yang sangat, malah terjadi. Gejala gejala *Subbudhi* sosial, seperti *kepercayaan* sosial yang terjadi, misalnya motivasi sosial, kelas sosial, kelompok atau subbudhi budaya berwujud dalam jajaran perilaku pemertaba, "beberapa" bahkan, dan "penerapan" lingkungan; dengan demikian, hal itu dapat dipandang sebagai petunjuk bahwa jauh terdapat kesenjangan antara alam idealnya dan pengimplementasiannya.

## Utopia

Dalam Webster's New World Dictionary telah terdapat definisi diberikan sebagai penggambaran tentang sesuatu "ideal", meliputi keadaan atau situasi; menurut ukuran politik, ekonomi, dan sistem sosial yang ideal atau sempurna (Makara and Guruhita, 1989).

Salah satu batasan dengan gejala sosial. Mannheim (1961) membahas cukup jelas adanya perbedaan hubungan antara konsep ideologi dan ideologi. Dikatakannya walaupun sebenarnya terdapat persamaan, namun tidaklah mudah menjelaskan perbedaan antara ideologi dan ideologi. Kesamaannya adalah bahwa keduanya merupakan kerangka kerja yang sedang bekerja untuk yang belum terjadi atau gagasan yang ingin diwujudkan.

Tanpa dua hal ini, pengetahuan manusia tidaklah dapat dipisahkan dari eksistensi kehidupannya. Mannheim (1961) mengemukakan adanya perbedaan antara ideologi objektif dan ideologi subjektif. Yang pertama merupakan gagasan-gagasan yang mengklaim objektif, sementara yang kedua sebaliknya, hal pertama dapat berwujud; sedangkan yang kedua adalah suatu ungkapan yang subjektif, tidak dapat diwujudkan hanya oleh suatu perspektif sosial tertentu, tetapi hal-hal yang sudah ada.

Sebagai gambaran, menurut Budiman (1991), hal para penganut sistem ideologi kapitalisme, sosialisme merupakan sesuatu yang nyata, dan tidak mungkin terjadi. Karena mereka menganggapnya, sistem sosialisme tidak didasarkan pada teori, tetapi pada kenyataan manusia adalah serakah, terdapat kekayaan materi. Bagi penganut ideologi kapitalisme, gambaran ini sama sekali makhluk sosial dapat dinilai sebagai nyata, objektif. Begitu pula sebaliknya, barangkali seorang penganut ideologi sosialisme dalam memandang manusia yang digambarkan oleh penganut ideologi kapitalisme.

Penganut sistem sosialisme beranggapan bahwa manusia merupakan makhluk yang dibentuk oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, dalam ukuran masyarakat sosialis manusia dapat dibentuk menjadi makhluk sosial yang baru lahir, untuk orang lain, tanpa terikat oleh kepentingan pribadi, material. Bagi penganut sistem sosialisme bahwa manusia didesain sebagai makhluk sosial, hal ini merupakan ideologi subjektif, dan berarti pula penganut sistem kapitalisme dalam mendefinisikan gagasan diri manusia yang dapat dan akan untuk mengembangkan tatanan masyarakat yang akan dibentuknya.

#### Pragmatisme

Dalam Webster's New World Dictionary telah mengartikan danikan sebagai pemeluk atau karakateristik. Ideologi yang menekankan arti dan kelengkapan suatu konsep diambil dari segi kesempurnanya dalam praktik. Ideologi ini dapat diartikan dengan pengastimhasan suatu konsep atau ideologi yang benar oleh suatu sistem masyarakat, dalam kenyataan sosial.

Sebagai kajian, pragmatisme dapat dianggap sebagai suatu "pendekatan" untuk melihat ideologi ideologi dalam dunia nyata. Seringkali suatu ideologi yang diperlakukan di masyarakat, dapat dilihat oleh "kenyataan" dapat ditelusuri melalui gejala sosial yang ditimbulkan oleh pragmatisme yang diteliti masyarakat itu. Sifatnya hasil pragmatisme ekonomi dalam kenyataan masyarakat menimbulkan gejala kontradiksi

asal yang benar, ada kesenjangan dengan visi ideologinya, maka dapat diartikulasikan kemungkinan penjelasannya:

- (1) Ideologi yang ada tidak mempunyai kerangka yang nyata untuk dijadikan wahana "aksi" politik atau pengintegrasian sistem sosial yang ada.
- (2) Bisa jadi visi ideologinya adalah jelas namun programnya adalah yang tidak sesuai dengan semangat ideologinya. Kemungkinan lainnya adalah bahwa hal itu disebabkan oleh konflik dengan nilai sosial atau sistem politik yang dipakai untuk mengkonstruksikan ideologi tadi. Tidak cukup memadai.
- (3) Terdapat kesenjangan pemahaman, terutama di kalangan elit atau pengelit masyarakat antara antara ideologi dan program lainnya.

### KERUSAKAN EKOSISTEM AGUAT (KORUPSI) POLITASI

Para penulis yang membangun kerangka "ideologi" kerjanya di bidang ekonomi nasional tampaknya kurang memperhatikan daya dalaung elitserent atau habitat masyarakat sebagai "akar" kehidupannya. Dengan menggunakan konsep *Dependancy Theory* (kelembaan berduka, berdiskritian, dan bekawar mungkin), Ewan J. Daw (1990), dalam pdaite pengkajian guru besarnya di bidang ekonomi, mengemukakan bahwa kelemahan kemiskinan, dan "krisis integrasi" telah menjadi permasalahan utama di banyak negara, namun keberagaman anti elitserent (gubuk) mengungkap bahwa hal itu semata-mata sebagai gubuk lokal. Karena itu dapat dikemukakan di sini bahwa ideologi yang dijadikan kerangka aksi ekonomis sosial yang bekerja itu berlaku jauh di dalam kehidupan.

Dalam tulisannya berjudul "Economic Sociology: Historical Theory and Analytic Issues" Vertinelli and Sanders (1990) menyebutkan bahwa dalam membangun kerangka aksi pemerintahan sosialis, Marx merasa gubuk kontradiksi (kelas sosial sebagai faktor utama perubahan), dan perubahan itu sendiri disebabkan oleh adanya "konflik" antara kelas penguasa aset produksi dan kelas tenaga kerja. Transformasi sosial akan terus berlangsung seiring dengan proses ke arah penyesuaian struktur yang menyebabkan kemelut kelas. Menurut pandangan Marx, sebagai struktur masyarakat dramatis atau diberikan oleh perubahan ekonomi kelas ekonomi yang kontras faktor kelas penguasa aset produksi dan kelas pekerja, maka dinamika atau perubahan sosial yang terjadi merupakan pertarungan antara dua kelas untuk memperlebarkan alud lebih tenaga kerja. Dengan menggunakan kasus industrialisasi yang berlangsung di Eropa Barat, konflik yang terjadi di masyarakat kapitalistik kemudian disekalakan oleh adanya eksploitasi kelas elit penguasa kapital atau aset produksi terhadap kelas massa tenaga kerja.

Mart memandangkan bahwa yang mendasari terbentuknya struktur masyarakat adalah kekuatan produksi, peralatan mesin, tenaga kerja, dan keterampilan teknik dan teknologi sosial (baik pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan lingkungan kelas). Selama struktur masyarakat masih merupakan perwujudan kelas ekonomi yang tidak memiliki tabakan sebagai akumulatif, selama itu pula sistem masyarakat tadi memiliki bentuk kontradiksi internal yang permanen". Perubahan sosial digambarkan sebagai "konflik abadi" antara dua kelas ekonomi, sampai terbentuknya masyarakat industri yang benar-benar sebagai Marx, Mueher and Huse 1984).

Sementara itu lain halnya "kelahiran kelas" (Ornam) dan mempunyai peran cukup besar dalam menstabilkan perubahan sosial lepas dari perhatian Marx dan juga para ahli ekonomi kelas lainnya. Pada beberapa kasus masyarakat bedanya di Indonesia menunjukkan bahwa konflik abadi antar dua kelas sosial yang sudah ternyata banyak yang bisa dihindarkan. Misalnya, kelas kelas menengah, eksploitasi antar dua kelas ini sebagian dapat dihindari karena menjadi eksploitasi yang eksploitasi (lingkungan alam). Pada banyak situasi masyarakat tidak (putus) dengan adanya sumber alam alam alam, menurut kelas menengah, yang bisa menghindari keterbatasan hubungan antara kelas sosial dan eksploitasi. Melalui habitat (alam) ini, ini sebagai menunjukkan bahwa surplus nilai ekonomi tidak semata-mata hanya bersumber dari nilai produksi endogen seperti tenaga kerja, peralatan produksi dan teknologi, melainkan juga karena ketersediaan alam.

Ini dapat menggariskan bahwa jika kontradiksi sosial tidak selalu tidak dengan "konflik abadi" yang berkembang karena secara faktor kemiskinan alam bisa memberikan peluang kelas masyarakat. Masih merupakan jumlah hidup. Scott 1988 menyatakan bahwa masyarakat kelas bawah baru akan melakukan pemberontakan karena ketidakadilan eksploitasi terhadap mereka "menyimpang" akan masyarakat (yaitu kelas subdominannya). Selama jumlah subdominannya kelas bawah tidak "aman", eksploitasi antar kelas akan berlanjut akan yang mengarah berkembangnya "konflik abadi". hingga terbentuknya perdamaian kelas sosial, belum tentu menjadi kenyataan.

Jangka waktu konflik sosial dapat dibatasi dari sejauhmana tingkat kemiskinan habitat atau lingkungan yang menopang keberlanjutan hidup antara sosial, sebagai akibat eksploitasi dari kegiatan ekonomi masyarakat. Realisasi perorangan atas sumbernya di alam (pembelian Indonesia, terutama pendidikan alam, bahkan eksploitasi alam alam alam). Sumbernya kelas di pendidikan hingga sekarang masih banyak yang terlihat eksploitasi alam "lokal" atau "lokal". yang tidak oleh hukum tradisi atau adat setempat. Model pendidikan sumbernya akan yang demikian ini agaknya bisa menjadi penyebab konflik kelas yang yang cukup efektif karena kegiatan ini mungkin eksploitasi antar dua kelas sosial dapat dibatasi jika eksploitasi terhadap sumbernya alam alam.

Pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa pertanyaan "Apakah tingkat kemiskinan relatif atau mutlak? atau harus dijadikan sebagai indikator pembangunan, ideologi dan pragmatisme pembangunan ekonomi?" Pembentukan masyarakat kelas bawah, mengakibatkan pemikiran Scott (1989), baru akan terjadi jika sumberdaya alam melimpah dan akhirnya tidak mampu lagi menopang kebutuhan subsistensi masyarakat. Karena itu, dapat dikembangkan bahwa kerusakan atau penipisan kemampuan berdaya guna dari sumberdaya alam dapat dijadikan sebagai indikator adanya gejala kontradiksi sosial yang berasal dari eksploitasi yang berlebihan antar kelas sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Pragmatisme pembangunan ekonomi seringkali mengakibatkan daya dukung alam, Tilgase (1982), semakin menjadi langka dan ekologi perlahan dari Belanda, pada awal 1980-an telah memperlebarkan rentang jarak pemeliharaan pembangunan lingkungan yang bertentangan menghancurkan ekosistem, pelestarian pertanian Jawa khususnya lahan kritis (kebarnya akibat erosi dan tanah tandusnya campur dengan masyarakat), banjir, masalah hutan primer dan pertaninya berbagai hutan hasil kerusakan penebaran populer untuk selang-gelang atau eksploitasi selang-gelang; dan hal itu sekaligus juga mencerminkan gejala "kegagalan" penerapan ideologi untuk menciptakan ketertarikan sistem sosial.

## KEKURANGKUKATAN DAN KEMISKINAN

Marinelli dan Smelser (1986) mengatakan bahwa pembahasan sosiologi ekonomi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dua pendekatan, yaitu pertama dan kedua berdasarkan aspek hukum "keseluruhan pasar". Pendekatan ini diikuti oleh Talbot (1989) dan Mel Smelser. Dari sudut pendekatan ini, campur tangan pemerintah dalam pengaturan sosial dimungkinkan, apakah hal itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pasar. Pendekatan kedua yaitu yang memandang bahwa pasar yang berkembang dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan mengikut hukum (dikatakan oleh Landor Jaquith) dari pelaku-pelaku ekonomi untuk mempengaruhi nilai kritis dari tenaga kerja. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx.

Perry (1990), dalam bukunya berjudul "Kemiskinan dan Peranan Sistem Pasar" menyimpulkan tentang "kegagalan" peranan ekonomi pasar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Menurutnya gejala kemiskinan atau kemiskinan menunjukkan bahwa peranan ekonomi pasar tidak dapat dijadikan faktor tunggal untuk mewujudkan kesejahteraan atau keadilan ekonomi. Dengan mengambil kasus negara seperti di Tiongkok Rural abad 18-19 Perry (1990) mengatakan bahwa dengan mengendalikan sekularisasi ekonomi pasar dipadukan dengan kesepakatan negara-negara baru untuk tidak

berperang selama seratus tahun (a hundred year period), perekonomian negara-negara di Eropa Barat telah dengan pesat. Namun bersamaan dengan itu, sebagai akibatnya industrialisasi, sistem masyarakat tradisional terbelah menjadi dua golongan besar, yaitu golongan miskin, termasuk masyarakat hukum, dan golongan penguasa kapital, melalui minoritas.

Dalam bukunya berjudul *Hang-se-hung-ai Taya dan Yekku Myet* (1900) menyebutkan bahwa teori evolusi yang dikemukakan Marx digunakan dalam teori ekonomi. Asumsi yang mendasari masyarakat yang dianggap bahwa mekanisme pasar akan menciptakan hukum perkembangan yang akan bertumbuh. Masyarakat adalah gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam tulisan Bianchi dan Smitser (1990) juga diperoleh gambaran bahwa banyak asumsi yang digunakan dalam ilmu ekonomi yang sudah lama terabaikan. Beberapa penelitian asumsi yang lain yang dianggap sebagai pengantar teori perkembangan yang tidak hanya diberlakukan untuk individu, namun juga untuk politik dan komunal. Dan ide pembagian nilai berdasarkan keahlian campur tangan dari luar mencampur campurkan pemerintah.

Dikatakan oleh Bryant (1989) jika mekanisme ekonomi pasar tidak memperoleh "tuntutan" maka akan kemungkinan akan mengakibatkan ketidakselarasan dalam perdagangan, pengalihan modal, dan pengaruh. Munculnya perbedaan kemajuan antar negara atau bangsa. Taya dan Miskin, tidak semata mata dilihat sebagai alat "evolusi" karena nilai juga dilihat masing-masing negara memberikan nilai yang berbeda bagi nilai-nilai yang saling menguntungkan dan etos kerja ekonomi.

Disamping faktor lain yang akan akan munculnya *growth of capitalism* yang oleh Weber dijelaskan dengan *Protestantism*, pada saat yang sama perkembangan ekonomi masyarakat Eropa pada abad 18 didukung juga dengan berlangsungnya pemberlakuan masyarakat industri dan gerakan kelas menengah untuk memperjuangkan perubahan. Perkembangan ekonomi masyarakat Eropa bukan semata mata faktor kapital, teknologi, dan semangat kewirausahaan, namun juga oleh tuntutan faktor kesadaran kelas menengah untuk mewujudkan gerakan pembebasan dari golongan kelompok modal. Ada semacam kesenjangan antara kemajuan ekonomi dengan perubahan struktur masyarakat awal yang semula bertumbuh feodalistik menjadi hierarki yang demokratis.

Hasil penelitian Ranaidji, diti (1991) di Kabupaten Aceh Besar memberikan gambaran pertama gambaran yang menunjukkan gambaran penduduknya mengalami kemiskinan yang sangat tinggi wilayah kabupaten yang tingkat pendapatan rata-rata per kapita yang paling tinggi. Kedua, secara keseluruhan masih tali banyak didapati rumah tua rumah penduduk penduduk rumah dalam jumlah besar dan dekat dengan kota. Ketiga, pemilik akan adalah yang cabula mempunyai akses terhadap sumber pendidikan akan yang menjadi faktor produksi utama perkembangan selanjutnya. Keempat, masyarakat dan kelas burjuwasia yang akan. Kelima, kemajuan ekonomi wilayah setempat tidak didukung

Dengan peningkatan peran serta pelaku pelaku ekonomi kelas bawah sehingga dapat dilakukan ekonomi setempat meningkat tapi kesejahteraan masyarakat menurun. Ini terjadi karena kemajuan ekonomi hanya di ukur melalui sejumlah kecil pelaku ekonomi kelas atas.

Bahwa semangat liberalisasi, sebagaimana ditentukan Schumpeter, Weber dan Leger dalam Marshall dan Smelser (1993), sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan pendapatan kelas sosial terumpunya memang tidak dapat diingkari. Dengan mengambil kasus di Jawa dan Bali, Guruz (1993) mengemukakan adanya perubahan "sistem" pada beberapa anggota bangsawan Bali, yang hal ini mengakibatkan para bangsawan Bali lebih luas dalam dalam parahnya dalam lapangan ekonomi. Dan studi Guruz ini juga dipaparkan gambaran bahwa dengan lebih mengadopsi semangat kemasyarakatan (dari pada individualitas) dengan mempertahankan ekonominya sebagai bangsawan, ternyata para bangsawan Bali pun menunjukkan keberadaannya dalam mengembangkannya melalui ekonomi swasta pada tingkat kecil dari perdagangan. Hanya saja, para para bangsawan ini pada akhirnya tidak dapat meluluskan adanya hambatan kelas atas "ekonomi dualistik" yang disebabkan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu.

Berikut ini cuplikan tulisan pemerintah yang justru memberikan hambatan dalam "demokratisasi ekonomi". Misalnya dengan pertunjukan "peta kecil" atau jelak-jalak dalam pertemuan, menjadikan para "para raja" tidak bisa tidak mengemukakan gagasan ekonom yang lain untuk melakukan "reformasi politik" yang radikal. Para pemimpin kebijaksanaan "ekonomi dualistik" dari Pemerintah Hindia Belanda dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan antara perkecambahan berbasis "komunitas" (pribumi) dan perkecambahan berbasis perdagangan internasional (Mulla Belanda). Sebagai akibatnya... perkecambahan masyarakat tradisional berkembang dengan perlahan-lahan sedangkan perkecambahan masyarakat Hindia Belanda lebih pesat dan semakin pesat dengan cara masyarakat pribumi.

Menurut pendapat Wallerstein, Rudman (1960) dalam Kuntz (1990) mengemukakan bahwa sifat dari kapitalisme tidak mengabdikan persaingan yang sehat, tapi mengabdikan hak istimewa "monopoli". Situasi ekonomi pasar yang dengan ini dianggap menjadi pola eksklusif perkecambahan kapitalisme. Dimana seseorang "kelas bawah" untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis. Kontradiksi sosial mampu kendali masalah atau masalah lainnya sebenarnya, yang dapat muncul dalam masyarakat pembangunan ekonominya merupakan ketidakadilan akan diteliti antara lain antara lain dengan yang juga dan adanya gejala memukulkan di pesisir dan perkotaan.

Masyarakat Jepang yang mempunyai elit kelas yang kecil yang diwarisi oleh sekelompok antara lain yang baru dan kemudian. Pihak yang mempunyai perkecambahan yang kapitalistik, hanya dengan mengabdikan belanda yang baru. Tatanan masyarakat mereka tidak diizinkan berkembang seperti masyarakat Belanda barat yang lebih mengabdikan



pendirian, maka dampak pengurangan subsidi baik akan mengakibatkan pelaksanaan ekonomi pedesaan khususnya petani semakin semakin, menanggung beban biaya produksi lebih berat. Kelompok masyarakat petani di pedesaan ini, jika menghadapi pasar sulit tidak hanya saja mudah mencari pekerjaan di luar pedesaan yang menimbulkan masalah khusus.

Mengingat dukungan kekuatan administratif dan pemerintahan desa yang masih relatif lemah, dan masih lagi dengan masalah pelaksanaan "desa mandiri" masyarakat pedesaan hal ini menjadikan petani petani dalam pelaksanaan tidak mempunyai posisi tawar yang memadai dalam berhadapan dengan pelaku pelaku ekonomi lain yang lebih kuat, terutama pelaku pelaku ekonomi kota. Akibat dari situasi ini, bila secara politik maupun budaya, sistem masyarakat pedesaan menjadi subaltern sistem masyarakat perkotaan. Sejalan dengan ekonomi yang sempat di permudahkan dengan kemudahan, sebenarnya juga dalam belakang akan kesenjangan di bidang sosial dan politik.

Globalisasi akan lebih memudahkan sistem perkotaan dan menjadi diperkukuh akan semakin menenggelamkan sistem masyarakat pedesaan pada posisi yang semakin lemah. Kemampuan mereka untuk menjangkau lembaga-lembaga perekonomian modern, seperti perbankan, relatif sangat terbatas. Produk yang mereka hasilkan, karena kurang didukung oleh keterampilan khusus, dan struktur pasar yang tidak semuanya menjadi barang baru menghasilkan nilai tambah yang relatif tinggi. Struktur ekonomi yang mereka hasilkan, dengan menggunakan luas lahan terbatas mereka kurang dan bisa jadi menjadi kurang luas dipolakan sebagai "alat" untuk melakukan produksi barang. Secara politik, masyarakat pedesaan hampir tidak pernah secara aktif diajak dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik di tingkat nasional (Praditi, 2001). Situasi ini memberikan penegasan bahwa dengan terjadinya sistem ekonomi pedesaan dalam globalisasi pasar, hal ini semakin memperlebar adanya kesenjangan antar pelaku ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

## SEKTOR INFORMAL DAN GAGAL NYA PEMANISIRAN "KURUP"

Sejak 1990-an dikenal ada dua golongan sektor ekonomi, yaitu sektor informal dan sektor formal. Pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru, Para pengusaha telah dikenal sebagai "gaji" sektor informal. Menganggap bahwa umumnya akan sektor informal sebagai "katup pengaman" pembangunan juga baru dikenal akhir Orde Baru. Yang harus kita "katup pengaman" dianggap belum baik, sehingga ketika untuk kegiatan secara lebih lanjut lebih tepat jika istilah "katup pengaman" saat ini dijadikan "tempat bersembunyi" kalangan BKD untuk tidak menimbulkan adanya masalah dalam pembangunan ekonomi. Walaupun ini menjadi titik tolak dalam membangun lagi setelah terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan 1998. Terlebih

lagi setelah ditetapkan bahwa bahwa Undang-Undang Indonesia saat ini tidak berbeda dari apa yang sudah dilakukan (Gardner, 2000). Akan tetapi, memang masih sebagian besar masyarakat pada sektor ekonomi informal di pertengahan.

Menurutnya ekonomi informal bisa dipandang sebagai bentuk kegagalan pengembangan ekonomi yang merupakan bagian dari ideologi kapitalis liberal. Penekanan kegiatan ekonomi yang hanya berdasarkan pada keuntungan pribadi menimbulkan dampak besar terhadap aspek keberlanjutan. Voleryan (2002) menyebutkan bahwa keberlanjutan Indonesia yang sangat besar terhadap kelas menengah. Hal ini juga akan di bagi, di bagian lain kegagalan penerapan aturan ekonomi kapitalis di Indonesia. Adalah praktik yang besar dan tidak mempunyai kesempatan bekerja di sektor pemerintahan formal "anak-anak" mereka menjadi "anak-anak". Penanya pertumbuhannya akan di bagian informal di pertengahan ini di pandang sebagai "anak-anak" atau "anak-anak" kapitalis global yang diterapkan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun terakhir.

Jumlah sektor informal tidak ada dari dua kategori di bagian informal. Menurut Gardner (2002) mengemukakan bahwa ekonomi informal yang berbeda dari sektor ekonomi formal, meliputi tiga hal:

- (1) Ekonomi rumah tangga yang di bentuk bahwa aktivitas produksi tidak untuk diperjualbelikan. Di bentuk oleh anggota keluarga rumah tangga dan sebagian besar aktivitasnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.
- (2) Ekonomi bawah tanah, terdapatnya dan "gelap", yang di bentuk bahwa orang-orang produksi sebagian besar diperjualbelikan atau diperjualbelikan yang sebagian atau keseluruhan aktivitasnya tidak terorganisir oleh lembaga berpalakan resmi atau pengawasan pemerintah.
- (3) Ekonomi "ekonomi alternatif produksi" tidak untuk diperjualbelikan atau diperjualbelikan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan baik secara perorangan atau kelompok, biasanya memiliki ciri-ciri dengan cara bekerja dan yang mengorganisir jadi produksinya tidak ada lembaga resmi lainnya.

Menurut "ekonomi informal", menurut Gardner (2002), karena jika akan di bentuk sendiri aktivitasnya secara pribadi, maka ini akan di bentuk dengan "ekonomi formal" akan di bentuk sendiri aktivitasnya. Dan ini dari "ekonomi informal" juga terdapat pada aktivitasnya diperjualbelikan dengan. Ekonomi informal ini umumnya adalah bentuk pribadi. Sebagai contoh, misalnya keberadaannya di bentuk pada lingkungan antara lain di bagian pasar dan masyarakat. Keberadaannya terdapat pada yang terdapat tidak keberadaannya dengan spesialisasi yang tinggi, namun juga terdapat di bagian lain yang spesialisasi pada satu.

Keberadaannya dari "ekonomi informal" juga di bagian di bentuk. Menurut Gardner (2002) bisa di bentuk karena ini berdasarkan secara pribadi masyarakat yang sudah terdapatnya dalam masyarakat di bagian lain. Menurut Gardner (2002) akan terdapat bahwa ini akan di bentuk informal ini

diakibatkan untuk melihat masyarakat di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Walaupun menurut beberapa ahli ekonomi (sektor informal), misalnya Lickyot (1987) dan Marudang dan Riffenel (1986), tidak bisa didefinisikan atau diidentifikasi secara jelas, namun kehadiran sektor informal di perkotaan di negara-negara dunia ketiga cukup banyak.

Konsep "Ekonomi Informal" yang diperkenalkan Degrow (1988) menyulitkan akan kurang sesuai untuk menggambarkan permasalahan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya di Indonesia. Kita akan banyak menemui kesulitan untuk menyuar permasalahan yang kurang antara aktivitas ekonomi informal dan ekonomi formal di pedesaan. Apa yang disebut formal dan informal di perkotaan? Apakah permasalah lain kemungkinan hanya dapat dikomunikasikan jika yang merupakan permasalahan adalah "perilaku" yang bersikap sebagai "bahwa yang disebut maju atau modern adalah yang melaksanakan prosedur 'kita', dan sebaliknya bahwa yang tertinggal adalah "desa". Namun sebaliknya, kita akan merasa lebih mudah untuk membuat perbedaan ahli pada perkembangan masyarakat di perkotaan.

Mengapa kegiatan ekonomi atau sektor informal ini banyak ditemui di pedesaan? Anumalai (1986) menyebutkan masalah ekonomi informal di perkotaan antara lain disebabkan oleh beberapa alasan: penduduk yang tinggi dan pertumbuhan sektor pedesaan yang lambat. Aktor pelaku ekonomi informal di perkotaan Indonesia umumnya tidak memiliki keterampilan teknik yang relatif memadai. Mereka yang bekerja di sektor informal di perkotaan umumnya adalah orang-orang yang "terpaksa" bermigrasi untuk mencari pekerjaan di kota; dan umumnya juga mereka ke kota hanya untuk mencari modal yang mereka dan masyarakat pedesaan dan keluarga desa.

Pranadi (1983), dalam bukunya hubungan antara masyarakat desa dan kota, menyatakan bahwa masyarakat ekonomi atau sektor informal di perkotaan disebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang relatif eksistensi antara kemajuan yang dicapai oleh masyarakat pedesaan dan perkotaan. Gejala ketidakseimbangan tadi adalah akibat industrialisasi yang relatif cepat di perkotaan, sehingga menimbulkan kesempatan di bidang usaha dan lapangan kerja, pertumbuhan relatif lambat di bidang pedesaan. Kemajuan adalah bahan modal hasil pemanfaatan terhadap produk industri perkotaan, perkembangan infrastruktur di perkotaan yang relatif pesat, ketersediaan sumberdaya manusia terkonsentrasi di pedesaan, dan pertumbuhan ekspansi lapangan kerja terkonsentrasi pada kota pedesaan.

Konsep Degrow (1988) yang menyuguhkan ekonomi adalah yang disebut oleh Lick (1987) yaitu ekonomi kawasan lain, berkembang dari lokal. Konsep ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi permasalahan pedesaan dan perkotaan ekologis. Mengapa kita harus untuk masyarakat pedesaan yang mengikat pendidikan formal akan lama atau masyarakatnya masih relatif rendah. Istilah "pergerakan ekonomi" tidak bisa hanya memberikan pada faktor formal yang telah menentu

pada kehidupan masyarakat pedesaan. Pelaksanaan pengawasan hukum yang didasarkan pada norma dan budaya setempat dianggap idealnya perlu diberi tempat yang lebih tinggi. Inilah "kultur hukum" di pedesaan yang lebih "berakal oleh masyarakatnya".

Contoh kasus di Indonesia dapat ditemukan bahwa munculnya sektor informal di pedesaan dapat diartikan sebagai "kegagalan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi oleh negara". Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa pembangunan ekonomi yang lebih antara sektor pertanian dan pedesaan merupakan pembangunan dan pertumbuhan. Menurut prope modernisasi, melalui dan teknologi, kapital, dan stabilitas politik, tanpa membuat kesenjangan yang cukup pada lapisan-lapisan masyarakat lapisan bawah untuk meniadakan faktor produksi yang dominan, hal ini akan menghambat perkembangan masyarakat pada situasi yang seperti ini.

Munculnya golongan ("struktur") elite ekonomi yang sangat kaya di pedesaan ("struktur dan jasa ekonomik"), dan golongan kelas yang miskin di pedesaan ("struktur dan jasa tenaga tanpa keterampilan") dapat dianggap sebagai dan bisa dari pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat etalog pembangunan dan keadilan sosial. Karena munculnya sektor informal di pedesaan tidak dapat dihilangkan dari gejala kesenjangan yang tajam antara golongan ekonomi di pedesaan dan pedesaan, maka munculnya elemen atau sektor informal di pedesaan dapat dipandang sebagai bentuk adanya kesenjangan antara ideologi dan pembangunan ekonomi.

#### KERAMPUAN DAN KEMAMPUAN

- (1) Pemilihan ideologi (plus terjemahannya) dalam penyediaan dan pembangunan ekonomi pedesaan seharusnya menjadi tetap menjadi perkembangan ilmiah yang produktif. Harus disadari bahwa para pakar yang pembangunan ekonomi di kalangan EKSUS tampaknya masih dengan menggunakan hal ini sebagai sarana politik yang vertikalitas. Menganggap bahwa pilihan ideologi dalam pembangunan pedesaan tadi sudah "tutup" merupakan sikap yang jauh dari keakuratan intelektual. Selama sikap demikian ini terus dipertahankan, kesenjangan yang besar antara pemerintah di tingkat gagasan ideal ("ideologi") dan strategi pelaksanaan di lapangan tidak akan pernah akan tetap menjadi abadi.
- (2) Anya enggan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan hingga dewasa ini belum menunjukkan hasil yang mengagumkan dan berkelanjutan. Ideologi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi pedesaan tampaknya belum berhasil dirumuskan dengan jelas dan dalam pelaksanaan mengalami berbagai kendala. Dengan demikian, secara nyata dapat diperoleh bahwa akan terjadi

kesejahteraan yang lebar antara antara tujuan yang tinggi dengan dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan tingkat pemerataan.

- (3) Ideologi pengalihan kelas sosial berbasis nilai menghormati keabsolutnya masyarakat tatanan kelas etnikal berarti menafikan peranan sumberdaya alam dan keberagaman kelas yang selama ini memberi kontribusi yang besar bagi ketahanan masyarakat ketahanan masyarakat komunal dan pesisiran. Kelas sosial mengasah proses dapat memperolehi jaminan ketahanan sumberdaya alam sebagai pengalihan kelas sosial ke dalam sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan subsistensi jadi dapat dipecahkan dari ketersediaan sumberdaya alam dan tatanan budaya sebagai yang menghormati adanya ketahanan hidup bersama. Peluang terjadinya konflik akan semakin terlewat ketika ketersediaan sumberdaya alam semakin menyedekahkan yang menimbulkan ketidakmampuan akibatnya hidup bersama pada tingkat subsistensi.
- (4) Ideologi pasar yang dibarengi dengan proses industrialisasi yang cepat dan disubordinasikan oleh aliran aliran kapital dan arus perdagangan, terutama telah menyebabkan ketidakseimbangan yang berat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak dari gaya ketidakseimbangan ini telah menjurus dalam bentuk ketahanan dengan ekonomi yang berat antara ekonomi kota dan desa, antara sektor pertanian dan industri dan antara kelas yang menguasai kapital (dan teknologi) dan masyarakat kecil di pedesaan. Golongan masyarakat bawah yang marjinal terdampak jauh dengan golongan masyarakat atas berjumlah sedikit.
- (5) Peran pemerintah dalam pengendalian pembangunan daerah dan industri masih belum sepenuhnya mengoptimalkan daya sekecilnya. Kebijakan pada kondisi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang murah pada pelaku ekonomi kecil di pedesaan dan kegiatan industri yang memperoleh dukungan kemudahan dalam memperoleh kapital masih sulit dijumpai. Oleh itu sebenarnya sudah merupakan cacat bawaan yang melekat pada ideologi sistem pasar bebas yang merupakan pilar ideologi kapitalis-liberal. Cacat bawaan ini menjurus menjadi sistem ekonomi 'imposter' karena jumlah yang disedekahkan ditanggungkan oleh para pemangku industri. Para pelaku yang sudah 'mengekspansi diri' dengan rotasi sosial budaya masyarakat pedesaan di Indonesia.
- (6) Bertujuan membebankan sektor informal di pedesaan dapat dipandang sebagai siklus pembangunan yang besar dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan yaitu: pembangunan, pedesaan. Perkembangan sektor ini adalah dampak dari diterapkannya pragmatisme ekonomi yang berlebihan dan tidak sejalan dengan ideologi pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu akan ada siklus yang mengakibatkan 'bermunculan' pemerataan, namun akibatnya pemerataan yang kita dapatkan justru semakin terlewat yang menjadikan kesejahteraan yang terus melebar. Ini adalah bentuk kesenjangan yang nyata antara ideologi yang ingin kita

bagikan dan program pembangunan tersebut pelaksanaan yang juga berjalan secara baik.

- (7) Dari aspek ekologi pembangunan ekonomi tersebut yang sejalan dengan pembangunan pelaksanaan yang sesuai dan serasi menandai untuk diarah. Maka sangat bagus saja produksi. Halnya yang agili dari khasanah pemikiran Barat, lalu yang kram itu dan pemikiran ekonomi Marxisme maupun sistem liberalisme, tampaknya tidak bisa begitu saja diterima. Terlihat lagi jika pemerintah tadi tanpa dilibatkan oleh kritis para peneliti sosial mengenai pelaksanaan seperti yang terjadi pada 3-4 dekade terakhir ini. Kesengaman "Tim KEMER" Indonesia dalam merumuskan strategi pembangunan tersebut pelaksanaan untuk membangun sebagai upaya membangun banyak sekali jelek yang terjadi. Menyajikan dan pemikiran dari peneliti sosial tersebut pelaksanaan yang berjalan yang kaya dengan pengkajian empiris di lapangan tidak dapat diabaikan lagi, dan mereka harus diajak bekerja sama dalam pelaksanaan strategi pembangunan pembangunan ekonomi Indonesia di masa datang.
- (8) Para eksekutif ekonomi yang sebagai itu merekrutasi pergerakkan legislasi pembangunan pada lebih banyak dan untuk mengatasi berbagai masalah dari kalangan politik, ekonomi, sosial, budaya, sosiologi, ekonomi, ekonomi pertanian, ekonomi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Perlu disadari bahwa masa depan perkembangan Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan kita memerkalkan perkembangan seluruh pemerintah dan pemerintahan pelaksanaan sebagai itu dan beberapa tahun mendatang. Kapten tidak, dari aspek filosofis dan praktiknya, undang pemerintah dan dan pelaksanaan dalam penyusunan dan pembangunan dan perkembangan nasional pada mendatang.

## BAB IV.

### KONSEP MODERNISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Memasuki ZPTC pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan sekaligus, antara lain, persaingan pasar global, pertumbuhan ketidaksihan pangan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan dan pemanfaatan keagunaan maksimal pascapanen, serta sebagai pemrosesan lapangan kerja. Strategi modernisasi pertanian, dengan demikian, adalah untuk cara harus dikaitkan untuk mengejar ketertinggalan teknologi yang bersifat kekinian, melakukan juga perlu dikaitkan dengan penguasaan visi kependidikan yang lebih agribudaya dan lain-lain, untuk lebih sesuai dengan tantangan pembangunan di masa datang. Ciri khas strategi penelitian dan pengembangan pertanian untuk masa mendatang dalam rangka modernisasi dan pembangunan pertanian yang perlu diperhatikan adalah bahwa penelitian dan pengembangan pertanian haruslah berorientasi pada penguasaan hasil penelitian (science based).

Tujuan makalah ini adalah mengelaborasi bahasan yang berkaitan dengan "strategi penelitian dan pengembangan menuju pertanian modern". Dalam tulisan ini penelitian dan pengembangan pertanian dipandang sebagai salah satu komponen strategi dari sistem pembangunan (supporting system) untuk sistem pembangunan pertanian. Salah satu peran strategi penelitian dan pengembangan pertanian yang perlu diperhatikan adalah agar dampak dari perubahan ("modernisasi") akibat pemanfaatan teknologi dari proses ke penguasaan hasil penelitian, tetap sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian. Dalam tulisan ini, konsep "modernisasi" pertanian dipandang berbeda dengan "modernisasi" pertanian.

Secara garis besarnya masalah ini dapat diuraikan dari uraian bab per bab. Pada Bab II dibahas tentang karakteristik pertanian modern yang sumberdaya manusia pertaniannya memenuhi kriteria rasionalitas yang tinggi, produktif terhadap tantangan masa datang, haranya sangat efisien, tinggi tingkat efisiensi, pengalihan dan inovasi teknologi, dan lain-lain. Pada Bab III dibahas tentang perlunya pendekatan terhadap "modernisasi", agar selalu sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian. Pada Bab IV dibahas tentang strategi penelitian dan pengembangan yang perlu sesuai untuk menjawab tantangan dan tujuan pembangunan pertanian.

Untuk rangka mengelaborasi pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan pertanian, diperlukan sebagai pemahaman yang lebih mendalam terhadap diikutkannya beberapa konsep. Pertama, tentang beberapa aspek dan keterkaitan masalah antara penelitian dengan penguasaan hasil penelitian. Kedua, mengenai konsep mengenai penelitian (research

<sup>1</sup> Menurut istilah menurut Dr. Panji Simandjunt, dan selanjutnya secara bergeser, pernah diadopsi dalam Forum Penelitian Agro (Gemas), 1977:1-14, Juli 1988.

masyarakat untuk mengantisipasi dampak negatif dari alih teknologi hasil penelitian pertanian. Ketiga, digunakannya konsep "pengalihan" idiom klasik teknologi yang berasal dari era masyarakat pra-agraris sehingga proses modernisasi tetap berada pada ranah pembangunan pertanian.

### KARAKTERISTIK MODERNISASI PERTANIAN

Walaupun merupakan sebuah istilah yang sudah umum, pengertian "modernisasi" hingga kini masih tetap kabur, bervariasi menurut disiplin ilmu dan berubah-ubah menurut perkembangan zaman (Marer, 1980). Namun demikian, secara umum dapat dijabarkan bahwa yang modern itu ialah suatu yang sesuai dengan perkembangan zaman hingga ke date. Hardien, 1993, jadi, secara sederhana modernisasi, itu tak lain ialah proses pembiasaan untuk menerima atau meniadakan suatu masyarakat (perkembangan yang lebih baik (Rags, 1980). Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang modernisasi maka kita sesungguhnya membandingkan suatu pola baru yang dianggap lebih unggul, dengan pola yang sudah mapan (tradisional), yang dianggap lebih inferior.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka berikut ini dikatakan bahwa modernisasi pertanian adalah proses perubahan atau transformasi agribisnis sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana, kita ketahui proses agribisnis dikenal akan tiga tiga unsur yaitu :

1. Penguasaan petanai dan pengusaha agribisnis lainnya;
2. Jumlah dan ranjang tenaga agribisnis secara keseluruhan;
3. Perencanaan bisnis/industri dan pemasaran agribisnis lainnya;
4. Jumlah agribisnis / struktur atau jaringan agribisnis.

Alasan utama itu modernisasi pertanian haruslah didasarkan dari ada tidaknya pembiasaan pola berpikir untuk agribisnis tersebut. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian merupakan empat aspek perubahan yang ada kaitannya dengan semua itu yaitu :

1. Modernisasi pengusaha petanai dan pengusaha agribisnis lainnya umum;
2. Modernisasi petanai /buruh tani dan pekerja agribisnis secara umum;
3. Modernisasi pengusaha petanai tani dan perusahaan agribisnis secara umum;
4. Modernisasi struktur agribisnis.

Modernisasi pengusaha, tenaga/tenaga dan petanai merupakan hal-hal utama dan modernisasi pertanian karena melalui alih motivasi, penanaman aset dan pengalihan idiom/teknologi agribisnis. Modernisasi petanai dan petanai termasuk kategori modernisasi personalisasi (Gibbs, 1964; Lemay, 1986) yang tidak meliputi pembiasaan dalam fungsi struktural

Arithmetica majora, yveit modum illius, subduplo, triplo, quadruplo, pentaplo et sexuplo ab unitate.

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dituntut oleh rasionalitas yang tinggi dalam artian senantiasa membandingkan dan menyeleksi semua kegiatan dan standar dalam berbagai aspek-aspek produksi-konsumsi-konsumsi tingkat rumah tangga manusia mempunyai satu hal berbeda berdasarkan lingkungan sekitarnya secara alamiah dan dengan penuh pertimbangan. Dengan perkataan lain, modernisasi pengusaha dan pekerja agribisnis merupakan proses perubahan cara berpikir dari berdasarkan kepercayaan di dalam menjadi berdasarkan sudah-kondisi ilmiah dan penelitian yang ilmiah kemudian dari itu akan menjadi secara ilmiah. Dengan demikian, rasionalitas modern merupakan syarat keberhasilan agar suatu teknologi maju dapat diterapkan pada suatu agribisnis dan agar agribisnis tersebut dapat dikelola dengan efisien.

Analisis adalah kemampuan untuk mengklasifikasi apa yang akan terjadi di masa mendatang dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk itu. Pengusaha agribisnis modern menyadari bahwa siapa yang berhasil beradaptasi dengan perubahan mampu mengadaptasi dengan siklus baru apa yang akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat dengan prakiraan perubahan tersebut. Sebaliknya, pengusaha agribisnis tradisional cenderung hanya berpikir jangka pendek. Keterampilan ini dapat membantu kita untuk mengantisipasi perubahan yang akan datang agar usaha agribisnis yang dilakukannya dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan.

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara berpikir, sikap dan pola tindak orang lain. Mekanisme dalam pengalaman kemampuan empati. Berdasarkan empati ini sangat penting untuk dimiliki penguasa agama karena salah satu yang menentukan keberhasilan untuk menerapkan strategi pelayanan dan kerjasama bidang yang teras. Kemampuan memahami perusahaan dan keinginan untuk memberikan pengaruh yang positif yang sesuai dengan preferensi konsumen. Bg) jadinya agribisnis kemampuan empati ini sangat penting untuk dapat memahami latar belakang pemahaman perusahaan dan tidak dapat bekerja sama dengan para pekerjanya lainnya. Dengan demikian kemampuan empati sangat penting berhubungan suatu perusahaan.

Mobilitas merupakan salah satu dari tantangan utama untuk meraih status yang lebih baik. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dituntut oleh kemajuan dan kemampuan yang tinggi untuk persaingan meningkatkan usahanya. Dengan perkembangan baru, pengusaha dan pekerja agribisnis modern bersikap aktif, membangun pengusaha dan pekerja agribisnis tradisional bersikap pasif. Oleh itu, sifat mobilitas ini sangat penting agar semua agribisnis dapat tumbuh berkembang dengan cepat.

Partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk menjadi anggota kesatuan yang ada dan untuk peningkatan status. Perusahaan dan pemerintah agribisnis modern dituntut oleh tingkat partisipasi yang tepat dan tinggi (optimalitas). Sifat partisipasi yang tinggi merupakan faktor yang sangat mendasar dalam

suatu teknologi dapat diadopsi dengan cepat dan lengkap dan agar suatu kesempatan usaha (pasar) dapat diraih dengan cepat.

Selain dari nilai mengukur pada investasi dan perolehan untung seseorang, sikap dan nilai modern diartikan oleh motivasi untuk berusaha berpagu mental kemakmuran atau keberhasilan atau sikap untuk kesuksesan beresik karena tidak ada atau dasar dorongan imitasi atau meniru semata. Motivasi untuk meraih kemakmuran ialah yang menjadi batasan kuat bagi kegiatan usaha.

Untuk memudahkan pemisahan karakteristik dari tradisional dan pebera modern modern ditampilkan pada Tabel 2. Secara umum, karakteristik tersebut dapat dipandang sebagai karakteristik dari suatu budaya manusia pada agifitas modern. Dengan perkembangan ilmu, perkembangan pada masa mendatang menimbulkan adanya transformasi karakteristik sumberdaya manusia pertanian dari diri tradisional ke diri modern seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 tersebut.

Model usaha usahawan berdasar dari pengetahuan tentang teknologi yang digunakan, skala usaha, cakupan usaha, dan manajemen usahanya. Dari segi orientasi usaha, modernisasi usahawan ditunjukkan oleh pemahaman dari subsektor pada usahawan tradisional menjadi komendal pada usahawan modern. Usaha tradisional adalah usahawan yang hasil produksinya pun akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan demikian, usahawan tradisional tidak sensitif terhadap pasar dalam negeri. Sebaliknya, usahawan modern adalah usahawan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemilikanya dengan menggunakan pasar sebagai media transaksi. Dengan demikian, produksi dari usahawan modern sebagian besar dijual dan sebagian besar sarana produksinya pun dibeli dari pasar dalam.

Tabel 2. Karakteristik Sumberdaya Manusia Pertanian Tradisional dan Modern

|                                 | Aspek                    | Perubahan<br>tersebut |               |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
|                                 |                          | Tradisional           | Modern        |
| 1. Perilaku                     | a. Cenderung berpikir    | Kepentingan diri      | Ikutlah       |
|                                 | b. Pergaulian kepedulian | Asak                  | Sosialisme    |
| 2. Attitude                     | a. Persepsi terhadap     | Angka kecil           | Angka punyung |
|                                 | b. Kemampuan produksi    | Berakut               | Tinggi        |
|                                 | c. Kemampuan pemasaran   | Berakut               | Tinggi        |
| 3. Bupuk                        |                          | Berakut               | Tinggi        |
| 4. Modalitas                    |                          | Berakut               | Tinggi        |
| 5. Perilaku                     |                          | Berakut               | Tinggi        |
| 6. Sikap dan nilai (motivation) |                          | Berakut               | Tinggi        |

Dari segi teknologi, modernisasi pertanian ditunjukkan oleh perubahan dari teknologi tradisional ke maju. Dengan kemajuan perindustrian teknologi hasil ciptaan dari jenis dan cara penggunaan sarana produksi pertanian jenis sarana produksi modern menjadi lebih dari polikot.

(2) Dilihatkan oleh konteks manufaktur.

(a) lebih mengandikan tenaga mekanis daripada tenaga manusia atau anak.

(b) sedikit tenaga kerja yang perlu hasil akan.

Dari segi tenaga usaha, modernisasi industri ditunjukkan oleh peningkatan skala usaha dengan output besar untuk menghasilkan output skala usaha (*volume of work*). Industri modern semakin banyak beroperasi pada skala usaha yang lebih besar paling tidak pada skala usaha efektif minimum minimum  $\geq 100000$  SKUP. Sebaliknya, industri tradisional biasanya beroperasi di bawah skala usaha efektif minimum.

Dari segi cakupan usaha, modernisasi industri pada umumnya melakukan spesialisasi pada satu bidang usaha yang konvensional usaha banyak dilakukan apabila memang ada keahlian khusus usaha (*specialization of work*). Sebaliknya, industri tradisional cenderung melakukan diversifikasi dalam rangka bertahan hidup atau subsistence atau untuk mengelak risiko yang risk *overexposed* walaupun tidak ada keahlian khusus usaha.

Modernisasi industri juga ditunjukkan oleh perubahan manajemen usaha dari pola tradisional keluarga (*family-based management*), dimana manajemen dan tenaga kerja terutama menggunakan sumber daya manusia yang ada dalam keluarga ke pola manajemen perusahaan yang dikuasai oleh spesialis pekerjaan yang tinggi dan menggunakan tenaga kerja profesional. Secara ringkas karakteristik dari modernisasi modern dirangkai dalam tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Usaha Tradisional dan Modern.

| Aktiviti                    | Unitasari tradisional                                                  | Unitasari modern                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Cakupan usahanya         | Sekelompok                                                             | Kawasan yang luas                                           |
| 2. Teknologi yang digunakan | Lama                                                                   | Baru (penerapan)                                            |
| 3. Skala usaha              | Kecil, menengah atau mikro-internasional                               | Besar, polikot atau efektif skala usaha minimum 100000 SKUP |
| 4. Diversifikasi usaha      | Unggul, dengan tidak ada diversifikasi usaha ( <i>volume of work</i> ) | Polikot, dengan tidak ada diversifikasi usaha               |
| 5. Manajemen                | Manajemen keluarga ( <i>family-based management</i> )                  | Manajemen profesional ( <i>professional management</i> )    |

Modernisasi pertanian juga dapat dilihat dari perubahan struktur agrarisitas. Struktur agrarisitas memiliki tiga atribut penting yaitu: (1) berasiabilitas (diversitas), (2) kompleksitas, (3) integrilas, (4) keseluruhan dan (5) dinamika. Struktur agrarisitas modern ditandai oleh kemampuan bidang usaha yang tinggi, baik secara vertikal maupun secara horisontal, sehingga seluruh bidang usaha tersebut yang dapat berkontribusi menghasilkan keuntungan secara keseluruhan dalam bentuk, kualitas, dan kuantitas yang dipengaruhi kemajuan teknik, disiplin, dan disiplin keahlian dalam berproduksi, struktur agrarisitas modern juga bersifat terintegrasi dalam sistem nasional yang saling menunjang satu sama lain. Struktur nasional struktur agrarisitas modern juga berintegrasi dengan teknik, integrasi yang tinggi dilakukan oleh kuli dan padanya membangun dan membangun dari setiap komponen jaringan agrarisitas tersebut.

Keseluruhan dari jaringan agrarisitas di Indonesia oleh adanya dominasi setiap kemampuan. Keseluruhan adalah yang menunjukkan adanya pasar yang terdapat sehat. Struktur yang terdapat modernisasi struktur agrarisitas merupakan perubahan yang mengakibatkan keseluruhan kemampuan atau kemampuan jaringan agrarisitas tersebut. Keseluruhan modernisasi struktur agrarisitas juga ditandai oleh penguasaan kemampuan struktur agrarisitas untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Struktur terdapat dan struktur agrarisitas modern terdapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik dan Struktur Agrarisitas Traditional dan Modern

| Atribut                    | Agrarisitas traditional  | Agrarisitas modern         |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Berasibilitas           | bidang keseluruhan       | Tinggi Rendah              |
| 2. Kompleksitas            | bidang                   | Tinggi Rendah dan terputus |
| 3. Integrilas              | Kepuasan dan keseluruhan |                            |
| 4. Keseluruhan keseluruhan | Kualitas                 | Manfaat                    |
| 5. Dinamika                | bagian                   | Proses                     |

## MODERNISASI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

### Roda Modernisasi Dengan Pembangunan

Salah satu masalah pertanian ya agak banyak. Masalahnya yang kurang adalah modernisasi sesungguhnya tidak klasik dengan pembangunan (Giles, 1988). Dengan begitu yang akan dapat dimaknai bahwa modernisasi pertanian juga tidak akan dengan pembangunan pertanian. Giles menulis Salgado (1974), Goodenough (1978) dan Pado (1986) juga menunjukkan bahwa modernisasi tidak klasik dengan pembangunan pertanian. Perbedaan antara modernisasi

dan pembangunan pertanian merupakan satu paket yang harus dilaksanakan sebagai pegangan dalam upaya kita "Membangun Pertanian Modern dan Menyajikan Kesejahteraan Pangan Melalui Pengembangan Agribisnis dan Agribisnis" yang menjadi tema rapat kerja kita ini.

Pada halukatnya modernisasi dan pembangunan pertanian memiliki sifat umum yang sama yaitu suatu proses perubahan sektor pertanian dan agribisnis secara keseluruhan. Namun demikian diketahui secara mendalam maka akan terlihat bahwa jika bahwa keduanya memiliki perbedaan (Tabel 5). Perbedaan pertama adalah mengenai skala tujuannya. Pembangunan pertanian memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum dan kesejahteraan petani khususnya, yang harus diukur dengan indikator-indikator absolut seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan jumlah orang miskin, peningkatan distribusi pendapatan, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan umur harapan hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Berbeda dengan pembangunan pertanian, modernisasi pertanian memiliki sasaran relatif yaitu bagaimana mencapai tingkat kemajuan yang paling unakahir. Dengan perspektif lain, sasaran modernisasi pertanian pada halukatnya ialah berupaya untuk mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai oleh sektor pertanian di negara-negara maju. Oleh karena itu modernisasi pertanian harus sesuai dengan sistem pembangunan per sektor nasional.

Tabel 5. Perbedaan Cara-cara Modernisasi dan Pembangunan Pertanian

| Aktivitas     | Modernisasi pertanian | Pembangunan pertanian              |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Sasaran    | Kemajuan relatif      | Kemajuan absolut                   |
| 2. Perspektif | Populer (massal)      | Berkelanjutan jangka panjang       |
| 3. Strategi   | Partisipatif          | Eksklusif, eksklusif, partekipatif |
| 4. Proses     | Orbitasi, integrasi   | Terencana dan terkoordinasi        |

Kedua, dari segi perspektif Pengembangan pertanian akan-lasa didasarkan pada perspektif jangka panjang. Pembangunan pertanian tidak hanya berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa kini, tetapi juga pada masa mendatang. Sebaliknya, modernisasi pertanian justru didasarkan pada perspektif sesaat, yakni bagaimana mencapai kemajuan mutakhir (saat ini). Dalam konteks ini, modernisasi pertanian dapat menimbulkan keberlanjutan pembangunan pertanian dalam jangka panjang.

Ketiga, strategi atau upaya-upaya pembangunan pertanian juga berbeda dengan modernisasi pertanian. Pembangunan pertanian biasanya dilakukan dengan meningkatkan efisiensi produktivitas pertanian atau peningkatan aset produktif dan peningkatan kesejahteraan

modernisasi pertanian petani hanya dilakukan dengan pemrosesan nilai teknologi dan organisasi. Dengan demikian, dampak dari modernisasi pertanian belum tentu konsisten dengan tujuan pembangunan pertanian.

Kesepakatan dari segi proses pembangunan pertanian dilakukan secara beraturan dan terkoordinasi melalui keterlibatan pemerintah yang terarah, sedangkan modernisasi pertanian biasanya berlangsung secara efektif melalui efek demonstrasi dan imitasi. Tidak terencana dan tidak terkoordinasi, karena memang diarahkan dan diskoordinasi, maka upaya upaya pembangunan pertanian dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan maka modernisasi pertanian belum tentu menghasilkan dampak yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Harus diakui bahwa proses pembangunan pertanian melalui modernisasi dapat memberikan dampak yang positif, tetapi tidak selalu sebaliknya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Sebagai contoh, modernisasi pertanian melalui modernisasi teknologi usahatani yang padat modal dan mahal tentu akan dapat menimbulkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi pertanian, sehingga bisa meningkatkan tujuan pembangunan pertanian kita. Akan tetapi, pertanian yang memfokuskan lembaga lembaga ekonomi tradisional seperti sistem bagi hasil dapat pula menimbulkan ketimpangan tingkat pendapatan.

Sebenarnya yang kiranya perlu kita cerna adalah bahwa tidak semuanya modernisasi dan pembangunan pertanian itu berdampak selalu positif dari sisi terencana dan tidak terkoordinasinya proses modernisasi tersebut. Oleh karena itu kita juga harus menyadari modernisasi pertanian itu haruslah dengan pembangunan pertanian maka modernisasi pertanian tersebut haruslah kita serahkan, kita strukturisasikan dan kita koordinasikan. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian itu haruslah kita jadikan sebagai bagian dari strategi pembangunan pertanian. Kalau begitu, modernisasi pertanian itu haruslah kita rencanakan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika apabila dilakukan berlangsung secara tidak terencana pembangunan pertanian dapat sangat membahayakan pembangunan pertanian.

### Seberapa Aspek Dampak Modernisasi

Dinamika telah dikemukakan bahwa jika modernisasi pertanian tidak terencana dan terkoordinasi, modernisasi bisa dalam jangka panjang justru dapat berdampak negatif terhadap pembangunan. Kalau demikian halnya, apakah modernisasi tidak bisa dipicu oleh pemerintah, atau setidaknya didekati dengan pembangunan pertanian. Jika justru pemerintah diperlihatkan yaitu sebagai penghalang modernisasi, maka lagi-lagi tujuan pemerintah ke depan yang berdasarkan optimal pengaliran tidak akan banyak dapat diajarkan dengan pembangunan. Karena itu, disamping

petani adanya pemerintahan dan politik nasional. Untuk keberhasilan modernisasi pertanian diperlukan beberapa aspek pendanaan eksternal yang cukup luas, yaitu :

- 13) Adanya pemerintahan dan kebijakan untuk bagi petak-petakan agribisnis. Jika UU No.12 (1992) tentang Pendidikan Tenaga dan 141 Pusat Agraria (1992) disesuaikan sesuai dengan jiwa dan tujuan kedua UU tadi, hal ini merupakan kondisi adanya perlindungan dan kebijakan hukum.
- 14) Penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung tinggi nilai "aman pemerintah", disiplin kerja yang tinggi, dan peningkatan keterampilan teknik (technical) kerja hard yang tinggi bagi aparatur. Selain itu akan membuat sistem "petak-petakan" yang nyaman, sehingga hal ini sangat relevan untuk mewujudkan penyediaan agribisnis yang bersih dan jujur.
- 15) Menjelaskan ekonomi yang telah transisi dari sedap petani agribisnis. Target hal ini, iklim persaingan yang baik sangat diperlukan akan muncul dari tingkat yang rendah perkembangannya. Agribisnis itu sendiri. Munculnya semangat kreatif yang mendorong peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan agribisnis modern, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh apakah kebijaksanaan ekonomi telah mulai diterima oleh oleh oleh petani petani agribisnis.
- 16) Mengutip pendapat Alang (1991), seorang petani agribisnis yang profesional tidak akan berpikir "nepotisme". Ia juga bukan orang yang senang jika bisa memperoleh perlindungan "proteksi" yang terus menerus dibawah kekuasaan politik. Petani adalah orang-orang yang politik mereka "tersebar" dalam kegiatan agribisnis, bukan ada berdasarkan ikatan budaya agribisnis dan agribisnis yang universal, namun juga dapat diartikan sebagai pembangkitan budaya lokal secara "legal" dalam modernisasi pertanian.
- 17) Menciptakan struktur dan budaya ekonomi yang berakumulasi sehingga kegiatan agribisnis dari agribisnis ini didukung oleh pemerintah petak-petakan ekonomi yang tinggi nilai banyak (terutama) di pedesaan. Dengan demikian, modernisasi pertanian adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi petani petani ekonomi di pedesaan. Jika demikian halnya, keberhasilan modernisasi pertanian akan lebih terjamin dan signifikan juga tujuan pembangunan.
- 18) Fasilitas struktur dan kelembagaan agribisnis yang memerlukan ditumbuhkannya lingkungan kemasyarakatan yang harmonis antara petani agribisnis, lembaga umum yang berakumulasi dan berprestasi luas dengan yang masih lemah. Struktur agribisnis ini haruslah lebih mengacu terhadap pemerataan di bidang kesempatan berusaha yang baik bagi petak-petakan agribisnis di pedesaan. Dengan demikian, modernisasi pertanian, melalui pengembangan agribisnis dan agribisnis, mengarah pada pemerataan dan tujuan selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

- 17) Penguasaan infrastruktur agribisnis perlu diberikan pada wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam dengan keunggulan komparatif yang relatif tinggi. Dengan memandangi bahwa sumberdaya pertanian selalu dapat diperbarui atau diperbaharui (renewable resource), jika dapat dipadu dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi petani agribisnisnya, maka markasa pertanian akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi keberlanjutan pembangunan pertanian.

Dari uraian di atas banyak sekali bahwa akan menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi pertanian melalui pengembangan agribisnis dan agrowisata. Hal ini membutuhkan penelitian. Dengan demikian peran pemerintah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka agar modernisasi yang dimaksud dapat terlaksana pada "rel pembangunan". Untuk menunjang itu semua, peran penelitian dan pengembangan menjadi semakin penting, termasuk dalam permasalahan penelitian (research intelligence) dan pengembangan teknologi pertanian.

#### STRATEGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan pertanian dalam hal ini dipandang sebagai salah satu komponen strategis dari sistem pendukung (supporting system) pembangunan pertanian. Artinya, output suatu kegiatan penelitian dari pengembangan harus dapat diolah, diwujudkan bagaimana yang tinggi jika dan hanya jika output penelitian dan pengembangan tadi betul-betul menunjang pencapaian tujuan modernisasi dan pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, menurut pendapat Ardhya Guna (1983), untuk masyarakat Indonesia yang masih berada pada masa transit, output suatu kegiatan penelitian dan pengembangan haruslah diturunkan dari kebutuhan (demand side) modernisasi dan pembangunan pertanian itu sendiri.

Strategi penelitian dan pengembangan pertanian, dengan demikian haruslah lebih banyak memperhatikan kebutuhan pengguna hasil penelitian dan pengembangan pertanian (client-oriented). Pengalaman menunjukkan bahwa jika strategi penelitian yang lebih diarahkan pada kepentingan produsen penelitian ("supply side"), banyak dijumpai hasil penelitian yang "mandul". Dengan kata lain, bahwa makna dari hasil penelitian tadi tidak sepenuhnya menunjang modernisasi dan pembangunan pertanian dan hal itu berarti pemborosan sumberdaya penelitian.

Output suatu kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian adalah teknologi (dalam arti luas mencakup "pengalaman praktis"). Menurut istilah Sorokin (1984), teknologi dapat dipergikan dalam dua jenis, yaitu :

- (1) Teknologi yang berupa perangkat keras sebagai pendukung dalam kerja kelompok dengan cara menggunakan desain area table yang menggunakan pedal mekanis untuk meningkatkan efisiensi kerja kerja dalam percontekan pada kelompok area teknologi ini
- (2) Jenis teknologi lain adalah yang berupa perangkat lunak sebagai pendukung "kemampuan" para pengembangannya usaha agribisnis yang mampu bekerja di pedesaan, yang berdampak besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Berwujud jenis teknologi ini juga juga, teknologi mencakup fasilitas pemenuhan para kebutuhan keagamaan petani agribisnis yang mampu mengawasi dua tujuan sekaligus yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan pedesaan.

Dalam rangka mendukung efisiensi strategi penelitian dan pengembangan penelitian pertanian para peneliti Badan Litbang Pertanian dan Peltanah haruslah mempunyai keunggulan kompetitif yang tidak dalam hal ini yaitu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan melakukan antara lain dengan cara penelitian mutakhir dengan penggunakan. Walaupun agribisnis harus ada dengan kemampuan peneliti dalam membaca perkembangan ilmu serta kegiatan ekonomi global saat ini sehingga ia bisa membantu pengguna teknologi untuk mengadail manfaat dari kemajuan yang pesat, melalui modernisasi.

Walaupun demikian yang dimaksud oleh para peneliti haruslah mempunyai kemampuan melihat ke depan (future fit), dalam arti dapat mengantisipasi dan mampu merelagasi penggunaan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna di masa datang. Dengan demikian modernisasi dan pembangunan pertanian di masa datang tidaklah serong atau salah diarahkan para ilmuwan ke arah teknologi yang diambil oleh penggunaan teknologi yang memang (tidak) atau tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat.

Rencana lima and masih berkaitan dengan penelitian yaitu yang singkat seperti berikut:

- (1) Untuk dalam melakukan kegiatan penelitian peneliti haruslah memiliki kemampuan organisasi agar hasil penelitiannya bisa bertahan selang dan bermanfaat bagi pengguna hasil penelitian.
- (2) Kedua, pengertiannya bahwa peneliti haruslah mampu men transfer ilmu teknologi hasil temuan mutakhir ke pengguna hasil penelitian. Yang ini, ilmu teknologi tidak mencakup memotifikasi atau mengadaptasi dan menfiksifikasinya pada komunitas petani agribisnis yang memunculkannya.

Untuk mendukung efisiensi strategi penelitian dan pengembangan pertanian, Badan Litbang Pertanian bukan saja memiliki ilmu peneliti yang mempunyai keahlian khusus pada bidang ketahanan pangan, namun juga memerlukan peneliti lain yang memiliki bidang penelitian termasuk teknologi yang tidak dalam area global teknologi yang

1. *Penemuan (Innovation)* oleh lembaga lembaga penelitian dari negara lain atau lokal dipandang sebagai suatu inovasi. Jika kita hanya mengadaptasikannya sendiri adalah tidak rasional atau dapat dikatakan sebagai tindakan "pemborosan". Oleh sebab itu, jika masalah masalah intelektual seperti *right* dapat diatasi melalui penelitian penelitian yang ada dalam negeri, maka dapat diatasi dan tidak perlu melakukan penelitian untuk memperolehnya. Untuk memperolehnya melalui penelitian yang ada.

Walaupun secara kuantitas jumlah peneliti di Badan Litbang Pertanian relatif besar, namun dilihat dari pengelompokan, komposisi, umur, kemampuannya, dan proses regenerasinya ini masih merupakan sebagai masalah perhatian dalam penelitian pertanian dan teknologi pertanian berdasarkan keahliannya masih pada generasi tua. Pada dasarnya dapat dikembangkan bahwa untuk menciptakan sumber peneliti yang berkualitas dan berpengalaman cukup dibutuhkan waktu yang tidak singkat, bisa mencapai 10-15 tahun.

Pemerataan yang juga diperhatikan kemudian adalah upaya sebagai upaya pemerataan hasil penelitian dan pengetahuan pada semua? Dalam hal ini ada dua golongan golongan hasil penelitian dan pengetahuan pertanian yaitu : petani agribisnis dan pemerintah. Jadi strategi dari pemerintah penelitian dan pengembangan pertanian haruslah berdasarkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan petani ekonomi yang menghadapi jaringan pasar agribisnis. Selain, strategi tadi harus juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang berperan sebagai pengelompokan penelitian.

Mengingat sebagai hasil petani agribisnis dan agribisnis ini akan menghadapi pekerjaan kemampuannya serta yang relatif masih akan mereda umumnya menghadapi kekurangan untuk mengantisipasi bila misalnya... maka peneliti sebagai upaya untuk memperkuat untuk akan melakukan kebutuhan petani agribisnis dan agribisnis ini. Untuk itu, hanya perlu peneliti di Badan Litbang Pertanian haruslah dapat cukup jika hanya mampu mengefisienkan jenis teknologi yang dibutuhkan (misalnya) petani untuk mencari peningkatan produktivitas usahatani dalam jangka pendek. Yang penting untuk lebih disediakan bahwa pengetahuan teknologi baik pada agribisnis haruslah mencakup nilai pengetahuan keagribisnis petani agribisnis, terutama petani dari keluarga...

Berbagai penelitian dan pengembangan penelitian yang penting untuk memenuhi kebutuhan petani agribisnis yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (1) Memperkuat petani agribisnis di penelitian sebagai pengelompokan hasil penelitian dan pengembangan penelitian. Petani agribisnis di pedesaan yang akan dengan petani memelihara peternak dan nelayan, merupakan petani ekonomi yang paling lemah kemampuannya. Jika strategi penelitian dan pengembangan penelitian dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan petani agribisnis.

kefektifan, maka diperlukan manifestasi pemerintah sebagai pemrakarsa dalam memberikan kontribusi besar bagi modernisasi pertanian dan pembangunan pedesaan.

- [2] Selama kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk memanfaatkan kebutuhan teknologi pertanian karena seperti telah ungut, pupuk, obat-obatan, dan pestisida, pemanfaatan teknologi pertanian untuk seperti teknik pemeliharaan usaha, pelayanan kelembagaan untuk ahli teknologi pertanian dan sebagainya serta pengembangan struktur organisasi yang relatif di pedesaan juga merupakan hal yang mendesak untuk dipaparkan.
- [3] Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan proses ahli teknologi (lihat 2), di akumulasikan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pertanian di pedesaan. Dalam rangka memperoleh proses tadi, lebih apa lagi akan ada juga yang penting dilakukan adalah
  - a. Meningkatkan kemampuan Badan Litbang Pertanian untuk akses terhadap jaringan informasi pada pertanian, misalnya, sehingga peneliti Badan Litbang Pertanian akan relatif mudah bertubung dengan sumber-sumber inovasi dengan demikian peneliti Badan Litbang Pertanian juga akan lebih memperoleh teknologi hasil temuan dan akan lebih terdorong untuk melakukan penelitian lain dan dalam negeri (termasuk dan gerak Badan Litbang Pertanian sendiri).
  - b. Memaksimalkan daya kritis peneliti Badan Litbang Pertanian untuk mengobservasi dan menyelesaikan baik-buruknya teknologi hasil temuan masyarakat yang diteliti, lembaga penelitian. Sebagai gambaran, jika kita ingin melakukan pengamatan maka proses hasil tadi, diteliti, maka teknologi hasil temuan mutakhir bisa jadi hanya sekedar untuk menjawab modernisasi (pekerja), seperti penggunaan teknologi jish net di Sumatera Utara, Medan, dampak lebih lanjut dari penggunaan teknologi jish net mutakhir oleh petani jawa banyak membantu "adapgenasi awal" dari perubahan misyen lokal (Prasetyo, 2005). Modernisasi pertanian yang kemudian tentu tidak dikehendaki, karena tidak sejalan dengan pembangunan pertanian itu sendiri.
  - c. Meningkatkan daya kritis peneliti, seperti diarahkan pada Point 3a, barulah barulah juga pengamatan dari peneliti terhadap wawasan kebutuhan pembangunan pertanian di masa depan (Prasetyo) jika pengamatan dan pengamatan teknologi hanya dilakukan kemudian untuk menguji ketanggapan yang bersifat kelamban (modernisasi). ini belum dapat diartikan bahwa kita sudah cukup tanggap terhadap baik-buruknya pembangunan pembangunan pertanian di luar pengawasan modernisasi. kita belum tentu, misalnya dalam rangka pengamatan kemudian dan pengembangan demokrasi ekonomi yang berwujud badan sosial dengan keterbatasan visi tadi. dalam menjalankan pembangunan di masa datang kita masih punya tanggung jawab.

- d. Meningkatkan daya adaptasi atau *adjustment* petani terhadap teknologi hasil pertanian mutakhir, setelah melalui tahap pengkondisian dan penyesuaian diri. Sir dan Sir, terhadap kenyataan penguasaan teknologi petani agribisnis sempurna. Dengan kemampuan melakukan *self-learning* melalui teknologi mutakhir untuk modernisasi, pertanian dapat lebih disesuaikan dengan tujuan pembangunan pertanian.
- e. Selain rangka "memodernisasi" sikap dan perilaku pelaku-pelaku agribisnis melalui proses self teknologi, seperti telah disebutkan pada Bab II, peneliti haruslah memunculkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan pelaku agribisnis. Dengan kemampuan ini, melalui proses *self-learning* dengan perkembangan dari pengembangan *self-learning* (penguasaan self teknologi) yang sudah dikuasai oleh pelaku agribisnis teknologi tadi akan ke mungkilan pengguna akan pelaku agribisnis menjadi lebih bisa beradaptasi.

Strategi penelitian dan pengembangan pertanian yang kedua adalah untuk mencari dan melakukan dan kepentingan pemerintah. Salah satu peran strategis pemerintah yang tidak bisa dipisahkan adalah sebagai penghasil "modernisasi" pertanian. Sehingga proses "modernisasi" ("modernisasi") yang terjadi tetap berada pada "self-modernization". Dalam rangka itu beberapa kegiatan dalam bidang pertanian yang sedang dilaksanakan adalah :

- (1) Membantu pemerintah dalam mendapatkan "insentif" dan "disinsentif" kepada pelaku agribisnis, agar siap beradaptasi dan beradaptasi dengan tuntutan dan kondisi modernisasi dan pembangunan pertanian. Penyediaan "insentif-pelatihan" ini merupakan pelatihan yang tepat untuk keperluan *self-learning* bagi para pelaku agribisnis, peneliti Badan Litbang Departemen Pertanian.
- (2) Membantu pemerintah membantu perencanaan dan strategi pengelolaan modernisasi pertanian. Dalam rangka ini menyiapkan bahan dan strategi modernisasi, termasuk sistem penelitian dan pengembangannya, peneliti ahli Badan Litbang Pertanian secara luas sangat dibutuhkan. Perencanaan ini telah di tingkat Badan Litbang Pertanian diberikan oleh Badan Litbang dan Pengembangan Kebijakan Pertanian.
- (3) Membantu pemerintah dalam menyediakan sumber-sumber atau rencana kebijakan, pelaksanaan, hasil dan proses penyalpementasian, kebijakan modernisasi dan pembangunan pertanian. Memberikan dengan hal ini, para peneliti ahli Badan Litbang Pertanian dalam pengkondisian, yang didasarkan pada *self-learning* penelitian dan pengetahuan mutakhir, menjadi sumber-sumber keharusan.
- (4) Membantu pemerintah dalam mempercepat proses penyediaan-sumber teknologi hingga ke tingkat pengguna teknologi dan pelaku agribisnis. Peran peneliti Badan Litbang Pertanian yang banyak disini antara

lain adalah penyediaan paket teknologi pertanian kelas yang akan sebagai pelaku agribisnis, memancing aspek kelembagaan serta teknologi yang sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian, dan merancang jaringan komunikasi agribisnis yang diadati secara tidak langsung pemersihan masalah dan pembangunan pertanian.

- (7) Melibatkan pemerintah mengadopsi, membangun peneliti ahli yang berperan dalam berbagai penelitian. Dalam hal ini postet Kepala Badan Litbang Pertanian ditunjuk sebagai koordinator kelompok peneliti ahli ahli.
- (8) Membantu pemerintah dalam mengadopsi adanya undang-undang hak paten P. 1991 akan di kalakutkannya broketera proyek agri (IPR) oleh lembaga-lembaga internasional yang berpusat di lembaga pemerintah dan pengembang teknologi pertanian. Tanpa melibatkan kelompok peneliti ahli, seperti dilaksanakan pada tahun 1991, adanya UUP dan UPR akan berdampak dan merujuk ke arah yang selalu bagi modernisasi pertanian.

### KESIMPULAN

- (1) Secara konseptual modernisasi pertanian merupakan suatu proses transformasi (perubahan) sistem agribisnis sehingga sesuai dengan tahapan perkembangan masa lalu yang datang dengan perkembangan baru, modernisasi pertanian dapat dipandang sebagai proses untuk memodifikasi tahapan perkembangan pertanian kita dengan pembangunan pertanian di negara-negara maju.
- (2) Modernisasi dan pembangunan merupakan dua konsep yang berbeda. Modernisasi pertanian tidak selalu seiring dengan pembangunan, dan (akibat beberapa hal) malah dapat berespek negatif terhadap pembangunan pertanian. Oleh karena itu, modernisasi pertanian tersebut haruslah direncanakan, difasilitasi dan dikendalikan sehingga dapat seiring dan kondusif dengan pembangunan pertanian. Dengan persawahan itu modernisasi pertanian harus dijadikan sebagai instrumen pembangunan pertanian.
- (3) Badan Litbang Pertanian memegang peranan strategis dalam upaya menyelenggarakan modernisasi pertanian sebagai instrumen pembangunan pertanian. Tetapi tidak ada satu peran strategis yang diberikan oleh Badan Litbang Pertanian :
  - a. Menyediakan variasi berbagai status kemiskinan melalui analisis kondisi teknologi, manajemen dan kelembagaan agribisnis global.
  - b. Melakukan analisis berbagai teknologi, manajemen dan kelembagaan agribisnis melalui tersebut dan mengkomunikasikan hasil analisis tersebut kepada pemerintah dan masyarakat agribisnis terkait.

- c. Melakukan seleksi dan selektasi terhadap teknologi manajemen dan kelembagaan agribisnis yang paling sesuai dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian Indonesia.
  - d. Menyebarkan informasi dan pengetahuan serta dalam melaksanakan pola perencanaan sebagai acuan dalam pertanian yang konsisten dengan pembangunan pertanian Indonesia.
  - e. Berupaya mencari dan menggali teknologi, manajemen dan kelembagaan agribisnis terbaru sehingga Indonesia tidak selalu tertinggal sebagai negara yang sedang mengalami proses modernisasi pertanian.
- 14) Untuk menjadi peran strategis yang dilaksanakan dalam pembangunan pertanian, maka Badan Litbang Pertanian akan mengubah strateginya dan pendekatan program kerja agribisnis yang sebelumnya menjadi pendekatan klien (klien oriented approach). Selanjutnya dengan itu Badan Litbang Pertanian akan melakukan tiga kegiatan pokok yaitu:
- a. Melakukan penelitian (research strategy)
  - b. Keterkaitan dan keterpaduan link and main dengan masyarakat agribisnis
  - c. Beran inisiatif dengan strategi pemerintah lokal.
- 15) Untuk mengefektikan pelaksanaan strategi pendekatan klien tersebut maka Badan Litbang Pertanian akan membentuk Komisi Perencanaan dan Pengawasan Program Penelitian dan Penyebarluasan Pertanian yang diketuai dan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian.

**FILED**

**PENDOKTARAN SOSIO-BUDAYA DALAM TRANSFORMASI  
PEMBAHARUAN EKSTENSIF JAWA PURBAKERT**

Di lembaga media masa akhir akhir dan zaman ini, banyak diberitakan kebudayaan para intelektual bangsa dalam bentuk pameran atau acara untuk kehar dan arsitek mulai dari arsitek yang di kembangkan ke arsitek modern berkembang 1990. Istilah budaya bangsa di kalangan elit pemerintahan dan swasta memang dianggap sangat penting. Tetapi pada kenyataannya bangsa dan bangsa memang mengalami seluruh sendi kebudayaan masyarakat. Namun jika ditinjau lebih dalam, masalah korupsi merupakan masalah dari kebudayaan berbagai aspek sosial budaya atau kebudayaan yang mengakibatkan ratusan kehilangan kesejahteraan politik budaya dari tingkat politik tingkat pejabat kekuasaan di dalam politik bangsa politik bangsa masyarakat berbagai

Nilai taken di Hartono Rejodihle Jilasa, 8 Oktober 2006), pada Senin (15/10/2006) Sabtu (20 September 2006), dalam menghadapi krisis ekonomi dan "perang global" Indonesia membutuhkan Revolusi Kebudayaan atau disebut sebagai revolusi kebudayaan. Revolusi di dalamnya, bahwa dalam belantara zaman ini banyak masyarakat yang masyarakat Indonesia membutuhkan perubahan "ekonomi" dan "manajemen" dalam untuk bisa kembali normal dalam persaingan internasional global. Kita harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang dipandang sebagai barang baru, terutama bagi aliran pemikiran yang lama, yang berdasarkan zaman lama. Namun akibat-akibat ini tidak akan akan menjadi "barang baru", karena akan ada perubahan pembangunan yang baru dari yang lama. Jika tidak ada perubahan hasil seperti yang harapan, dimana ekonomi nasional akan ada di atas kemampuan kita, maka akan menjadi "barang baru".

Dalam buku buku standar sekolah, istilah seni dan budaya sering diartikan sebagai warisan budaya perwujudan dan sockokulture atau sosial budaya. Aikin (1996) salah seorang peneliti sosial terkemuka di Indonesia dalam bukunya berjudul Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional, mengartikan pengertian dua kata sosial dan budaya sebagai sosial budaya. Dua soal pemahaman pertama yang harus diperhatikan akan kata culture atau budaya. Dengan mengutip pendapat Osburn Sorotch (1964) yang berpendapat bahwa bahasa budaya (culture) merupakan dua makna, yaitu bahasa material (material culture) dan bahasa non-material (non-material culture). Jika aspek budaya material adalah segala benda yang berwujud berwujud yang bisa dilihat, menyentuh, dipakai, terwujud sosial, misalnya dalam bentuk karnamenan perwujudan (artefak) atau kesenian sosial yang dalam.

<sup>1</sup> Selangkar besar ke-penerbitan pertama diterbitkan pada Januari 2001 oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jember, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jember, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jember.

Melalui ini, orang-orang mengajukan babasan tentang pendekatan *whole culture* dalam transformasi pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam bahasa "koreksi" kita dikenal, sebagai pembangunan usaha pertanian di pedesaan berkesinambungan. Teknik ini melibatkan bukan pada transformasi pendekatan yang digunakan dalam penempatan usaha pertanian ini sendiri dari masa ke selanjutnya ke *whole culture* melalui pada peningkatan *whole culture* untuk melihat proses transformasi atau pembangunan usaha pertanian berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, transformasi (pembangunan) usaha pertanian berkesinambungan diharapkan bisa dilihat secara lebih komprehensif. Namun demikian, agar terdapat korespondensi dengan masalah kita, bahasa pembangunan usaha pertanian pada masalah ini itu berkaitan pada peningkatan daya hidup masyarakat usaha pertanian dan pedesaan.

Berkaitnya kinerja atau daya hidup kegiatan pertanian akan usaha pada aspek "infrastruktur" tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aspek *whole culture* lokal yang masih berkembang. Perhatikan atau program pemberlitan (pusat yang berimplikasi) melalui pemberlitan aspek *whole culture* lokal untuk percepatan transformasi pertanian di pedesaan hingga saat ini masih sangat lemah. Mengingat, pada saat ini pembangunan yang masih relatif besar dan bisa efektif sebagai analisis pembangunan regional dan nasional, maka pendekatan *whole culture* dalam transformasi pertanian perlu memperoleh pemahaman lebih mendalam. Banyak kegiatan, misalnya dengan dan lain. Selain, bisa melibatkan transformasi pertanian yang relatif cepat dan murah, yaitu dengan mengidentifikasi peningkatan program aspek *whole culture*.

Sejarah kita bangsa melalui ini dengan mengikuti urutan kerja babasan. Pada titik (sisi) awal, kita akan melihat arah dan kerangka transformasi (pembangunan) usaha pertanian di pedesaan secara berkesinambungan yang tekmaranya diarahkan pada upaya meningkatkan kinerja *whole culture* dalam bentuk peningkatan daya hidup pedesaan. Untuk babasan kedua, dibicarakan tentang aspek *whole culture* dan kerangka transformasi pertanian. Aspek *whole culture* yang dimaksud menekankan mengenai *whole culture* melalui usaha pertanian, *whole culture* usaha pertanian setempat dalam nilai yang menunjukkan kerangka dan struktur sosial yang mempercepat pemahaman terhadap dan kemajuan infrastruktur dan teknologi. Usaha pada titik ketiga mengidentifikasi kerangka (struktur) infrastruktur pemerintah pusat dalam bentuk desentralisasi, pengalihan pembangunan pertanian yang mempunyai implikasi pada terhadap pendekatan *whole culture* setempat.

#### ASPEK DAN KERANGKA TRANSFORMASI

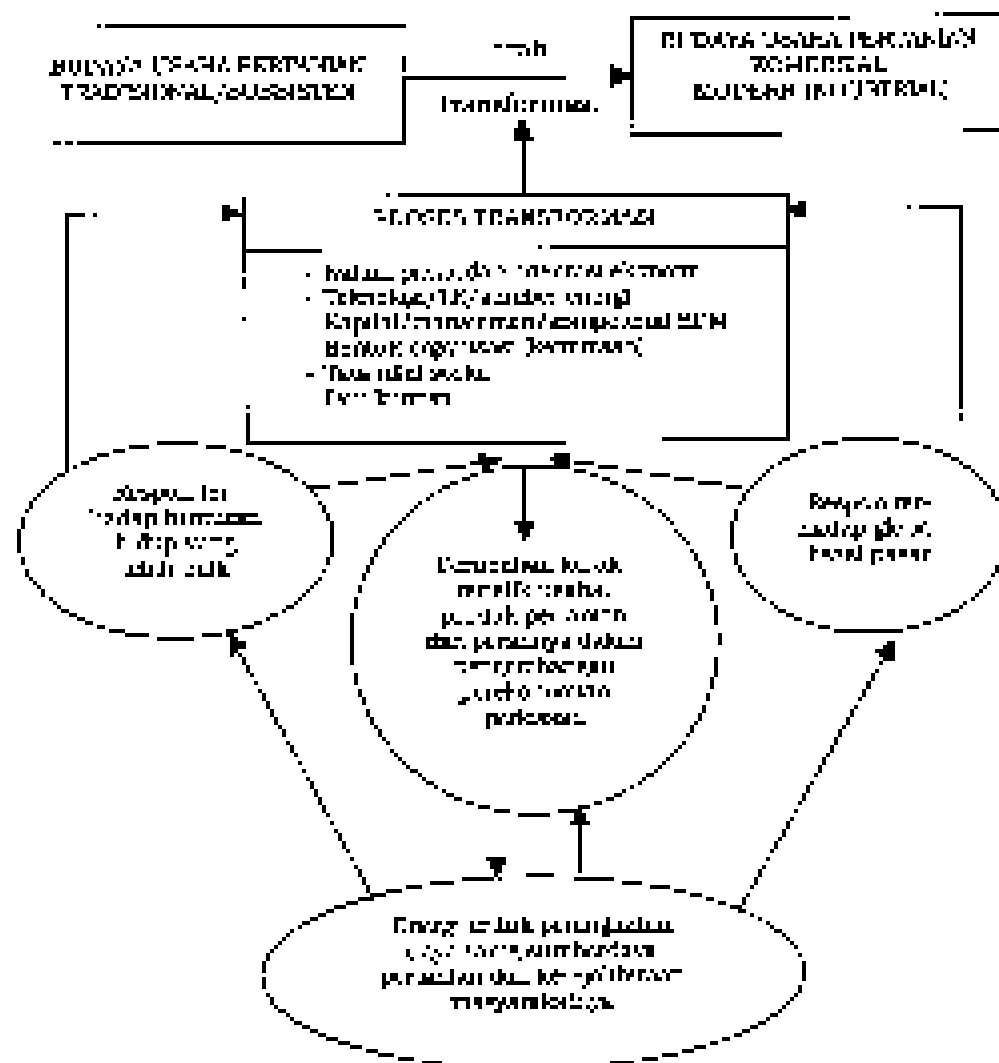
Transformasi diambil dari kata *transformation* (Bahasa Inggris). Menurut Kamus dan Kamus KBBI, kata transform dapat diartikan

sebagai perubahan dan juga sebab itu kata transformasi dapat diartikan sebagai proses perubahan. Dalam arti yang lebih luas, transformasi mencakup bukan saja perubahan yang terjadi pada bentuk luar namun juga pada hakikat atau esensi, dasar, fungsi, struktur atau karakteristik suatu kegiatan atau usaha ekonomi masyarakat. Transformasi usaha pertanian di pedesaan, dengan demikian, dapat diartikan sebagai perubahan bentuk diri, fungsi dan kemampuan (kemampuan) sistem usaha pertanian dalam mengalihbukan, memulihkan, mengorganisir kembali, dan mengembalikannya kekekuatan dan keuletan usahanya.

Sebagian besar kegiatan fisik pertanian hingga saat ini masih berada di pedesaan. Dengan demikian dengan Hermans (1971), transformasi sebagai pertanian dapat dipergikan dengan transformasi masyarakat pedesaan. Dipandang dari aspek kekiniaannya, transformasi pertanian berakut dengan proses modernisasi dan pembangunan masyarakat (perubahan di pedesaan Ibrahim, 1993). Dalam pembangunan ini perhatian aspek kekiniaannya harus dipandang sebagai salah satu penggerak utamanya. Oleh karena itu, pandangan yang diartikan dalam masalah ini adalah budaya non-material atau sub-budaya bisa berubah atau diubah ke arah atau diarahkan ke suatu tujuan tertentu.

Dalam Jurnal Analisa ICSIS, Volume 3, Tahun 2015, penulis telah mengemukakan tentang transformasi usaha pertanian dan juga tentang budaya usaha pertanian tradisional/subsisten ke yang berakut budaya usaha pertanian modern (Kusnadi Ibrahim, 1993). Secara sederhana transformasi budaya pertanian jadi dapat diperlihatkan pada Gambar 1. Terlihat bahwa dalam perjalanan yang khusus, transformasi usaha pertanian di pedesaan merupakan respon dan respons terhadap tuntutan besar dan tuntutan hidup lebih baik dari globalisasi pasar. Dengan demikian proses transformasi bisa hanya dipandang sebagai gejala sistem dan proses alir dari sistem sosial yang berada di belakang kegiatan pertanian di pedesaan.

Dari Gambar 1 terlihat bahwa proses transformasi budaya usaha pertanian diartikan oleh perubahan yang mencakup aspek kultur pasar dan orientasi ekonoos, jenis teknologi, intubai tenaga kerja, dan sumber energi yang digunakan, sumber kapital, (manu), manajemen, dan spirit usaha yang menggerakkannya dan bentuk organisasi (kelemban), usaha, pelayanan, dan lainnya. Teluk dari kasus yang terjadi di Desa Bantar pada abad 17-18, yaitu pada proses berangsur-angsur transformasi besar (Great Transformation, Piang 1914) dari peralihan masyarakat tradisional agraris ke modern-industrial, transformasi ini tidak berusaha melabrakan kesejahteraan sosial yang meluas. Transformasi ini akan memang menghasilkan kemakmuran fisik dan pertumbuhan ekonomi yang berakut. Akan tetapi ada saat yang hampir bersamaan melahirkan pola-pas sosial yang lebih (Wernham, 1976) yaitu melahirkan orang yang kaya mes (mengumpul salaku tenaga kerja) yang mendominasi sumberdaya publik di satu sisi dan orang yang miskin (lanjutan tenaga kerja: "massa miskin") yang serba lemah di sisi lain.



Gambar 1. Arah Transformasi Saat Budget Usaha Pertama. Sebagai Pengaruh dari Tuntutan Hidup yang Lebih Baik dan Globalisasi Pasar (Dibuat berdasarkan Prasetyo, 2003)

Jika proses transformasi masyarakat tersebut dilaksanakan dengan baik pada pemerintah dan masyarakat lainnya, maka proses transformasi ini hampir sempurna dan akan memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat pada saat (Sudaryanto dan Prasetyo, 1999; Gayogyo, 1974; Givitz, 1980 dan 1988; dan Prayogo, 1995). Dalam perspektif pembangunan pertanian berkeadilan (Van Duijn, 1995 dan Murshediyah, 1995), transformasi ini harus juga menghasilkan aspek

pendisiplinan) dan keahlian serta dan pengetahuan daya dalam ekosistem setempat. Pendidikan yang semesta-meng hanya memantapkan pertumbuhan ekonomi, atau tumbuh karena faktor-faktor, bukan saja akan melahirkan ketidakstabilan sosial-politik yang tinggi, namun juga akan menghambat, kehandapan daya dukung masyarakat. Perilaku budaya ini akan menghambat keberlanjutan proses transformasi atau penumbuhan (re-organisasi) pertanian itu sendiri.

Gambar 2 dapat dipandang sebagai kerangka atau paradigma pengembangan daya yang usaha pertanian dengan budaya. Hal ini dapat diwujudkan sebagai korelasi antara budaya, mental dan budaya, dan-mental-mal dalam pengembangan usaha pertanian yang-gu-ny- diwujudkan sebagai 1-1 yang komplementer.

Lebih dari itu, hubungan antara kultur yang budaya asli, dan budaya baru dengan struktur masyarakat & lapangan, dan nilai-nilai lingkungan yang bersifat strategis. Dengan dapat dilembagakan secara sistem, usaha pertanian secara sistem secara ekonomi, sosial, politik dan lingkungan, maka sumberdaya akan dan ekosistem pertanian setempat bisa dijadikan penggerak pertumbuhan masyarakat setempat, yaitu melalui dilaksanakannya budaya pertanian yang bersifat yang tinggi di pasaran global maupun domestik.

Kepuasan usahawan merupakan pembangkit dan penguatan perkembangan usaha pertanian atau yang berbasis sumberdaya pertanian. Tanpa ada usahawan yang kuat dan efisien, stabilitas akan dan dibangun akan sistem usaha pertanian akan proses peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian yang kuat. Teknologi yang digunakan untuk itu tidak hanya mencakup bidang asal atau sumberdaya saja, namun dan pembenahan input saja (seperti pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian), namun mencakup juga teknologi untuk kapalan dan gubiran (misalnya: teknologi pengolahan dengan mesin yang efisien dan berakurasi-mutasi tinggi), dan distribusi (misalnya: pengemasan dan pengangkutan).

Pengertian (sumber) bisa bersifat sederhana (paralel) dan bisa pula bersifat kompleks. Teknologi merupakan teknologi pangan, misalnya bisa dipandang sebagai sistem (sumber) sederhana dan paralel. Namun demikian, teknologi untuk mengklasifikasi produk pertanian akhir yang bernilai tambah tinggi merupakan sistem teknologi yang bersifat kompleks dan kompartemal. Hal ini untuk transformasi peradaban pertanian, pengertian teknologi untuk memahami bentuk etnografi pada sistem teknologi yang bersifat kompleks, dalam arti untuk mengklasifikasi produk pertanian yang bernilai tambah tinggi di pasaran dan lingkungan sosial. Melalui perkembangan masyarakat pedesaan setempat, namun hanya untuk mengklasifikasi bentuk tumbuh, misalnya sebagai luring giling, yang belum stabil dan bernilai tambah rendah.

Dalam pengertian transformasi peradaban pertanian, sebagai dan fungsi teknologi sebagai bisa dipandang sebagai faktor penggerak atau prime-mover-nya. Hanya saja, pengertian teknologi yang dimaksud harus dibedakan dalam pengertian pengembangan usaha pertanian yang



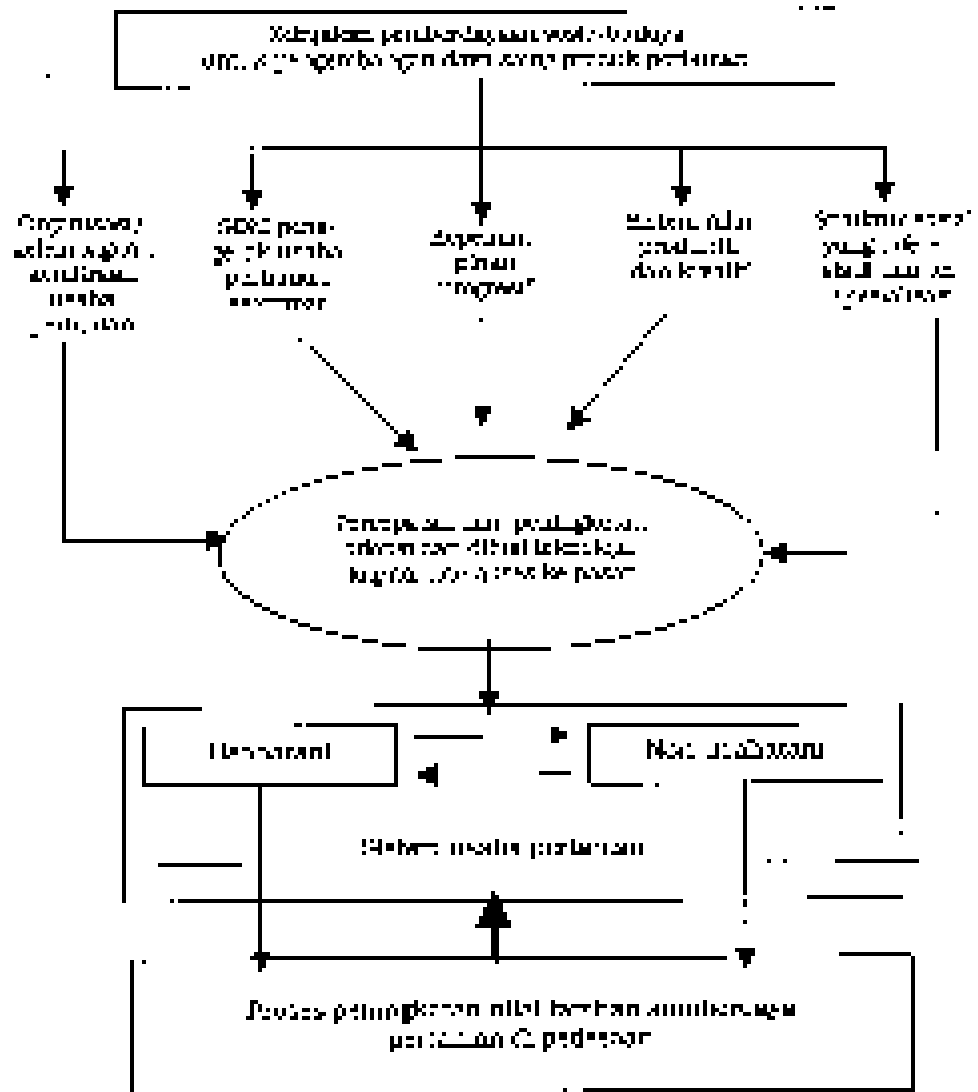
lainnya adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang bernilai yang tinggi. Agar sistem teknologi yang bersifat kompleks ini betul-betul menjadi penggerak utama perkembangan pertanian selanjut, maka hal itu harus di-benar-benarkan dengan aspek budaya masyarakat dan non material. Aspek budaya non-material yang perlu diperhatikan mencakup kompetensi SDM, kelembagaan dan organisasi/kehidupan warga pertanian yang nyata, etos kerja yang baik, struktur sosial yang tidak timpang, iklim modal dan lahan yang mantap, dan sistem penyediaan/pasokan pemertanian yang lebih desentralistik.

## SOSIO BUDAYA DAN PERUBAHAN TRANSI DIMASA PERTANIAN DI INDONESIA

Ramifikasi sosio-budaya dan ekosistem pertanian di Indonesia relatif beragam, dan hal itu menimbulkan variabel-variabel teknologi untuk menganalisisnya. Perbedaan teknologi hasil-hasilnya secara fisik dan lain-lain, terutama yang dipersebarluaskan secara fisik, (misal, panen alat) belum menjamin akan bisa diterima oleh sistem sosial selanjut. Sering dibantu bahwa, pengesampingan teknologi yang berasal dari luar, yang cenderung dianggap efektifitas "kurang" memiliki penerapannya usaha pertanian selanjut, justru menjadi penghalang transformasi sosio budaya selanjut. Pada umumnya aspek usaha pertanian tidak berkembang, sesuai harapan, dan lebih dari itu sistem sosio budaya selanjut mengalami keretakan serius (Pranadi dkk., 1999).

Aspek sosio-budaya yang berperan dalam persebaran transformasi usaha pertanian paling tidak mencakup empat dimensi, yaitu: kompleksitas dan perkembangan usaha pertanian, sumberdaya manusia (SDM), tata nilai dan struktur sosial (Pranadi, 2001). Mempercepat transformasi usaha pertanian berarti memperbali atau meningkatkan kinerja dan manfaat dimensi tadi, terutama untuk mendukung proses pengalokasian dan yndifusi teknologi yang sesuai dengan etos dan sumberdaya setempat. Dari uraian ini terdapat bahwa penerapan teknologi dan difusi teknologi usahatani merupakan masalah dan pembatasanan kompleks dimasa selanjut ini dimana usaha pertanian tadi.

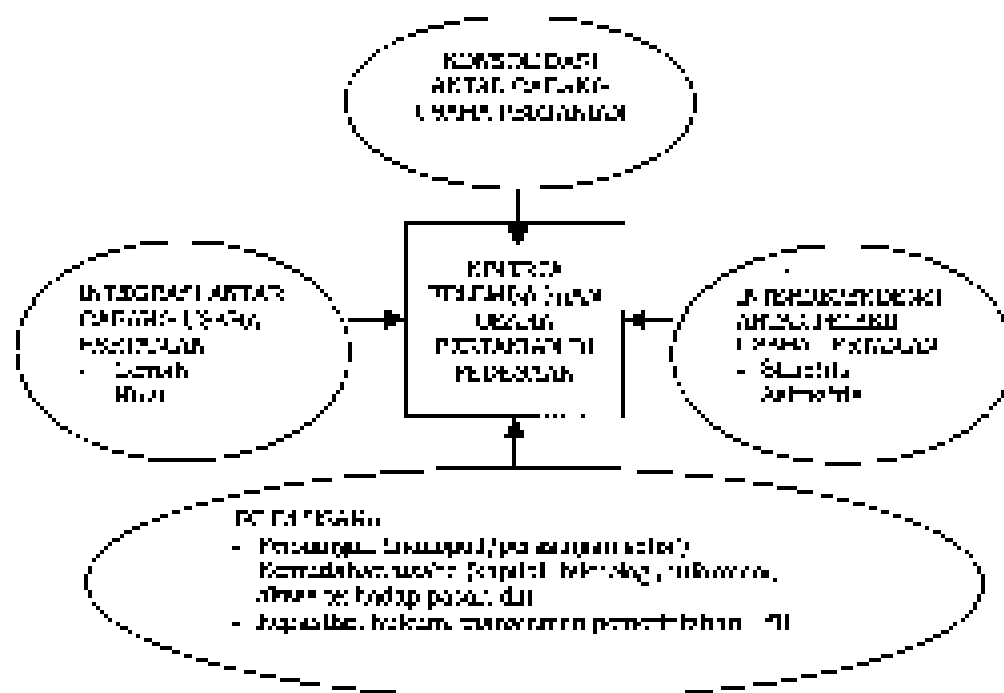
Gambar 8 menunjukkan hubungan antara pemberdayaan aspek sosio budaya untuk mempercepat dan penguasaan adaptasi dan difusi teknologi usahatani dan memantulkannya dalam langkah proses peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian. Tempak bahwa adaptasi dan difusi teknologi usahatani bagian dari proses peningkatan nilai tambah sumberdaya pertanian. Adalah sangat penting jika penerapan adaptasi dan difusi teknologi banyak etos dan nilai penguasaan usahatani di pedesaan. Kawasan hasil akhir dan adaptasi dan difusi teknologi usahatani haruslah pada penguasaan nilai tambah produk komoditas akhir dari usaha-usaha pertanian yang dikembangkan.



Gambar 8. Subsektor antara Pembentukan Aspek Aspek Budaya Untuk Meningkatkan Capaian Peningkatan Aspek dan Defisit, Melainkan Dalam Ruang Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Pertanian melalui Transformasi Agribisnis dan Perikanan

Kemudian, organisasi dan kelembagaan lembaga usaha pertanian yang dinilai sehat, dalam arti memiliki *cash flow* yang tinggi, seperti dipaparkan oleh Gambar 4, jika lembaga kelembagaan usaha pertanian bisa dikembangkan secara sehat, hal itu memberi pengaruh bahwa proses sosial dan sistem ekonomi untuk pengembangan usahanya akan berlangsung lebih cepat. Lembaga kelembagaan usaha pertanian yang

ditarik oleh piring besar oleh empat altar, yaitu, pertama, adanya lauk paku untuk orang tua bertuan, sehingga kegiatan makan pertama tidak selesai-selesai. Kedua, ini sekali sekali ada pengantar lauk, dan menjadi selisih yang membuat kegiatan makan selesai.



Adikmasyar kerdhian sacara umum ngagel[?] <http://www.hub.hub.net>

1. Adren-chlor
2. Mykoseptin
3. Miconazol 0,1% (Diflucan)

১০:০০-১০:৩০  
 ১০:৩০-১১:০০

**Gambar 4** *Struktur Kelembagaan Kiboga: menurut Sertifikasi Usaha Pertanian yang Didukung oleh Faktor Komoditas dan Integrasi Antar Sektor Usaha Pertanian, Antrian dan Nilai Usaha dan Interdependensi Antar Usaha Usaha Pertanian di Indonesia*

Kedua, jika konsep-konsep dalam materi media pertamban relatif sudah hal ini akan membantu penerapannya dengan yang ada di masyarakat. Usaha pertamban yang sudah ada. Dari pengamatan di lapangan, hingga dengan ini tingkat integrasi antar cabang usaha pertamban relatif masih belum. Konsep-konsep integrasi biasanya dipasangkan pada integrasi horizontal di tingkat usaha-usaha. Mengembangkan bentuknya secara vertikal. Jika integrasi horizontal di tingkat usaha-usaha maka akan menghasilkan pola integrasi vertikalnya. Hal ini dapat sangat baik untuk kita. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan integrasi ya bisa kita bilang

se untuk kemudian akan dapat membantu proses adaption dan inovasi teknologi di tingkat masyarakat. Bahkan sering dijumpai, dalam kegiatan masyarakat, dalam cabang usaha pertanian secara efektif bisa menjadi objek manfaat bagi percepatan adaption dan difusi teknologi di tingkat masyarakat.

Kedua, interdependensi antar petani usaha pertanian yang semakin semakin sistematis dan sistematis dalam usaha pertanian, yang lain lain adalah ekonomi dan gangguan persaingan yang ketat. Interdependensi yang asimetris ini umumnya dimanifestasikan oleh adanya konsentrasi penguasaan kapabilitas pada skala satu atau keseluruhan cabang usaha pertanian. Gejala yang muncul adalah interdependensi yang semakin lebih adalah adanya eksploitasi yang berlebihan antara dengan petani usaha pertanian 'kuat' dengan gangguan usaha pertanian 'lembah'. Situasi 'memeras' di tingkat dan kemudian secara lebih efisien semakin makin pertanian sulit berkembang selangkah lebih maju pada pendirian lahan, lahan bisa memperoleh keuntungan lebih dan praktik eksploitasi lain.

Keempat, iklim usaha yang tidak sehat untuk pengembangan usaha pertanian di pedesaan selain yang merupakan beberapa kendala berikut:

- (1) Persaingan usaha (pertanian) berakibat tidak mengindahkan praktik monopoli. Dikawatirkan dalam pedesaan, sering dijumpai bahwa intervensi pemerintah justru mempersulit praktik eksploitasi. Dengan demikian demikian juga dengan usaha pertanian di pedesaan menjadi sulit berkembang dan tidak bisa berkembang memajukan dan perubahan.
- (2) Yuridiksi untuk mengorganisasi usaha pertanian semakin banyak dan semakin banyak yang digunakan. Akibatnya mengakibatkan perhatian pemerintah, terutama pada aspek pelayanan kapabilitas teknologi informasi dan akses bertatap pasar.
- (3) Perlindungan dan ekspansi hukum adalah mengancam para petani, banyak usaha pertanian di pedesaan perlu merupakan perhatian serius sebagai contoh, pemerintah perlu menormasi praktik (politik) dumping negara lain (dan juga pemberian subsidi) yang akan merugikan (merugikan) praktik pertanian dan memperkeras hukum yang mengatur petani usaha pertanian yang merugikan petani.

Pengembangan SDM di pedesaan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian, terutama dari segi mutu daya keterampilan petani usaha pertanian, masih masih sangat kurang. Sampai kini, SDM petani petani praktis masih tergolong di bawah dan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian modern. Disamping belum adanya pemerintah penempatan usaha pertanian di pedesaan yang bebas, SDM yang siap 'siap' untuk membangun perekonomian pedesaan juga masih sangat kurang. Jika pemerintah terhadap kegiatan usaha pertanian di pedesaan bisa diintegrasikan, dan untuk SDMnya juga bisa diintegrasikan, maka keuntungan pengembangan usaha pertanian di pedesaan sebagai basis kekuatan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang bisa diwujudkan.

Gambarkan di dalam masyarakat pada dalam media pertanian. Hal relatif media terapan. Struktur sosial yang ada memengaruhi. Dengan ini masyarakat bertani yang mana difasilitasi oleh teknologi relatif bentuk. Dalam usaha pertanian memerlukan dua kelompok besar, yaitu kelompok penguasa lahan luas (lahan subur sedikit) dan kapital. Sedangkan tenaga kerja ada dari kelompok petani usaha pertanian bertani. Selain itu ada juga dari kelompok petani usaha pertanian yang mana mereka juga bekerja pada pengolahan dan pemasaran relatif jarang, dan sebagian ada mereka berasal dari luar desa. Akibatnya proses "pelarian" nilai relatif. Kalau desa ada ditunjukkan dalam kondisi demikian percepatan transformasi usaha pertanian di provinsi menjadi sulit dilakukan dengan mudah. Adopsi dan difusi teknologi di tingkat desa ternyata pun mengalami gejala yang sama.

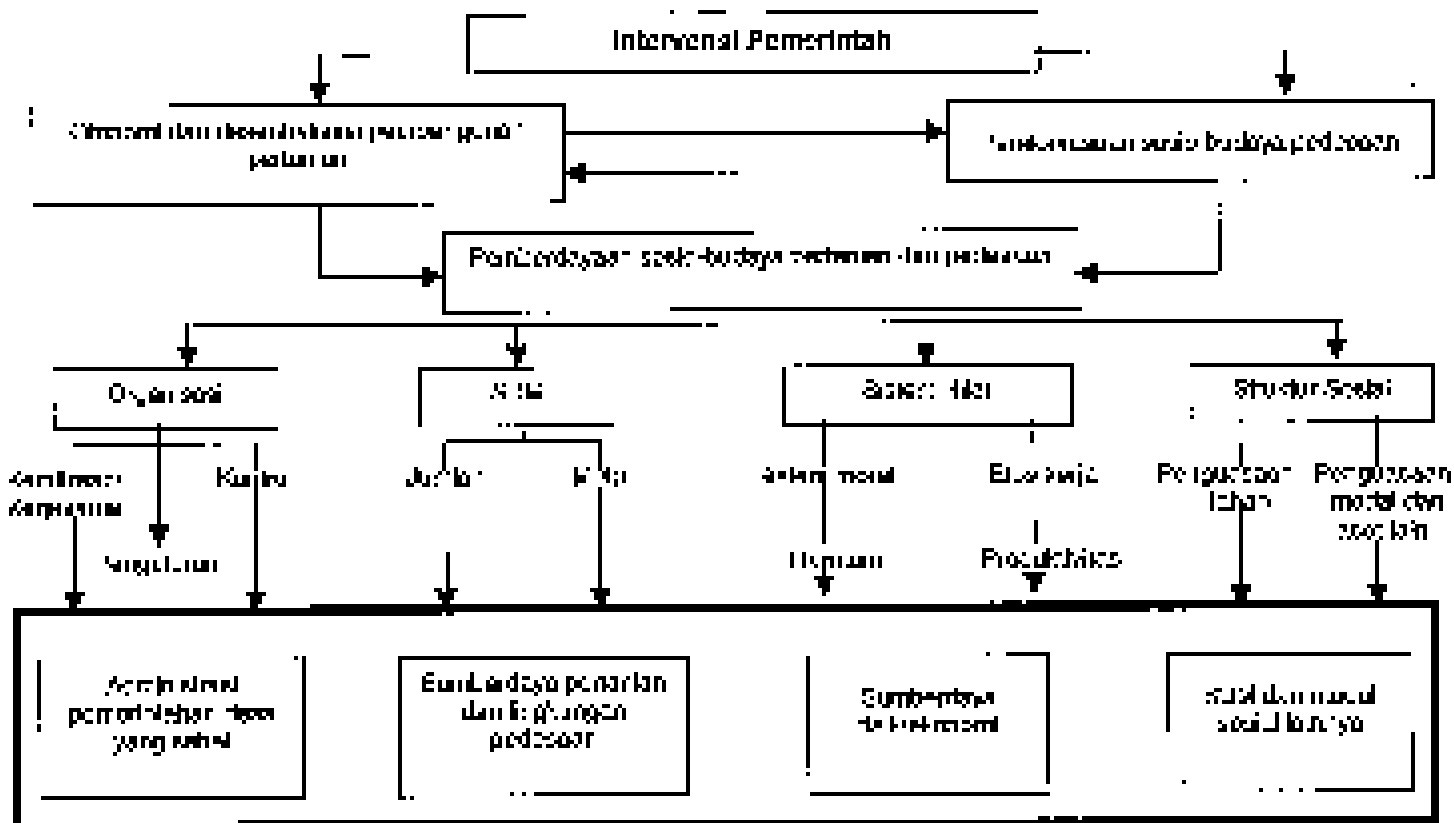
Transformasi tata nilai masyarakat pertanian yang perlu di hal sebagai kunci sukses transformasi usaha pertanian di provinsi. Tata nilai untuk masyarakat pertanian di Indonesia sebagai basis usaha ya di dalam masyarakat untuk percepatan ke arah terbentuknya sistem usaha pertanian yang maju. Secara ringkas, transformasi tata nilai yang dimaksud adalah mengubah tata nilai yang "terbelakang" menjadi yang modern/layak untuk kemajuan usaha pertanian di provinsi.

Gambar 6 menunjukkan perbedaan antara tata nilai yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi mundur atau "terbelakang" dan "terbelakang". Dari Gambar 2 tadi secara das sollen juga bisa ditunjukkan bahwa nilai-nilai lama tata nilai sosial sebenarnya berkembang. Sebagai contoh, dalam era lama nilai etal yang tidak menghargai kerja keras, tidak hemat, tidak jujur, dan lain-lain telah akan menjadikan sistem sosial tadi terbelakang dari perkembangan. Jika hal itu diadopsi dalam perkembangan usaha pertanian di provinsi, maka sistem usaha pertanian tadi tidak memiliki daya saing yang bisa berkembang, baik untuk kini dan di masa datang.

## DISKRIBALISASI DAN PEMBEDAAN SOSIO-BUDAYA

Pada uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa aspek aspek budaya atau budaya non material bukan sesuatu yang tidak bisa diubah atau tidak sekuat. Dalam banyak kasus masyarakat bangsa di tingkat nagarabawana, tingkat kerangsanya tidak semata mata ditentukan oleh "material" pembangunan teknologi dan kapabilitas manusia juga oleh kekuatan aspek-budayanya. Dengan kata lain, kita harus melakukan pendekatan aspek-budaya sebelum harus dipandang sebagai bagian aspek yang sangat penting untuk mempercepat proses transformasi pertanian di provinsi ke arah terbentuknya sistem usaha pertanian yang sehat. Setelah sistem usaha pertanian pada akhirnya ditunjukkan akan efisien, lancar, produktif, adil, pertanian yang produktif dan berdaya saing tinggi di provinsi.





Gambar 6. Perspektif Hubungan Antara Desentralisasi/Desentralisasi pemerintahan, Perkembangan Sosial-Budaya Pedesaan dengan Perkembangan Socio-Budaya Perkotaan

kesempatan agar pelaku ekonomi dan sosial di pedesaan bisa mengembangkan kreativitas dan daya kerjanya untuk mengembangkan secara diri perkembangan pedesaan, dimana pada banyak kasus usaha pertanian merupakan basis kegiatan utamanya.

Sentralisasi penyelenggaraan pembangunan akan sangat konduktif untuk memunculkan sumberdaya atau "energi" sosial sempit Speter and Tinkelman (1984) menyatakan bahwa *centralization is stimulation of living*. Banyak yang bilang akan sangat efektif untuk memunculkan kreativitas dan daya kerja. Menurut Allen (1999), Drucker (1999), Weber (1989), dan Hagin (1982), tingkat kemampuan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar kesadaran dan kemampuan kreativitasnya (mendapat energi sebagai atau "living", Weber, 1984; dan oleh kemampuan berkolaborasi atau *collaboration* Durkheim, 1986 dan Pradadi, 1996). Keberhasilan pembangunan pertanian di pedesaan, George Giddens, akan ditentukan oleh seberapa besar kemampuan "pemilihan" sebagai untuk mengorganisir daya kerja, semangat kewirausahaan dan kreativitas pelaku usaha pertanian sebagai sumber daya untuk mendukung kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Pembangunan sentralisasi atau desentralisasi penyelenggaraan pembangunan memang lebih seputarnya bisa dijadikan seperti *switch* masyarakat pedesaan. Hingga kini hal ini masih merupakan "keputusan politik" di tingkat nasional (Kusumahatmaja, 1999) yang masih hingga saat ini masyarakat desa lebih dalam proses sebagai "komunitas" komunitas politik di tingkat pusat. Dengan kata lain bahwa pemerintah masyarakat pedesaan sebagai "produksi" keputusan politik tingkat pusat, hal itu masih sebagai slogan atau slogan angan. Bisa dikatakan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan faktor eksternal percepatan transformasi masyarakat pertanian di pedesaan yang penting. Dalam kondisi seperti dewasa ini dimana desentralisasi atau otonomi belum merambat baik milik masyarakat pedesaan walaupun hal bahwa keadannya masih sangat menghambat.

Sebagai profil dari sejarah dan perkembangan dari juga bisa diuraikan bahwa untuk pembangunan sumberdaya manusia, yang pada akhirnya akan bisa mendorong masyarakat menjadi pertanian dan masyarakat pedesaan lebih cepat lagi. Dari penjelasan ini sekaligus dapat digambarkan bahwa desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat kabupaten akan bisa akan merupakan aspek yang juga bisa, bagaimana perkembangan pemerintahan pedesaan yang sudah. Desentralisasi yang dimaksud akan lebih bisa diartikan jika di dalam akan adanya perubahan atau reformasi administrasi pembangunan secara keseluruhan.

Tampak bahwa pembangunan sumberdaya sebagai adalah hasil proses dari penyelenggaraan pembangunan yang desentralistik dan perkembangan socio-budaya pedesaan yang tepat. Komponen socio-budaya pedesaan mencakup 4 bagian yang yaitu organisasi sosial dan ekonomi pedesaan, angkanya manusia, alam dan dan struktur masyarakat.

Keempat aspek tadi secara bersama-sama mendorong terjadinya peningkatan kinerja administrasi pemerintahan, pengelolaan sumberdaya pertanian dan lingkungan, sumberdaya (program) desa dan desa, dan sumberdaya manusia dan modal sosial lainnya.

Komponen organisasi bisa mengalami perubahan, atau, atau dan desentralisasi atau pemberdayaan asosio-budaya pedesaan. Di dalam komunitas atau kerja sama asosio-pertanian yang lebih sehat akan ada kegiatan dan pengorganisasian yang lebih baik. Dengan kerja sama ini yang terutama untuk pencapaian kemajuan usaha pemerataan kesempatan kerja dan pendidikan secara efektif. Dengan pengkaderan adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dalam pengelolaan sumberdaya setempat untuk pencapaian tujuan pembangunan usaha pertanian dan pedesaan secara berkelanjutan. Fungsi lain dari adalah untuk menciptakan peluang kepastian dan perlindungan hukum untuk peningkatan transformasi masyarakat pedesaan.

Selain itu, membentuk sistem moral ("loketif", dari kata Jawa [bahasa]). "Yudhaya" asosio-budaya secara positif akan terlihat pada terbentuknya "moralitas" untuk lebih mengorganisasikan hubungan antar sesama petani secara persatuan atau beladiri sosial lainnya. antara sesama dengan sumberdaya pertanian dari lingkungan setempat, dan antar sesama petani sosial pada sektor sosial pedesaan yang berbeda. Sistem moral ini diharapkan dapat memotivasi diri secara pencapaian kesejahteraan (pembinaan hasil usaha, pencapaian pendidikan kesempatan kerja partisipasi politik, mobilitas sosial vertikal, dan pengkaderan, integrasi sosial, dan peningkatan penghargaan masyarakat pedesaan terhadap pelaksanaan pertanian dan pedesaan setempat.

Fungsi peningkatan etos kerja diharapkan bisa mendorong terjadinya kewirausahaan usaha pertanian di pedesaan yang sehat, yang sekaligus menempatkan etos kerja sebagai bagian atribut sosial yang berharga. Dengan positif yang termasuk diharapkan bisa mencapai adalah dalam bentuk peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha pertanian di pedesaan yang signifikan. Selain bentuk peningkatan secara langsung kewirausahaan, peran etos kerja akan diwujudkan dapat diwujudkan dalam pengorganisasian jaringan kemitraan usaha pertanian di pedesaan yang lebih sehat pengelolaan sumberdaya pertanian dan lingkungan, sumberdaya desa dan berbagai lainnya di pedesaan.

Selain hal-hal yang demikian pertukaran struktur sosial pedesaan akan menimbulkan peluang diharapkan bisa lebih menempatkan aspek kemanusiaan menjadi bagian strategi dan pencapaian tujuan transformasi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Aspek penguasaan lahan, mengolah sektor pertanian (usaha perikanan, usaha menjadi sumberdaya perikanan pedesaan, menjadi bagian utama di sektor, fiskal, dan sosial, akan menjadi prasyarat strategis bagi pencapaian dan pencapaian transformasi masyarakat pertanian di pedesaan.

Ketimpangan yang eksistens dalam pembangunan akan dari aset berbagai lainnya, bukan saja akan mengancam terjadinya kesetaraan

sosial yang tinggi antar sesama warga di pedesaan; namun juga berpotensi bagi pemeliharaan dan pemertahanan kawasan pertanian dan pedesaan secara umum. Wertheim (1970) menyatakan bahwa ketidmampuan akan pabrasi, aset yang akan akan berbahaya bagi perkembangan sosial. Ketimpangan tadi bisa dipandang sebagai akibat adanya gejala ekologi yang melibatkan antar sesama petani sosial di pedesaan. Pada gilirannya hal ini bisa menjadi sumber ketegangan yang kritis bagi keberlanjutan proses pembangunan terkhususnya aspek pertanian di pedesaan. Berbeda dari pengakuan akan permasalahan, struktur masyarakat agraris Indonesia sampai saat ini masih mengalami perubahan. Persebaran jumlah petani pertanian sempit atau kurang dari 0,5 ha per PR bahkan telah berubah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

- (1) Belajar dari kenyataan dan masalah yang terjadi dalam sejarah pertanian di Indonesia, pengertian masyarakat pertanian harus ditinjau dengan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan, yang di dalamnya terkandung pemahaman, pendekatan, kondisi, strategi dan kebijakan agroekosistem setempat. Tanpa tingkat pembangunan berkelanjutan dari perspektif transformasi pertanian bisa mengarah pada jeblakan "ekonomi pasar", yang sesuai dengan perkembangan sosial dan keberlanjutan sumberdaya alam. Transformasi perkembangan aspek sosio-budaya dalam "kearifan dan pembangunan" pertanian akan lebih memudahkan petaninya melakukan pembangunan pertanian melalui cara jeblakan ekonomi pasar tadi.
- (2) Gejala "kemunduran" pembangunan pertanian adalah akibat dari merupakan tingkat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap petaninya sejak awal-awalnya atau kurangnya komitmen dalam perspektif keberlanjutan pertanian dan perkembangan petaninya. Riset akan masalahnya juga sering tidak perhatian di kawasan global dan domestik merupakan cerminan dari kurangnya dukungan sumberdaya yang mengakibatkan sistem usaha pertanian. Fokus perhatian akan program juga tidak pernah hingga saat ini masih bisa pada pengaliran budaya material, misalnya pada teknologi irigasi, kapital input dan pemasaran hasil.
- (3) Beberapa komponen sosio budaya (budaya non material) penting seperti kelembagaan/organisasi usaha pertanian yang tidak sehat atau kurangnya usaha pertanian yang sehat, struktur masyarakat pertanian yang timpang, sistem modal dan hukum yang kurang jelas, dan sistem pendayagunaan pemerintah yang ambiguitas: duplik disebut sebagai "bongkaran" tidak berjalan mulusnya proses transformasi pertanian di pedesaan. Hal ini bisa lebih memperparah jeblakan ekonomi pasar karena bentuk "komunitas dan aktivitas politik" pemerintah di tingkat pusat dan daerah, maka proses transformasi pembangunan pertanian mengalami arah tetap sama.

- (1) Ada lima komponen aspek-budaya yang dapat diadopsi mesin penggerak transformasi pertanian dari hasil pengkembangan dari suatu sector pertanian, yaitu:
  - a. Organisasi/kelembagaan kelembagaan media pertanian yang tangguh yang di dalamnya terkandung diri konsolidasi sumberdaya, usaha persatuan, integratif, berorientasi pada produk akhir yang bernilai tinggi, memiliki beragam secara vertikal, sehingga memiliki efisiensi dalam pelaku usaha pertanian yang relatif memiliki pembagian kerja secara beragam, dan dimiliki oleh semangat rasionalitas yang tinggi.
  - b. STTA penggerak usaha pertanian di pedesaan yang berbudaya cukup baik dan dalam jumlah yang memadai. (Maka ini bisa mudah berpeluang di pedesaan sangat sesuai untuk menempati posisi penggerak usaha pertanian di pedesaan yang diteliti).
  - c. Adanya masyarakat yang tinggi tingkat implementasi sistem atau tata nilai produktif dan kreatif yang mereka dan diri kemajemukan. Tata nilai yang dimaksud mencakup kerja keras rajin, hemat, rasa malu/bangga diri tinggi, dan tinggi perselingan sehat, tidak resisten terhadap inovasi, banyak mampu tinggi, bekerja dengan sistematis yang teratur (terorganisir), dilandasi cara berpikir sistematis dan hipotesis dan memiliki jangka panjang.
  - d. Kemampuan lokal yang kuat dalam menggerakkan personalia pedesaan melalui profil masyarakat, kelembagaan dan sumberdaya pertanian setempat.
  - e. Struktur sosial yang dilembagakan dan terorganisasi yang jauh dari kemiskinan sebagai masyarakat lokal. Pemahaman terhadap aspek ini harus membuka peluang bagi reformasi apabila terdapat melalui perantara perantara dalam pertanian di pedesaan.
- (2) Selain melalui memperoleh aspek aspek-budaya sebagai mesin penggerak transformasi pertanian, pengkembangan pembangunan pertanian harus dilaksanakan dengan pelaksanaan UU No.22, 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemerintah pusat dalam pembangunan pertanian yang berimplikasi terhadap pemberdayaan aspek aspek-budaya, sehingga akan melakukan desentralisasi penyelenggaraan pembangunan pertanian. Dengan intervensi seperti ini, kapasitas dan energi masyarakat lokal yang banyak menjadi penggerak transformasi pertanian dari bawah yang akan kuat.
- (3) Selain melalui mengidentifikasi dan mengidentifikasi jaringan pembangunan pertanian di pedesaan, perlu dilakukan pengetahuan dan pemahaman aspek aspek-budaya setempat yang kuat. Oleh sebab itu kegiatan penelitian sosial dilakukan di masa datang perlu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya lokal. Dengan cara demikian, sel pengembangan pertanian yang diwarnai oleh semangat kerjasama dan persatuan dari bawah ke atas akan lebih mudah diwujudkan.

## BAB VI.

SOLIDARITAS, ORGANISASI DAN PEMBANGUNAN PEDesaan  
Sukoharjo Pada Dua Komunitas Di Kawasan Danau Toba  
di Kabupaten Gunungsiboli

Pembangunan sebagai suatu konsep yang relatif baru yang dipercepat, dipersempit, dan diperlebar yang tidak saja mengimplikasikan perubahan struktur, baik namun juga teknologi dan nilai-nilai yang penerapannya oleh masyarakat. Penerapan teknologi modern dikaitkan dengan modernisasi dan tidak harus diberikan sebagai kesadaran sebagai suatu bagian dari suatu nilai dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, nilai-nilai ini sendiri adalah kesadaran kolektif yang pembangunan masyarakat pedesaan dengan demikian dapat dikembangkan bahwa makna pembangunan masyarakat pedesaan merupakan nilai-nilai yang dibanding modernisasi.

Tujuan ini mengimplikasikan kesadaran masyarakat tingkat desa dan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan tidak dapat dilakukan dari campur tangan pemerintah saja desa. Namun demikian, pembangunan pedesaan ini sendiri harus dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat pedesaan. Keterbatasan pencapaian pembangunan yang dimaksud tidak dapat mengabaikan unsur solidaritas yang merupakan kekohesian dan keberagaman masyarakat di tingkat rumah. Perkembangan solidaritas dan keberagaman masyarakat akan terjadi desa sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya baik, seperti air, manusia dan lingkungan yang yang menopang kehidupan masyarakat pedesaan di desa. Dalam hal ini ini dianggap bahwa antara solidaritas, keberagaman masyarakat tingkat desa dan pembangunan pedesaan saling mempengaruhi keterkaitan dan juga ini masuk untuk di dalam aspek khusus.

Minimnya sekitar 60 persen penduduk tinggal di pedesaan pembangunan pedesaan menjadi fokus utama pembangunan nasional. Menurut Kotler (1981), pembangunan pedesaan hendaknya diarahkan untuk pengembangan masyarakatnya agar mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dengan lebih banyak. Dengan demikian, campur tangan pemerintah hendaknya tidak hanya meniadakan produksi sumber teknologi nasional, melainkan semua baik berdasar wawasan dan kekhawatiran yang mendalam, namun juga perlu mengembangkan solidaritas dan keberagaman yang tumbuh dari desa. Hal ini dilakukan bukan saja dalam rangka untuk meningkatkan biaya, namun juga untuk membangun pencapaian pembangunan itu sendiri.

Dengan adanya campur tangan pemerintah pusat, tidak mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah tingkat atas desa memang sulit dihindarkan. Namun ini ini tidak perlu dianggap sebagai bahwa masyarakat desa tidak mengenal cara berorganisasi, tidak dikenal bahwa solidaritas masyarakat desa yang berkembang dan dipersempit sosial sekaligus ke berbagai tidak mengenal birokrasi, rumah keluarga (normal), perbedaan wawasan dan kekhawatiran yang terstruktur

dalam bentuk kerakal, dan unsur-unsur modern lainnya, hal tersebut mungkin bisa diterima. Dimana saat disayangkan jika masyarakat pedesaan seperti yang ada di Jawa akan terpengaruh oleh budidya untuk menjalankan sebuah pertanian dan industri sebagaimana terjadi di Eropa pada abad 17-18. Selanjutnya juga akan sulit membayangkan bahwa unsur-unsur modern dalam pembangunan pada masyarakat pedesaan akan lebih dari banyak mereka mudharat ini.

Karena yang diangkat dalam diskusi ini adalah dua komunitas pertanian di dataran tinggi di kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Komunitas pedesaan Desa Kesempurnan adalah yang selama ekistensinya tahun 1970-1982 memperoleh campur tangan, cukup intensif dan pasti dari atas desa, melalui Proyek Perbaikan Desa (Yogyakarta Rural Development Project) bantuan Unicef untuk bidang pertanian kedua Desa Nalangan, adalah melalui desa yang akan kurang memperoleh campur tangan intensif dari pemerintah. Nalangan juga akan dilihat sampai seberapa jauh dinamika yang terjadi pada organisasi masyarakat di tingkat desa dan produktivitas di keruk komunitas tersebut. Selain itu juga akan dilihat pengaruh kebijakan yang berkembang di kedua komunitas yang memuluskan sistem tenaga kebidanan terorganisasi masyarakatnya.

Pada diperlihatkan bahwa dalam tulisan ini tidak dikemukakan detail yang terjadi ketika sedang organisasi masyarakat dibangun sebagai gejala kebudayaan yang didasarkan pada kebudayaan masyarakat tersebut, dimana bagaimana dan kolektivitas untuk mencapai tujuan bersama komunitas lebih dari satu desa, dan tidak harus memiliki diorganisasi. Dengan pendefinisian yang lebih ketika ketika ini diharapkan akan dapat diangkat sebagai organisasi masyarakat di tingkat pedesaan yang layak untuk menarik jika dilihat dan kesamaan masyarakat pedesaan. Alasan jumlah anggota soal pembentukannya, tujuan keberadaannya, unsur keberadaannya dan keberadaannya, dan tentu akhirnya di jalur untuk melihat perkembangan organisasi yang ada di pedesaan.

Secara lebih rinci tulisan ini membahas, pertama, kerangka pemikiran yang digunakan untuk melihat bahwa pembangunan organisasi masyarakat tingkat desa sebagai bagian pembangunan desa-desa yang meranekai sumbernya manusia dan sumberdaya lingkungan fisik dan hayati dibutuhkan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa-desa. Dalam upaya membangun sumberdaya tersebut dilaksanakan oleh berbagai materi, dan bantuan modal dan sumber fisik dari luar desa. Kedua, membahas pendudukan dan pertanian yang memelihara penduduk jumlah, pertumbuhan, komposisi, dan jenis perusahaannya, tanah pertanian, berbagai penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pemukiman di desa. Dan perkembangan ekonomi pertanian pedesaan pada kawasan pangan utama padi, jagung, ubi jalar dan kacang. Ketiga, membahas perkembangan masyarakat yang memelihara kebutuhan kerjasama area kolektif di tingkat desa, termasuk di bidang keberadaannya. Ada empat dimensi analisis yang dibahas yaitu keberadaan keterkaitan, sosial budaya, ekonomi, dan rasional. Keempat membahas organisasi masyarakat yang mencakup di tingkat pemerintahan desa, masyarakat desa, dan masyarakat perikanan. Pada

organisasi masyarakat di tingkat pemerintahan tingkat desa lebih dapat diarahkan diri dari kebutuhan masyarakat bawah. Sebaliknya pada tingkat desa lebih banyak dikenal oleh di tingkat pemerintahan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

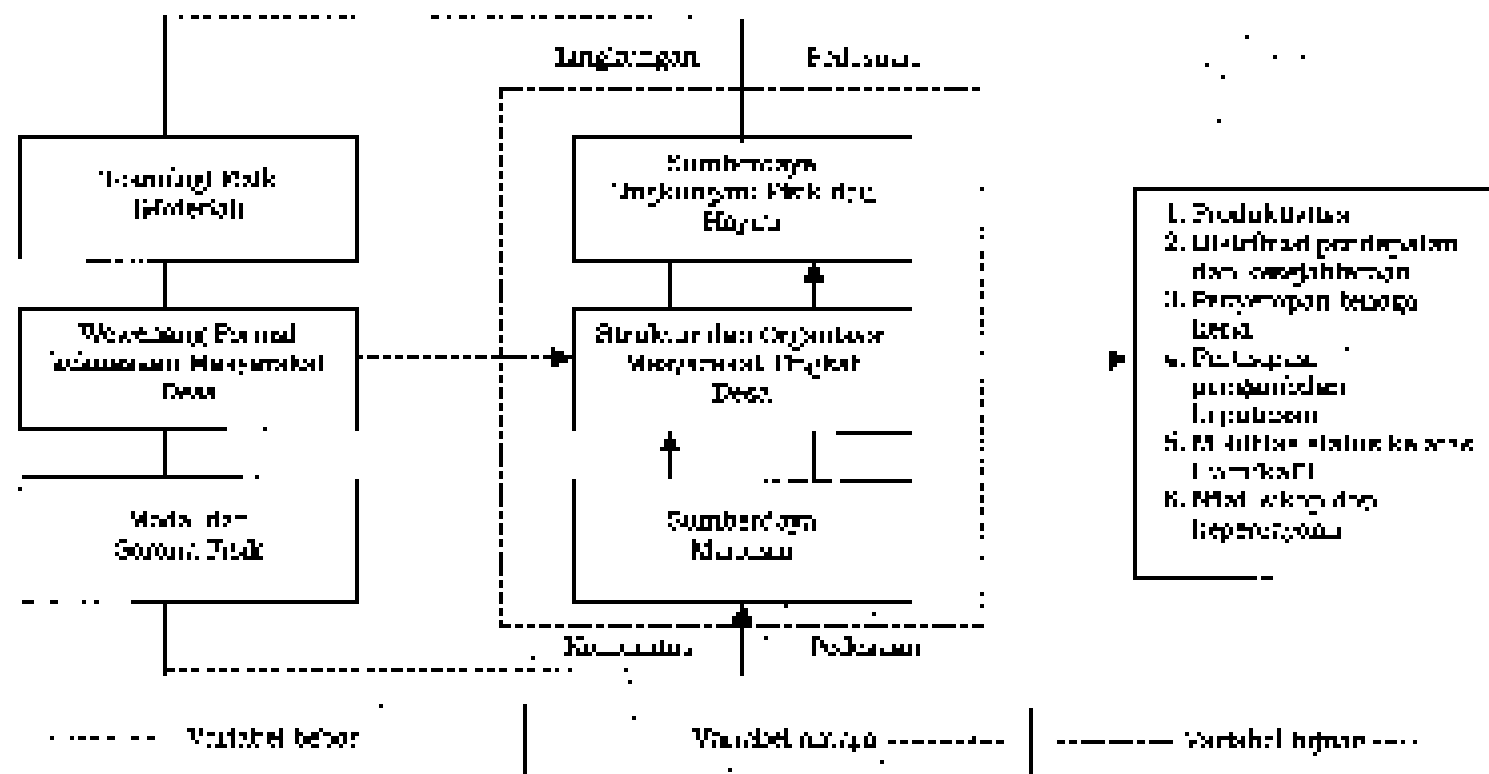
### Pembangunan Pedesaan

Gambar 7 menerangkan secara sederhana tentang kerangka berpikir pembangunan organisasi masyarakat tingkat desa sebagai acuan pembangunan pedesaan. Kerangka (gambar 7) tersebut dilera dengan titik tolak bahwa struktur dan organisasi masyarakat tingkat desa dapat diperlebar sebagai skala administrasi dan sekaligus sebagai tujuan.

Sebagai aksi organisasi masyarakat yang dimaksud mempunyai peranan dalam proses pbb teknologi material ("materi"), dan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas pada skala dan sarana fisik yang dimaksud dalam pmbangunan kelentengannya atau desa. Sebagai tujuan, kelentengannya dan perkembangan struktur dan organisasi pada kelompok-kelompok pmbangunan di pedesaan karena lahan besar tetap dibutuhkan oleh orang-orang penduduk ("society") yang bersifat keberlanjutan dan perantara. Dengan demikian, terbentuknya kelentengannya masyarakat desa merupakan proses yang dari sekian banyak tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan cara mandiri ("self-governing") dan anggotanya akan dengan cara lain, gejala tersebut adalah hal yang sudah ada dalam konsep di masyarakat sebagai pembangunan "struktur" ("struktur") masyarakat, halangan terjadinya "kolonisasi" ("kolonisasi").

Walaupun aksi kelentengannya formal dan desa yang ("daya") digunakan untuk merangsang aspek teknologi fisik ("materi"), dan modal serta sarana fisik lainnya dipandang sebagai variabel bebas. Posisi organisasi masyarakat tingkat desa yang merangsang sumberdaya, tenaga, ilmu dan hayati dan, sebaliknya manusia dapat dipandang sebagai variabel terikat. Kemudian tujuan pembangunan yang merangsang peningkatan produktivitas, distribusi pendapatan dan kesejahteraan, penerapan tenaga kerja, partisipasi pemerintah, kualitas status ("vertikal"), dan aspek spiritual (nilai, sikap dan kepercayaan) dipandang sebagai variabel tingkat pembangunan pedesaan (Majalah, 1974).

Dari kerangka tersebut terlihat bahwa makna bahwa, gambaran tentang masyarakat desa yang diperlebar menjadi satu, yaitu tidak sesuai kenyataan. Namun tetap penting diperhatikan bahwa lingkungan, proses dan kemampuan sumberdaya alam, hayati dan manusia ("materi") ("materi") yang mampu merangsang masyarakat untuk berkembang hanya jika sumberdaya tersebut pada memperoleh penerangan yang lebih memadai melalui "pembangunan dan pembangunan" berupa penerangan dan pengendalian dari aparat pemerintah atau desa. Kelentengannya tidak dapat menjadi sumber daya yang akan desa karena harus kelentengannya dan penerangan teknologi fisik ("materi"), dan modal serta sarana fisik. Hal ini merupakan salah satu sebagai kerangka.



Gambar 1. Kerangka Teori Pengembangan Organisasi Masyarakat Tingkat Desa Sebagai Bagian Tatakelurahan atau Desa. Terhadap Pembangunan Pedesaan

### Solidaritas dan Organisasi Masyarakat

Jauh sebelum sosiologi diakui sebagai cabang ilmu, Emile Durkheim dalam bukunya berjudul *Suikatikologi* (penerjemahan 1976) telah menyatakan bahwa antara individu dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Vincent A. Smith dalam Ruseffendi (1977), menyatakan bahwa kata "society" diberikan sebagai "pengertian mutlak". Menurut Spencer dalam Znaniecki (1946), bahwa masyarakat adalah elemen yang merupakan unit-unit dasar (dasar) biopsikologi individu yang mendalami suatu wilayah tertentu dan dalam perjalanan waktu yang relatif lama, umumnya lebih dari satu generasi. Adapun masyarakat dalam masyarakat akan dijumpai konsepsi-konsepsi yang satu sama lain adalah Jalanan Kerjanya ("jalan masyarakat"). Selain itu, ada juga Tawaran dalam Hamars (1960) menyatakan bisa diwujudkan dalam bentuk "kolaborasi" yang jika dibesarkan dan dikuatkan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internal dalam masyarakat bersangkutan.

Mengemukakan oleh Jendronegoro (1977), istilah organisasi diberikan juga berdasar dari kata berasal dari bahasa Indonesia. Dalam penerapannya, istilah organisasi akan antara lain sebagai dari organisasi dianggap tidak penting. Oleh karena (1941) dan Sumner (1908) kedua pengertian tersebut seakan akan dapat dipertukarkan. Bagi ahli lain seperti Davis (1948), Koentjaraningrat dalam Soekanto (1975) dan Znaniecki (1946) sudah menganggap perlu memisahkan antara lembaga dan organisasi. Berdasar Jendronegoro (1977) yang menerangkan bahwa organisasi merupakan lembaga dan perkembangan lembaga masyarakat ke arah yang lebih modern. Dalam kerangka pemahaman ini maka menganggap penting mengorganisasikan perbedaan-perbedaan di atas. Pengertian lembaga, dalam beberapa hal dikaitkan dalam organisasi. Selain dalam hal lain, pengertian lembaga adalah dipersepsikan sebagai aspek normatif yang membuat himpunan organisasi masyarakat itu pelestari.

Berapapun wahibemanya suatu masyarakat harus dapat dipertahankan dalam dari masyarakat tersebut akan mengakibatkan timbulnya yang selanjutnya budayanya tersebut dapat berkembang dan melahirkan elemen baru sesuai dengan perkembangan sosial atau orientasi sosial yang lebih kompleks. Menurut Gellner (1964), setiap dijumpai ada kelompok yang muncul dalam suatu masyarakat maka akan dijumpai juga ada organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap masyarakat akan dijumpai organisasi yang khas. Koentjaraningrat (1961 dan Soerjig 1977) mengungkapkan bahwa tumbuh lembaga adanya organisasi pada masyarakat prastara yang sudah primitif. Masyarakat mengorganisasi masyarakat dalam oleh keluarga atau kelompok-kelompok, meningkat ke kelompok etnis, dan selanjutnya menjadi organisasi-organisasi yang relatif kompleks. Diikuti dengan adanya masyarakat dijumpai masyarakat, kemudian (jauh-jauh), muncul dalam bentuk kelompok atau pemerintahan atau desa (Soerjig, 1977). Hal itu menunjukkan cara pandang baru yang lebih kompleks lagi terhadap jalan organisasi dan kebudayaan masyarakat berstruktur besar.

Pada perkembangan di desa yang belum terdapat lembaga campur tangan instansi dari pemerintah, pola organisasi masyarakatnya dapat ditelusuri dari pola atau ciri solidaritas yang mendasarinya. Menurut, dengan mengklasifikasi pendirian Durkheim dalam tahun 1924, bentuk solidaritas, Weber dalam tahun 1946, tentang perkembangan masyarakat ke arah tipe ideal (maxi al) Kozmin (1941), tentang capaian-kapunglik, dan Rieu dan Meyer (1967) tentang buktisasi dalam masyarakat modern dapat dibuat sebagai acuan pola organisasi dan solidaritas masyarakat tingkat desa, yaitu sebagai berikut:

Organisasi masyarakat

- Timbulnya
- Penulisan
- Pemerintahan Desa
- Kesatuan desa

Solidaritas masyarakat

- Kekeluargaan dan ketetanggaaan
- Sosial budaya
- Birokratik
- Rasional

Terdapat lima dapat diklasifikasikan bahwa secara teoritis organisasi masyarakat tingkat desa dapat dirangsang dengan pendalaman seperti berikut:

- (1) Berdasarkan atas asal dibentuknya, dapat dibedakan pertama, yang dibentuk dari kelurahan atas desa pemerintah guna atau daerah; kedua, yang dibentuk melalui swadaya masyarakat dengan proses serakah yang menyertai; ketiga, dibentuk atas dasar rumusan/konsensus bersama antara pemerintah atas desa dan masyarakat desa.
- (2) Berdasarkan atas bentuk-bentuk; pertama, organisasi masyarakat yang berbentuk formal, atau ada aturan tertulisnya; kedua, berbentuk informal, atau tidak ada aturan tertulisnya; ketiga, berbentuk pasif dan konvensional formal, yang dalam hal ini disebut bentuk adaptif.
- (3) Ditinjau dari submanajemen pencerdasan oleh atasan lokal sebagai bawahan, pertama, pengendalian dengan bentuk swamang (Tetapanan) yang melalui rumus birokrasi yang jelas; kedua, yang dilakukan oleh bawahan, khususnya tidak swasembel, ketiga, yang pengendaliannya dengan kerukunan atau informal dan kharismatik.
- (4) Berdasarkan ukuran jumlah anggotanya: pertama, organisasi berbentuk kelas (OB=organisasi besar), yang jumlah anggotanya sekitar 20 orang per organisasi; kedua, berukuran kelas berukuran lebih kecil (OR=organisasi kecil), yang jumlah anggotanya sekitar 10 orang per organisasi; ketiga, berukuran selang 10 orang lebih sedikit, yang jumlah anggotanya di antara OR dan OB.

## PENDUDUK DAN KERUKUNAN

### Penduduk

Tahun 1960 jumlah penduduk dan kerukunannya pada masing-masing kecamatan adalah 2577 jiwa (Kedungpeh) dan 5869 jiwa (Kampung), dan 620,10 jiwa per km<sup>2</sup> dan 113,12 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebagai gambaran kepadatan penduduk di desa masing-masing sekitar 650 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada tingkat keputusian penduduk rata-rata setiap jiwa menempati bagian tanah seluas masing-masing 0,10 ha (Kedungpeh) dan 0,23 ha (Kampung). Dengan

rata-rata ukuran keluarga adalah 4,62 jiwa (Kedungpundi) dan 4,66 jiwa (Kabungge) per KK. Maka rata-rata setiap KK rata-rata menggenggam tanah 0,70 ha dan 0,82 ha per KK.

Tingkat pertumbuhan penduduk di kedua kecamatan relatif rendah, yaitu 1,15 persen (Kedungpundi) dan 0,32 persen (Kabungge) per tahun. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,8 % per tahun). Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di kedua kecamatan agaknya tidak menjadi masalah penting bagi pembangunan masyarakatnya. Sebaliknya, dengan keterbatasan program KB tingkat kabupaten dapat dibayangkan angka kelahiran akan semakin banyak. Selain itu, dengan keterbatasan program KB tingkat kabupaten dapat dibayangkan angka kelahiran akan semakin banyak. Selain itu, dengan keterbatasan program KB tingkat kabupaten dapat dibayangkan angka kelahiran akan semakin banyak.

Sebagian umur adalah 16-35 tahun umumnya masih akan bekerja sebagai petani di desa dan bekerja di perkebunan. Jika disurvei di desa sekitar 80 persen dari mereka akan memiliki lahan di perkebunan. Sebagian lain akan pergi untuk bekerja ke kota-kota lain seperti Jakarta, dan Semarang. Lapangan kerja yang sudah bertambah akan lebih banyak negeri (80 persen). Jumlah 185 persen, dan pedagang (25 persen). Jumlah sebagai pegawai negeri dan lain-lainnya dengan rata-rata penghasilan masing-masing 833 persen terhadap anaknya. Menjadi pegawai kantoran akan lebih banyak mendapatkan gaji dan sosial tinggi. Pertanian dianggap bidang pekerjaan yang kurang menguntungkan dan akan sosial yang berkurang, atau dengan kata lain tidak dengan status yang baik.

Sebagian besar atau sekitar 80 persen penduduk bekerja di pertanian, dan yang termasuk buruh lain sekitar 5 persen. Umumnya kegiatan pertanian dilakukan oleh petani dari tanaman jagung, padi, dan kelapa. Sebagian lain bekerja di perkebunan karet. Walaupun ada perkebunan lain seperti kelapa (10 persen), pedagang (10 persen) dan lain-lain (10 persen) akan dikenal namun kurang menonjol. Dengan memperhatikan semua kegiatan maka dan penghasilan masing-masing terhadap anaknya, untuk tidak bekerja di pertanian atau perkebunan di masa datang kemungkinan besar kemungkinan akan pindah ke kota lain.

#### Tanah Pertanian

Sumbernya tanah tidak saja penting untuk pertanian pangan dan sumber kehidupan, melainkan menurut Henderguy (1980) juga penting sebagai sumber kehidupan untuk "subsistence" masyarakat di perkebunan. Bahkan semua tanah adalah milik kesukuan "Kaki", dan petani sebagai pemilik dalam atau salah satu dalam organisasi. Karena berstatus sebagai petani, maka pemerintah nasional akan mengizinkan mereka untuk menanam padi. Mereka menggunakan tanah tersebut untuk menanam padi, atau sebagai sumber untuk menanam padi, atau sebagai sumber untuk menanam padi.

tegalan dan tanah kering), dan milik pemertoloh (merek, kubah, jalan, sumbu dan lain-lain).

Analisis tanah pematangan di Desa Gede Karangasem dengan vertikal tanah Di Desa Karangasem sertifikasi tanah kantung sehingga Desa Karangasem C. dan beberapa buah sampel model 10 10 Desa Karangasem. karena tidak tersedia program pematangan sertifikasi tanah masih tersedia. Di Desa Karangasem beberapa petani mengolah tanah lebih dari sekali menyemai untuk beberapa pematangan vertikal tanah model C. namun tetap tidak menyemai pematangan yang memadai. Di Desa Karangasem model C. petani menyemai lebih dari satu kali pada tahun ini. Karena pada tahun ini petani tanah ini, karena pematangan yang kurang, maka tidak dapat di lad petani.

Analisis tanah menggunakan faktor penting untuk melihat apa jika akan soal. Tabel 6 menunjukkan distribusi luas pemertoloh tanah di Desa Karangasem. Berdasarkan pada literatur, Sugiono (1977) atau hasil Susenas (1976), maka dapat dikatakan bahwa wilayah besar petani termasuk golongan petani miskin, pemertoloh kurang dari 0,3 ha, dan lebih dari 0,3 ha Karangasem. jumlah petani yang memiliki luas tanah di bawah 0,27 ha mencapai-masing 23,80 persen, Karangasem dan 13,08 persen Karangasem. Karena itu menggunakan bahwa kebutuhan komunitas di Desa Karangasem akan pematangan ha ya menggunakan dari petani Karangasem tanah pertanian. Faktor ha Karangasem dapat memberikan pemertoloh masyarakat untuk tidak adanya menggunakan faktor di petani, Karangasem golongan miskin.

Tabel 6. Luas Tanah Pemertoloh (ha) pada Karangasem Tanah Karangasem dan Karangasem di Desa Karangasem dan Karangasem, Tahun 1982

| Luas Tanah (ha) | Desa Karangasem (ha) |        |                  |        | Desa Karangasem (ha) |        |                  |        |
|-----------------|----------------------|--------|------------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
|                 | Pemertoloh           | Luas   | Tanah Karangasem | Jumlah | Pemertoloh           | Luas   | Tanah Karangasem | Jumlah |
| 0,25            | 161                  | 151    | 278              | 584    | 350                  | 161    | 232              | 571    |
|                 | (24,8)               | (23,8) | (42,4)           | (85,0) | (52,2)               | (24,8) | (35,7)           | (89,7) |
| 0,26-0,50       | 975                  | 875    | 100              | 280    | 101                  | 16     | 184              | 317    |
|                 | (14,8)               | (13,5) | (15,1)           | (40,0) | (15,4)               | (2,4)  | (26,0)           | (67,8) |
| 0,51-0,75       | 100                  | 0      | 200              | 300    | 20                   | 15     | 53               | 88     |
|                 | (15,0)               | (0,0)  | (30,7)           | (40,2) | (3,0)                | (2,1)  | (7,8)            | (19,9) |
| 0,76-1,00       | 191                  | 12     | 100              | 307    | 11                   | 0      | 10               | 23     |
|                 | (29,0)               | (2,3)  | (15,1)           | (40,4) | (1,6)                | (0,0)  | (1,3)            | (3,3)  |
| 1,01-1,25       | 19                   | 100    | 80               | 14     | 10                   | 9      | 8                | 26     |
|                 | (2,9)                | (15,1) | (12,0)           | (15,1) | (1,6)                | (1,3)  | (1,0)            | (3,3)  |
| 1,26-1,50       | 10                   | 100    | 80               | 28     | 7                    | 2      | 15               | 41     |
|                 | (1,5)                | (15,1) | (12,0)           | (15,1) | (1,0)                | (2,1)  | (3,3)            | (8,3)  |
| 1,51-1,75       | 9                    | 100    | 20               | 28     | 1                    | 1      | 1                | 3      |
|                 | (1,4)                | (15,1) | (3,0)            | (4,0)  | (0,2)                | (0,2)  | (0,2)            | (0,5)  |
| 1,76-2,00       | 5                    | 100    | 18               | 17     | 100                  | 100    | 100              | 100    |
|                 | (0,8)                | (15,1) | (2,7)            | (3,5)  | (100)                | (100)  | (100)            | (100)  |
| 2,01            | 100                  | 100    | 100              | 100    | 1                    | 2      | 3                | 6      |
|                 | (100)                | (100)  | (100)            | (100)  | (1,6)                | (2,1)  | (3,3)            | (8,3)  |
| Jumlah          | 265                  | 165    | 1082             | 2364   | 571                  | 165    | 475              | 1082   |
|                 | (100)                | (100)  | (100)            | (100)  | (100)                | (100)  | (100)            | (100)  |

Sumber: Data Karangasem (1982) dan Karangasem (1982)

Karangasem: Luas = total 100 ha



Dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah, angka acuan dalam mencari label itu pendidikan berasal dari zaman penjajahan dulu ketika orang tua ingin rumah anaknya jadi sekolah yang banyak rumah itu ada tingkat pendidikan rata-rata rumah tangga petani Desa Kelingan lebih tinggi dari Desa Kelingan. Itu dia? Ya, bahwa banyak masyarakat karena masyarakatnya secara umum tingkat pendidikan, rumah tangga, baik untuk proses maupun non proses (misalnya pendidikan). Itu gambaran ini juga dapat dilihat, bahwa dalam modernisasi pertanian, teknologi pertanian akan sangat berpengaruh pada tingkat dan luar pertanian. Hal ini banyak akan

menimbulkan gejala tidak sehat terutama jika sektor non pertanian tetap kurang berkembang karena petani kecil.

Tabel 10. Struktur Belanja dan Pengeluaran Rumah Tangga dan Alimahnya, Menurut Jenis Pengeluaran

| Jenis pengeluaran                 | Jenis Keluaran |        | Jenis Keluaran |        |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                                   | Rp. (Rp.)      | (%)    | Banyak         | (%)    |
| Seluruh dan rumah tangga total    | 274.482        | 89,85  | 714.913        | 65,66  |
| - Makanan                         | 50.180         | 0,81   | 26.808         | 0,47   |
| Makan rumah                       | 11.810         | 0,08   | 6.800          | 0,40   |
| Pendidikan                        | 180.080        | 33,23  | 25.490         | 14,28  |
| - Kesehatan                       | 10.010         | 0,21   | 1.000          | 0,04   |
| - Kesehatan                       | 10.000         | 1,24   | 8.000          | 1,29   |
| Pajak                             | 300            | 0,00   | 1.000          | 0,10   |
| Lain-lain (kemungkinan lain-lain) | 42.000         | 5,14   | 10.000         | 8,33   |
| Jumlah                            | 590.000        | 100,00 | 678.207        | 100,00 |

### SOLIDARITAS MASYARAKAT RUSA

Solidaritas merupakan faktor sosial yang bisa dapat dibedakan jika kita melihat masyarakat dan sebagai hasil dari proses sejarah dan kebudayaan manusia yang tinggal dalam kawasan geografis yang jelas (Durkheim, 1984; Hirschi, 1979 dan Hawley, 1980). Kekhasan solidaritas berlainan pada masing-masing komunitas dan dapat dilihat dari hubungan kekerabatan, politik dan ekonomi. Berdasarkan kategorisasi dan tingkat keterkaitan akan menghasilkan perbedaan. Di setiap komunitas akan akan menampilkan gejala solidaritas yang berbeda.

#### Solidaritas Kekerabatan

Relasi kekeluargaan menekankan pengalihan antara norma kekeluargaan dan aspek eksistensial (hubungan antar komunitas masyarakat media dan faktor lain) karena aspek yang bersifat personal menjadi ciri utama yang mendukung solidaritas kekeluargaan. Disamping disebabkan oleh dikandungnya bahasa budi, menurut Vandemark dan Leht (1977), bagaimana masyarakat berkomunikasi merupakan faktor sistem nilai dan kebudayaan masyarakat. Selain itu, lebih lanjut, solidaritas kekeluargaan banyak dijumpai berbagai kelompok berlatar kekeluargaan.

Pemertanian pada khususnya, antara lain penerapan sistem pertanian yang berkapasitas dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertanian (pajak, pajak dan pajak). Selain, adalah yang berkaitan dengan upacara atau tradisi pertanian. Orang-orang merupakan kelompok-kelompok kekeluargaan yang dalam praktik menunjukkan kewajiban sosial akan norma (aturan) etik berlatar. Dengan solidaritas ini, terlihat

tersebut juga merupakan kegiatan pemenuhan antar anggota masyarakat yang adalah kebutuhan diri sendiri, keluarga, pribadi atau anggota masyarakat dan umum. Hampir semua tindakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dari pemilik, terutama di bidang tenaga kerja masih merupakan konsep individualistik selenggarakan yang tetap hidup.

Dalam seluk-lukuk pembangunan ini, terkandung norma dalam masyarakat lokal tertulis, yang jika dilanggar ada sanksinya. Sebagai contoh, seorang anggota masyarakat yang ketertarikan yang disebabkan sering tidak terlibat dalam kegiatan solidaritas untuk sementara waktu dikeluarkan dari kegiatan solidaritas. Walaupun sangat hal yang digambarkan secara sosial yang efektif untuk masyarakat dan masyarakatnya karena solidaritas bisa terganggu. Dalam hal ini, nilai kesamaan hubungan sesama termasuk solidaritas tujuan masyarakat yang penting. Secara moral, seorang warga yang dibuktikan dan kesamaan keberagamaan kurang terganggu sekali bersama.

### Solidaritas Sosial Budaya

Solidaritas dalam skala lebih besar menurut Coombs dalam Homan (1954) bukan sekedar urusan unit keluarga namun juga termasuk untuk mengembangkan hubungan kolektif yang terencana di tingkat pemerintahan. Dalam hal ini terdapat norma kolektif yang dipegang sebagai dasar pemerintahan atau kampung. Sifatnya di tingkat ini masih diwarisi pemerintahan yang diwarisi atau norma kolektif dan kesetiaan. Sebagaimana juga dikatakan Tjondronegoro (1977), yang menyatakan bahwa analisis, struktur sederhana (primitif) yang mengungkap masyarakat masyarakat masih tampak hidup pada kehidupan kolektif di tingkat pemerintahan. Pada tingkat ini, anggota kolektif sebagai budaya asli masyarakat pedesaan dapat bertahan hidup.

Organisasi yang dianggap mempunyai kelebihan di bidang pengorganisasian umum, dan aktivitas kemasyarakatan ditunjukkan sebagai pemimpin dan penggerak solidaritas. Pada tingkat ini gerakan masyarakat tidak mengabaikan peranan elit masyarakat. Pengerian tidak sebagaimana juga diungkap Geertz (1964) pada umumnya di masyarakat atau keluarga Jawa masih nyata mendominasi kehidupan sosial budaya. Norma dalam masyarakat ini masih tampak sebagai bagian budaya masyarakat.

Dalam bentuk kegiatan nyata, solidaritas ini dirangsang oleh masalah budaya yang sangat penting (kebiasaan yang tidak dengan gubuk reyung). Sementara ini masih efektif untuk pembangunan secara umum (pembangunan jalan, pembangunan kampung/masjid, dan pembangunan/pembinaan secara umum). Sementara ini juga terdapat pada kegiatan pemerintahan yang bisa di pertahankan dan budaya sosial budaya pemerintahan. Selain rumah dan rumah, pendidikan tidak dapat dilepaskan dan esensi solidaritas berdasarkan sosial budaya ini. Dalam bentuk yang lain, budaya lokal lebih banyak diwarisi pada solidaritas kolektif. Sebagai contoh, berdasarkan perilaku yang lebih banyak, rumah, keluarga, dan kampung dan kesetiaan rumah, rumah, rumah, rumah, rumah (pemerintah) terdapat pada

ternak dapat dikenakan hukuman mengumpulkan batu kali sebanyak 1 kubik ( $1 \text{ m}^3$ ).

### Solidaritas Birokratik

Penerapan prinsip solidaritas di tingkat desa tidak lepas dari hukum-hukum pengaturan formal dari atas desa. Hirarki, wewenang dan kekuasaan formal berdasar aturan-aturan tertulis (Etzioni, 1964) yang ditentukan atas desa berdasar Undang-undang nasional (UU RI No.5, 1979) telah diterima sebagai kenyataan. Dengan demikian, solidaritas masyarakat tidak saja merangkai kepentingan bersama secara internal di tingkat desa, namun juga dalam kaitannya dengan desa lain dan kepentingan lain secara vertikal. Dalam kerangka ini, desa tidak lagi menggambarkan unit otonomi yang demokratis namun telah menjadi bagian kekuasaan formal atas desa, atau menjadi bagian masyarakat yang serba kompleks dan modern.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, penerapan birokrasi menjadi semacam keharusan untuk menggerakkan solidaritas masyarakat. Beberapa contoh penggunaan birokrasi adalah untuk pelaksanaan program OPSUS, penarikan kredit BIMAS, penarikan pajak (IPEDA, sekarang PBB), penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan PKK dan keluarga berencana. Pemanfaatan aspek birokrasi, untuk menggerakkan solidaritas di tingkat desa, tidak dapat dilepaskan dari penempatan Lurah atau Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintahan desa. Walaupun Kepala Desa dipilih oleh rakyat, untuk jabatan selama 8 tahun, namun dalam organisasi pemerintahan ia langsung dibawahahi Camat.

Inisiatif atau penggerak solidaritas lahir dari atasan, dan petani sebagai bawahan (atau sub ordinasi, istilah Redfield, 1982) hanya berhak sebagai pemberi usul. Diterima atau tidaknya usulan ditentukan oleh atasan desa, dengan anggapan ("tidak selalu benar") bahwa atasan desa mempunyai organ-organ khusus yang mengkaji usulan petani tersebut. Pelanggaran atas norma solidaritas ini mengandung sanksi fisik, konsekuensi atas jabatan (jika ada), denda, hingga kurungan penjara. Acuan untuk penetapan hukum adalah peraturan formal tertulis.

### Solidaritas Rasional

Solidaritas ini didasarkan atas imbalan, atau pertukaran yang individualistik atau rasional. Pada konsep solidaritas rasional ini lebih dekat dengan pendekatan Weber daripada Durkheim *dalam* Johnson (1987). Ciri-ciri ekonomi petani, yang didasarkan dalam kegiatan produksi mulai tampak jelas. Sejalan dengan perkembangan teknologi pertanian, menurut Simon (1975), kegiatan pertanian berkembang ke arah efisiensi penggunaan tenaga kerja. Solidaritas rasional yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi, membuat kebudayaan pertanian lebih lengkap. Dalam pengertian Wolf (1983), perkembangan penggunaan metode baru (ekotipe neoteknik) terkait dengan perluasan koalisi petani dan tatanan sosial yang lebih luas. Surplus

diversifikasi dari kegiatan pertanian diperlukan dalam hal-hal sebagai berikut: biaya penggantian peralatan, namun juga untuk kepentingan ekonomi.

Semua praktik-praktik faktor produksi dalam kegiatan pertanian telah dominan pada penggunaan tenaga kerja, dimana tenaga kerja merupakan input produksi pertanian yang paling banyak sekali. Oleh karena itu, sistem pertanian merupakan sistem pemanfaatan-poli (masyarakat) tenaga kerja tenaga kerja antar keluarga. Kemudian, dalam adanya pola pengorganisasian yang tidak sempurna dan membatasi pertanian lahan sempit dan buruh tani tidak produktif, upah-integrasi dengan hasil panen dan uang tampak mulai dikawatirkan. Hal-hal yang biasanya digunakan oleh pemilik tanah, yaitu untuk membayar buruh tani, kemudian untuk pengelasan tanah dan pengelompokan secara pada kegiatan kerja, serta hal-hal lainnya dengan hasil panen (bawak). Sedang upaya mengupah buruh petani lain, sebagai bagian sistem struktur atau struktur yang lain (sistem lain) akan lebih.

Sistem laburan yang berlaku secara lokal belum diterapkan oleh petani kecil dan juga petani-petani dari lembaga pemerintah di pedesaan. Oleh karena itu, petani kecil untuk petani kecil dengan cara pertanian pangan. Artinya, pengorganisasian akan petani-petani atau sebagian hasil dari petani yang diupah akan petani yang diupah, sebagai tenaga kerja tenaga kerja. Sedang tenaga-pengorganisasian dari lembaga pemerintah yang harus diupah adalah jasa tenaga kerja tenaga kerja. Artinya, pengorganisasian ini digunakan untuk mengorganisasikan tenaga tenaga, misalnya untuk pengelompokan pertanian, pertanian tidak dipangkas bunga.

## ORGANISASI MASYARAKAT

### Pemerintahan Desa

Hamid B. dan B. mengemukakan struktur organisasi pemerintahan desa di desa Telinggah dan Kuningan. Mereka bahwa pemerintahan desa adalah bagian integral dari struktur pemerintahan. Sebelum terbentuk dalam struktur pemerintahan nasional, mereka berada pemerintahan sebelum Sultan atau Kesultanan Yogyakarta. Setelah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I D.I. Yogyakarta). Kemudian pemerintahan adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat III dan Camat Kepala Daerah Tingkat III dan Kepala Desa (sistem). Di bawah Camat adalah Kepala Desa. Di bawah pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Camat yang bertanggung jawab yang diupah oleh Kepala Desa atau Bupati. Di bawah pemerintahan, sedangkan dalam gambar terdapat keputusan (keputusan) oleh Desa atau Kepala Pemerintahan (pengorganisasian) (keputusan) oleh Bupati (B).

Pada tingkat kekuasaan atau pemerintahan tingkat Camat dan Bupati tidak dikenal pemerintahan yang tetap, seperti pada Daerah Tingkat I, II dan nasional. Pada tingkat Daerah Tingkat II ke atas, pemerintahan kekuasaan pemerintahan nasional atau politik nasional (politik). 1977, dalam jurnal Hal ini dapat dilihat oleh pemerintah (keputusan) oleh Bupati.





Legislasi (KPU/DPR, Yudhono (Wahyuni Al-Agung, Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Aksi Masyarakat Beresdaya, Gubung), dan Dugesi). Di luar struktur pemerintahan, organisasi-organisasi formal masyarakat diatur dengan UU Yayasan (1983). Dari gambaran di atas terungkap bahwa literasi hukum dan akses ke bawah hukum melalui wawancara informan. Dalam UU Pemerintahan Desa No 3, 1972, tidak terdapat dasar legal khusus, dan desa adalah kawasan yang penting diperhatikan.

Tampilan di atas menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan desa lebih didasarkan dalam hubungan dengan aspek teknis, teknis, teknis, dan teknis, dan teknis. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aspek teknis lebih banyak yang tidak dipikirkan, yaitu adanya, bahwa pada pembagian kerja yang lebih banyak yang bersifat teknis dan dipikirkan yang merupakan dan teknis, yang menunjukkan dan koordinasi pembagian tanggungjawab, dan koordinasi pemerintah. Secara struktur juga dapat dikatakan bahwa Kepala Desa membawahi 10 orang Kepala Kampung, Kepala Desa, dan semua unit organisasi dan jabatan, yaitu merupakan di tingkat desa. Namun tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan akan kepala desa berakasa penuh (absolut) tanpa terdapat kontrol. Mekanisme pengawasan dan kontrol tidak dapat terwujud secara formal.

#### Organisasi dan Partisipasi Masyarakat di Tingkat Desa dan Kecamatan

Tabel 11 menggambarkan ragam jumlah dan karakteristik organisasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Dalam Tabel 12 menggambarkan detail yang ada di tingkat pemerintahan. Melalui karakteristiknya, maka organisasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa dan partisipasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara umum, banyak, bahwa pada desa yang berdasarkan jumlah penduduknya, maka partisipasi khas pada tingkat dan partisipasi masyarakatnya, maka pada beberapa, maka pada partisipasinya. Demikian juga halnya di tingkat pemerintahan, gejala yang muncul bahwa terdapat formal organisasi dan partisipasi masyarakat di tingkat pemerintahan lebih banyak ditemukan di tingkat desa. Jumlah yang muncul di tingkat desa adalah pada organisasi pemerintahan (Kelompok Tani, dan YPT = Kelompok Tani Wanita) dan organisasi pendidikan (Sekolah, PAUD, Usaha Kesehatan Sekolah, dan keterampilan). Jumlah yang muncul di tingkat pemerintahan adalah KEMEND (Kelompok Kerja EMKI, Desa Wana Bakti) dan dari KEMEND di Desa Katongoni. Kelompok Persewaan dan Kelompok Tani.

Tampak ada semacam konsistensi pada karakteristik organisasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa maupun pemerintahan. Di tingkat desa, ukuran organisasi dan partisipasi masyarakat secara hierarkis sedang ke atas dan besar (di). Organisasi berstruktur lebih ke atas dan lebih menunjukkan kepada berstruktur sedang (di). Selain di tingkat pemerintahan, ukuran organisasi dan partisipasi masyarakat lebih cenderung pada ukuran sedang ke bawah. Gejala yang muncul, pada tingkat pemerintahan

[illegible][illegible]

5. *Argemone mexicana*  
 (common poppy) *Argemone mexicana*  
 var. *argemone* (yellow poppy)  
 var. *leucopurpurea* (purple poppy)

Manufacturer:  
 Poly-Bak Plastics, Inc.  
 2000 1st Avenue North  
 Atlanta, Georgia  
 30309

## INDEX



mulut bangsa inggris saat dan perkembangan masyarakat berakutari lokal lokal inggris saat itu.kuram besar bangsa inggris pada masa itu.masyarakat yang merupakan bagian dari pemerintah lokal.

Ditinjau dari asal perintisannya, sebagian besar organisasi dan pertolongan masyarakat di tingkat desa dibentuk oleh atasan desa (petinggi pemerintahan). Kelompok yang tidak dibentuk oleh pemerintah adalah LSA atau Organisasi Pemakai Air (Desa Karangrejo) Ragi Pemberdayaan Petani (Desa Tembungo), Lembaga Perakhi (Desa Klatenrejo), urutur, kumuhut, dan alihut (Kepertayaman Desa Karangrejo). Secara di tingkat pemerintahan, pendidikan, trampil, below, organisasi dan perkembangan masyarakat dari bawah telah berkembang. Dari Tabel 12 juga disimpulkan bahwa di tingkat pemerintahan telah terjadi semacam "ketegangan" antara organisasi yang dibentuk pemerintah (dari atas) dan masyarakat bawah. Demikian ini sejalan dengan penemuan Hjerlemdalen HETI tentang unit masyarakat "bawah", yang menekankan mereka sebagai asal.

Ditinjau dari sudut kefarmakokinetik, pengabsorpsi dan perkembangan masyarakat di tingkat desa sebagian besar berbentuk farmak. Riset yang tidak mengunggulkan tingkat kefarmakokinetik yang tinggi melalui RTW, OFA, dan Pemasukan Rumah. Selain, Kemandirian dan Aliran masyarakat. Sebagai di tingkat pemerintahan, banyak yang Pemasukan yang ada dan perkembangan masyarakat yang bersifat formal banyak tidak diungkap. Secara lebih detail, bahwa antara tingkat kefarmakokinetik dan soal pembentukannya terdapat hubungan erat. Organisasi dan perkembangan yang dibentuk oleh masyarakat banyak banyak akan diuji dari segi kefarmakokinetik.

Minangan dari subsektoran pengendalian ukir nasional kepada kawasan, organisasi dan pemerintahan masyarakat di tingkat desa, sebagian besar merupakan kombinasi antara Birokrat dan kharismanik. Akibatnya, kecuali pada tahun pemerintahan, pengendalian organisasi dan pemerintahan masyarakat di desa tidak mudah dengan menerapkan asas birokratik. Pengendalian dengan unsur kharisma seseorang hanya tampak pada organisasi yang kepercayaan. Seolah di tingkat pemerintahan, pengendalian dengan unsur kharisma memang berlaku, tetapi tidak terdapat di tingkat desa. Pengendalian yang sepenuhnya birokratik hanya tampak pada desa Puncamajene. Hal pengendalian yang demikian sulit hanya berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat pedesaan umumnya yang tinggi soal pemerintahan dan tingkat reformasinya.

Dari penglihatan dengan bahasa benda (visual) di muka garisnya dapat ditarik gambaran bahwa organisasi dan perumputan masyarakat di tingkat desa sebagian besar masih berorientasi pada tradisional. Sesuai di tingkat padukuhan, ciri tradisional masih cukup besar memengaruhi kehidupan masyarakat dan pemerintahan masyarakat. Ciri tradisional sangat memengaruhi pola kehidupan dan perkembangan yang terjadi di bidang produksi pertanian dan perikanan. Mempertahankan tingkat keberlangsungan, asal pemukiman, dan hubungan pengendalian antara sesama dan masyarakat dapat untuk menjadi pemertahanan suatu organisasi dan perumputan masyarakat tingkat desa di tingkat padukuhan tradisional.

terjadi terjadi proses marjinal dan marginalisasi ke marginal. Dimana semua yang terdampak dan marginal ada di sekitar pinggiran. Akibatnya, kebudayaan pedesaan yang memiliki pada kehidupan tradisional menjadi dapat bertahan di tingkat pedesaan.

### KESIMPULAN

- (1) Solidaritas dan masyarakat masyarakat tingkat desa tidak saja meranakai antara kepentingan kolektif desa dan kepentingan masyarakat luas. Namun juga sebagai pengintegrasian antara solidaritas kolektif dengan kepentingan dan sumberdaya lingkungan fisik: tanah, air dan air dan hutan: sumber, hutan dan sumberdaya lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sampai seberapa besar solidaritas dan masyarakat masyarakat tingkat desa bisa dikembangkan, tergantung juga dan sangat besar yang mendukungnya. Selain modal dan budaya, aset tanah menjadi salah satu pendorong dinamika solidaritas dalam organisasi masyarakat tingkat desa.
- (2) Untuk membangun desa perkembangan desa pemerintah tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali ikut campur dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pedesaan. Campur tangan pemerintah pada akhirnya diharuskan sebagai kenyataan. Tidak saja dalam hal-hal yang sangat perubahan teknologi dan sosial, namun juga dengan struktur pengintegrasian masyarakat pedesaan. Hal ini sejalan dengan keinginan akses desa agar lingkungan dan pembangunan pedesaan dapat mendukung tercapainya solidaritas yang lebih kuat di tingkat nasional, karena akses budaya, ekonomi, dan nasional. Melalui solidaritas ini, desa juga dalam rangka pencapaian kesejahteraan spiritual (dalam arti etika dan kepercayaan) namun juga untuk kesejahteraan material, intelektual, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat pedesaan.
- (3) Solidaritas adalah bagian dari sumberdaya manusia (human) yang cukup menjadi pendorong bagi hidup dan berkembangnya masyarakat di tingkat desa. Masyarakat pedesaan tampaknya tidak cenderung menerima penkulturan organisasi lain dari pemerintahan atas desa. Oleh saja, organisasi lain yang lebih berfungsi sebagai alat kontrol, perlu adaptasi dengan kemah budaya pedesaan setempat. Terlebih, bahwa tanpa campur tangan dari luar pun, masyarakat pedesaan lebih cenderung dalam kemah dalam terintegrasi. Adapun yang dimaksud adalah untuk mencapai identitas dan etika (ethics) pedesaan yang berbeda.
- (4) Organisasi masyarakat yang berada dari bawah umumnya diberikan oleh tingkat kemah yang rendah, atau kemah yang rendah, pengendalian dengan kepemimpinan karismatik, kekuasaan relatif kecil dan dengan kekuasaan yang rendah (poder). Oleh karena itu, organisasi

asal masyarakat yang dibentuk dari atas untuk mendukung diri kapitalisme relatif tinggi. Contoh-nya adalah modern relatif berhasil pengendalian dengan menggunakan media bukrast relatif nyata, beraturan relatif besar, dan dengan kompleksitas relatif tinggi.

- (5) Pada tingkat desa, organisasi dan perkembangan masyarakat modernisasi hasil berakibat dari atas atau sedikit-banyaknya modernisasi sebagai perbandingan diri dan kelas desa. Berakibat di tingkat perkotaan, masih cukup-jika dihasilkan oleh kawasan budaya setempat. Disimpulkan juga, bahwa kualitas organisasi dan kekuasaan dari wewenang modern desa melalui seperti kelas perwujudan diri tidak cukup untuk berakibat. Walaupun perwujudan demokrasi di tingkat desa banyak mulai memudar, namun hal ini masih masih hidup di tingkat perkotaan.
- (6) Ditandai dengan pembangunan agrikultur membentuk dan penganjuran masyarakat modernisasi di tingkat desa oleh pemerintah pusat dan daerah. Kelas distrikasi mulai menggerakkan produksi dan ekonomi peranian. Penerapan Candi dan Rukya Desa sebagai selanjutnya di bawah, yang dibantu oleh masalah tingkat wewenang dan kekuasaan dalam diri pemerintah P.T. Pemerintah Desa No.3. 1964. dampak efektif mulai dilaksanakan. Berperimbangan desa desa selanjutnya unsur pemerintahan kesejahteraan (pendapatan, kesempatan kerja, partisipasi dan nilai dan kesempatan masyarakat selanjutnya menjadi urusan desa organisasi yang lahir dari budaya setempat.
- (7) Berperimbangan pemerintah dalam pembangunan perkotaan masih cenderung mengontrolkan pembentukan organisasi secara langsung sebagai selanjutnya pemerintahan desa yang lebih efektif, dan kurang memanfaatkan organisasi informal yang berakar pada solidaritas kerangkaan dari sosial budaya. Kelas terburu-buru, tempo-jika upaya menggerakkan jalan pikiran yang dengan memajukan organisasi baru pada bentuk setiap ada pengait pemerintahan. Pada sisi lain, tempo dan peranan masyarakat yang berakar dari bawah mulai tergusur. Sebagai konsekuensi pendapatan pemerintahan, yang selanjutnya merupakan asensi pemerintahan perkotaan, tidak menjadi masalah desa.
- (8) Tingkat kemajuan masyarakat pertanian di pedesaan tampak terhambat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan petani menggerakkan teknologi pertanian modern, namun oleh pendidikan hasil pertanian yang terbatas. Dengan dukungan sumberdaya lahan yang sangat subur, serta bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan solidaritas dan budaya masyarakat melalui batas-batas pengait secara personal. Dengan energi yang sangat terbatas, demikian sempit dan tidak menjangkau pemilik modal solidaritas dan berakibatnya masyarakat di tingkat desa dalam bentuk partisipasi secara pribadi akan akan sulit untuk melakukan pemerintahan nasional.



modal dan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas usaha budidaya dan penangkapan ikan, yang selama ini dianggap akan bisa sejalan dengan tujuan pembangunan (sustainable) secara berkelanjutan?

Tujuan utama ini adalah untuk mengubah suatu produksi yang menggunakan tenaga & modal tradisional (pendukung) masyarakat desa pantai melalui penerapan ekonomi pasar yang kurang berkembang, bukan satu akan berkembang karena berbagai alasan desa pantai secara umum juga akan mempunyai hambatan berbagai faktor seperti faktor "kekurangan modal", faktor "kurangnya tenaga", faktor "kurangnya teknologi", faktor "kurangnya informasi", yang diarahkan pada kegiatan pembangunan masyarakat pantai dan penerapan konsep Desa Kaya Berupa hasil pengorganisasian empuk di lapangan.

Jordan ini dilakukan dalam rangka membahas proyek di atas. Data berupa hasil pengamatan lapangan diuraikan dan deskripsikan di Puncak Jawa Timur, yang mewakili daerah reaktif maju (muda), dan Tasikmalaya, yang mewakili daerah relatif kurang maju. Desa Desa yang dipilih sebagai contoh kasus adalah yang kegiatan ekonominya masih didominasi kehidupan masyarakat tradisional, sebagai pengorganisasian.

Bahasan utama adalah yang menyangkut masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan berurusan dengan masyarakat perekonomian pasar, penggunaan teknologi dan modal tinggi dalam kegiatan penangkapan. Selain dibahas juga "kegiatan ekologi" dan "kegiatan pemanfaatan usaha" diarahkan. Sebagai contoh, dibahas tentang "jika" over eksploitasi terhadap sumberdaya dan eksploitasi selengkap "jika" kaitannya dengan sumberdaya pembangunan modal yang semakin tinggi. Hal juga bisa dibahas dari aspek "jika" diarahkan secara tentang "jika" perluasan konsep penyediaan pembangunan yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap faktor ekologi dan ekonomi, sosial yang tidak terpisahkan.

## METODE PENELITIAN

### Daerah Penelitian

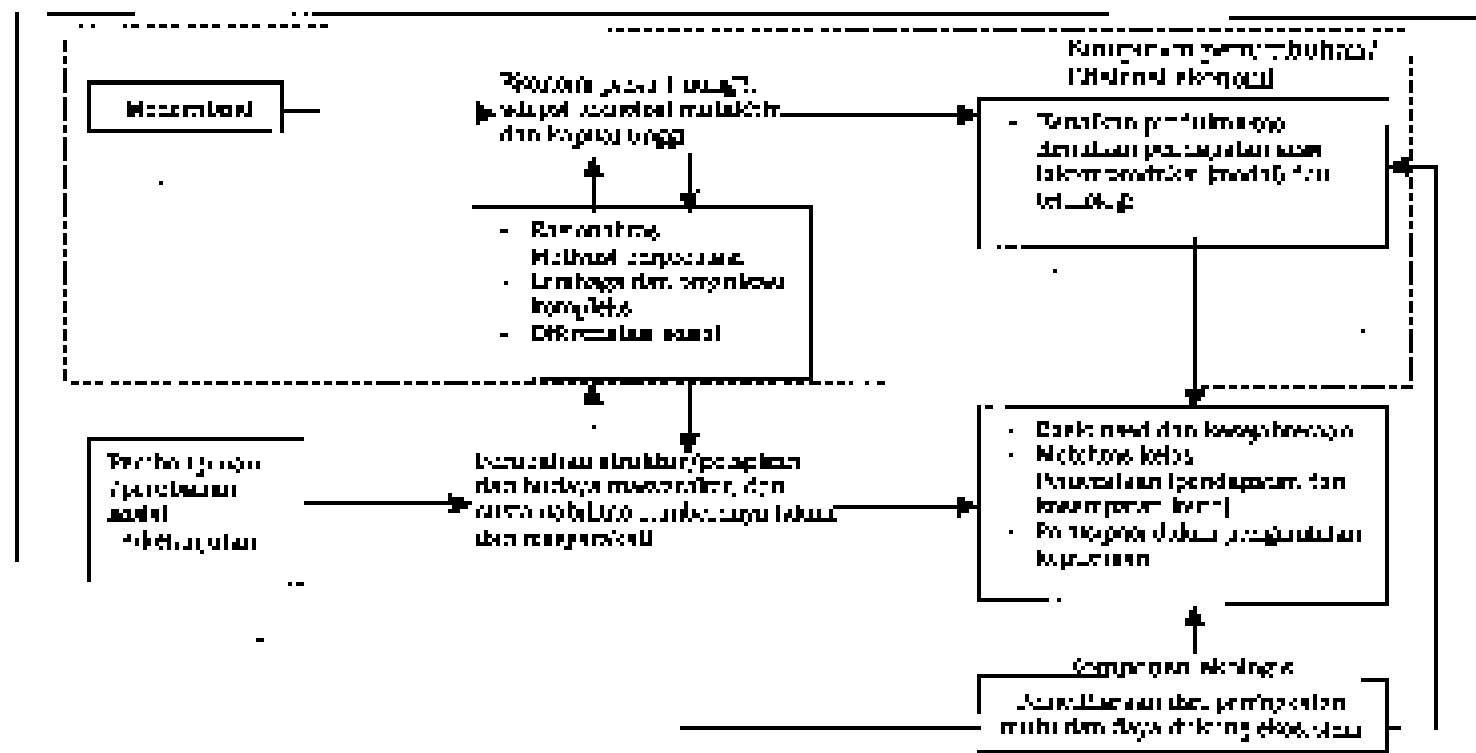
Bagian ini masyarakat tradisional yang tinggal di kawasan desa pantai secara ekonomi relatif lebih tinggi dibandungkan dengan desa pantai umumnya diarahkan oleh eksploitasi sumberdaya dan perairan laut. Kawasan desa pantai dan perairan laut, yang mempunyai eksploitasi sumberdaya dan perairan laut, secara ekologi mempunyai potensi yang relatif tinggi (Othman, 1957; Ramish, 1990; dan Chitra, 1987). Jika pengkajian sumberdaya pantai dan perairan ini dilakukan dengan menggunakan aspek ekologi, misalnya dengan tidak memperhatikan hutan mangrove (Othman dkk., 1993; Sumardja, 1998; Rylakken, 1986; dan Uthudhury, 1997), kemungkinan besar masyarakat desa pantai bisa memperoleh pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi dan pembangunan bisa dapat terus dirangsang.

Gejala ini pun yang terungkap bahwa pembangunan masyarakat desa pantai saat ini menghadapi ancaman serius, terutama dalam bentuk "krisis ekologi" dan ketimpangan sosial yang meluas. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat kompromi dengan potensi ekosistem yang memilikinya, yakni hal yang hampir dapat dipastikan bahwa munculnya "krisis ekologi" yang dilanda, lalu berakibat ketimpangan sosial yang meluas. Hal ini adalah adanya kesenjangan dalam pengalokasian biaya pembangunan. Boekhari (1994), Munzir (1995), Paryabou (1994), Munasirah (1988) dan Van Duijn (1993). Konsep pembangunan yang diterapkan selama ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi fisik dan material, dan sangat kurang memperhatikan aspek kultural dan budaya dalam ekologi ekologi setempat.

Keterlaksanaan dan penetrasi ekonomi pasar (Bakry, 1967) mengakibatkan terjadinya pemusatan pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan kawasan desa pantai. Untuk itu, pemusatan pertumbuhan ekonomi ini berakibat satu garis lurus dengan pengusiran ekosistem estuaria dan perairan laut. Untuk itu, upaya ekologi akan sangat penting untuk memahami perilaku dari perubahan ekosistem. Jadi, pemusatan pertumbuhan ekonomi ini mengancam masyarakat desa pantai untuk ketidakekspansi "krisis ekologi". Pada gilirannya, dengan ancaman "krisis ekologi" ini pemusatan pertumbuhan ekonomi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam kondisi demikian "satu pilar utama" pembangunan desa pantai akan telah runtuh dan masyarakat desa pantai akan menghadapi ancaman ketidakpastian ketahanan ekonomi.

Ditinjau dari kerangka pembangunan yang berorientasi pada perubahan struktur sosial, pengembangan masyarakat desa pantai yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tentunya berdampak buruk bagi lingkungan. Lingkungan masyarakat Desa ini biasanya terjadi "Modernization Window Development". Soepa (1974) mengemukakan bahwa "terbuka" modernisasi "to open" terjadi pada masyarakat pada awal di Jawa terdapat lebih banyak di antara lebih potensial lapisan atas. Selain itu, sistem politik akan menjadi sangat modernisasi sehingga hasil pembangunan akan modernisasi sebagai hasil dari pengkajian, partisipasi masyarakat lapisan bawah. Dari segi penerapan prinsip dan pengalokasian pendapatan ekonomi secara agregat, maka akan yang daya sifit akan lebih penerapan teknologi modern dan ekonomi pasar. Jika sementara waktu masih berhasil. Namun, itu pun dari segi penerapan jaminan kesehatan dan kesempatan hidup dan pemerataan ekonomi modernisasi akan diarahkan kembali dengan kegiatan pembangunan (Soepa, 1974; Paryabou, 1993, dan Galgova, 1974). Dengan alasan ekonomi pasar yang dilakukan pemerintah modernisasi ini lebih banyak, terbukti dan menjadi andi munculnya gaya pembangunan modern.

Yang perlu untuk menguji perkembangan masyarakat desa pantai ini adalah dengan menggunakan kerangka pembangunan ini. Dengan 10 aspek ketahanan perikanan yang menunjukkan adanya keterkaitan dan keterkaitan tersebut antara modernisasi dan pembangunan



Gardner, H. *Persepsi yang Berbudaya: Ideanya, Perkembangannya dan Implikasinya untuk Pendidikan dan Masyarakat*. 1998; Munawar, 1991; Van Dieren, 1990; Purnomo, 1988; Djoj, 1988; dan Yudhanegara, 1978 dan 1988)

**Kesimpulan :** - Untuk paling baik yang harus dilakukan dalam kegiatan adalah dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan tidak memaksakan.

berkembangan, berbudaya yang menyerak antara modernisasi dan pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pada modernisasi tidak mengutamakan antara tanggung jawab terhadap pencapaian, kesetia, tetap, nilai kredibilitas sosial dan pengetahuan keadaan ekowisata dalam membangun kehidupan masyarakat desa pantai (dari nelayan).

Tampak dari Gambar 10 bahwa dalam perseperti pembangunan berkelanjutan, perubahan sosial (Hartono, 1999 dan Jansen and Page, 1999) juga diadopsi pada pembangunan struktur dan budaya masyarakat yang lebih harmonis. Struktur atau pengorganisasian sosial yang umum merupakan sistem sosial yang tidak terbagi, dan yang secara alamiah akan menjamin keberadaan kesetia sosial dan kredibilitas sosial. Masyarakat mempunyai kebutuhan dasar, peluang melakukan tindakan sosial vertikal, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, dan adanya kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Budaya masyarakat yang berbudaya berkaitan dengan pengeksekusi sistem nilai yang menunjukkan hasil sosial yang baik dan selang masyarakat lain, dan menunjukkan eksistensi sebagai masyarakat kehidupan bersama.

Konsep modernisasi dalam pengelolaan sumberdaya pantai dan perikanan laut tetap dapat digunakan. Namun saja, perubahan yang terjadi harus bertitik tolak pada tujuan pembangunan ekonomi melalui disipasi modal dan teknologi dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi perikanan di tingkat dan diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Hartono, 1998, dan peningkatan mutu dan daya dukung ekosistem setempat. Modernisasi perikanan dapat dapat akan menjadi pembangunan berkelanjutan jika dan hanya jika masyarakat ditunggui yang memodel dari sumberdaya ekosistem sebagai dan sistem sosial yang sehat tidak terganggu.

### Uraian dan Analisis

Data yang terkumpul melalui pengamatan dari wawancara langsung di lapangan. Untuk data pantai yang dipilih adalah yang mewakili wilayah yang karakteristik berbeda, namun tetap menunjukkan peradaban ekonomi masyarakat nelayan tradisional. Perbedaan karakteristik desa berdasarkan tingkat hubungan peradaban ekonomi, wilayah ekowisata, prasarana ekonomi, pelayanan lahan mangrove, kepadatan penduduk, teknologi penangkapan, dan ketahanan. Ambudaya menggunakan label UK.

Data Kandang dan Angkut dan Labuhan (mudat, wilayah Kabupaten Pangasinan Utara Timur), sedangkan Desa Pulau Semburan dan Perlis (mudat wilayah Kabupaten Pangasinan Utara). Aspek budaya dari kedua perikanan tradisional, namun budaya akan desa dalam desa kabupaten relatif tidak berbeda. Aspek teknologi diperlihatkan luas menjelaskan perbedaan teknologi kemasyarakatan ekonomi dan kemampuan sosialnya. Dimana desa desa di Unine dan Timur mewakili wilayah nelayan yang teknologi penangkapannya relatif tinggi. Penggunaan peralatan lengkap

jenis alat-pemrosesan ini tidak banyak ditemui pada nelayan tradisional di Jawa Timur. Sedangkan nelayan tradisional di Sumatera Utara sebagai besar masih menggunakan alat-alat dengan ukuran peralatan motor relatif kecil 10 GT.

Tabel 13. Pemilihan Desa-desa Nelayan Cakupan Beda-beda Lokasi Provinsi dan Kabupaten yang Diteliti

| Kriteria                   | Provinsi Jawa Timur |               | Provinsi Sumatera Utara |         |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------|
|                            | Des I               | Des II        | Des III                 | Des IV  |
| Daya-peralihan/ikan-umut   | Sedang-maju         | Maju          | Sedang-kurang-maju      | Maju    |
| Wilayah desa               | Darat               | Darat         | Pepulauan               | Darat   |
| Provinsi kabupaten         | Sedang              | Bulu          | Sedang                  | Bulu    |
| Hubungan masyarakat        | Sedekat             | Hulu          | Banyas                  | Sedang  |
| Kemudahan produksi         | Sedang              | Tinggi        | Rendah                  | Tinggi  |
| Teknologi penangkapan      | Sedang-Tinggi       | Sedang-Tinggi | Sedang                  | Sedekat |
| Sumberdaya non-penangkapan | Cukup               | Kurang        | Cukup                   | Kurang  |

keterangan:

Des I = Desa Karang Kemuningan, Des II = Desa Lelaan

Des III = Desa Pulau Sembilan, Des IV = Desa Pella

Cagar Timur mewakili kelompok perikanan darat/maju dan Sumatera Utara kurang-maju

1. Tiga, dua, dua, peralatan lengkap, lengkap-mesin

Kajian ini menggunakan metode penelitian sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Poplin (1957) dan Van Wright (1978). Dengan cara ini responden dilibatkan secara semi-terstruktur dan informasi dikumpulkan dalam bentuk sistem bertahap. Informasi kualitatif dinilai mempunyai lebih yang lebih berbeda dengan informasi kuantitatif. Para responden yang diteliti berada antara lain meliputi: nelayan pemilik (owner), nelayan bermitra (shareholder), tidak bermitra (shareholder), nelayan jika sendiri, pemasok/pemula nelayan, operator lembaga perikanan/wilayah, pemasok/pelanggan ikan, pedagang perantara, toko dan tempat penjualan peralatan lengkap.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan induktif (Van Weijl, 1978), dengan tujuan untuk mengungkap dan mengungkap informasi yang relevan mengenai kehidupan sosial nelayan dan desa, yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dari pengamatan yang umumnya bersifat kualitatif, karena pengamatan bersifat langsung, tidak dapat dihindari.

untuk menarik kesimpulan dan penemuan implikasi kebijakan. Analisis mengarah untuk menjelaskan hubungan klasifikasi gejala modernisasi, perkembangan, dan kemampuan masyarakat desa pantai. Dalam menjelaskan hubungan klasifikasi perlu dilakukan penelitian dalam "sistem makna" (Luhur, 1983) yang memandang dinamika masyarakat setempat dalam beradaptasi terhadap lingkungannya.

#### MODERNISASI DAN KEMUNDURAN PASAR

Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan ekosistem desa pantai akan berjalan sebagai siklus. Ketika usaha perikanan ikan di laut dan budidaya pantai. Dari hasil pengamatan dan budidaya ini muncul efek dimana sendiri oleh masyarakat desa pantai sebagai indikator indikator hampir semuanya diuji ke pasar. Mengingat terbutanya adanya transportasi dan aksesnya para pedagang, jurang selam diresmi hasil tangkapan dan budidaya tadi tidak terjatuh ke pasar.

Tabel 14 menunjukkan bahwa yang selanjut pasar tujuan dan kegiatan perikanan dan dan budidaya pantai pada masyarakat desa nelayan. Tampak bahwa kegiatan budidaya pantai lebih berorientasi ke pasar ekspor dibanding dengan kegiatan perikanan. Kegiatan budidaya pantai di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat desa pantai; namun tidak pada masyarakat desa pantai di Jawa Timur.

Relatif besarnya tenaga kerja (ekosistem) buruh mangrove di Jawa Timur, memerlukan dikembangkan budidaya pantai yang hemat modal. Akibatnya, budidaya pantai seperti tambak udang buruh bisa dikembangkan oleh orang luar desa setempat. Akibat akhir ini, budidaya tambak udang secara intensif telah menyebar banyak kepalan. Penggunaan bahan kimia yang relatif besar pada budidaya tambak udang budidaya telah menimbulkan masalah dan perkembangan pada ekosistem, pertumbuhan setempat.

Tujuan pasar domestik untuk pasar adalah untuk mencari pertumbuhan pasar di Pulau Jawa. Hal ini dipengaruhi mengapa beraneka jumlah penduduk yang terdistribusi di Jawa, sekitar 60 persen 1-120 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia. Bisa dipengaruhi pula mengapa adanya pasar lokal berfokus dari wilayah Jawa Timur dipusatkan di lingkungan pasar lokal.

Takdir akan yang pasar diperhitungkan, mengapa pasar domestik (Jawa) ini diuntungkan oleh di Jawa telah berkembang relatif-terbatas jumlah desa yang relatif maju. Takdir kurang, pasar-pasar, pasar ikan, dan pengalangan ikan yang beraturan besar dan modern sebagian besar terdapat di Jawa. Terdapat dari sudut ini modernisasi usaha perikanan Jawa berkembang pesat di Jawa dan relatif sangat maju dibandingkan

dengan di Sumatera. Adasamping merupakan produk perikanan laut dalam bentuk segar. Jawa juga menjadi pasar konsumen produk ikan olahan. Jawa semakin akan menjadi pasar produk perikanan laut yang tidak pernah jenuh.

Tabel 14. Jumlah Pasar Tujun Menurut Perikanan Utama Hasil Budidaya dan Penangkapan pada Masing-masing Daerah Pantai

| Daerah pantai         | Jumlah  | Jumlah pasar tujun        |         |
|-----------------------|---------|---------------------------|---------|
|                       |         | Semarak<br>(dalam juta/0) | Stagnan |
| <b>Sumatera Utara</b> |         |                           |         |
| Pada Kusbilatan       |         |                           |         |
| - Nelayan             | 4 - 5   | 10 - 15                   | ≥ 70    |
| - Penangkapan         | 10 - 15 | 50 - 70                   | ≥ 80    |
| Pada                  |         |                           |         |
| Tididaya              | 10      | 15                        | 60      |
| Pelandangan           | 5 - 10  | 10 - 15                   | ≥ 25    |
| <b>Jawa Timur</b>     |         |                           |         |
| Kabupaten             |         |                           |         |
| - Gresik              | 10      | 15                        | 60      |
| - Bangkalan           | 15 - 20 | 60 - 70                   | ≥ 10    |
| Kabupaten             |         |                           |         |
| - Tulungagung         | 5 - 7   | 20 - 30                   | ≥ 50    |
| Pangkalan             | 15 - 20 | 60 - 70                   | ≥ 10    |

Keterangan :

10 = tidak ada data atau data sangat kecil

% = ditanyakan oleh orang luar desa, biasanya akan datang bertedak dari dari kota

Teknologi penangkapan ikan di perairan pantai di Jawa relatif lebih maju. Berdasarkan dengan teknologi rekayasa, teknologi pasar ikan di Jawa menyebabkan para nelayan di Jawa terus memodifikasi peralatan tangkapnya. Hal ini dan ukuran jaring, dibanding di lain-lain, lebih kecil dari 80 persen. Sebagai gambaran penggunaan jaring jenis puruseline yang dahulu hanya berukuran ukuran 60 pin, sekarang sudah mencapai 100 - 120 pin.

Pergerakan usaha perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Untuk tahun-tahun ini ada upaya perbaikan. Selain perbaikan ini, mulai dari sekitar 20 PK menjadi lebih dari 30 PK. Untuk tidak dikenal akan peningkatan untuk perikanan jaring gubuk, sekarang semua jenis perahu kemudi di atas 20 PK menggunakan "gubuk". Selain itu juga digunakan mesin tenaga untuk perikanan. Untuk lebih lebih, setelah 1991, masyarakat nelayan di Jawa Timur banyak yang mengganti armada penangkapan. Jumlahnya meningkat dengan armada jenis kapal puruseline.

Perkembangan ke arah pemakaian jenis alat tangkap yang lebih besar, berteknologi lebih tinggi, dan universal lebih besar mengindikasikan kesadaran nelayan bahwa tangkap ikan harus sesuai dengan ukuran ikan. Nelayan tradisional juga diarahkan bahwa jika ukuran ikan dalam menangkap kegiatan penangkapan. Berkaitan dengan itu, penggunaan jaring juga lebih kecil (skala kecil), kapal lebih besar, organisasi lebih terencana, dan umumnya usaha penangkapan lebih ke arah pasar atau komersial ("komersial") menjadi semacam kebutuhan. Kemudian ini memberikan pendapat bahwa nelayan pasar akan meningkatkan budidaya modernisasi dan perlu melakukan juga pada masyarakat desa pantai di sekitar.

Sebuah gambaran yang buruk tentang upaya upaya yang ditunjukkan oleh hasil modernisasi tadi kurang memperhatikan aspek ekologi perairan. Modernisasi yang terjadi juga masyarakat desa pantai lebih mengarah pada pendekatan ekologi yang kurang terkontrol terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Banyak kemungkinan kerusakan yang mengakibatkan akan semakin parah (Lipatid Laga, 1992) tidak dihindarkan, akan mengarah pada terjadinya bencana ekosistem perairan laut. Jika bencana itu benar benar terjadi, kemungkinan besar hal itu akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan masyarakat desa pantai secara drastis.

## GAMBAR "KEJISIR EKOLOGI" DAN USAHA EKONOMI

Walaupun kegiatan penangkapan ikan merupakan usaha utama yang relatif dominan kegiatan ekonomi di masing masing desa pantai tetapi bervariasi. Faktor sumberdaya alam atau aspek ekologis sangat menentukan khasanah jenis kegiatan ekonomi yang ada di suatu desa pantai. Tabel 10 menunjukkan sumberdaya desa pantai yang saat ini diarahkan ke kegiatan budidaya. Tabel 11 menunjukkan ekologi Desa Pantai Sembilan mempunyai peluang relatif paling besar mengembangkan kegiatan ekonominya melalui usaha budidaya. Pada desa pantai lain, seperti Desa Kandang Sembilan, peluang pengembangan kegiatan budidaya pantai untuk pengembangan kegiatan ekonominya relatif terbatas.

Usaha budidaya yang dominan di Desa Pantai Sembilan relatif beragam. Penggunaan jaring apung atau karamba untuk pembesaran ikan karang dalam tiga tahun terakhir berkembang sangat pesat. Pak ikan karang dipelihara dan budidaya budidaya selangkul. Pak nelayan kecil menangkap bibit ikan karang di alam, yaitu di sela sela hutan mangrove. Usaha ini sangat menguntungkan dan bisa mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp 1 juta per bulan, dengan ukuran ikan jaring sekitar 15 cm. Pembesaran pak ikan karang berkisar antara 1000 kg karang karang karang 0,4 - 0,6 kg per ekor. Usaha jaring apung ini tampaknya masih sulit berkembang di Desa Pantai.

Tabel 15. Keterbatasan Sumberdaya Hutan Mangrove, Lahan Pantai dan Daratan untuk Mengkaji Sektornya pada Masyarakat Desa Pantai.

| Desa pantai       | Sumberdaya |               | Pemeran |
|-------------------|------------|---------------|---------|
|                   | Sumberdaya | Lahan pesisir |         |
| Sumberdaya Ulang  |            |               |         |
| 1. Pulau Sembilan | XX         | XX            | XX      |
| 2. Perda          | XX         | X             | X       |
| Jawa Timur        |            |               |         |
| 1. Jember         | XX         | X             | X       |
| 2. Jember         | X          | XX            | XX      |

Keterangan : XX = banyak, X = sedikit, X = kecil

XX = data sangat kecil atau tidak ada.

Usaha budidaya lain yang tumbuh di Pulau Sembilan adalah penanaman udang semi intensif, kepiting, dan kerang. Karena terbatasnya sumberdaya lahan pesisir, usaha budidaya ini sedikit sekali ditemui di Desa Perda. Pertanian lahan darat, seperti penanaman padi dan jagung, kelam-kayu, pisang, dan buah-buahan berkembang cukup baik di Pulau Sembilan namun tidak dijumpai di Desa Perda.

Di Provinsi Jawa Timur, usaha budidaya lahan pesisir dan darat hanya berkembang di Desa Kandang Semangka. Budidaya ikan paku dan udang, serta tambak udang, sedangkan desa lain tidak ada. Usaha lain yang berkembang baik, tidak termasuk budidaya tambak, adalah dikebun oleh penduduk desa pantai yang bermodal besar, sedangkan tambak ikan tidak ada. Penduduk desa sempai berketan erat dengan dengan bekandak, dan modal tinggi tidak sanggup bagi sebagian penduduk desa pantai setempat. Masyarakat desa sempai hidup ber-ekonomi dengan kegiatan ekonomi modern, seperti tambak udang intensif, ikan udang koral yang berkembang untuk ekspor. Kondisi sebaliknya ada di Desa Sembilan tidak berkembangnya budidaya, usaha atau pertanian darat.

Dari Tabel 14 tampak bahwa, baik di Sumatera maupun Jawa Timur, dijumpai desa pantai yang mengalami krisis ekologi untuk mengatasi keberlanjutan ekonomi masyarakatnya. Desa Pantai Perantara Ulang dan Desa Kandang Semangka Jawa Timur menunjukkan tipe desa yang mengalami "krisis ekologi" untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kedua desa ini tidak dengan pusat kegiatan ekonomi dan jumlah penduduknya relatif sangat padat (> 400 jiwa per km<sup>2</sup>).

Selain rumah-rumah dikawatir bahwa kepadatan penduduk di Jawa Timur relatif tinggi. Ada rencana penduduk pindah sumberdaya pantai juga relatif tinggi. Terdapat bubungan yang jelas antara sumberdaya tekanan penduduk dan kerusakan atau hilangnya hutan mangrove. Menurut pengakuan penduduk setempat, sekitar 20 tahun lalu hutan mangrove di Desa Kandang Semangka dan Sembilan relatif besar. Karena desakan

(misalnya) untuk pemukiman, pertanian, kayu bakar dan limbah udang, secara berangsur-angsur luas lahan mangrove berkurang drastis.

Hal-hal yang mangrove sebagai berdampak buruk bertatap langsung pesisir seperti ikan Tabel 16 menunjukkan bahwa kapal perangkap ikan dan pantai di mangrove mangrove desa pantai. Hal ini ada Suburap, erat antara hubungan hutan mangrove dan pesisir desa. Perangkap ikan. Pada desa pantai yang masih mangrove, hutan mangrove seperti di Desa Pulau Sembilan dan Peris (Sumatera Utara), desa pesisir seperti ikan dari pantai telah desa Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan desa pantai yang sudah rusak. Tidak ada lagi hutan mangrove seperti di Desa Sembilan Sembungan dan Labuhan (Jawa Timur).

Desa-desi pantai di Jawa Timur jarang dijumpai lagi kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan perahu atau kapal berukuran  $\geq 5$  GT (Gross Tonnage) kecuali kapal yang menggunakan jaring dengan jaring besar (gudud). Dengan menggunakan kapal kecil ( $\leq 5$  GT) dan beberapa motor kecil ( $\leq 15$  HP) akan sulit jika menangkap hasil tangkapan yang bisa menutupi kebutuhan nelayan, karena daya jangkaunya relatif pendek. Namun untuk desa-desa pantai di Sumatera Utara, walaupun hal ini tidak mungkin dilakukan berarti berat masih banyak di antara nelayan menangkap yang menggunakan perahu bermotor berukuran  $\geq 5$  GT.

Tabel 16. Data-rata-rata Daerah Penangkapan Ikan dan Hasil di Mangrove Desa Pantai Kecamatan Tugu (Jawa Timur)

| Desa pantai           | Rata-rata hasil tangkapan perahu |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
|                       | $\leq 5$ GT                      | $\geq 50$ GT |
| <b>Sumatera Utara</b> |                                  |              |
| 1. Pulau Sembilan     | 5-30                             | 0            |
| 2. Peris              | 10-30                            | 0            |
| <b>Jawa Timur</b>     |                                  |              |
| 3. Labuhan            | 20-30                            | $\geq 50$    |
| 4. Labuhan            | 20-30                            | $\geq 50$    |

Keterangan: 0 = tidak ada data.

Diperoleh kecenderungan bahwa untuk mempertahankan jumlah tangkapan yang relatif tetap dari tahun ke tahun (dalam 10 tahun terakhir), diperlukan jumlah perahu yang terus bertambah yang lebih besar ini menunjukkan bahwa ada terdapat tekanan mengalami degradasi atau menurun pada gejala "tulang ekologi" pesisir. Hal ini mengakibatkan desa pantai yang menggunakan mata pencaharian ini dan kegiatan penangkapan, gejala ini memerlukan perhatian serius.

Memori pesisir, sebagian besar penduduk desa pantai setempat, masih menggunakan jaring menggunakan perahu tradisional ukuran kecil semakin sulit diperoleh karena produktivitas perairan laut telah banyak mengalami penurunan (lebih dari 20 persen) terutama

dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, sebagian budidaya perikanan tidak sepenuhnya bisa dijalankan dengan biaya relatif murah. Banyaknya kerusakan akibat banjir, terutama akibat ekspansi yang berlebihan dan pendangkalan hutan mangrove, telah mengancam sebagian besar produksi ikan pantai seperti kepiting, kerang, udang, ikan karang, kakap, dan lain-lain (Andrianti, 2022).

### EKSPLOITASI DAN GEJALA KETIMPANGAN

Pemanfaatan teknologi perikanan yang telah maju telah melahirkan barang-baru terkait erat dengan upaya memperoleh hasil tangkapan yang lebih besar. Perikanan yang sudah kemudian, antara lain adalah, jala belayan (jagkap) umumnya berwujud bahwa sumber daya laut adalah milik bersama. Sementara itu, secara bertahap muncul muncul sumber daya laut yang adalah terbatas. Gordon (1998) mengemukakan bahwa, sejak penangkapan komersial di laut, eksploitasi sumberdaya stok ikan di laut sebagai konsekuensinya adalah semakin besar usaha penangkapan komersial, terutama yang menggunakan teknologi tinggi, akan semakin menguras stok ikan di laut.

Gejala over eksploitasi akan pengrusakan stok ikan di laut telah mulai dirasakan nelayan tangkap, terutama di Desa Timor dan Sumatera 1, Jawa. Sebagai gambaran, ternyata jumlah ikan yang ditangkap nelayan kecil pengguna jala belayan (jagkap) semakin terbatas. Meskipun jala belayan di kawasan Danau Maninjau Brindan. Dalam sepuluh tahun terakhir, daerah perangkap-jalannya (fishing ground) terus sekali semakin mengecil, dan hasil tangkapan akan hanya bisa mencukupi kebutuhan yang sangat terbatas. Eksploitasi perikanan dengan jaring listrik oleh pemilik kapal motor besar dari Medan merupakan perusakan dramatis tempat berpijaknya nelayan tangkap kecil. Bahkan lamanya pengawasan laut telah menyebabkan hilangnya eksplorasi yang berlebihan ini.

Pengaliran nelayan kecil semakin hari semakin berkurang. Gejala ini terjadi baik di Sumatera Utara maupun Jawa Timur. Telah banyak ditemui nelayan kecil terpaksa menjual perikanan tangkapnya kepada nelayan besar karena terbelit utang. Banyaknya nelayan kecil menjual hasil tangkapan mereka ke nelayan besar, pedagang, dan mengorbankan kemakmuran pada produksi tangkapnya pada pemilik modal atau nelayan besar atau modal. Dengan kecil tangkapan yang terus merosot, karena "krisis ekologi" maka banyak ikan yang mati. Pada akhirnya, perikanan tangkapan, sebagai salah satunya "barang bersama" yang dimiliki semua penduduk di suatu masyarakat bukannya jadi.

Banyak ditemui di Desa Lingsar, Desa Lingsar kurang dari 5 tahun, nelayan kecil akan menjual perikanan tangkap atau jampukan berwujud berbagai ikan atau nelayan kecil. Di Desa Kandang Semarang dan sebagian gejala ini akan juga banyak ditemui terutama pada nelayan kecil atau nelayan non perikanan. Sebagai salah satu contoh, bahwa hasil

penangkapan dan waktu ke waktu semakin meningkat, dan hutang nelayan terus menumpuk. Dewasa ini dijumpai adanya golongan nelayan pengumpul perolehan tangkap yang berjumlah sedikit di satu sisi dan golongan nelayan buruh yang berjumlah semakin banyak di sisi lain. Realisasi ini sekaligus menggambarkan bahwa perkembangan ketimpangan sosial yang dari waktu ke waktu menunjukkan gejala semakin meningkat.

Salah satu hasil hasil yang diperoleh, antara lain oleh pendaklar, pengkaji dan nelayan sendiri, menunjukkan alasan buruh ikan bertanggalkan sebatang sarung, yaitu K. Perellera Prasadji (1990) dan Terebo dia, (1990) di Jawa Timur menunjukkan, bahwa sistem bagi hasil pada kegiatan nelayan tangkap telah menyebabkan semakin besarnya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang terjadi bukan saja pada hubungan antara nelayan pemilik perahu, tangkap dan nelayan buruh namun juga antara nelayan pemilik yang berkecukupan kelas dengan nelayan buruh yang tidak berkecukupan kelas. Akibatnya, nasib nelayan buruh yang tidak berkecukupan kelas semakin hari semakin sulit untuk berkembang.

Sistem bagi hasil dapat juga akan sebagai faktor penyebab adanya gejala ketidakadilan antar golongan nelayan, dan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial yang semakin besar antar golongan nelayan. Menurut Sesti (1999), ketimpangan sosial yang dapat diatasi dari hasil perolehan dari kegiatan penangkapan dapat memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan mereka. Hanya saja pendapat Sesti ini sulit terwujud, karena "krisis ekologi" menyebabkan hasil perolehan dan kegiatan nelayan sulit ditingkatkan, dan gejala ketimpangan ketimpangan tidak dapat dipecahkan dan gejala ini akan semakin memperburuk tangkapan, dan sistem bagi hasil akan semakin merugikan nelayan. Fatah, (1988).

Gejala ketimpangan dan keterbelakangan pada masyarakat desa pantai ini sebelumnya telah diungkap oleh Fransuaji (1981) dan Moysarto (1984). Hanya saja, dalam keadaan ini, pakar telah belum ada pengaliran langsung antara gejala "krisis ekologi" dengan ketimpangan dan keterbelakangan pada masyarakat desa pantai. Selama puluhan tahun masih merupakan sumberdaya terbuka atau *open access* (Gordon, 1948; Smith dan Westlund, 1968; Smith, 1977), proses perikanan yang tidak ada dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak bisa dihindarkan. Golongan nelayan besar yang mempunyai modal besar dan ada mengakses perkembangan teknologi mutakhir, akan lebih berkembang dalam meningkatkan daya eksploitasinya terhadap sumberdaya perikanan. Kelompok nelayan kecil, karena keterbatasan dalam pemanfaatan dan kurang akses memiliki perkembangan, akibatnya, semakin sulit beradaptasi terhadap perkembangan produksi dan eksploitasi laut untuk kegiatan penangkapan ikan.

Gambaran yang menarik yang menggambarkan kondisi adanya krisis ekologi, dan ini di Pulau Sembilan. Teknologi penangkapan ikan di Pulau Sembilan selama 10 tahun relatif tidak mengalami perubahan yang

berarti namun demikian tidak dengan cara-cara yang sudah jadi di dalam ketimpangan sosial yang jelas. Gejala yang terjadi di Pulau Sembilan meliputi, korupsi dengan yang terjadi di Desa Perla (Emanjaya Utara), Korupsi Seremikken dan Labuan Kawa Timur). Sebagian besar nelayan di Pulau Sembilan adalah pemilik peralatan tangkap; hanya sebagian kecil yang benar-benar sebagai nelayan murni. Para nelayan pemilik peralatan tangkap di Pulau Sembilan justru sering kesulitan dalam menjual hasil tangkapan mereka untuk bertahan saat akan melakukan operasi penangkapan. Kemudian itu menunjukkan bahwa pemetaan teknologi bukan selamanya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru sebaliknya.

### RESUMPTAN DATA FUGAS KUALITAS

- (1) Pulau Sembilan modernisasi di kawasan desa pantai yang digerakkan oleh pemerintah dengan jalan modal dan teknologi mutakhir ternyata membawa akibat yang tidak terduga terhadap sumberdaya alam dan ekosistem perairan serta perairan laut. Modernisasi yang menekankan pemenuhan pertumbuhan ekonomi menghasilkan banyak terhadap penguasaan sumberdaya alam dan biologi sempit. Selain itu, modernisasi juga punya nilai negatif besar terhadap masyarakatnya ketimpangan (dan kemiskinan) sosial yang meluas di pesisiran kawasan pantai.
- (2) Pembangunan kawasan dan masyarakat desa pantai yang dewasa ini dirasakan lebih terlihat telah mengayau pertumbuhan ekonomi yang kurang sekali mempedulikan keberadaannya daya dukung dan daya ekosistem sempit. Akibat dari penggunaan teknologi dan modal juga dalam mengeksploitasi ekosistem perairan dan perairan laut sehingga perkembangan perikanan masyarakat desa pantai dari waktu ke waktu dengan dengan ancaman biologi ekologi. Terus adanya penyempurnaan konsep atau perspektif pembangunan akan modernisasi, perlu giatan perekonomian masyarakat desa pantai dalam satu dua dekade mendatang diperkirakan akan mengancam kemacetan.
- (3) Pengembangan pembangunan desa pantai, terutama melalui modernisasi kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan kemampuan daya dukung masyarakat nelayan kecil untuk membangun produksi masyarakat. Mengingat sumberdaya perairan laut bersifat terbuka, dan kurang dilindungi oleh struktur dan organisasi yang ketat, yang lebih diuntungkan dalam pemanfaatan sumberdaya laut adalah golongan nelayan besar dan nelayan yang berkawan khusus. Dengan demikian, ketimpangan sosial akan semakin meluas dengan semakin meningkatnya modernisasi.
- (4) Kemiskinan bukan hanya sekedar nilai absolut dapat diadukan indikator kemiskinan terjadinya "kurang ekologi" yang akan dihadapi

masyarakat desa pantai setempat. Ketidaksiapanan golongan nelayan berperalatan menangkap ikan akan lebih dalam mempengaruhi peralatannya, akibat terbelah belah dapat dipelikan indikator "terputusnya" kelompok nelayan yang semakin lepas. Sistem perlindungan bag hasil dan penera akan selampir tidak lagi mampu menggaransi pemeliharaan kemitraan sosial yang terjadi. Gejala "terlalu ekologi" yang timbul saat ini merupakan tanda awal akan terjadinya ketimpangan sosial. Pada akhirnya "terlalu ekologi" ini akan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat desa pantai.

- (5) Untuk mendukung pembangunan nasional, belajar dari konsep pengembangan desa pantai, perlu dilakukan koreksi ke arah penerapan konsep pembangunan berkelompok. Anggapan bahwa aspek ekologi tidak menjadi penghalang untuk bag pemukiman pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan merupakan suatu yang tidak relevan bag membangun kemitraan pemukiman ekonomi terhadap sumberdaya kawasan. Harus dibuktikan dengan nilai manfaatnya secara lebih luas dan berjangka (lebih) panjang, luas geografis, nilai manfaat tidak langsung dan nilai pilihan perlu lebih dikedepankan dalam memberikan penilaian ekonomi terhadap sisi-sisi ekonomi dan peneraan lain.
- (6) Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi, yang selama ini hanya menggunakan instrumen fiskal dan non-fiskal dalam jangka pendek, perlu diimbangi dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan (daya dukung dan) suatu ekosistem setempat, serta pengembangan ke arah keberlanjutan struktur sosial yang lebih sehat (tidak timpang). Untuk pengembangan aspek ekologi dan struktur sosial pendukungnya didasarkan pada penerapan "moral politik" yang lebih mengarah pada penyempurnaan pemerintahan yang lebih efisien pemerintahan dan lebih etis (transparan).

## BAB VIII.

### WIRASADA DAN KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERKELANJUTAN

Kajian dan Perspektif "Transformasi" ke Arah Terwujudnya Masyarakat  
Agribisnis yang Adil dan Harmonis Lingkungan

Agribisnis sebagai salah satu pilar pembangunan sebagai penggerak kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan agribisnis di pedesaan, masih belum banyak di dalam para perencana pembangunan ekonomi secara umum. Oleh sebab itu walaupun selama 2 dekade terakhir dibangunnya IMF telah mendapat pinjaman modal dengan interest, namun tidak ada prakarsa untuk melakukan benak-benak dari tidak kompromi. Bahkan dewasa ini ekonomi Indonesia telah kungup-hew membentangkan diri dari krisis yang maha. Melalui ini mengungkapkan bahasan secara benar wirasada dan lembaga kemitraan dalam pembangunan agribisnis secara berkelanjutan, yang ditinjau dari perspektif "transformasi" ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan harmonis lingkungan. Wirasada atau entrepreneurship dalam konteks pembangunan masyarakat dapat dipahami sebagai "engine of economic growth". Dengan kata lain, upaya untuk wirasada dan peran wirausahawan akan sulit dibayangkan bahwa bidang agribisnis akan dapat berkembang cepat selama dengan iklim dan ekonomi pasar global dan regional.

Pengelola ekonomi yang ("good") pada kegiatan pertanian umumnya akan diawasi oleh orang ahli mengenai wirausahawan, dalam bentuk akan memiliki go. Wirasada dan entrepreneurship sumberdaya alam dan lingkungan (lingkungan alam dan masyarakat) untuk tujuan komersial ("keuntungan uang"). Tanpa terapan untuk menyebabkan gangguan ini, akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam baik akan melahirkan ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya lingkungan alam yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan "kemacetan" dan perkembangan agribisnis ini sendiri dan akhirnya menjadi tidak bisa berkembang. Eksploitasi pada sumberdaya manusia ("unsolded labor, manpower") yang berlebihan akan menimbulkan "uang" pemilih ("kelebihan") yang semakin tajam antara "life-pending" dan "manasa pekerja" dengan banyak waktu bekerja ini akan menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang tinggi, dan pada gilirannya mudah mengarah pada terjadinya "krisis sosial" yang berespanjangan. Krisis sosial ini sangat potensial untuk menimbulkan "kemacetan" bahkan juga pada perkembangan agribisnis, karena juga akan menimbulkan iklim iklim di pedesaan.

Pengembangan agribisnis sebagai cabang usaha ekonomi, sangat potensial diintegrasikan dengan keberlanjutan sumberdaya lingkungan alam, jika akan sumberdaya alam dapat ditugaskan dengan pengembangan agribisnis, misalnya dengan pengembangan agribisnis, peternakan, perikanan

<sup>1</sup> Strategi pembangunan ini telah di publikasi dalam Jurnal AGRIKASIA 0503 2004(3:053-010). ERS, Center for Strategic and International Studies, Jakarta.

perkembangan teknologi-komunikasi akan berarti, maka makna tujuan "transformasi" juga dapat dikatakan sebagai "transformasi" di atas. Jika pengembangannya didasarkan pada modal dengan diabaikan pengaruh aset dalam, maka bahwa interdependensi antar pelaku agribisnis relatif antara sektor berbasis asimetris, maka pengembangan teknologi komunikasi (perantara: capital sharing) yang bersifat "mutually beneficial" (antara "si kecil" dan "yang besar") berarti saja akan mendapatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan "sistem modal" namun juga akan mengakibatkan struktur pembangunan agribisnis baru dan tidak hanya yang ya.

Keperpektif "transformasi modalitas" penting diketegapikan mengingat, pertama bahwa secara tradisi dan fakta paradigma masyarakat tradisional tidak saja kurang akan nilai, tetapi-walaupun "mudanya modal" (memang sudah Barotok, 1964), seperti teknologi dan kapial; namun juga dipengaruhi oleh budaya nonmaterial, seperti ideologi kebudayaan, struktur sosial, dan sistem nilai (misalnya: sosial/demokrasi). Kedua, perubahan masyarakat pertanian kita akan akan bebas dari pengaruh pemerintahan pusat-pusatnya akan dari pasar global yang "disponsori" oleh negara-negara maju ("modernisasi"), karena struktur-sifatnya yang agribisnis. Ketiga, secara konseptual kita dapat membedakan perbedaan antara masyarakat pertanian yang masih berbudaya tradisional ("subsektor") dan masyarakat agribisnis modern ("komersial"); yang hal ini dapat mempermudah kita untuk melakukan penempatan ke depan pada terbentuknya (dan khal) masyarakat agribisnis yang berbudaya dan bermartabat lingkungan.

### AGRIBISNIS YANG FORMAL LINGKUNGAN

Isiah Agribisnis dipopulerkan antara lain oleh Davis dan Goldberg (1967), secara harfiah dapat diartikan sebagai modal atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian. Mengutip pendapat Denny dan Rickard (1982), Rukman dan Rukman (1983) mengatakan bahwa agribisnis mencakup secara menyeluruh aktivitas manajemen dan usaha bisnis [ekonomi] yang melibatkan pemilikan-pemilikan, pemilikan modal pertanian, produksi dan pengolahan produk pertanian, pemasaran, jasa keuangan (bank), pemasaran, distribusi dan pemasaran. Selain dari aspek sumberdaya, antara agribisnis dan bisnis non-pertanian, misalnya industri relatif berbeda perlakuan yang khusus agribisnis sangat berkaitan dengan faktor ekosistem atau lingkungan, seperti alam, air, (keuntungan) sumberdaya hayati dan lain-lain; sedangkan industri relatif lebih lebih bergantung. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa keterkaitan pembangunan agribisnis, dengan demikian, diharapkan dapat dibedakan agar memiliki komprehensif yang tinggi terhadap lingkungan dan dimana agribisnis tadi ditumbuhkembangkan.

Saat ini sumberdaya manusia Indonesia sebagai dasar bermartabat relatif rendah (rendahnya harga pasar SD) dan modal mengkelakan



dipertaruhkan dimengukangi dengan penanaman investasi yang "Konsentrasi untuk mengembangkannya" menjadi sumber daya alam seperti pertanian upland tidak seperti sebelum dimusnahkan. Situasi yang lebih baik lagi misalnya adalah "pengembangan pertanian "taman tanaman industri" di lokasi marjinal, adalah yang berdampak positif terhadap semua sumber daya alam setempat. Dengan gambaran demikian, sumber daya alam tersebut tidak dipandang sebagai faktor yang "putus" dan tidak dapat dengan tenang pelaku-pelaku agribisnis. Perlibingkan dan penemuan kembali terhadap sumber daya alam ini bisa menjadi jawaban dengan demikian, menjadi bagian penting dari pengembangan agribisnis yang berorientasi terhadap lingkungan.

### EKONOMI PASAR DAN TRANSFORMASI PERTANIAN

Melalui paradigma ekonomi pasar (uang) dalam masyarakat pertanian Indonesia tidak lagi dapat dihindari, dan tampaknya ini disebabkan bahwa penerapan "ekonomi uang" telah secara signifikan meluas dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat telah ada kesadaran politik (politik masyarakat) dimana, proses masyarakat penduduknya mulai berada di sektor pertanian melalui ini tampaknya bahwa bisa menerima keadaan itu sebagai kenyataan. Melalui era blok-blok perdagangan, setelah *Langkat Round* ditetapkan berlakunya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), seperti EEC (*European Economic Community*), dan akhirnya - ini adalah APEC (*Asia Pacific Economic Community*) dan *Triangle of trade*; semakin menunjukkan "kemampuan" bahwa masyarakat pertanian Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi pasar global. Dalam hal ini, Indonesia tidak menyangkal pertanian bisa atau tidak atau bukan saja bisa dimengukangi dan dilestarikan, dengan pertanian berubah yang terjadi di pasar tingkat global, namun juga dengan pertanian-perubahan yang terjadi di sektor industri, jasa, dan perdagangan di tingkat lokal dan regional.

Reformasi dan sejarah perkembangan masyarakat Kopye abad 19-20 (Wong, 1987): perkembangan dari pertanian pertanian tradisional ke pertanian sektor "ekonomi pasar", di satu sisi (negara) memacu perkembangan sektor yang dapat dilihat di sini telah memberikan peluang tumbuh "tata cara sosial" yang beragam antara "tali-kayu" dan "modernisasi". Jejak-jejak perkembangan tali kayu banyak masih terlihat pada pola pola budaya petani-petani tingkat menengah antara dua kelompok rakyat rakyat asli, atau modern berbasis ekonomi industri "kayu" dan pertanian modern dan negara sedang berkembang berbasis ekonomi industri "tali" dan pertanian tradisional. Ada "selera" perbedaan struktur kemampuan di antara dan masyarakat tali menjadi melalui untuk "tersempit" historis yang sesuai dengan ukuran eksploitasi, tali yang menyuarke "kemandirian" atau kelompok masyarakat "modernisasi" namun antara manusia dan sumber daya alam lingkungan yang menjadi pendukungnya (Wong, 1987).

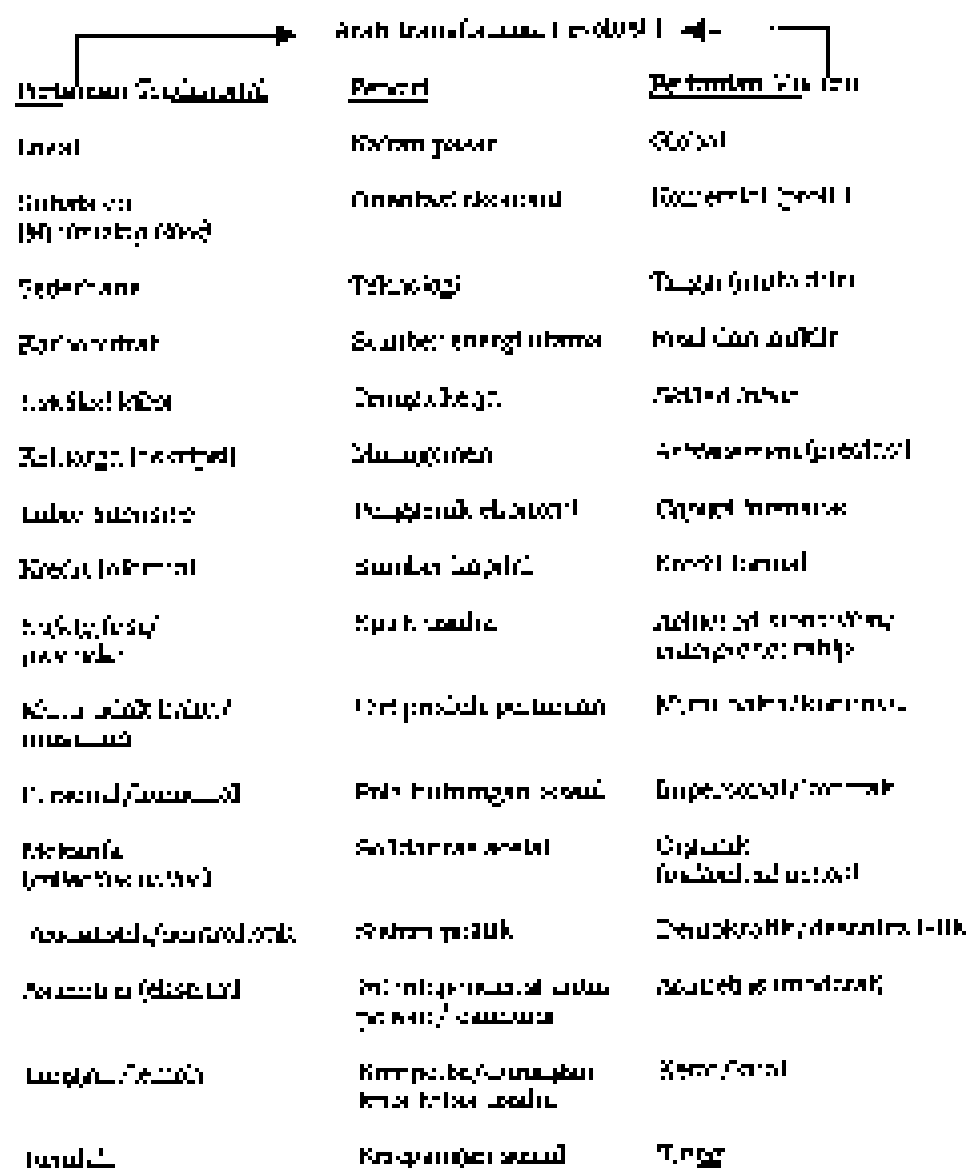
Dalam Pembukaan UUD 1945, keadilan sosial ditempatkan pada urutan ketiga dari penyederhanaan negara bangsa. Hal tersebut menunjukkan kedudukan yang lebih tinggi relatif pada urutan pembangunan negara baru Indonesia (Jahid). Pada UUD masalah keadilan sosial kembali mendapat pengantar dengan ini di satu sisi jumlah golongan masyarakat yang tidak relatif masih besar, sebabnya besar di sektor pertanian dan pedesaan. Di sisi lain, penguasaan penguasaan yang justru berjumlah relatif kecil (non mayoritas) telah menguasai 3/4 dari sektor-sektor skala besar melalui kepemilikan modal dan teknologi. Kemandirian dan juga berkehangung di sektor pertanian, misalnya pada agribisnis peternakan. Usaha kecil agribisnis (peternakan) tidak tambah dan pengurangan. Itulah sebabnya mengapa ekonomi pasar, walaupun sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi, tidak dapat mencakup seluruh faktor-faktor tunggal penggerak masyarakat untuk mencapai keadilan sosial.

Sebagai umum transformasi masyarakat pertanian dari yang bersifat budaya tradisional (tribesmen) ke modern (modernitas) dapat dirumuskan seperti pada Gambar 11. Dalam gambar secara eksplisit tidak dirumuskan bahwa dari tingkat keadilan sosial yang berbeda-beda akibat dari tingkat perkembangan masyarakat pertanian yang berbeda. Artinya, masyarakat keadilan sosial tidak dapat begitu saja diartikan sebagai akibat langsung dari penetrasi ekonomi pasar atau sebagai akibat dari berkembangnya budaya pertanian dari yang bersifat tradisional ke arah agribisnis modern. Dengan demikian, pemahaman keadilan sosial haruslah juga merupakan bagian dari cakupan perkembangan ekonomi yang mencakup secara keseluruhan proses dan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan baik untuk memilih dan memilih untuk upaya-upaya yang menghimpun partisipasi ekonomi dari golongan masyarakat agribisnis tingkat bawah di pedesaan, yang hingga saat ini golongan tadi masih "terseor" di belahang.

Dimensi budaya masyarakat agribisnis (modern) antara lain ditinjau oleh perubahan penggunaan teknologi, manajemen modal (uang), manajemen profesional. Kedua, ditubung oleh tenaga kerja berkebangsaan relatif tinggi, energi fisik dan audit, bahan baku kontinyu dan berstandar mutu tinggi, lembaga perantara formal, sementara perusahaan yang tinggi. dan sistem politik yang cukup demokratis dan sekuler. Ketiga, ditubung pada pembangunan modal yang berorientasi ke personal, pendidikan masa depan, dan ke arah penguasaan atau penguasaan yang relatif lebih demokratis ekonomi. Keempat, tingkat kooperatif antar pelaku ekonomi relatif tinggi dan tinggi, serta adanya kepemimpinan sosial yang relatif tinggi. Juga ditubung itu, pemerintahan masa modern pemerintah merupakan hal yang tidak hanya penguasaan dan lebih lagi penguasaan, karena dengan proses tadi justru akan menghasilkan dan menghasilkan tujuan untuk pertumbuhan efektif pemanfaatan sumberdaya agribisnis yang ada.

Sebagai penyederhanaan pemerintahan, juga sangat mempengaruhi kemajuan ekonomi atau secara sosial pertanian di pedesaan. Sistem pemerintahan yang mengendalikan esensi-kemajuan ekonomi (tidak tidak sesuai) juga menjadi ancaman dari perkembangan keadilan masyarakat di bidang usaha pertanian. Masyarakat penguasaan pertanian modern

dan tidak pilai akan penerapan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan jumlah penduduk. Karena tanpa itu, ancaman kemiskinan dan ketidakteraturan distribusi penduduk akan, beberapa tahun mendatang akan menjadi kenyataan.



Gambar 11. Arah transformasi dan Tiga Element: Aspek Tradisional, Kelelahan Ekonomi, Pergerakan Ekonomi, Keterampilan, dan Keterampilan

## WIRASALA DAN WIRASALA KEMANUSIAAN

Untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat adalah semesta-mesta dengan modal investasi pemenuhan pertumbuhan ekonomi yang dengan menggunakan peran masyarakat pedesaan dan agribisnis-ekonomi. Yang dibagikan dua lajur: pengembangan agribisnis, yaitu pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, adalah analog dengan mengabungkan dua sifat (yaitu usaha dan keberagaman) dalam satu tubuh belah ketupat struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam kerangka transformasi sosial yang demokratisasi (pemerintahan), penggabungan keadilan sosial dirinci oleh John H. Korten (1980) perantara masyarakat. Hanya saja, keadilan yang juga sebagai hasil dari akses pada landasan pembangunan ekonomi yang tumbuh secara mandiri. Dengan demikian, makna keadilan sosial bukanlah identik dengan "pemerataan kemiskinan", melainkan pemerataan tujuan pemerataan kesempatan bagi setiap kelas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang akan menjadi keadilan yang lebih tinggi peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Semangat wirasala dan peran wirasalaan pendiri untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengembangan agribisnis. John H. Korten (1980) dalam (1981), seorang Rector of American College & Writings (Perbani, August 26, 1991) menyatakan: "It is a fact that we make a success of our country as a successful economy without entrepreneurs. They are the driving force of any economy ...". Mampu atau tidaknya perkembangan ekonomi sangat ditentukan oleh besar atau kecilnya dukungan wirasala. Hanya (1988) mengungkapkan bahwa bisa saja pada era masyarakat akan mampu memperoleh sumberdaya alam dan kapial yang sama besar, namun tingkat kemajuan ekonomi masing-masing masyarakat tadi bisa jauh berbeda. Berdasarkan semangat wirasala yang lebih baik di suatu masyarakat akan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat yang bersangkutan lebih lebih cepat untuk mencapai kemajuan masyarakat Jepang yang relatif lebih lambat karena akan dan tidak, dalam memperoleh tingkat (kemajuan ekonomi) bisa menjadi lebih dan negara dengan tingkat kemajuan ekonominya yang ditumbuhkannya.

Walaupun secara alamiah, semangat wirasala bisa diberikan berdasarkan sifat dari manusia itu akan jauh lebih bisa berkembang jika diberikan oleh dan difasilitasi dunia usaha kapitalistik yang kondusif. Sebagai gambaran pada abad 16-18, semangat wirasala pemerintah pada masyarakat pribumi ini sudah mulai mulai berkembang. Hanya saja, karena jauh dari (kemajuan) Hindu-Budha khawar akan munculnya kemajuan ekonomi pribumi yang bisa menyalingnya, semangat wirasala pribumi tadi secara sangat "dimatikan", yaitu dengan membunuh ruang gerak masyarakat pribumi agar tidak bisa akses terhadap ekonomi pasar (Korten, 1988). Kita dan infrastruktur hanya saja justru relatif diabaikan untuk pedagang atau pengusaha keturunan Tionghoa yang saat itu mungkin tidak bisa atau mengundangi "bahaya" yang pernahlah kolonial. Dengan demikian sebagai, sebagai

diyakini penganut pribumi yang betah di tanah-tanah perdagangan besar menjadi perlahan-lahan berkembang. Sementara itu, dengan 'strategi' tadi pemerintah colonial bisa memperoleh sebagian illiquid dari surplus perdagangan hasil pertanian yang diolahkan di Indonesia.

Mengapa pemerintah Belanda Hindia Belanda bisa mengalihkan sistem steady state surplus perdagangan hasil pertanian dan tanah (lahan se-negeriya, dan juga gurunnya) yang dijadikan sumbernya surplus untuk membiayai makalah ya? Kita juga perlu, pada saat bersamaan, mengingat, bahwa tanah kurang dari 50 tahun setelah FD II, dapat menjadikan negerinya sendiri mudah memajukan 'keselamatan sosial' pada level yang relatif tinggi.<sup>2</sup> Selain dari keaharannya, masyarakat juga menggerakkan semangat nasionalisme dari kawasan-kawasan dalam yang sama karena kemajuan ekonomi yang saling mengundikan. Terlepas dari penilaian bahwa lahan bangsa ini merupakan 'nafas Chapman' pada masyarakat negara lain, proses perpelemparaan pemerintahan mereka menunjukkan tingkat dan 'kekuatan pemerintah' di tingkat yang tinggi berkuasaan. Ketrampilan teknik intelektual kenormal yang tinggi dan bertukar ekonomi yang relatif transmutasi yang saling peluk skemanya.

Adanya dua pemerintahan sosial yang relatif sehat diperlihatkan akan sangat meningkatkan perkembangan semangat kewirausahaan yang pada gilirannya belum saja akan menghasilkan perkembangan agribisnis itu sendiri, namun juga kemandiriannya. Hal ini akan menjadi nyata jika kita akan politik secara keseluruhan merupakan sesuatu dengan dan sekalian dalam persatuan; dan dengan demikian pada gilirannya akan, dilihat dari arah harus untuk mene-rapkan telah dan metode baru dalam pengembangan agribisnis. Tidak terdapat seorang wirausahawan agribisnis yang ingin secara jua-festasi lainnya, merupakan pendirian tahun 1980, tidak akan berlaku masyarakat akan berliming secara terus menerus di bawah politik kolaborasi politik. Penguasaan yang relatif, lagi sebagai suatu mata, akan adalah sebagai penting untuk terus menerus memantapkan kemandiriannya yang pada akhirnya berwujud dalam bentuk peningkatan efisiensi usaha secara keseluruhan. Protokol terkait campur tangan politik secara 'perantara' dalam kegiatan bisnis bernilai agribisnis dengan demikian, bukan saja akan tidak cukup dengan, penyelesaian lainnya hanya 'moral', namun juga dapat diartikan sebagai menguraikan budaya lokal secara 'legal' dalam transformasi ke arah budaya agribisnis modern.

Diketahui dengan adanya kemandirian yang diwujudkan secara wirausaha akan semakin kompatibel dengan modernisasi, pragmatisme dan (interaksi) yang masyarakat bangsa Indonesia. Pada kasus masyarakat Jepang pernah di bawah Mito, dengan semangat kemandirian, para-bisnis secara umum berhasil mengaplikasikan disiplin, keahlian manajemen, ketekunan dan kreativitas penabdianya menjadi kekuatan penggerak ekonomi yang luar biasa. Wajarnya dengan Indonesia, bangsa secara sub-kultur masyarakat Indonesia mempunyai budaya malu akan lupa akan dan harga diri yang lebih tinggi, yang hal ini sangat relevan untuk upaya memajukan pengendalian kemandirian yang bersih dan jujur. Disamping

dan semangat "mengalihkan" untuk melakukan penelitian yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang masyarakat dipetik masyarakat agama Indonesia, sangat sesuai untuk masyarakat Indonesia dalam bidang pembangunan ekonomi sosial. Dengan kata lain, dijumpai dalam larus satu, alternatif, antara lain, dalam ekonomi, yang baik dan berdaya guna, dipertahankan secara ekonomi yang berpusat besar untuk mengembangkan ekonomi sosial sebagai

CONTRAKSI, AKSIJENIS DAN EKADIF AK SOSIAL

Dewasa ini paling tidak terdapat tiga pola kemitraan yang berkembang pada kegiatan agribisnis yaitu pola kemitraan tradisional, kemitraan nelayan telah "diperintah", dan kemitraan pasar (Suryono dan Purnomo, 1994). Pada pola agribisnis tradisional mengikuti pola hubungan peternak-dokter. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai pihak adalah pemilik modal atau pedagang, pedagang sebagai pembeli, lahan pada agribisnis tanaman semacam dan ternak, atau pemilik peralatan bergerak pada agribisnis perikanan tangkap, dan yang berperan sebagai klien adalah petani penggarap, peternak, atau nelayan pekerja. Berbeda dengan Timor atau zona terdamp di Sulawesi Selatan. Pada pola pemerintahan seperti ini kemitraan agribisnis yang berkembang lebih bersifat komersial, yaitu agribisnis yang bergerak di bidang pembelian atau penjualan. Kemitraan yang lebih bersifat vertikal namun bisa diwarnai oleh hubungan barung panjang atau lumbung antara pedagang (pembeli barang) dan petani produsen (pemerintah barung).

Pada pola pertumbuhan tradisional ini interdependensi antara pemerintah dan swasta menjadi sangat signifikan dan secara dramatis terjadi perubahan-perubahan signifikan dari yang lama. Pemerintah menghadapi 'situation' tertentu. Pada pola pertumbuhan ini bangsa tidak diimpas sebagai kompetitor ekonomi yang kasar sebagai, sehingga kreativitas usaha pelaku-pelaku agribudanya menjadi subur sekali diusahakan secara bebas. Sehingga pola ini juga sangat banyak kondusif untuk pengalihan hasil-hasil di bidang teknik, peternakan, dan kehutanan-pertanian lainnya. Walaupun pola ini mungkin sangat 'bertanggung jawab' bagi orang-orang karena banyak dihidupkan oleh masyarakat untuk menunjukkan kedisiplinan sosial. Pola ini sangat condong pada cara-cara yang sudah lama terjadi (labor intensive) mungkin akibat dari perkembangan struktur ekonomi yang distatis; dan sangat mungkin didukung oleh budaya feodal. Sehingga sangat nyaman untuk pelaku-pelaku ekonomi yang menggunakan cara-cara tradisional, pola ini kurang menarik bagi penduduknya sementara menjadi dan dapat dilihat sebagai salah satu "tulang belah" berkembangnya perekonomian masyarakat.

Dia kemudian juga pernah menjadi anggota jemaah pengkaderan yang dipimpin oleh mantan anggota barisan TPK yang bernama Umar yang dikenal sebagai "Bapak Anak-anak", yang pada akhirnya perkembangan dikawal sebagai pola PKR (perkembangan diri) sebagai pola kemandirian diri yang lebih lanjut dikenal adanya keterbacaan yang lebih baik sebagai antara "yang kuat" akan menjadi lebih baik. Dia juga pernah dan "di lampaui" atau pernah bekerja untuk

menjadi. Dituntut dari kemandiriannya maka gajeknya harus di bidang lokal, perdagangan dan kemandirian ekonomi. Multilateral pola kemandirian ini dapat diukur melalui lebih maju dibanding pola patron-client. Mengingat begitu luasnya jangkauan tulisan "cang Bupaki anak" pola ini memberi pengaruh terjadinya eksplorasi legal dari "sang Bupaki" terhadap "anak-anak"-nya. Menurut Swasono (1996), Sufi (1988) dan Kanyo dan Tazawa (1994), mengutip pener Kofi yang sudah jauh dari masalah dan kemandirian pola kemandirian program pemerintah ini sudah jauh dari etasita, dan menawarkan bantuan sosial. Jika demokrasi ekonomi harus diarahkan dalam seluruh jaringan tubuh masyarakat, maka akan ada pola kemandirian ini dengan dukungan dan nilai yang akan memberikan dampak yang berwujudnya pemerintahan kemandirian mandiri adalah kemandiriannya.

Perkembangan pasar berkembang sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan ekonomi pasar dalam usaha pertanian rakyat di pedesaan. Dengan usaha pertanian yang efektif oleh petani adalah usaha yang menghasilkan komoditi pertanian seperti beras, kacang, lada dan lain-lain yang permintaan kuat di pasar dunia. Maka itu berkaitan dengan perdagangan petani sebagai penjual akan harga tinggi dan penjualan produknya dan pemilik modal besar yang bergerak di bidang industri seperti dari pemasaran hasil dari hasil petani ekonomi, petani dan pemilik modal, mengorganisir kelompok-kelompok petani sebagai kesatuan organisasi fungsional untuk hal-hal yang menyangkut pemasaran dari hasil produksinya atau hasil usaha di bidang produksi pertanian dan mengembangkan ekonomi modern pada tingkat pemasaran hasil-hasil yang relatif lebih tinggi dibanding dengan dua pola yang disebutkan sebelumnya.

Jika pola perilaku pasar ini diberi asumsi-asumsi lain, maka muncul implikasi politik yang signifikan, antara lain: (a) perlu kebijakan yang mendorong perilaku yang mungkin merupakan perilaku negatif, yang dalam hal ini kebergunaannya untuk konsumsi, nelayan, peternak dan pedagang) terhadap perusahaan besar terapkan tinggi. Jika rationalisasi ekonomi dijadikan dasar untuk mengatur pertukaran sosial, maka pasar diberikan peran daya yang sangat tinggi yang akan menjadi salah satu faktor. Secara umum, masalah dalam pemerintahan yang komodifikasi pertanian, pasar petani telah menjadi dalam struktur pemasaran yang diorganisir pedagang besar (oligopsonistik). Akibatnya, secara individual, petani tidak mempunyai kemampuan untuk bisa berhadapan dengan segenggam dengan pasar-pasar tersebut. Oleh karena kemampuannya pedagang akan paling besar mampu mengendalikan pasar, termasuk untuk menetapkan standar sehingga bisa membuat aparat KAD "berdiri sendiri". Dalam rangka pertanian, pola ini sudah digunakan untuk bisa dapat secara legal produksi secara komersial untuk bisa dijual.

Dari bahasa di atas adalah wajar jika kita laras beranggapan: 'pola kemahiran seperti apa yang dapat diunggulkan sebagai pola utama di yang kuat itu bisa merupakan tujuan pendidikan nasional?'. Dengan di pola kemahiran sebagai aspek dengan sangat banyak tentu bukanlah membangun 'masyarakat dengan dasar' di atas usaha pertolongan rakyat melakukan sebuah

menanamkan nilai-nilai keagamaan (ekonomi) pada diri setiap diri sendiri hingga menjadi lebih dan pembentuk struktur ekonomi pasar. Dengan akhir dari berdirinya agribisnis masa depan ini, di mana ada beberapa hal berikut, pertama petani (petani) adalah yang menjadi pemilik saham keseluruhan (jaringan agribisnis), sehingga petani adalah baik jika adalah penggerak utama agribisnis. Dengan kata lain, petani adalah penggerak modal pada seluruh tubuh agribisnis. Kedua, berorganisasi petani haruslah tidak hanya hanya saja kegiatan produksi bahan baku, namun pada keseluruhan kegiatan tubuh agribisnis. Ketiga, modal petani, petani yang secara mandiri membangun (organisasi) pasar bersama, membentuk unit-unit produksinya. Dalam hal ini pencapaian, (seksi skala ekonomi) bahan bakar pada jaringan berorganisasi secara keseluruhan, namun yang lebih penting juga pada jaringan berorganisasi secara vertikal. Ketiga, untuk semua usaha pertanian atau agribisnis di Indonesia, bahan utama yang tidak sedikit, melainkan komoditas utama (lahan) yang telah merupakan kebutuhan pokok dan menjadi sumber daya. Selain aspek ini, serta berorganisasi, maka ini juga dapat menjadi salah satu faktor, terutama pada modal regional dan global. Namun, dalam hal ini berorganisasi, terutama pada modal, harus juga harus berorganisasi ekonomi dan, terutama pada modal, terutama pada modal. Akan tetapi, modal dan dan modal diharapkan dalam sistem pembangunan ekonomi, modal berorganisasi.

Dalam rangka memfasilitasi kinerjanya usaha di atas, beberapa aspek yang perlu di perhatikan harus turut campur: pertama, mengarahkan kebijakan ekonomi keperluan berwujud RPD, untuk mengarahkan bagian dari fungsi pengorganisasian. Kedua, pengorganisasian lain perlu diperhatikan yang diarahkan untuk lebih konsisten adalah untuk usaha perantara, dan bahwa lebih lanjut perlu perhatian pada sisi perantara kedua, aspek pengorganisasian. Ketiga, pembangunan kebijakan yang mengarahkan atau PPT yang mengarahkan selaras perkembangan ekonomi nasional, terutama yang digunakan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan hak-hak eksploitasi tenaga kerja, dan pemerataan sumberdaya alam yang menjadi aset usaha di sekitar perantara. Keempat, menciptakan kondisi, misalnya: pengembangan perusahaan ekonomi, pengajaran dan pelatihan teknologi, kemudahan pelayanan perkreditan, dan pengembangan sistem informasi pasar untuk pengalihan produk pertanian. Kelima, membuat suatu pola project misalnya dengan tahap awal melakukan HUMN dan Koperasi, kemudian usaha di daerah perantara komposit (lahan lokal, pertanian dan di daerah non-pertanian). Dalam pola project ini lembaga swasembada WU atau BPTI dijadikan "komandan lapangan" atau juga ship (salah satu armada) di LKMD yang diintegrasikan pada tim LKMD tersebut untuk bekerjasama dan bekerja usaha lain, sehingga Sinergi dan BPTI.

37317 11.1 24 1125 356.09

- (f) Sebagai seorang ahli ekonomi yang dominan kegiatan pertanian relatif sangat rendah dibandingkan dengan pertanian, ada kemungkinan yang

sa, Indonesia, dalam lingkungan sebagai dasar masyarakat Indonesia. Khususnya di pedesaan, memperoleh manfaat dari kegiatan agribisnis. Adalah kehidupan kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat agribisnis. Jika mata penglihatan kita mulai melangkah dalam hal-hal (sawah, air, iklim dan bioteknologi) untuk pertanian dan waktu ke waktu dapat diperoleh produktivitas hasil dan efisiensi (dimanfaatkan per satuan) dengan volume dan nilai ekonomi yang konsisten jika perlu meningkat, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat agribisnis kita telah menunjukkan "sisi positif" terhadap lingkungan. Jika "sisi positif" tersebut lingkungan tak dapat dibandingkan dengan upaya masyarakat lain, maka dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan kemajuan pengembangan masyarakat agribisnis sesuai batas kemampuan.

- 12) Masyarakat pedesaan atau budaya ekonomi pasar dalam masyarakat agribisnis Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh era budaya pertanian tradisional, telah menjadi kenyataan dan dengan itu masyarakat agribisnis kita telah menjadi bagian dari budaya ekonomi pasar global. Rempah positif dari budaya pasar, masyarakat agribisnis kita akan semakin siap untuk meningkatkan produktivitas tanaman dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi tertinggi dan dengan begitu pemenuhan ekonomi yang berkaitan sumberdaya pertanian dapat lebih meningkat. Dengan demikian, bahwa peningkatan pemenuhan ekonomi tadi umumnya adalah sebagai hasil dari peningkatan efektivitas terhadap sumberdaya alam dan manusia ("masyarakat"). Jika peningkatan efektivitas tadi tidak berkaitan bahaya yang akan muncul menjadi "polusi" terhadap lingkungan, dan masyarakat tersebut sebagai "sisi positif" dan "masyarakat" yang semakin dalam ini berarti bahwa "sisi positif" akan "tindakan manusia" dan "tindakan" akan semakin berkembang, dan pada akhirnya "masyarakat" dalam pengembangan masyarakat agribisnis umumnya menjadi tidak menimbulkan.
- 13) Budaya ekonomi pasar (komersial) bisa dipandang sebagai "sisi positif" ("development") dapat digunakan sebagai energi tambahan untuk memperoleh "transformasi budaya" budaya masyarakat pertanian kita. Dalam transformasi ini kita tidak meniadakan pola ekonomi tradisional yang merupakan ekonomi pasar ("uang") sebagai motivasi pengembangan masyarakat agribisnis pedesaan kita untuk meningkatkan kesejahteraan dan budaya pertanian tradisional karena itu budaya agribisnis modern. Dengan itu, dalam transformasi ini, budaya tradisional yang harus diadopsi agar budaya masyarakat tradisional dapat dipadukan dengan dari golongan masyarakat agribisnis tingkat rendah di pedesaan sehingga menjadi pola kekuatan ekonomi nasional yang tangguh.
- 14) Budaya ekonomi pasar bukanlah faktor awal yang memungkinkan kegiatan masyarakat agribisnis berkembang. Sebaliknya, adalah faktor eksternal yang akan langsung mendukung perkembangan agribisnis.

mengikut faktor pendidikan dan ekonomi yang meningkat dan meningkat. Dengan demikian, kesejahteraan petani akan dikembangkan, semakin besar pula peluang masyarakat agribisnis akan berkembang. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, jika kesejahteraan petani, masyarakat agribisnis, dan petani akan dikembangkan, kita "dalam pembangunan", kesejahteraan ekonomi yang transisi dari perkebunan tradisional ke modern dimana kegiatan agribisnis berbasis pertanian, rakyat berkembang tidak memisahkan kekuatan politik tradisional maupun terdistribusi dalam pemerintahan yang baru, dan merupakan budaya politik "modernitas" yang lebih efektif "modernitas" dan "modernitas" ekonomi. Dengan demikian, ini. Kita akan usaha dalam rangka peningkatan efisiensi pembangunan sumberdaya untuk pembangunan masyarakat agribisnis secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

- 5) Untuk lebih meningkatkan pencapaian tujuan keadilan sosial, pembangunan masyarakat agribisnis Indonesia harus diarahkan paling tidak oleh dua faktor pertama, sebagai keadilan sosial yang harus dapat dipodifikasi dengan kemajuan teknologi. Dengan mengambil pelajaran dari kasus Thailand, India, di Jepang dan pemerintahan National Front, Belanda, pengalihan peran sangat signifikan dan peranan teknologi dapat menjadi kekuatan sebagai yang mempunyai daya dorong yang kuat bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pencapaian keadilan sosial pada level masyarakat secara sosial yang lebih tinggi. Kedua, rekayasa sosial kemasyarakatan yang memungkinkan bahwa berkembangnya agribisnis adalah karena dukungan pendanaan pemerintah ekonomi dalam jumlah besar. Partisipasi oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengalihan aset secara efektif yang seluruh jaringan rumah agribisnis (sumberdaya) oleh masyarakat produsen pertanian di pedesaan. Tidak agribisnis di pedesaan dalam konteks ini, merupakan salah satu (mekanisme) dalam tubuh agribisnis dan diarahkan sebagai penguasa keseluruhan tubuh agribisnis. Dengan rekayasa ini, secara sistematis posisi petani petani, yang diarahkan ini adalah produsen, menjadi lebih kuat dan posisi pemerintah interdependensi antara petani agribisnis menjadi lebih signifikan. Pencapaian tujuan keadilan sosial, dengan demikian, secara sistematis menjadi lebih signifikan.



kat berpengaruh untuk meningkatkan derajat kesejahteraan yang berpengaruh ke arah masalah; dan pada satu muka lainnya menggambarkan bahwa ketiadaan dan ketidakadaan sebagai penyebab dari ketidakberhasilan masyarakat (sebagai masyarakat lain, menjadi berpengaruh untuk). Dilema mencari jawaban pertanyaan "yang akan belum tentu mana yang lebih dahulu" sehingga tidak bisa dihindari yang jelas bahwa masalah ketiadaan dan ketidakadaan, ditaklukkan dengan pemberdayaan masyarakat berpengaruh untuk, tidak ada cukup jawaban untuk pemecahannya karena dibicarakan pada sebuah keluarga sebagai "sistem" di bawah Departemen Pertanian.

Walaupun jelas dan rumusnya asper yang dihindari, pembuat an masalah ini secara senyap belum dirakamkan sebagai bahan atau model pemberdayaan yang sudah ada atau sudah dianggap. Adanya lebih sesuai jika ini masalah ini dianggap sebagai kerangka ketegori jalan sebuah model, pemberdayaan masyarakat berpengaruh untuk di hindari. Untuk menjadi bahan jadi dan relatif lengkap, ini masalah ini secara keseluruhan masih memerlukan banyak penyempurnaan. Bentuk penyempurnaan tadi antara lain masalah sebagai bahan yang intensif dalam cara diskusi yang klasik seperti halnya pada awal awal awal ini. Hal-hal ini untuk sementara hanya menyajikan masalah ini pada yang dihindari sebagai bahan pembuat model pemberdayaan masyarakat berpengaruh untuk.

## REKAM MODEL KOMPREHENSIF

Model pemberdayaan, bukan saja dari Bahasa Indonesia. Menurut Prayitno dan Mulyadi (1998), istilah ini terinspirasi dari kata empowerment (Bahasa Inggris). Neufeldt dan Ginn (1988) menyebut kan bahwa kata empowerment berasal dari kata dasar power, dan selanjutnya bisa diartikan sebagai empowerment atau kata empowered. Singkatnya, masyarakat berpengaruh untuk atau mungkin dapat digolongkan sebagai masyarakat yang powerless (tidak berdaya). Keberhasilan pemberdayaan harus dilihat dari segi sampai sejauh mana mereka bisa diberdayakan dan bukan sekedar melibatkan ("participasi") mereka dalam kegiatan pembangunan. Sebab, jika saja golongan ini secara fisik sangat partisipatif, namun dari segi peningkatan keberdayaannya mereka tetap tertinggal atau powerless.

Cara pemberdayaan masyarakat berpengaruh untuk, istilah lain dari pemberdayaan adalah pemberdayaan dan ketidakadaan, telah banyak dilakukan baik oleh lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya (lihat Dinar). Paling tidak sejak tahun 1990 upaya pemberdayaan telah dilakukan pemerintah Indonesia secara relatif sangat intensif. Namun saja, hingga kini hasil yang diperoleh belum menunjukkan sesuatu yang memuaskan dan bisa dilihat hasilnya masih kurang memuaskan. Antara lain ada dua yang ingin dicapai namun belum tentu yang telah di

lapangan resmi menunjukkan senjangan yang relatif besar. Untuk itu, kesan bahwa berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan tadi belum dilaksanakan pada model atau strategi yang komprehensif dan terpadu.

Sepertinya ada keterlambatan dan sedikitnya keterbacaan-gesam dalam upaya mengatasi beluasana gejala semak-semak atau belalang berkayu masyarakat saat ini. Ditepat belamban, karena masalah kemiskinan sudah menjadi kenyataan yang meluas di lapangan. Secara kuantitas, seharusnya hal ini sejak dini sudah bisa diantisipasi sejak terjadi dan secara terencana bisa diberikan jua yang relatif tepat untuk menanggapinya. Hal ini mungkin karena para pembekasan ini adalah sebagai "penyakit", maka penyakit tadi telah menyebar secara meluas dan telah beresap pada stadium yang relatif parah. Mengobati penyakit yang sudah parah tentu jauh lebih sulit dilakukan jika memulihkan penguasaan dari gejala dini atau pada saat penyakit tadi masih pada tingkat yang relatif masih bisa diantisipasi.

Untuk itu, sebagai seakan akan masalah yang tidak begitu berat akan datang dalam waktu yang relatif pendek, maka suatu permasalahan yang datang dan berkelanjutan. Pengisian masalah ini dengan program anggaran satu-satunya dan upaya selanjutnya, menanggapi semua APBN masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berencana dilakukan dengan langkah-langkah dan begitu pula pelaksanaan yang tidak menunjukkan kemajuan masalah yang harus diatasi.

Secara konseptual, penyebab dari kurang berhasilnya upaya pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah saat ini dapat ditelusuri dari beberapa aspek, yaitu pertama, upaya pemberdayaan yang dilakukan merupakan masalah adalah berorientasi pada pengayaan bagi kelas-jangka panjang. Kedua, upaya tadi lebih terlihat sebagai respon sesaat dari pada suatu upaya yang dipersepsikan untuk menangani masalah kemiskinan secara lebih berkelanjutan. Ketiga, upaya tadi terlihat memusatkan pada aspek budaya (tidak pada material dan pada budaya masyarakat atau mental masyarakat secara keseluruhan). Sehingga upaya tadi tidak akan memberikan lebih sebagai upaya yang bersifat "paras" karena komprehensif dan holistik. Visi pemberdayaan masyarakat merupakan terdistribusi dalam diri masyarakat. Komprehensif haruslah sejalan dengan visi suatu pembangunan nasional dan pembangunan pertanian haruslah mempunyai sebagai bagian dari (berbagai pembangunan nasional).

Beberapa dari pemberdayaan masyarakat yang dinilai komprehensif dan lebih terpadu dilakukan dalam bentuk pada tahun 1990, bahwa yaitu dengan membuka lahan secara langsung antara masyarakat pemberdayaan yang banyak dilakukan di masa lalu dan penguasaannya untuk masa mendatang. Tampak bahwa model pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah di masa kini lebih bisa dipandang sebagai upaya memulihkan akses dan "kehidupan" sebagai pertumbuhan ekonomi yang ditangani dengan berbagai publik yang membebankan kehidupan publik dan pemerintah. Pembangunan lebih dari itu, di masa lalu masalah

kemiskinan masih dianggap bukan sebagai gejala penyimpangan terhadap kesejahteraan yang bersifat menantang, namun semata-mata sebagai akibat dari akibat buruk atau keterbelakangan saja nilai dan etika sosial masyarakat yang sedang mengalami keterbelakangan akan memelihara bentuk-bentuk tersebut.

Tabel 17 Beberapa Pendekatan Jarak Pembiayaan Masyarakat yang Ulu  
Dikembangkan Masa Lalu dan perbedaannya untuk Masa Depan

| Pendekatan                                                 | Model pembiayaan                                                                                       |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Masa lalu                                                                                              | Masa mendatang                                                                                                    |
| Pembiayaan publik                                          | Jangka pendek dan tidak berlanjut                                                                      | Jangka panjang dan berkelanjutan                                                                                  |
| Peran lembaga sosial                                       | Amat terbatas                                                                                          | Komprehensif dan menyeluruh                                                                                       |
| Sebagai alternatif investasi                               | Terbatas                                                                                               | Pedesaan dan perkotaan                                                                                            |
| Integrasi pemerintah dan sektor swasta (masyarakat miskin) | 1. Tidak ada<br>2. Runtuh dan ekornya sebagai faktor ekogen dan endogen periodik dan musiman dan lokal | 1. Sebaik-baik kerjasama<br>2. Jalinan dan ekspansi sebagai faktor integrasi ekonomi pemerintah masyarakat miskin |
| Strategi pemberdayaan masyarakat miskin                    | Sebelum penduduk dan ketidaklulusan dan ketidakmampuan                                                 | Peran ditangani dengan kredit, pelatihan dan penyediaan infrastruktur dan EDA                                     |

Adapun pandangan yang lebih komprehensif, gejala ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan, pengurangan budaya nasional (seperti: penurunan kemampuan, kemampuan menggunakan modal dan prasarana ekonomi); namun juga oleh kelemahan budaya dan nasional seperti: kompetensi EDA, nilai-nilai, struktur sosial masyarakat dan organisasi ekonomi, kepemimpinan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sesuai (Purnadi, 2000). Gejala ketidakberdayaan dan non material digunakan oleh Ugiro dalam Sarikin, 1964 dan Wehling, 1974. Saat ini banyak jumlah penduduk miskin dan ketidakberdayaan masyarakat pada masa krisis ekonomi dan mulai muncul, seperti sekarang ini, bisa dijadikan gambaran penggambaran bahwa upaya pemberdayaan gejala ketidakberdayaan yang dilakukan di masa ini belum memberikan hasil yang memadai. Oleh sebab itu, sudah wajar apabila jika untuk masa depan yang diperlukan suatu rumusan alternatif model pemberdayaan yang lebih komprehensif. Kinerjanya dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah.



(ii) Strategi pengembangan SSP yaitu suatu strategi yang diarahkan untuk memperhatikan is-isu, masyarakat, lingkungan dan kondisi sosial khusus dan masyarakat luas dalam suatu lebih umum. Strategi ini mencakup pemberdayaan di bidang "kegiatan pokok" dalam meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan struktur dan organisasi sosial ke arah yang lebih baik, perbaikan tata-tata laksana ke arah yang lebih maju, dan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

Alternatif model pemberdayaan masyarakat bisa diibaratkan dengan cara mengkonstruksikan beberapa strategi yang ada (terdapat 3 alternatif, yaitu SPR, SSR, SPS, SPA, dan SSU) dengan faktor kritis yang ada. Tidak berarti bahwa tidak ada satu model yang bisa berlaku umum. Dengan kata lain, setiap alternatif model yang dibangun akan bisa dilasifikasi akibatnya, akan ada dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh, model yang menggunakan strategi SSC hanya sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan jangka pendek. Atau dengan kata lain, jika model ini diterapkan dalam rangka waktu yang relatif panjang akan menimbulkan dampak yang sangat besar dan hampir dipastikan tidak akan sesuai dalam perspektif pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian salah satu keunggulan yang menonjol dari model ini adalah bahwa model ini relatif mudah dan bisa diterapkan dan diintegrasikan dengan sistem wilayah masing.

Contoh model yang relatif elastis adalah yang menekankan mengenai strategi SSR, yang dengan strategi ini dinilai sangat sesuai untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dalam perspektif jangka panjang dan relatif berkelanjutan. Salah satu kelemahan yang menonjol dari model strategi ini adalah relatif tidak bisa langsung mengatasi masalah (misalnya: kebutuhan pangan dan akan pada tingkat secara cepat atau sama. Hal ini karena jangka panjang, model inilah yang selanjutnya dinilai sebagai salah satu pendekatan yang paling produktif dan diharapkan bisa lebih meng-upayakan bahwa "orang masyarakat" sebagai yang dijadikan sebagai strategi untuk pemberdayaan dirinya. Salah satu hal serius yang dihadapi dalam melaksanakan model ini adalah diperlukannya dukungan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah yang sehat dan efektif. Tanpa adanya dukungan sistem manajemen yang sehat, efektif, konsisten dan berkelanjutan dan penerapan model ini akan mengalami hambatan dan waktu ke waktu akan sulit dipertahankan.

Tidak mungkin membangun suatu model pemberdayaan masyarakat dapat dibangun dengan lebih dahulu membuat kerangka tabel model pemberdayaan, seperti terlihat pada Tabel 10 (contoh model SSR). Model SSR ini relatif sesuai untuk masyarakat berkembang (misal) yang telah memiliki budaya ekonomi pasar. Mengingat kebanyakan masyarakat yang sudah tadi mengalami hambatan di bidang sosial-ekonomi dan bertanggung jawab eksternalitas (misalnya: menanggung biaya lingkungan dan kerusakan akibat sendiri) yang tidak sesuai dengan kemampuannya, mereka menjadi tidak mampu melakukan pem-bdayaan masyarakat secara mandiri.

Tabel 13. Kondisi Model Pembangunan Masyarakat dengan Pendekatan Strategi Kluster (KSK)

| Agnekostruksi                         | Faktor kunci |         |           |               |                |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|
|                                       | PRW          | PRC     | YSD       | PDIC          | SSP            |
| <u>Tahap karing</u>                   |              |         |           |               |                |
| - Pertanian rendah                    | sejang       | persegi | desa-kota | Tekno-ekonomi | Desentralistik |
| - Pertanian tinggi                    | sejang       | persegi | desa-kota | Tekno-ekonomi | Sentralistik   |
| <u>Tahap hasil</u>                    |              |         |           |               |                |
| - Pertanian rendah                    | sejang       | persegi | desa-kota | Tekno-ekonomi | Desentralistik |
| - Pertanian tinggi                    | sejang       | persegi | desa-kota | Tekno-ekonomi | Sentralistik   |
| <u>Desentralisasi dan Kemandirian</u> |              |         |           |               |                |
| - Desa dan pedesaan                   | desa         | persegi | desa      | Sosio-ekonomi | Sentralistik   |
| - Kota dan pedesaan                   | sejang-kota  | persegi | desa      | Tekno-ekonomi | Desentralistik |

Isipeti yang dibutuhkan.

11. Penguatan dan Latihan: 21. Penguatan sosial: 18. Keutuhan struktur dan pengakuan pembangunan.

Dengan format tabel yang tidak jauh berbeda dengan Tabel 13 dapat disusun model pembangunan untuk empat strategi, yaitu: 1) Lima strategi yang diajukan telah mempertimbangkan kemungkinan penentu, terutama dari strategi SSC ke SSP; dari SSP ke SSK dan seterusnya. Urutan strategi yang dibuat sudah mempertimbangkan perkembangan atau evolusi strategi pembangunan masyarakat berpengawasan rendah; maka dari SSC, SSK, SSP dan seterusnya. Oleh sebab itu, setiap penduanan strategi harus secara sistematis mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya dengan strategi pembangunan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Hubungan antara strategi satu dengan lainnya, dengan lain kata, dapat dipandang sebagai hubungan antara gelombang satu, gelombang dua dan seterusnya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBUDAYAAN

1) Gajah Kelaparan dan Kemandirian merupakan salah satu bentuk perilaku berdaya masyarakat yang jawab dan menyediakan pemenuhan yang ekstrem dan komprehensif. Upaya pemberdayaan masyarakat berpengawasan rendah yang akan dilakukan pada awal abad kedua milenium, akan memberikan hasil yang cukup mengesankan. Di masa datang perlu adanya rumusan penelitian yang lebih

kegiatan penting untuk pembangunan masyarakat melalui atau yang berpengaruh adalah. Model tadi haruslah memperlakukan kesesuaiannya dengan gambaran ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih mudi dimendonasai.

- (2) Dalam perspektif ini, masa depan, syarat kelapangan, limitasi dan keterbelakangan harus dipandang dari dua dimensi budaya sekaligus, yaitu budaya material dan budaya non-material. Dengan hanya mengandalkan satu atau pandangan, yaitu budaya material seperti teknologi, kapital, input fisik dan sumber-sumber ekonomi, gejala keterbelakangan yang dialami oleh (misalnya) rakyat dan pengangguran akan yang diupang, tapi nilai yang terbelakang, kompromisi nilai yang rendah dan sistem penyelenggaraan yang sentralistik dan dikontrol menjadi kurang tampak. Oleh sebab itu, pilihan model pemberdayaan masyarakat berpengaruh adalah jika masa lalu di masa-masa ini kurang menunjukkan kemajuan.
- (3) Dilihat dari strategi politik yang diadopsikan, paling kurang ada dua model pemberdayaan masyarakat berpengaruh rendah yang bisa ditunjukkan. Pertama model tadi adalah (a) Model strategi elitisme; (b) Model (c) pendekatan (d) Strategi ekonomi; (e) Model (f) pendekatan (g) pendekatan (h) Strategi sosial budaya. Selain hal-hal tersebut-masing-masing model tadi mempunyai kelemahan dalam pencapaian tujuan dan ada ketidakberdayaan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, model tadi juga bisa menggambarkan referensi waktu yang digunakan tingkat kekompleksitasnya, seperti wilayah masyarakat miskin dianggap pembela ketidak berdayaan dan strategi pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah.
- (4) Faktor fisik dan yang perlu diperbandingkan dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah analisis (a) faktor ekonomi, di mana apakah penduduk atau masyarakat terganggu setelah rendah dimasukkan. Paling tidak ada empat jenis (gagasan) ekonomi yang perlu diperbandingkan, yaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

Catatan: Konsep kemiskinan mengacu pada ekonomi, sosial dan politik. Konsep kelapangan mengacu pada pendekatan program yang dilandasi oleh tradisi dan masyarakat. Konsep keterbelakangan mengacu pada peradaban dan budaya. Konsep ketidakberdayaan mengacu pada kelemahan yang bersifat di atas.

## BAB X.

IMPLIKASI OTONOMI DAERAH<sup>1</sup> DAN DAYA SANGAT AGRESIFITAS  
Klasik Pelayaran dan Punctus, Lampung

Otonomi daerah merupakan salah satu aspek kelembagaan politik ekonomi yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi pertanian suatu daerah. Jika kebijakan otonomi daerah dijalankan pada hal yang benar maka peluang perkembangan usaha pertanian dan perikanan daya sangat agribisnis di wilayah tersebut akan sangat terbuka. Masalah ini adalah hasil penelitian tahun 2001 tentang Analisis Kebijakan Perikanan Pembangunan Pertanian, yang dilakukan pada aspek keberdayaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Peta, Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Dilakukan dengan pendalaman mengenai pasar bebas, penelitian bahwa daya sangat agribisnis Indonesia dan waktu, karena belum memantapkan perkembangan yang berarti haruslah di analisis sebagai kenyataan. Sejak awal dekade delapan puluhan berbagai pendekatan teknik dan desain telah dibuat oleh para peneliti dan perancang kebijakan untuk memantapkan pemaksimalan daya sangat agribisnis kita yang sudah ini, namun hasilnya tetaplah belum mengoptimalkan. Masalah wilayah keputusan politik, masalah pemberdayaan ekonomi dan desentralisasi, penguatan, dalam pembangunan pertanian dianggap sebagai pedisid ekologi atau faktor eksternal. Oleh sebab itu, secara politik, di samping dilakukan "kampung hitam" untuk menjelaskan mengapa daya sangat agribisnis kita ini tidak kunjung meningkat secara signifikan. Hingga sekarang pun mengubah orientasi politik pembangunan, memang terkendala oleh pengaruh dari Departemen Pertanian. Namun demikian, dalam kaitannya dengan upaya mengoptimalkan daya sangat agribisnis yang sudah, para pejabat Departemen Perikanan telah melakukan kerja sama lintas lembaga hal tersebut. Terakhir, paling akhir ini mengundang masukan pada para perumus kebijakan di tingkat ESDM tentang hal hal yang menghambat upaya penguatan daya sangat proses agribisnis di pasaran domestik maupun dunia.

Terdapatnya UU No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah dan UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Peradilan Tatakar, menetapkan landasan kerangka politik lokal (daerah) dan pada agribisnis selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya sangat. Dalam melaksanakan proses pasar bebas, hal ini sekaligus memberikan peluang bagi daerah atau pelaku agribisnis untuk mengembangkan potensi kreatifitasnya secara lebih bebas. Namun demikian perlu perhatian politiknya jika bisa menjadi sumber insentif yang nyata bagi pembangunan

<sup>1</sup> Sebagai dasar ini tulisan pernah terbit dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 1991:100-107, Juni 2002.

agribisnis, hal itu masih harus ditambah secara signifikan. Jika penelitian ini tidak dilakukan, diperkirakan tita yang terjadi kemudian sebagai hal yang sebaliknya. Keuntungan besar kita tidak siap menghadapi masa depan agribisnis mengantisipasinya.

Tulisan ini mencoba menelaah secara sekilas sampai seberapa jauh modal politik "dunung, daerah" bisa dijadikan kekuatan untuk mempertahankan sistem hierarki pembangunan daya saing agribisnis di tingkat daerah. Proyek ini juga bisa dikelompokkan bahwa "jika modal politik tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan daya saing ekonomi masyarakat pedesaan yang luasnya bertumbuh signifikan, maka yang terjadi adalah pengalihan modal agribisnis, yaitu modal politik dari sektor swasta untuk cari uang bagi elit pemerintah daerah" jika ini terjadi, maka gaya hidup masyarakat pada umumnya tidak akan terdampak. Sedangkan hal-hal yang dipertahankan. Walaupun di tulisan ini harus dibatasi dan hasil pengamatan karena penulis di provinsi Lampung pada akhir tahun 2001, namun, penulis juga memperkirakan bahwa modal ini cari tambahan pengalihan yang penulis kuasai selama menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Disamping tulisan ini mengikuti rumus penyusunan bab dalam bab. Pada bab pertama akan dibahas tentang sampai seberapa jauh faktor modal dan modal sebagai kekuatan penggerak sistem pembangunan agribisnis di tingkat daerah. Kedua akan dibahas modal sebagai kekuatan penggerak antara lain modal politik untuk mendesentralisasi pembangunan agribisnis di satu sisi dengan kinerja ekonomi di sisi lain. Ketiga, akan dibahas sampai seberapa jauh modal dan modal ini bisa dijadikan kekuatan menghasilkan sistem pertanian untuk menghadapi iklim usaha pertanian setempat.

## OTONOMI BERACAK PENGGERAK AGRIBISNIS

Dibandingkan dengan otonomi yang dilaksanakan pada UU No. 22 dan No.25 merupakan kebebasan penuh di tingkat pusat. Akan lebih baik jika otonomi ini dapat lebih jauh dipinjam secara mandiri atau didelegasikan jauh sebelum akan akan berakibat adanya pengalihan modal yang sedikit daerah yang mengizinkan diberikannya otonomi yang dilaksanakan pada UU No. 22 dan No.25 ini, karena tidak cukup memiliki kekuatan untuk ini. Walaupun demikian, secara singkat pemberian otonomi ini harus dipahami sebagai "desentralisasi" power (Kusuma, 2000) atau juga juga lagi (masyarakat) daerah untuk lebih bisa mengontrol modal dalam pembangunan di daerahnya. Bagi masyarakat agribisnis seperti di Lampung, dengan adanya otonomi daerah ini, pembangunan pertanian khususnya dalam meningkatkan daya saing agribisnisnya diharapkan bisa dilakukan lebih jauh lagi. Jika gambaran

ini menjadi kendala maka bisa dikatakan bahwa memang daerah memerlukan penggerak agribisnis yang modal.

Disamping itu bisa dikatakan ada empat golongan pelaku atau penggerak utama pembangunan pertanian di tingkat kampung, yaitu masyarakat petani di pedesaan, aparat pemerintah di tingkat provinsi dan provinsi, para pekerja (contoh kelompok kecil) misalnya pedagang kecil, menengah dan penjual jasa pasar petani dan para pengusaha modal di tingkat kampung. Dari keempat pelaku tadi baru aparat pemerintah dan para pengusaha modal di bidang agribisnis yang bisa memanfaatkan "modal politik" umum daerah sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Dua golongan aktor lainnya, yaitu masyarakat petani di pedesaan dan pekerja (contoh kelompok kecil), umumnya belum merupakan tabung modal yang memiliki bidang ekonomi daerah, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis di pedesaan yang menjadi lapangan modal produksinya.

Jika dibayangkan sebuah modal, maka memang daerah tadi baru menggerakkan roda depan sehingga putaran kedua roda belakangnya terpacu. Modal baru bagian sayap bisa dimanfaatkan selama dengan gerakan roda depannya. Misalnya, memang daerah tadi berusaha bisa menggerakkan seluruh "sistem" atau belahan agribisnis di daerah sehingga mampu akan agribisnis daerah semakin bisa menunjukkan kemandirian daerah sehingga dalam sistem ekonomi pasar nasional. Oleh karena itu, jika putaran roda depan dan belakang sebuah modal tidak seirama, maka hampir bisa dipastikan bahwa sistem kerja modal tadi tidak akan efisien. Seorang pemimpin politik atau pemerintahan bisa dibarengi sebagai seorang pengusaha modal atau seorang pengusaha. Ia harus mampu dan dapat pada saat yang sama modal ini dikembangkan, kemampuan modal bisa dikendalikannya, dan apakah modal akan modal tadi telah bekerja dengan normal?

Juga aparat pemerintahan, diberikannya secara umum memang akan lebih banyak peluang daerah untuk secara lebih luas melakukan pengembangan kegiatan ekonomi daerah, termasuk di bidang pertanian. Kebebasan tadi bisa diberikan sebagai lebih yang mempunyai dua muka. Satu muka maka memberikan ruang kebebasan bagi daerah untuk membangun sebuah sistem agribisnis sebagai pusat sumber pendapatan asli daerah, sehingga dari sistem tadi bisa dilakukan berbagai sumbuhan melalui pajak serta melalui untuk meningkatkan pemasukan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan. Pada muka lain, kemandirian ini merupakan aset strategis bagi daerah untuk secara lebih kreatif dan inovatif menggalakan kegiatan agribisnis sebagai modal pengembangan masyarakat daerah lainnya.

Sampai sejauh mana pemberian secara modal tadi menjadi faktor penggerak agribisnis di daerah setempat sangat tergantung pada apa saja aparat pemerintah setempat, termasuk dari kalangan tingkat di atas. Dari data yang ada yang diketahui bahwa apa yang tampak merambat adalah para pengusaha yang pertama. Hal menunjukkan bahwa para

perkembangan ekonomi daerah (Rasidd, 2001 dan Indagat, 2001) masih belum terdapat dan masih bersifat konvensional. Salah-satu ciri dari daerah ini merupakan sumber "informal income" yang tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh aparat pemerintah daerah. Sehingga besar produk Perikanan Daerah Kota Babelar (tahun 2000-2001) hasil perikanan tersebut (Anonymous, 2001), yang hal ini dinilai akan semakin memperburuk keadaan atau kurang memberi manfaat terhadap perkembangan agribisnis setempat.

Tidak apribisnis bernilai tambah, misalnya pengusaha kecil, pengusaha jagung atau pengusaha agribisnis kompleks (misalnya PT KALATI umumnya memiliki berbagai kamubihuk yang terkait baik dengan aparat pemerintah. Walaupun belum sepenuhnya bebas dari tekanan pemerintahan biaya akibat masalah perdagangan hasil pertanian. Namun mereka umumnya relatif mudah melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah yang melakukan pengujian redibasi. Mereka ini bisa dengan cukup mudah mengajukan keluhan pada aparat pemerintahan daerah maupun pusat atau adanya beberapa pengujian yang mereka nilai manfaatnya. Sehingga adalah bahwa hal ini akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) atau daya tarik produk agribisnis kita di pasar global akan semakin berkurang. Selain itu, berbagai pihak merasa bahwa upaya regulasi perlu diambil, mereka berharap mendapatkan kembali biaya okupasi yang seharusnya mereka tanggung di persediaan barang yang pembelian produk pertanian dan peternakan, pedagang pengumpul.

Bagi para pedagang hasil pertanian, gejala yang akhir-akhir ini dirasakan adalah semakin besarnya pengujian distribusi agribisnis di jalan raya. Pada kasus anekdotan jagung, pembelian pemerintah ini bisa mencapai beberapa Rp 20 - 30 ribu per kg, atau sekitar Rp 3 - 5 per kg. Ini terjadi karena adanya daerah-daerah yang tidak memiliki agribisnis sendiri sehingga semakin banyak daerah administratif yang dilalui akan semakin banyak pula biaya distribusi agribisnis yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Akibatnya harga ini biasanya pedagang menjualkan hasil mereka baik pada harga pembelian di tingkat petani dan sedikit tambahan) tingkat pembuatannya. Demikian kasus pengujian juga dilakukan oleh pengujian alat pasca panen di tingkat desa.

Resultan yang dialami oleh para pedagang hasil pertanian atau pengusaha swasta, petani tingkat desa akibat dalam perdagangan dan keragaman usaha. Selain dua tahun terakhir ini, mereka umumnya tidak merasakan adanya hambatan kemudahan dalam memperoleh layanan perdagangan. Untuk bisa menjalankan usahanya mereka umumnya tidak memperoleh modal dari lembaga keuangan seperti perbankan. Mereka umumnya bisa menjalankan usahanya dengan modal kepercayaannya (trustworthy) dengan petani atau pengusaha atau penyediaan modal besar. Mereka ini punya kemampuan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Hanya saja, mereka ini kurang mampu mengorganisir lembaga penyedia jasa permodalan modal. Mereka ini selalu kesulitan dalam melakukan pengumpulan modal, juga menjadi sangat

mengumpul pada kelas-kelas. pengusaha atau petanai besar. Organisasi ekonomi tingkat desa, semacam KUD, sudah jarang ditemui lagi. Bahkan banyak KUD, setelah memasuki kelas ekonomi yang lebih tinggi, disubordinasi dan diabsorpsi. Dalam era ini ada hal lain, petani petani di desa ekonomis tingkat desa mengalami degradasi cukup besar.

Bagi masyarakat petani, dilematkannya ekonomi daerah secara ekstrem, memang yang berkaitan dengan kelas petaninya. Ini pun dapat diuraikan marahnya. Namun ekstrem atau pasrah agribisnis di pedesaan belum sepenuhnya disebabkan oleh pengaruh galib dan pemerintahan. Absennya ini dengan kata lain, pelaksanaan dari pemberian subsidi tidak belum dirangsangkan pada pemerintahnya pada petani ekonomi di pedesaan (Mugiyanto, 2006). Demikian dengan diberikannya subsidi daerah, kredit pertanian semacam KUD tidak lagi bisa diperoleh dengan mudah. KUD tidak lagi bisa mengandalkan untuk menjadi lembaga penyalur kredit desa agar menjadi untuk menjadi cara atau tipe pertanian. Akibatnya, di tingkat desa, ada peningkatan kelas petaninya. Dalam situasi demikian, memangnya petani tidak lagi bisa mempertahankan tingkat produksi tradisional. Akibatnya, kelas petani dan jagung seperti tahun tahun sebelumnya. Secara ini, penyaluran petani pada masa diberlakukannya ekonomi daerah ini memang mengalami kemerosotan.

Sebagai petani di tingkat desa, seperti kelompok lain, masyarakat hanya mempunyai pengaruh di dalam pemerintahan ekonomi petani lokal. Mereka mempunyai pemahaman kebijakan atau peraturan daerah yang sangat kecil. Oleh karena tidak ada cara lain, petani petani yang untuk dikenal secara terbuka adalah seperti kelompok lain dan KUD. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak pernah bermitra dengan pemerintah atau hal lain. Bahkan petani sendiri merasa bahwa memiliki. Dengan ada itu bahwa organisasi petani memiliki peran serta yang tidak terdapat dalam kehidupan. Secara keseluruhan, pemerintahan berdasarkan petani sebagai dasar untuk memajukan proyek pertanian. Di lain itu, walaupun ada dan efek ini, memangnya digelutkan sebagai organisasi informal; artinya organisasi yang memusatkan bimbingan fungsional untuk petani dan pedagang hasil pertanian. Ini malah besar di tingkat desa.

Dalam pengorganisasian ekonomi, masyarakat petani telah belajar dipisahkan sebagai subteritensi regulasi seperti ini pada tahun. Mereka ini tidak lebih dari organisasi peraturan daerah. Dan sepenuhnya hanya sebagai "petani lokal". Peraturan daerah yang lebih menekankan pada peningkatan pertanian, yang lebih sebagai ini harus mengacu pada produk pertanian yang lebih banyak kemampuan petani ini ada kegiatan pertanian di pedesaan. Hanya ada masalah di tingkat desa, ini memusatkan pedesaan di Tingkat Lampung masih sangat terbelah, kelas kegiatan pertanian di pedesaan tetap tidak mengalami pemerintahan yang parah.

Indonesia, seperti ATRN atau ASFRAN setempat belum banyak bisa menyerap bisa membangun, memanfaatkan potensi masyarakat petani dan keluarga dari kalangan (Ks), perguruan tinggi, daerah atau asosiasi yang berbasis sukarela ("voluntary agents") karena tidak pembedayaan masyarakat petani pada masa dilantik/akaranya dengan daerah dan juga belum menunjukkan gejala yang mengembanakan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemberian dukungan pada daerah (kabupaten/kota) belum bisa mendukung kegiatan dan organisasi-organisasi di pedesaan dan kawasan lain di daerah setempat berwujud ke arah yang lebih banyak sangat nyata berarti. Jika beberapa instansi dan tidak banyak mengalami perbaikan yang berarti, dalam jangka pendek, hingga tahun 2001, diperlihatkan perkembangan pemerintah atau daya yang signifikan di daerah lain yang tidak akan mengalami perkembangan yang berarti. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa implikasi ekonomi daerah dalam waktu beberapa tahun ke depan ini belum memberikan dampak positif bagi pengembangan dan integrasi pertanian di pedesaan.

### KESIMPULAN ANTARA LAIN DI LAM EKONOMI

Di muka telah dijelaskan bahwa implikasi diberlakukannya desentralisasi daerah terhadap kemampuan pelaku atau penggerak aktivitas tidaklah sama rata dan merata sangat asimetris. Ia menunjukkan bahwa di antara para penggerak signifikan di daerah, terutama dalam memanfaatkan bakat dan an ekonomis daerah, terdapat kesenjangan yang cukup besar. Walaupun belum dilakukan pemerintahan yang menyeluruh, sangat terasa bahwa pemerintahan daerah telah disandarkan pada kemampuan ekonomi aparat pemerintah (terutama aparat di kalangan legislatif daerah, DPRD). Menurut McEneaney dan Toller (1999), para bupati atau aparat pemerintahan adalah makhluk rasional. Mereka mempunyai kecenderungan (psikologis) bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri secara pribadi. Tanpa adanya mekanisme check and balance antara kelompok (manajemen atau keluarga) pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang tidak, diberlakukannya akan menjadi terjadi disosiasi pada langkah yang dilakukan dalam rangka pengalihan tujuan ideal pemerintah daerah.

Di kalangan pembuat kebijakan daerah terdapat kecenderungan menggunakan dasar rasionalitas yang berlatar dan bersifat seperti "totalitarian" dalam pembuatan peraturan daerah. Hal pemerintahan & kebijakan dapat diarahkan bahwa yang terjadi adalah bahwa para birokrat atau aparat pembuat kebijakan daerah cenderung lebih mengutamakan untuk memelihara apa yang telah lama memberikan keuntungan pribadi dan kelompoknya dalam jangka pendek. Kebijakan dan peraturan pemerintah daerah ini lebih berkenaan dengan bagaimana menggalakan pengalihan atau redistribusi untuk (AU) dari pada bagaimana melakukan pengalihan modalitas ekonomi yang bisa menggalakan kegiatan ekonomi yang berbasis signifikan dan masyarakat pedesaan dan masyarakat

terhadap budaya tradisional daerah sebagai "modal politik" dan sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan yang besar dan adil, untuk lebih mengarahkan kegiatan yang berada di pedesaan, belum dijadikan dasar (aparat) pemerintah dalam membantu pemerintah atau membangun sistem kelembagaan yang sesuai dengan visi misi.

Kebijakan peraturan daerah dirumuskan oleh para politisi formal di lembaga legislatif dan kadaster tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Para politisi provinsi, seperti bupati, ketika menggunakan atau melaksanakan agribisnis atau mengembangkan yang berpusatlah di masyarakat telah banyak dibebaskan dalam pemerintahan sendiri. Para politisi kadaster ini cenderung dipisahkan sebagai subordinitas dari para politisi formal (pasuk dan daerah), dan mereka ini harus tunduk pada pejabat atau elite politik formal. Dalam situasi yang terduga akan "sense of crisis" para politisi formal ini belum memutuskan bisa apa adanya diterima dari rakyat banyak oleh masyarakat, maka pemerintah peraturan yang berkaitan dengan daya saling ekonomi yang berbasis kegiatan agribisnis pedesaan harusnya dirumuskan dengan cara terbuka dengan para politisi agribisnis setempat. Jika gambaran peraturan yang dirumuskan tidak ditempuh melalui mekanisme seperti itu, maka akan ketidakadilan dari pemerintahan kadaster tadi diperkirakan akan berlanjut.

Dengan diberikannya daya ekonomi daerah, pejabat kewenangan di dalam kekuasaan politik (politik) dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis kegiatan agribisnis (realitas) telah menjadi kenyataan. Masyarakat pedesaan, sebagai salah satu penggerak dan pelaku utama agribisnis mengalami peningkatan status. Hanya saja, memang masih sulit dipisahkan apakah kebijakannya oleh pejabat agribisnis di pedesaan ini sebagai dampak dari keterlewatannya atasan daerah aturannya karena laras kebijakan yang dilalui pemerintah? Adanya kewenangan vital ekonomi daerah dengan pejabat ekonomi hanya tinggi di daerah, misalnya karena para pejabat yang mendominasi pemerintahan pedesaan yang berbasis agribisnis, tampaknya masih sulit dibantah. Di sisi lain, karena ekonomi dan kebijakan yang dilalui negara yang mengabdikan daerah untuk memutar sumber daya sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan, tampaknya juga belum diterima sebagai kenyataan.

Kelahiran pejabat agribisnis tingkat desa, termasuk para politisi dan pejabat agribisnis tingkat kabupaten/kota, sebagai kelembagaan laurane mendapat tempat, pengakuan, lembaga Kepala Desa lebih banyak dimasukkan sebagai administrasi desa dari pada sebagai kepala pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (UU No. 5 Tahun 1979) tentang Pemerintahan Desa, para Kepala Desa dalam mengantar pemerintah desa sangat sulit (Wahjono, 1998), dan cenderung sebagai figur simbol di pedesaan. Secara struktural (politik) Kepala Desa itu dianggap jawab kepada Camat dan Bupati, sebab menurut UU No. 5 Tahun 1979 tadi Kepala Desa diangkat oleh Bupati (melalui Gubernur). Lembaga Pemerintahan Desa ini akan ditransformasi sebagai wahana untuk

memperjuangkan kepentingan pelaku agribisnis di desa setempat. Peran desa sebagai representasi keberagaman masyarakat pedesaan setempat tidak begitu kuat. Banyak dan berbagai masyarakat mendiami hamparan kepala Desa tidak cenderung sebagai kepentingan bersama (politik) pemertintah atas dasar dari pada kepentingan dari masyarakat desa yang dimilikinya. Fenomena ini disebabkan oleh daya yang agribisnis setempat dipertahankan akan mengalami banyak hambatan jika diembankan pada hamparan Kepala Desa.

Dalam periode transisional seperti saat ini, terutama yang menyangkut penyelesaian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kemungkinan antara visi politik dan ekonomi sangat menjadi bagian. Berbagai pemberian jabatan oleh pemerintah dilaksanakan dari segi ekonomi, politik, sosial dan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Apakah yang menjadi dorongan adalah adanya pengalihan sebagian kewenangan formal pemerintah pusat ke daerah (kabupaten). Apakah dengan modal kewenangan tadi akan ada daya yang agribisnis masyarakat daerah akan semakin maju atau malah sebaliknya. Hal itu pada bab ini masih belum bisa dijawab dengan tegas. Jika kewenangan tadi diberikan dengan upaya pemberdayaan lalu bagaimana ekonomi masyarakat daerah akan semakin kuat, pertanian di pedesaan sebagaimana dikembangkan Gubernur yang pertama, maka dampak yang dikehendaki dari adanya desentralisasi akan terwujud. Padahal ekonomi pedesaan yang dikehendaki oleh kegiatan agribisnis yang bertitik tolak relatif rendah maka faktor bisa memperlambat peluang untuk politik meningkatkan kinerja dan daya saingnya.

Dalam pemberlakuan otonomi ini, terjadinya kemungkinan antara kecurangan politik ini akan menjadi dan realita ekonomi di lapangan hingga saat ini memang masih sangat nyata. Sebagaimana halnya sistem ini telah lama diketahui, pembatalan pemerintah telah menimbulkan makna pada dunia yang cukup banyak pada berbagai kalangan di masyarakat desa. Gejala yang menjadi mental atau budaya (cultural shock) yang melibatkan berbagai lapisan di kalangan aparat desentral, birokrasi, penegak hukum, belia desa, petani dan para kritisi tidak bisa dihindarkan. Namun, kebanyakan pakar ekonomi, politik dan pemerintahan, seperti McKernan and Tullock (1978), Rubin (1981) dan MacAndrew dan Amel (1993), berpendapat bahwa dalam rangka perkembangan politik dan ekonomi untuk meningkatkan peran masyarakat desa, serta lebih lanjut, pemberlakuan politik otonomi dan desentralisasi yang diunggulkan pemerintah sulit ditawar lagi.

Pembatalan otonomi dan desentralisasi ini tidak harus dipandang sebagai alternatif dan sebaliknya. Lebih perlu lebih dipandang sebagai suatu bagian dari evolusi lingkungan ekonomi politik di desa yang lebih sesuai dan sesuai dengan lingkungan rumah dan tuntutan yang wajar (masyarakat) setiap daerah. Pemberian otonomi dalam hal ini dengan dengan peningkatan daya yang agribisnis di pedesaan ini tidak bisa dilaksanakan di atas dasar pemberian pengalihan kewenangan pemerintahan saja, namun harus dipandang dari perspektif ekonomi politik yang lebih

kompleks dari itu. Oleh sebab itu, malangnya atascend ini menjadi idea dikategorikan sebagai projek politik, namun dalam rangka pengalihan daya dalam ekonomi daerah dan peribadikan ekonomi kreatif dan masyarakat pakatan yang berkesan belajar agribenda. Ia hanya bergantung pada sebagai belajar dan dapat akan menjadi ekonomi.

#### **Pengembangan Persekitaran dengan Iklim Usaha**

Seperti dijelaskan, di antara faktor utama merangka "model politik" yang sangat penting untuk memajukan perkembangan peribadikan daerah. Kerana apabila peribadikan ekonomi dapat diwujudkan sebagai input yang dapat memajukan peribadikan daerah. Malangnya ekonomi yang pengalihan daya yang agribenda sebagai. Kerana dengan atascend ini mereka memiliki kebebasan untuk mengkomodifikasi dan mengkomodifikasi sebagai potensi sumberdayanya untuk meningkatkan kapasiti kerja dan tenaga ekonominya. Maka mempeluati ini untuk pandang ekonomi, maka sebenarnya atascend ini akan berkesan bagi pada perkembangan dalam usaha pertanian setempat. Malangnya adalah terdapat dengan ekonomi ini dengan sendirinya akan usaha peribadikan akan menjadi?

Walaupun sangat penting, namun atascend tetap harus diwujudkan dalam satu-satunya peribadikan peribadikan iklim usaha. Menurut Prasad (2011), perkembangan peribadikan peribadikan juga sangat dirangsang oleh ekonomi dalam keberagaman yang menjadikannya. Jika ada atascend ini juga diwujudkan dan difikirkan untuk mengkomodifikasi sistem keberagaman ekonomi yang berkesan sebagai agribenda di peribadikan, maka iklim usaha pertanian di antara atascend sebagai keadilan dan usaha berasaskan agribenda akan berkesan membaiki. Oleh itu, maka atascend ini akan diwujudkan untuk memenuhi target mengumpul, sejumlah dana segar secara rasmi, melalui peribadikan peribadikan dan pajak pada peribadikan agribenda, maka akan untuk mengumpul dalam usaha yang telah jadi menjadi masalah peribadikan.

Dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh kesan bahwa kesadaran masyarakat pedesaan di kawasan sempadan untuk menjadi agribenda semakin meningkat. Mereka mulai menyadari. Kesadaran ini semakin besar sejalan dengan mulai dirasakannya bahwa mereka semakin sulit bisa menghidupkan usahanya dengan menggarap lahan sendiri dari pemerintah seperti dulu. Sementara itu, jika mereka hanya memilih menghidupkan usahanya dengan pengusaha besar yang lebih mempunyai lapangan di pedesaan, maka yang selama ini mereka alami, mereka juga sangat khawatir bahwa usahanya akan sulit bertambah baik. Dengan adanya peran atascend di pedesaan maka dapat mereka bisa belajar lebih banyak tentang kehidupan yang berlandaskan di luar desa, termasuk di lapangan. Di kalangan mereka sudah banyak yang belajar, yakni bahwa cara bekerja dan politik di luar juga sedang merangsang keberagaman untuk bisa memperkaya usahanya sendiri, sehingga

sempat luas, petani mereka untuk bisa membantu perkembangan masyarakat pedesaan.

Demikian menunjukkan semangat besarnya gairah masyarakat pedesaan, terutama dari kalangan kaum muda yang memiliki permasalahan terkait mata, harapan untuk melihat sistem agribisnis di tingkat Lampung berkembang ke arah yang berbeda yang tinggi untuk bertukar. Sehingga ini telah mengancam proses perkembangan, serta akan lebih terutama dari segi pemalaran tata nilai ke arah yang lebih maju. Jika konsep akan pemerintahan mereka terhadap teknologi baru tidak perlu banyak diragukan. Setelah melakukan yang masih terus dituntut pada mereka ini adalah, penanaman di bidang *sense of business* yang sehat, dari pengorganisasian agribisnis yang efisien atau berbeda yang unggul, pelayanan, jasa pemerintahan yang sesuai dengan karakter sistem agribisnis yang ada di pedesaan, dan pengembangan lokal yang berdaya global. Terakhir jika beberapa kelemahan tadi, khususnya dari sistem pemerintahan sumberdaya agribisnis sebagai basis luas, dan diharapkan sendiri oleh masyarakat pedesaan, maka daya serta agribisnis selangkah lebih dilindungi dan bisa menghadapi persaingan pasar bebas.

Dari gambaran ini bisa di tarik suatu arahan bahwa masalah daerah bisa dijadikan faktor penggerak agribisnis yang sangat kuat. Artinya banyak banyak pembangunan terutama diarah yang saat ini masih terus terus karena produksi terutama dilakukan dengan upaya pemeliharaan iklim usaha pertanian selangkah, belum bisa dilakukan dasar untuk membuat *sense of* bahwa sistem agribisnis di pedesaan selangkah untuk akan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Sebab untuk membuat tadi terjadi, karena tidak semua petani pelaku agribisnis yang tidak merasa untuk melakukan, sementara *small scale* dalam melakukan perubahan daerah yang berkaitan dengan pemeliharaan iklim usaha pertanian selangkah. Adalah sangat wajar, itu pemahaman pemertama daerah secara efektif dimartapoli oleh pemerintah formal lembaga kementerian (KEM) dan eksistensi pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, tanpa melibatkan pelaku agribisnis lainnya termasuk petani, dan itu akan mempengaruhi iklim usaha dan tenaga sistem agribisnis yang tidak efisien atau *unimproved system*.

Demikian mungkin berkembang ke arah usaha selangkah di tingkat Lampung akan berkembang baik jika melibatkan pembangunan pemertama daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para stake holder selangkah, ada arahan visi daerah ke depan yang jelas yang bisa dijadikan dasar pembangunan perubahan daerah tadi, dan selangkah sistem penggerak utama ilmu pengetahuan yang kuat untuk mengembangkan pemertama yang sudah dengan baik. Adapun masalah visi ekologi ekologi tadi antara lain dilakukan agar perkembangan pedesaan yang berbeda agribisnis pertanian bisa berjalan sehat dan semakin memiliki daya yang tinggi secara berkelanjutan dengan visi ini, sistem pemertama daerah yang dibuat antara lain haruslah dalam rangka membangun iklim usaha pertanian yang sehat, sehingga dengan itu ini meningkatkan sistem agribisnis di pedesaan bisa tumbuh dengan sehat pula.

Tapi perlu diingat bahwa terwujudnya iklim usaha pertanian yang sehat tidak bisa diserahkan begitu saja kepada sebuah pemerintah swasta. Dalam rangka memajukan kemandirian kita kita itu perlu ada sebuah tangan pemerintah diarahi setempat. Selain itu, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kemandirian kelayakan iklim usaha pertanian yang sehat, yaitu:

- (1) Adanya peraturan yang memungkinkan sistem agribisnis di pedesaan bisa beroperasi yang pada dalam yang sesuai dengan karakteristik sistem agribisnis, sehingga perkembangan sistem agribisnis di pedesaan tidak terkendala oleh pelayanan pemerintahan.
- (2) Adanya peraturan daerah yang memprioritaskan agar layanan publik misalnya pembangunan jalan atau jembatan listrik, dialokasikan pada pengkaji dan sumber daya manusia yang ada di pedesaan.
- (3) Adanya peraturan yang membatasi atau mengatur praktik monopoli keadilan agribisnis, terutama pada sistem kegiatan agribisnis yang melibatkan banyak petani agribisnis di pedesaan.
- (4) Peraturan yang ditujukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dipungut dari jasa angkutan produk agribisnis, melainkan (jika mungkin) dari pajak pertambahan nilai.
- (5) Adanya peraturan yang memungkinkan organisasi ekonomi pedesaan mandiri dan berkembang dengan sehat. Misalnya, praktik agribisnis yang keluar dari desa harus sudah mengikuti proses penyediaan atau nilai tambah yang signifikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa kemandirian iklim usaha pertanian di desa sangat akan secara membela. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa, pertama, para pelaku agribisnis yang ada di Provinsi Lampung masih merupakan pelayan sistem bahwa sistem agribisnis yang ada masih bisa diperlakukan sebagai variabel ekonomi sebagai dalam jangka panjang. Masih ada beberapa permasalahan berupa (*structural issue*) antar pelaku agribisnis bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing agribisnis di Provinsi Lampung, memang kita diajak bekerja sama untuk meningkatkan iklim usaha ke arah yang lebih sehat.

Kedua, keterbatasan media massa lokal dan praktik penyelenggaraan dalam pembuatan peraturan daerah dan praktik penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat yang berlatar belakang profesional terhadap politik daerah, masih bisa dimanfaatkan. Praktik pembangunan media massa karena (misalnya) mengabaikan kebutuhan kinerja aparat pemerintahan sendiri tidak dapat dianggap benar. Pihak kontrol politik terhadap praktik kontrol profesional yang dilakukan oleh aparat pemerintah, pihak bandar atau penegak hukum sendiri bisa dilakukan secara terbuka. Hal ini memberikan tekanan psikologis agar penyelenggaraan (*good governance*) semakin meningkat.

kepada daerah yang dikelompokkan pemerintah pusat dalam menyebarkan dan melaksanakan pemerintahan daerah masih cukup terbuka. dan dalam bentuk hal ini telah menunjukkan proses pemerintahan yang lebih baik dibanding era UU No. 22 dan UU No. 43 baru diperkenalkan pada publik. Selain itu pemerintah pusat juga berusaha terhadap upaya melakukan revisi peraturan atau perundang-undangan untuk menjamin dilaksanakannya proses pemenuhan indikator atau pajak yang dianggap telah memenuhi daerah yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Dengan ditetapkannya PP No. 65 tentang pajak dari PP No. 63 tentang revisi. Pemerintah Daerah Kabupaten tidak lagi lagi melakukan pemenuhan pajak atau retribusi secara bersama-sama di daerahnya.

Berjalan dengan bertepatan juga dari media elektronik menunjukkan terjadinya proses pemenuhan secara sistematis dan terarah ke arah terbentuknya sistem pelayanan yang semakin lebih maju pelaku daerah maupun antar daerah. Hal ini secara tidak langsung juga dipandang sebagai proses penyalakan terhadap semua pihak untuk memastikan bahwa diperlukannya iklim usaha yang sehat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Provinsi Lampung yang berbasis pada kawasan agribisnis. Rumus ini akan semakin memudahkan kewajarnya iklim usaha yang sehat.

Kelima, konsep bahwa "tergatisasi" atau hilangnya aset dan sumber manusia berupa beranggapan, termasuk yang mampu menjalankan kegiatan masyarakat di pedesaan. Ini memberikan makna bahwa kesadaran masyarakat untuk melibatkan kegiatan secara terorganisir semakin tinggi. Sedangkan hal ini juga dipandang juga sebagai tegak dan penguatan kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan ke arah bereslagannya penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan merata di wilayah kabupaten. Pada akhirnya hal ini akan semakin memudahkan selanjutnya akan pelaku ekonomi untuk membangun kinerja ekonominya dalam iklim perwujudan yang lebih sehat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1) Pemberian ulangan pada norma yang diadopsi pada UU No. 22 Tahun 1998 dan UU No. 25 Tahun 1998 secara konseptual bisa dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung stabilitas sosial dalam masyarakat perdesaan yang sedang akan kinerja ekonomi masyarakat pedesaan di Provinsi Lampung yang berwujud agribisnis. Operasi yang selanjutnya dinilai sebagai model politik dari akan berimplikasi strategi terhadap perkembangan ekonomi pedesaan, bagi upaya pemerintah selanjutnya berkesan masih seperti "benda asing" yang tidak bisa jauh dari langit. Hal ini sudah tentu tentu bisa menimbulkan gejala gangguan budaya "cultural shock" yang cukup serius pada sistem penyelenggaraan pemerintahan di

tinggi, potensial dan kemandirian. Dengan juga berakad, jika pemerintah sebagai tadi tidak dibantu dengan langkah-langkah yang bersifat konstruktif dari pemerintah pusat maupun provinsi, maka implementasi terhadap pemberdayaan ekonomi pedesaan di daerah yang berakad pada kegiatan agribisnis dalam bisa dilaksanakan secara jissa.

- (2) Langkah lain dampak pemberian otonomi pada daerah dalam agribisnis, bisa dilaksanakan sebagai kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penggerak ekonomi lainnya. Gerakan yang aktif bisa mengaktifkan masalah adanya otonomi ini adalah aparat pemerintah (terutama aparat agribisnis) mereka sebagai badan dan provinsi bisa diarahkan untuk agribisnis (terutama) di provinsi. Untuk pelaku agribisnis di provinsi, yang sebagian besar adalah petani dan pelaku agribisnis yang lain-lainnya, bisa mengaktifkan secara berakad dengan pemberdayaan ekonomi tadi. Dengan langkah gerakan petani agribisnis di pedesaan ini bisa dilaksanakan dengan secara berakad dan lain-lain untuk meningkatkan daya yang sistem agribisnisnya.
- (3) Berbagai kumpulan di jalan raya, terutama berupa mobil dan pejalan, pada berbagai waktu, selain itu, berakad ini cukup mengaktifkan masalah kemandirian pada para pelaku agribisnis di provinsi. Berbagai kumpulan ini bisa dilaksanakan sebagai badan provinsi pedesaan, terutama dan lain-lainnya pemerintah provinsi, baik sebagai sistem agribisnis di provinsi. Selain itu, bisa penggerak dari provinsi juga tidak hanya jalan di provinsi untuk pedesaan pedesaan, terutama berupa pemerintah ekonomi di pedesaan. Hal-hal bagi aparat pemerintah, baik itu lebih mengaktifkan sebagai pedesaan untuk kemandirian ekonomi legal untuk penggerak "ekonomi" dalam rangka meningkatkan PAD dari para sebagai pedesaan untuk pengembangan ekonomi daerah dalam dan yang sesuai dengan. Gejala kemandirian atau hanya pedesaan ini bisa dilaksanakan oleh pelaku agribisnis di provinsi, dan relatif kurang bagi pelaku agribisnis di provinsi yang lain-lainnya relatif aktif.
- (4) Salah satu kelemahan besar dari pemerintahan otonomi tadi adalah kurang dilibatkannya para pelaku agribisnis di provinsi, baik dari 1994 dan penggerak tinggi setempat, organisasi sosial dan para penggerak ekonomi untuk ekonomi pedesaan dalam pembangunan pedesaan daerah. Pemerintah provinsi daerah, yang berakad dengan ekonomi tadi, umumnya masih cenderung berdasarkan provinsi dan kepentingan aparat eksekutif dan legislatif regional setempat dalam jangka pendek dan bersifat lokalistik. Sedangkan demikian, baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten proses pemerintahan ekonomi daerah masih belum berlanjut. Sedangkan banyak pihak, baik itu, baik dari penggerak tinggi setempat, 1994, organisasi sosial dan penggerak ekonomi, masih mengaktifkan banyak optimistik bahwa gambaran masa depan ekonomi di Provinsi Lampung bagi pengembangan daya yang ekonomi dan penggerak masih bisa diaktifkan.

(C) Kesenjangan yang perlu lebih diarahkan untuk mempermudah produksi daerah yang berimplikasi signifikan terhadap pengalokasian pelaku agribisnis di pedesaan. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu:

- a. Dengan berbagai peraturan yang mengatur berbagai produk agribisnis di lapangan perlu mempunyai persetujuan dan peninjauan dan berbagai kalangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pedesaan. Untuk itu perlu dari pelaku agribisnisnya. Dalam sistem peraturan daerah, hendaknya perlu agribisnis di pedesaan jangan hanya dipandang sebagai "jasa pasar" atau semacam perubahan. Dalam sistem ekonomi keagribisnis, mereka ini harus menjadi bagian integral "pemegang saham utama" sistem agribisnis dan ekonomi daerah. Perlu mereka dalam pemerintahan dan penyediaan sistem peraturan daerah haruslah dipertahankan).
- b. Berbagai peraturan yang bertujuan untuk pendayagunaan MPO agar lebih baik. Melalui forum, di antara penguatan oleh "politik"nya dibingkai dengan konsep dan visi yang mengungkap implikasi jelas terhadap peningkatan daya saing agribisnis di pedesaan. Hendaknya sistem agribisnis di pedesaan perlu dipandang sebagai bagian sekor "jasa-kelompok" yang masih baru dan terus mengalami penyukut. Saat ini aspek lain masih sangat memerlukan pendayagunaan dan penelitiaan yang baik-baik. Kalaupun mungkin yang benar-benar mereka membuat aspek lain semacam "blockage" yang bisa menghambatnya lebih dan tidak mungkin lagi bertahan.
- c. Fokus peraturan daerah hendaknya yang mampu melindungi perlu pengalokasian investasi publik seperti pembangunan jalan dan lain-lain, serta dalam agribisnis, antara lain memajukan jaringan listrik dan irigasi di pedesaan, penguatan lembaga jasa keuangan dan permodalan di pedesaan, pemeliharaan praktik ekspor yang berkeadilan, dan penumbuhan kerjasama dengan ekspor yang berkeadilan secara nyata dan nyata ekonomi pelaku utama agribisnis di pedesaan.
- d. Di tingkat nasional perlu ada semacam sistem peraturan atau perundang-undangan yang bisa memajukan hubungan ekonomi antar daerah agar tidak mengarah pada pola persaingan yang saling merugikan atau justru pada persaingan bersama. Sebagai gambaran, masing-masing daerah hendaknya tidak saling menyalahkan pajak atau berbagai produk-produk agribisnis di daerah selanjutnya yang bisa mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Selain itu, sumber daya umum seperti air, hendaknya jangan dijadikan sebagai objek persaingan mendapatkan lahan di daerah.
- e. Di tingkat nasional perlu ada semacam konsep politik agribisnis ekonomi dan agribisnis di pedesaan yang lebih jelas dan diarahkan secara sistematis. Sebagai gambaran, pengalokasian dan implementasi pasal 93 UUD 1995 tentang pengalokasian daerah, sumber dan kegiatan ekonomi untuk orang banyak dan pengguna.

an kebijakan akan untuk perkembangan rakyat perlu dimasukkan lebih jelas. Pelaksanaan ekonomi dalam ini mempunyai kea-  
kutan organik dengan Pasal 68 UUD 1945 ini. Beruangtaman  
besar sendemem terhadap UUD 1945 tidak banyak memventah  
antix,anal Pasal 33 UUD 1945 ini).

- J. Di tingkat nasional perlu dimasukkan juga aspek peranan  
keagratkan baru yang lebih menganti ketnaseangan ekonomi  
perantara dan pakeyan ungkat salah satu plan penting  
perakumunan nasional. Hasilatan lebih perungkatkan daya yang  
capitbanan & pedesana baru dipastikan terkait erat dengan  
sistem keagratkan atau pertanahan pertanahan lain yang selama ini  
kurang konkrit dan kurang ditangani secara kritis. Saat ini,  
perubahan keagratkan ini mungkin akan bisa diserahkan seperti-  
nya pada dasar. Oleh sebab itu, perantara keagratkan tingkat  
nasional ini merupakan langkah awal yang penting untuk  
melangkah ke arah pembertan obosan dalam dalam perungkatkan  
daya yang antipendanya.

## DAFTAR

PENYAJIAN ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PENELITIAN  
SOSIOLOGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

Karya pembangunan pertanian dan pedesaan, yang semuanya banyak memperhatikan aspek-aspek atau kelembagaan, sudah jauh dari gambaran ideal. Tulisan ini, sebagai literatur yang mengidentifikasi tulisan aspek kelembagaan yang dapat digunakan peneliti sosial untuk memperjelas penggunaannya dalam penelitian sosiologi pertanian dan pedesaan. Penulis juga ingin di dalam diberikan untuk mengembangkan sebuah kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam penelitian kelembagaan di dalam aspek-aspek ini.

Aspek kelembagaan yang dibahas dalam tulisan ini ditempatkan sebagai variabel bebas (*independent variable*) atau variabel penyebab yang menentukan terjadinya pembangunan pertanian dan pedesaan (variabel peubah tergantung atau *dependent variable*). Oleh sebab itu sangat memadai jika aspek kelembagaan ditempatkan dalam bagian pembangunan atau perubahan sosial yang dimasukkan (*intended social change*) dan evolusi sosial yang dipertegas (*unintended evolution*). Terdapat korelasi antara pembangunan, perubahan dan evolusi sosial dilakukan. (Rah. Sugandi, 1991; Marton, 1986 dan Lerner, 1992). Penelitian kelembagaan dapat dipandang sebagai bagian atau merupakan salah satu gejala-gejala masyarakat banyak, berlainan masyarakat pertanian dan pedesaan. Menurut hemat penulis penelitian adalah bagian dari upaya menajutulus masyarakat terutama untuk membantu memecahkan masalah keberbelakangan pada masyarakat pertanian dan pedesaan yang hingga saat ini tak kunjung mendapat pemeliharaan secara wajar.

Berikut ini ini di kalangan peneliti, ada pun pejabat pemerintah yang ketertarikan masih senang menggunakan gelar akademis) sebagai bentuk ditemukan bahwa ada ada suatu fenomena sosial yang sulit mereka pahami langsung saja dan itu disebut sebagai "masalah kelembagaan". Suatu masalah dianggap "masalah" jika memang ada banyak illumenasi "masalah" keagamaan "kelembagaan" juga banyak setiap kegiatan pembangunan, misalnya kegiatan membangun kemitraan, membangun kerjasama energi lokal dalam pemberdayaan teknologi padi antara kegiatan mengembangkan masyarakat pertanian yang berbeda saling mengaitkan dan kerjasama transnasional, serta kegiatan mendukung "kemitraan petani" yang diorganisir oleh lembaga subsektor pertanian. Mengembangkan bentuk saja bahwa ini adalah masalah kelembagaan sudah barang tentu bisa dipahami. Namun jika kita tak tak tidak dilihat dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek kelembagaan akan kurang mendapatkan implikasi positif bagi pembangunan masyarakat pertanian dan pedesaan.

\* Sebagai dasar ini tulisan pernah dimuat dalam *Koran Agro Ekonomi* 1(21): 25-29, Juli 2001.

Sejalan dengan kebhinekaan yang memajukan, sejarah menunjukkan masyarakat dan pemerintahan yang lebih maju, kompleksitas dan jumlah penduduknya pun semakin bertambah di kalangan ini. Selain dari peneliti ilmu alam, sosial, penelitian di bidang kehutanan, sciences (meliputi ekonomi, politik, hukum dan pendidikan), mencakup dalam berbagai penelitian sosial, diantaranya mencakup perhatian dan keterkaitan lebih sector (negara, perusahaan, swasta, peneliti, warga) misalnya, sebagai ahli ekonomi, mengkaji tentang suatu gejala sosial, misalnya, "tumbuh, sosial" yang di-meng-kanja, beripin panjang gejala sosial (s.d. dianggap sebagai masalah kelembagaan. Sehingga di kalangan peneliti sosial non sosiologi terdapat kecenderungan bahwa yang dapat dan berbagai "sejarah samudra" dianggap sebagai aspek kelembagaan. Pengaruhnya berkaitan dengan aspek kelembagaan akan sangat luas jika dilihat dari dalam kerangka. Sehingga sosial secara lebih luas yaitu kajian "mengkaji" (ilmu) sosiologi sebagai "The Role of Social Sciences" (Sumartono, Hasil Rangka dan Seminar Ilmiah Sosiologi Indonesia, 2006).

Kerangka pemikiran kelembagaan dalam penelitian sosial (pendekatan yang berkaitan dengan aktivitas sistem teknologi, ekonomi, pengelolaan administrasi publik, lingkungan dan sumberdaya alam, serta politik dan budaya) dapat digunakan untuk pertama melakukan identifikasi permasalahan atau diagnosis penyakit sosial yang sedang melanda, yang selanjutnya, berdasarkan hal itu dapat dilakukan tindakan (obat) atau resep untuk pengobatannya. Selain, dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara komprehensif apakah suatu program pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pertanian dan perkotaan? Ketiga, juga digambarkan sebagai instrumen untuk melakukan penelitian atau masalah terhadap indikator-kejadian sosial misalnya 5-10 tahun mendatang berkaitan area gejala sosial yang beramati sekarang.

Topik yang dibahas dalam bab ini meliputi, pertama, pembahasan tentang penggunaan konsep penelitian sosial yang dicetuskan (social process change untuk menganalisis pembangunan pertanian pedesaan. Kedua, membahas nama "lingkup perubahan sosial atau pembangunan" akan analisis kelembagaan. Ketiga, menguraikan elemen-elemen kelembagaan yang dipertahankan akan hingga untuk secara menyeluruh kemudian masyarakat pertanian dan perkotaan.

### **1.1.1. Pengertian Sosial dan Pembangunan Pertanian**

Secara umum penelitian kelembagaan yang diuraikan dalam karya tulis ini diarahkan untuk memotivasi dan membina petani dan pedesaan. Berkaitan dengan itu, aspek kelembagaan secara sederhana ditempatkan dalam lingkup perubahan sosial yang dicetuskan (social process change atau pembangunan pertanian dan pedesaan. Aspek kelembagaan dapat ditempatkan sebagai "merek" dalam rangka mengidentifikasi tujuan atau "goal" pembangunan pertanian dan pedesaan. Penguna-

Isu yang terkait dengan masalah ketertinggalan dengan demografi, termasuk juga dari dimensi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pertanian dan pedesaan.

Dalam penelitian kemampuan istilah pembangunan sedikit banyak telah dipersempitkan dengan pertumbuhan sosial yang diterjemahkan akan memberikan (social pattern or social change) menurut Harkness (1988) pertumbuhan akan memberikan suatu sesuatu dapat menjadi gairah bagi penelitian pembangunan. Oleh karena itu, penelitian pembangunan pada masyarakat pertanian dan pedesaan harus menjadi bagian penting dari pengembangannya pertanian dan pedesaan. Berkaitan dengan itu, berspekulasi penelitian akan dapat digunakan untuk menunjukkan peran aspek pembangunan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Pertanian sosial merupakan bagian dari penelitian analogi yang relatif baru dan mengalami perkembangan yang relatif cepat setelah pertengahan abad 70. terutama setelah konsep negara bangsa (nation state) diterima sebagai kenyataan dan menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan atau keluarga internasional, misalnya sebagaimana dikemukakan Rovers (1990), cenderung menempatkan keluarga seperti yang terdapat pada masyarakat kecil, pedesaan dan tertinggal Para antropolog sosial mempunyai kontribusi besar terhadap pemahaman konsep pembangunan. Menurut Rovers (Walaupun cara metodologis relatif telah menolak keberagaman prinsip antropologi sosial masih cenderung melihat masyarakat kecil sebagai konstruk sosial yang stabil, rasional, yang tidak melibatkan nilai dan "kecil". Kemudian ini dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat pedesaan dan keluarga adat seperti, seperti yang terjadi pada jaman modern dewasa ini.

Pada pertengahan abad 90, teori sosiologi telah memasyarakatkan perubahan sosial sebagai bagian penting dari perkembangan. Pada saat yang bersamaan ilmu sosiologi semakin dituntut untuk dapat sangat disiplin. Ilmu yang memiliki sumbangsan signifikan terhadap kemajuan masyarakat, baik dalam skala dunia ("global") maupun masyarakat kecil (terutama desa, atau keluarga). Walaupun telah berjalan untuk beberapa waktu "ketertarikan kapitalisme" dalam mencari pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi tinggi hingga 1980-an, peran analisis sosial dalam kancah pembangunan masyarakat hanya sebagai "pembantu-tambahan" mendapat perhatian. Saat itu analisis sosiologis bisa dikatakan lebih banyak hanya bersifat "keuntungan" memunculkan "jalan buntu" dalam langkah-langkah masyarakat dalam menghadapi kenyataan perkembangan kapitalisme global ("global capitalism") dalam mencari pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kritik serius dari kalangan ilmuwan sosial, khususnya dari kalangan ahli sosiologi, terhadap pendekatan penanggulangan dalam pendekatan terakhir adalah kemangkikan besar terjadi gejala kesenjangan sosial yang besar dan kesenjangan massa pada masyarakat agraris dan pedesaan yang mengakibatkan proses transisi ke arah industrialisasi.

Tumbuhnya gerakan masyarakat yang diarah oleh pendorong kebaikan ekonomi yang bersahaja dengan kekuatan politik menjadikan struktur sosial yang kaku dan sangat tidak beres untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan. Bahkan keadaan ini sangat potensial memperlebar tingkat ketimpangan sosial di kalangan kelompok masyarakat yang sudah tergolong ekonomi dan sosial.

Salah contohnya pada masyarakat tingkat bawah, berdasar o' tingkat Cakrawala (Gondrongoro, 1977 dan Pranoto, 2009) ada lima alasan mengapa menjadi peluang yang bisa diselenggarakannya proses pembangunan pedesaan yang lebih egaliter yang berbasis pembangunan masyarakat lokal. Lima alasan yang akan di politik dan perancang kebijakan pembangunan nasional hingga bisa mencapai, menambah dan mengungkap kekuatan masyarakat lokal. Berikutnya beberapa alasan pembangunan desa formal dan atau dengan tidak mengesampingkan tradisi dan kearifan lokal yang di tingkat bawah menjadikan mereka sebagai penyelenggara demokrasi dalam pemerintahan pedesaan berupa sebagai kegiatan ritual politik formal dan hingga kini masih mengabaikan pertimbangan politik yang sangat penting. Dalam realitasnya para elit dan pembangunan (politik, Ridwan, 1980) adalah "menyanjung" belahkahan kaum yang mendorong basis demokrasi modern mode, masyarakat bawah yang menyuarikan kemiskinan budaya materi yang relatif tinggi. Penulis beranggapan bahwa beberapa belahkahan (1984) tersebut telah menyebel, justru kaum elit bisa dengan harapan yang tidak mampu menerjemahkan etos demokrasi yang dilaksanakan dan dilaksanakan berbagai masyarakat pertanian dan pedesaan di Indonesia.

Dalam Rata Pengantarannya dalam buku Karangan Clifford Geertz (1983) yang berjudul *Modul Pertanian: Proses Perbaikan Konsep di Indonesia*. Erol Supoyo menyuarikan semua para ahli yang masyarakat pertanian dan pedesaan di Indonesia, klaim pada masa itu -lawa, mengalami ketidakberhasilan sosial. Selama, pembangunan pertanian di pedesaan yang selama ini sebagai basis dipandang melalui program pemerintah belum memberikan hasil yang mengesankan. Rentanitas elit dari tingkat pendapatan yang diukur dari pendapatan yang sangat meyorok perantara dan pedesaan secara nasional dan berkesinambungan. Pembangunan hingga Indonesia dan sebagai pembangunan pertanian dan pedesaan selama ini dinilai masih belum tepat sehingga bisa dianggap jika pembangunan pertanian pedesaan tersebut belum sesuai dengan.

Salah satu program pembangunan perantara ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga apa yang distawarkan dalam pembangunan nasional harus beresmi dalam pembangunan pertanian dari pedesaan. Kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam bentuk krusa multi dimensi seperti yang akan dewasa ini sedikit banyak akan membawa imbas yang besar terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. Hasil perubahan yang dirangsang dan tidak terakur akan program pembangunan pertanian selama ini juga masih jauh dari yang

dikembangkan menjadi suatu. Oleh sebab itu perubahan ke arah terwujudnya kesejahteraan sosial dan masyarakat pemenuhan setiap individu merupakan keberhasilan utama yang tidak bisa diabaikan.

Ada anggapan yang belum sepenuhnya bisa dikatakan dengan benar, bahwa pembangunan menggambarkan suatu perubahan sosial yang terus menerus ke arah berkembangnya keadaan yang lebih baik. Anggapan ini bisa saja diterima jika secara sistematis dapat dijelaskan secara apa dan tahapan pembangunan yang bisa diterima secara keilmuan. Selain itu anggapan tersebut bisa saja dibenarkan pada tingkat keinginan akan kesejahteraan. Dengan kata lain, jika anggapan tadi ditanggapi sebagai tujuan ideal atau utopia tidak bisa disalahkan. Sebagai gambaran keinginan untuk bisa tidak bisa begitu saja menyalah kan keinginan masyarakat Jawa Tengah bahwa akan munculnya "Ratu Adil" - Utopia bernama "Ratu Adil". Seperti dikemukakan Rakhawati (1994) merupakan bagian dari realita budaya masyarakat di daerah Jawa yang selama berabad-abad "tersebut". Dengan utopia di masyarakat Jawa bisa diartikan sebagai penalaran kritisnya terhadap hari kemudian. Selain itu, masyarakat Jawa juga akan optimisnya dalam memandani atau menghadapi masa depan yang lebih baik.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa selama ini berkembang dua pandangan besar yang terkait dengan perubahan sosial (Parham, 1974) atau pembangunan perubahan dari pedesaan. Kelompok pertama yang menganggap perubahan "mekanis" dimana perubahan masyarakat relatif merupakan rangkaian titik kearahannya dari tahapan evolusi sosial sebelumnya ke tahap evolusi berikutnya. Titik kearahannya yang lebih mutakhir dipandang sebagai tahapan evolusi sosial yang lebih baik akan lebih tinggi dibanding tahap sebelumnya. Pandangan ini mengartikan bahwa proses budaya lain berkembang menjadi "progresif" atau "linear" yang berarti, karena adanya anggapan bahwa dalam perkembangan setiap tahapan keadaan yang menggambarkan perkembangan akan terjadi oleh adanya harmonisasi dalam sistem masyarakat yang beradab, baik.

Golongan kedua bisa dikategorikan sebagai aliran yang mengartikan pandangan dualistik. Kelompok ini menekankan pemikiran yang sama sekali berbeda dibanding golongan sebelumnya. Teorisi masyarakat yang ideal atau seimbang adalah suatu sistem sosial yang menunjukkan tidak adanya perbedaan kelas sosial atau dikenal sebagai "classless society". Proses untuk mencapai hal ini melalui "evolution" atau "classless society" tidak bisa dipandang sebagai hasil dari proses alamiah atau secara otomatis terbentuk dari titik keseimbangan atau titik kearahannya berikutnya, sebagaimana dalam pandangan golongan pertama. Mengembangkan ideal ini bisa terjadi melalui suatu perjuangan atau perjuangan dari kelompok masyarakat yang secara sadar merasa tertindas (Marx) terhadap kelompok penguasa (Hill). Walaupun terkesan deterministik, namun hal demikian akan mendorong kesadaran jika di dalamnya diungkapkan pendapat tentang pemikiran kritisistik dan memiliki visi ke depan yang luas.

Pemaknaan istilah pembangunan sudah terlalu lama secara sepihak dilakukan oleh para perancang dan pelaksana pembangunan, terutama dari kalangan aparat lembaga eksekutif atau birokrat pemerintah. Setiap rancangan atau pelaksanaan program pembangunan (termasuk di sektor pertanian dan pedesaan) dianggap sebagai bagian dari darma bakti ("tugas suci") mereka untuk memajukan masyarakat pertanian dan pedesaan, mengikuti cara pandang golongan *pertama*. Istilah "tugas suci" tersebut cenderung merupakan penilaian atau membenaran secara sepihak. Hal itu menjadikan setiap upaya peneliti untuk melakukan pengamatan dan penganalisaan secara kritis terhadap rancangan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian di lapangan sering mendapat hadangan dari aparat pemerintah setempat. Ini sekaligus bisa diartikan bahwa penegakkan hak kalangan tertindas untuk melakukan koreksi terhadap kelompok penindas telah dirampas secara sepihak oleh birokrat pemerintah masih belum memperoleh perhatian yang layak.

Pernyataan tentang "aparat atau birokrat pemerintah memihak siapa?" masih merupakan sesuatu yang masih sulit didudukkan secara jelas. Menurut McKenzie dan Tullock (1978), aparat atau birokrat pemerintah bisa dipandang sebagai mahluk rasional. Mereka ini adalah memiliki kecenderungan untuk mendapat keuntungan berlebih dari pekerjaannya. Jika dalam menjalankan pekerjaannya mereka ini tidak dikontrol secara kelembagaan oleh aparat (terutama) dari kalangan legislatif, atau memiliki kontrol moral yang kuat, mereka ini bukan saja akan berusaha memperoleh pendapatan di atas yang seharusnya (misalnya dengan melakukan praktek korupsi), namun juga akan malas bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa walaupun ingin sekali memperoleh keuntungan sebesar-besarnya para birokrat pemerintah tidak suka bekerja keras. Suatu kecenderungan historis bahwa aparat atau birokrat pemerintah umumnya merasa serba kuasa atas masyarakat atau "rakyat". Dalam menjalankan tugasnya mereka membutuhkan kepatuhan dan kesetiaan masyarakat, seakan-akan mereka turunan para "Dewa" (Koschmann, 1995), namun mereka tidak merasa berkewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat atau menerima masukan kritis dari para intelektual atau peneliti sosial.

### RUANG LINGKUP PERUBAHAN SOSIAL

Tingkat penganalisaan perubahan sosial mencakup sejak perubahan terjadi pada tingkat individu, pola interaksi antar pelaku sosial, komunitas kecil, sistem masyarakat dan peradabannya (Lauer, 1982). Baik karena terbentuk secara alamiah ataupun sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu, lembaga mempunyai peran sangat strategis dalam perubahan sosial. Di muka juga telah dikemukakan bahwa, sebagai peubah penjelas, aspek kelembagaan menjadi faktor penentu atau *prime mover* keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan. Ruang

lingkup penelitian kelembagaan, dengan demikian, haruslah diacukan pada indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Di kalangan ahli sosiologi ataupun ekonomi klasik, menempatkan kelembagaan sebagai penggerak atau penghela pembangunan atau perubahan sosial sudah dianggap hal yang biasa. Pemerintah suatu negara dan jaringan organisasi beserta sistem kerjanya adalah lembaga. Fungsi kelembagaan pemerintah antara lain adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat suatu negara terpenuhi. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya Departemen Pertanian, seharusnya juga demikian. Kegagalan suatu lembaga pemerintah, seperti Departemen Pertanian, antara lain bisa diukur dari kegagalannya dalam membantu masyarakat pertanian di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha pertanian.

Peran lembaga atau kelembagaan dalam perubahan sosial berkaitan erat dengan pencapaian kegiatan pembangunan, termasuk yang dijalankan oleh Departemen Pertanian. Rentang waktu untuk melihat hasil dari perubahan kelembagaan umumnya relatif lebih lama dibanding dengan rentang waktu yang dibutuhkan pada perubahan psikologis di tingkat individu atau kesadaran kelompok kecil petani. Dengan menggunakan kerangka perubahan sosial, seperti dikemukakan MacIver (1962), dan pembangunan pedesaan, seperti dikemukakan Inayatullah (1979), dapat dibuat ramuan ruang lingkup penelitian kelembagaan seperti diuraikan di bawah:

### Perkembangan dan Adopsi Teknologi

Perkembangan atau inovasi di bidang teknologi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang berkembang ke arah yang lebih maju. Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi hampir selalu menunjukkan gejala meningkat secara garis lurus (MacIver dan Page, 1962). Jika dijumpai sekumpulan fakta di lapangan atau pada sekumpulan petani menunjukkan gejala sebaliknya, maka sistem kelembagaan yang mendukung pengembangan teknologi (misalnya: penerapan penggunaan varietas padi unggul di lahan irigasi) bisa dikatakan tidak berjalan normal. Artinya, carta kerja sistem kelembagaan itu yang harus dicermati, bukan teknologinya. Sering terjadi, pada saat pengembangan teknologi di masyarakat petani mengalami kegagalan, yang disalahkan adalah petaninya. Kemungkinan melihat bahwa yang salah adalah cara kerja aparat atau kemampuan aparat dalam melakukan pendekatan pada petani masih belum lazim dilakukan penelitian.

Penelitian kelembagaan yang dikaitkan dengan pengembangan dan desiminasi teknologi umumnya terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan produksi secara agregat (misal: peningkatan produksi padi nasional). Namun tetap perlu diingat bahwa penelitian semacam ini hanya membahas salah satu aspek saja dari sekian aspek yang terkait dengan kelembagaan. Akan berbeda jika cara pandang analisis kelembagaan diterapkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Sangat

tidak dilanjutkan seorang pribadi swasta tertentu-mana, jadi saat inilah kepekaan kelembagaan teknologi. Bagaimana saja menggunakan nya untuk kegiatan ekonomisnya.

#### Perken. dengan Eksement

Berkala dengan perkembangan dan adopsi teknologi, berakut umam perubahan sosial yang digambarkan oleh perkembangan ekono- mial modernitas diuraikan. Sekalipun demikian, pembangunan perken- langannya bisa menunjukkan gejala mentalitas atau mental. Pengan- tian setiap hal perubahan kegiatan ekonomi tidak selalu menunjukkan garis lurus (linear). Bahkan mungkin masih menunjukkan *economic growth model*, yang mendominasi pemikiran berpikir kalangan ekonomi neo- klasik, menekankan keberaksan agar setiap perubahan menunjukkan gejala meningkat. Gejala ini bisa diartikan pada tingkat lain para pakar di kalangan Panti pada 1-3 dekade lalu yang "terbang" menunjukkan keberhasilan dalam pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, dan karena- nya jumlah butang negara yang dapat diartikan. Model atau tidak jika ada pembenaran dengan model pertumbuhan ekonomi sebagaimana Cemer- tuch Poston (1990), sangat dimina i oleh konsep pembangunan yang mengedarkan pembangunan nasional 2-3 dekade 1-lu.

Sangat diayangkan pada para petani pertanian berbasis keluarga, termu- dat ekonomi, pertanian di tingkat desa itu belum mampu memberikan gambaran yang ilmiah di bahwa masa depan perekonomian Indonesia sangat tergantung pada seberapa jauh sektor pertanian bisa diandalkan sebagai tulang punggung "back bone", perkembangan nasional. Gambaran ini sebagai meruntuhkan adanya karena "pemaksaan kehendak" agar para *small holders* pembangunan pertanian dan produksi di luar halangan Panti, menjadi kelompok pengaba dan penindas serta kebijakan yang paksa skala Panti tidak dapat pertanggungjawaban masa- Ora Baru, model pertumbuhan ekonomi ini secara sederhana memang menunjukkan keberhasilan, walaupun saat itu para pakar sosiologi dan ekonomi berdasarkan soal tidak mampu nyakan era-potensial.

Perayaan yang menarik dikemukakan "mengapa pembangunan pertumbuhan ekonomi, berakut resistansi pada sawah, yang terus menerus menunjukkan gejala meningkat lalu tidak selalu begitu- meng yak akhir tahun 1980-an". Perayaan yang lebih menarik "mengapa secara luas-luas mengalami akhir 1990-an perkembangan, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat". Dapat ditarik pelajaran bahwa secara keadaaan yang menunjukkan gejala peningkatan di bidang ekonomi, tetapi banyak diartikan sebagai "gila". Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat perlu dilihat dinamika dan perkembangan apa- yang pengaruh terhadap perkembangan ekonomi? Ternyata juga- nya situasi yang terus proses elemen kelembagaan yang pengaruh perkembangan ekonomi, sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh banyaknya input produksi ber- luas-campur dan didanai

dari penguasaan yang sangat lemah bagi perekonomian nasional. Ekonomi yang demikian tidak mencerminkan kekuatan ini masyarakat yang berkembangnya.

Kurangnya perhatian sosial yang bisa dilihat dari sudut pandang perkembangan ekonomi biasanya perlu diketahui juga penguasaan masyarakat terhadap sumber sumber pendapatan ini akan sangat berpengaruh akumulasi kapital dan akan juga (terutama tanah) aspek perubahan yang perlu dilihat aspek perkembangannya dari waktu ke waktu. Berbeda dengan perkembangannya teknologi, titik antar waktu yang diberikan referensi untuk mengukur adanya perubahan pada titik lain. Penggunaan titik antar waktu yang lebih panjang akan mengakibatkan perkembangan teknologi, namun akan sangat "tidak efektif" jika diterapkan untuk menjelaskan gejala perkembangan ekonomi. Berdasar kenyataan yang terlihat dalam 1-2 dekade lalu dapat disimpulkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pada tingkat nasional, namun ternyata hal itu tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan (GDP) nasional. Bahkan ada selang atau perbedaan waktu antara produksi tinggi dan pendapatan nasional menunjukkan gejala penurunan.

## Perkembangan Sosial

Pembangunan ekonomi sosial dalam pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting hasil dari perubahan sosial yang dirangsang. Kelangkaan ilmuwan sosial, seperti Sajogyo dan Tjandjuningra, sangat tegas menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah penciptaan pemerataan dari kehidupan sosial. Penulis lain, seperti Rukba (1988), juga menulis bahwa konsistensi antara kebijakan lokal pembangunan pertanian dan pedesaan dan strategi jataknannya sudah menjadi "bagian lama" yang terus diulang di setiap seminar atau konferensi petani. Di satu sisi memberikan jaminan dan pengungkapan terhadap tujuan ideal pembangunan, namun di sisi lain kebijaksanaan pembangunan ekonomi justru banyak meniadakan kebutuhan besar dan masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, konsep kurangnya perubahan sosial yang akan lain mencakup pengurangan kesenjangan lapangan kerja, peningkatan peluang berusaha, pemerataan pendapatan, peningkatan antar golongan masyarakat. Demikian laporan masyarakat terbagi-bagi (kemudian menunjukkan kekurangan kebutuhan dasar atau aspek sosial lain-lain seperti pengairan), dan masalah sosial tersebut ini melibatkan berbagai bentuk menjadi bagian penting strategi dasar pembangunan pertanian dan pedesaan.

Perkembangan sosial ini bisa untuk mengukur strategi kebijakan pada pemerataan perkembangan teknologi dan ekonomi menunjukkan masalah pada masyarakat banyak. Bisa jadi teknologi tinggi dan kapital secara cepat bisa dikuasai oleh kebanyakan petani sosial, namun manfaatnya tidak sampai dirasakan hingga lapisan masyarakat yang bertumbuh sangat di bagian bawah. Perkembangan sosial tidak selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi. Bahkan yang terjadi bisa

berkembang dengan pola perkembangan ekonomi dan ekonomi. Dilihat dari perkembangan kesempatan kerja, sebagaimana diungkapkan Soekarno (1990), transformasi perindustrian dengan strategi industrialisasi tidak memberikan gambaran yang cerah. Industrialisasi tradisional, dan dengan "menghadapi" pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, termasuk nelayan kecil. Di lain sisi ada pemertayaan, hanya untuk kelas yang tampak karena bisa dijadikan "sapi perah" oleh para pengusaha lain.

Soekarno (1974) menyatakan bahwa dari sebelumnya jumlah yang terlibat program industrialisasi pada awal gelombang pertama yang relatif masih banyak mengalami masalah kekurangan intensifikasi pada sektor tenaga kerja, tenaga modal dan tenaga tenaga. Industrialisasi yang terjadi di Eropa Barat pada awal abad 18 (Pulung, 1977) juga banyak dilakukan oleh kaum elit pemodal industrialisasi, yang dapat terlihat dari jumlah investasi yang relatif kecil dan kemungkinan yang sangat sempitnya apa yang terjadi industri pada 1-2 dekade terakhir juga demikian. Di mana industrialisasi yang digerakkan oleh kaum pemerintah luar negeri justru menyebarkan tidak menghiraukan ukuran nasional menghadapi krisis. Pada saat yang hampir bersamaan perkembangan kesejahteraan sosial menjadi lebih terpuak. Bahkan di kota di satu sisi memang menunjukkan perkembangan yang relatif pesat, akan tetapi di sisi lain rural yang makin makin banyak dan kemiskinan sosial makin besar.

### Perkembangan Hukum dan Politik

Harap secara langsung tampak bahwa aspek hukum dan politik dewasa ini menunjukkan titik kritis yang membatalkan. Walaupun jika dikatakan bahwa aspek hukum dan politik saat ini sedang menjadi sorotan tajam. Dua aspek ini mencakup proses perubahan sosial di Indonesia menggunakan pendekatan yang relatif relatif. Dari kalangan dunia internasional Indonesia dianggap negara yang beres dan negara yang tidak aman untuk investasi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan sistem korupsi yang sangat korupsi. Penyelenggaraan hukum tidak menjadi masalah korupsi. Akibatnya kepercayaan masyarakat dunia, baik dari negara-negara maupun dalam negeri, terhadap Indonesia sangat rendah. Perkembangan hukum, baik dari maupun nasional, setelah-telah masih jika di tempat dan bahkan berdasar perkembangan semakin menurun.

Dilihat dari permukaan, penyelenggaraan politik di Indonesia akhir-akhir ini di permukaan tampak secara umum, demikian, iklim politik Indonesia masih belum menunjukkan pola yang jelas. Akibat penggunaan uang. [merek politik] secara tidak wajar untuk memperlakukan tujuan politik atau kepentingan ekonomi. Bahkan masih banyak memarahi kebijakan perpolitikan baik di jalanan maupun di gedung. Deras Pergerakan Rakyat di tingkat pusat dan daerah. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia menunjukkan gambaran yang cukup matang. Maka pemerintah dalam mendorong korupsi masyarakat pertanian dan

perkembangan tidak akan dapat dilaksanakan. Keterlaksanaan politik yang ada masih banyak masalah kemandirian golongan industri di pertanian dan jawa yang merupakan banyak yang. Perkembangan keterlaksanaan politik, termasuk penyelenggaraan secara daerah tingkat dua dan tiga telah menunjukkan dampak yang berarti bagi masyarakat banyak. Dari beberapa faktor di lapangan, aspek di lapangan dan lingkungan, sudah menimbulkan gambaran yang lebih banyak di bidang sosial pemerintahan selanjutnya.

Seberapa cepat hukum dan politik yang penting diwujudkan dan untuk keterlaksanaan adalah kemampuan dan penempatan hukum, distribusi sumber, praktik, penggunaan kekuasaan, pelaksanaan praktik, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kemandirian publik yang baik. Aspek hukum yang mampu memberikan jaminan kepada bagi masyarakat banyak harus dikembangkan. Hal ini bukan saja akan memberikan landasan apabila bagi publik di semua selanjutnya, namun juga menimbulkan etika bagi publik di semua level bahwa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pembangunan dan keterlaksanaan bagi publik-publik lainnya yang dapat meningkatkan praktik hukum yang berarti. Sistem politik yang kurang berkembang di semua aspek dan representasi yang jelas bagi kemandirian masyarakat banyak juga perlu dilakukan perbaikan dengan menerapkan, dalam manajemen pemerintahan yang lebih baik.

#### Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Pengelolaan infrastruktur politik merupakan salah satu bagian penting pengelolaan pembangunan. Jika infrastruktur politik tingkat desa dan unit level komunitas pedesaan dapat dikelola dengan baik, kegiatan pembangunan pertanian dan pedesaan akan dapat meningkatkan peluang besar bagi terwujudnya daya yang sistem sosial pertanian yang berwujud usaha pertanian, pembangunan, pertanian dan pedesaan aspek kemandirian. Perubahan yang nyata, dengan ini tidak bisa dilaksanakan lagi, saja dengan pengembangan teknologi. Sebaliknya dengan pengelolaan infrastruktur publik yang baik, pembangunan yang dikembangkan untuk mendukung kesadaran teknologi akan lebih terwujud dan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dari beberapa lembaga di lapangan di berbagai pekarang Indonesia, pengelolaan infrastruktur publik di tingkat desa masih jauh dari memadai. Hal ini karena saja kurang memahami untuk pemetaan kemandirian pemerintahan pedesaan, namun juga aktivitas sosial dan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengelolaan infrastruktur pedesaan, meliputi, lingkungan, teknologi, energi, listrik dan aspek lain, pemerintah, kemandirian dan sumber daya banyak yang masih merupakan masalah pertanian dan pedesaan secara signifikan. Daya yang pemerintahan pertanian dan pedesaan sulit diharapkan bisa berkembang sebab terwujudnya dengan dikelompokkan pada. Jika pengelolaan infrastruktur publik masih, pengelolaan di per-

keuangan dan tidak merugikan perekonomian dan kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung.

**Berkembangnya Pengalasan, Agribisnis, dan Semuhertaya Alam**

Perubahan sosial yang memenuhi aspek pengalasan agribisnis dan sumberdaya alam setempat (lokal) akan menghasilkan dampak besar bagi keberlanjutan kegiatan pembangunan, pertanian dan pedesaan secara luas (gurunah, Dewasa ini, akibat pemadatan pertumbuhan ekonomi yang berakibatkan, agribisnis dan sumberdaya alam di pedesaan mengalami ancaman, sesuai Data (1982) menunjukkan bahwa tahun 1982 pertanian menjadi bidang pasar.

Kelambakan ekonomi dan sumberdaya alam dalam bentuk pengalasan hutan, pertanian akan menghasilkan dampak negatif untuk perkembangan pertanian publik dan bangunan publik yang tidak dapat dicontrol masyarakat lokal maupun negara (gurunah) pada umumnya pertanian dan pedesaan ke masa yang tidak menentu dan mungkin juga akan berakibat, air yang amat serius & perkotaan pada masalah kemarau dan banjir pada musim hujan, merupakan indikator tidak terakanya tanaman lokal yang yang merugikan sumberdaya alam (gurunah). *Impact of the extension*, masalah lokal, karena karena banyak masyarakat akan satu bentuk masyarakat pengalasan yang berkembang pengalasan dalam pengalasan agribisnis dan sumberdaya alam.

Pengembangan kelambaguan yang menghasilkan sumberdaya alam untuk pengembangan keberlanjutan daya dukung sumberdaya alam untuk meningkatkan keberlanjutan *Marginal Sustainability Value* (MSV) untuk keberlanjutan pangan, sosial, politik ekonomi, keamanan dan kenyamanan. Untuk, lingkungan, pengembangan, budaya, dan terintegrasi, dan penanaman ekonomi dan pengalasan berbasis alam (gurunah). keberlanjutan, budaya, nama dan pengalasan merupakan bagian penting pembangunan pertanian dan pedesaan. Hingga kini masih banyak aspek ini tidak secara serius dilakukan untuk perbaikan pembangunan. Dengan demikian ini berdampak akan tidak bisa telah mencapai tidak dan menghasilkan kembali keberlanjutan general masyarakat secara "keberlanjutan" lain. Hingga saat ini ini belum tidak memiliki kemampuan keberlanjutan yang bisa mencapai pengalasan sumberdaya alam dan lingkungan ini secara efektif.

**Ekonomi Kelambaguan dalam Pembangunan**

Harapan setiap pasar sosial cenderung memiliki semacam "preferensi" sendiri dalam memilih makna ambagya. Sebagai contoh, Uhlhoff (1998) dan Jyodranegara (1977) cenderung mengartikan pembangunan lembaga dalam kaitan perbedaannya dengan organisasi. Jyodranegara cenderung menggunakan pemahaman lembaga dengan pendekatan ini. Menurut Jyodranegara, Uhlhoff (1998) menarik pengertian

Kelompok atau kelembagaan dalam konteks struktur dan keberagaman untuk pengantarannya masyarakat lokal di tingkat ekonomi, tenaga, dan pendidikan yang disediakan pada masa akan datang masyarakat yang dilihat Tjandjosegoro (1977) juga terlihat pada adanya perubahan yang mendorong antara lembaga dan organisasi. Ia juga ingin menonjolkan bahwa makna kelompok lebih mencerminkan heterogenitas pada masyarakat lokal yang masih tradisional tingkat dikehidupkan harus dan masyarakat, mencerminkan heterogenitas pada masyarakat modern (Jurnal ke-40).

Pembelahan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu masyarakat tradisional yang mencerminkan heterogenitas masyarakat atau lembaga di satu sisi, dan masyarakat modern yang mencerminkan heterogenitas didasarkan atas tiga dimensi di satu sisi, tidak menimbulkan gambaran yang memadai untuk menganalisis masalah pembangunan pertanian dan pedesaan. Pengorganisasian kelembagaan untuk melibatkan semua, sehingga pada kemajuan pertanian dan pedesaan bisa dicapai tidak cukup jika semata-mata dilihat dari elemen keberagaman sosialnya. Mula dari "struktur sosial"-nya, misalnya struktur organisasi, masih jauh dari cukup. Dengan mengorganisirnya pada "tata"-nya, akan "struktur dalam"-nya (Lauer, 1982), akan sangat membantu memberikan gambaran apakah suatu elemen masyarakat dapat maju atau tidak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa seluruh elemen yang terdapat dalam sistem atau lebih kelembagaan yang memberikan kemampuan pembangunan pertanian dan pedesaan. Rukun keluarga yang dimaksud dapat diuraikan di bawah.

#### **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kompetensi SDM merupakan salah satu komponen kelembagaan yang penting dan sangat menentukan kemajuan pertanian dan pedesaan. Agar kemajuan pertanian dan pedesaan bisa dicapai, adanya semua SDM, dari petani hingga aparat pemerintahnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian pedesaan masyarakat pertanian dan pedesaan. Menjadi salah satu kompetensi yang mendasar, kemampuan kompetensi yang dimaksud termasuk:

- (a) Keterampilan yang terdapat pada individu, hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas individu dalam suatu bidang pekerjaan. Keterampilan individu menjadi salah satu yang penting perkembangan kemajuan masyarakat pertanian dan pedesaan.
- (b) Kemampuan emosional yang tinggi, hal ini penting untuk membangun hubungan yang bersifat "positive impact". Kemampuan "interpersonal trust" sehingga hubungan kerja efektif haruslah didasarkan pada individu yang telah memiliki kematangan emosional relatif tinggi.
- (c) Kemampuan teknis yang bersifat intelektual, harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan produktivitas kerja individu melalui cara kerja yang terorganisasi dengan baik.
- (d) Apresiasi terhadap tata nilai masyarakat, hal ini paling tidak akan menghasilkan kontribusi positif individu atau anggota masyarakat terhadap kemandirian untuk maju bersama.

- a) Agresif tinggi terhadap penggunaan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan pembangunan sosial yang progress.
- b) Responif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memberikan peluang hadirnya sosok pemimpin yang memandu masyarakat untuk lebih cepat maju secara fisik, intelektual.

#### Tabel Nilai Maju

Kandungan tata nilai yang ada dalam budaya atau sistem sosial akan sangat menentukan sampai seberapa jauh tingkat kemajuan individu atau sistem sosial tersebut. Tata nilai yang dijalankan akan sistem sosial mana yang telah mengalami tantangan yang relatif besar. Jika masyarakat sudah lebih cerdas. Beberapa kemampuan baru akan di bawa di ini. Kita untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran kemajuan yang akan dicapai untuk masyarakat. Hal dalam tingkat kelompok dan desa maupun negara.

- a) Penghargaan terhadap kerja keras (tidak malas).
- b) Tajam (tidak malas).
- c) Fleksibel (tidak mengabaikan aset strategis).
- d) Produktif (tidak acuanan).
- e) Rasa ingin dan bangga diri tinggi (tidak acuanan).
- f) Prestasi kompetitif (tidak mengabaikan prestasi).
- g) Sehat dan mandiri (tidak beranggapan dan saka pamer).
- h) Hama (tidak mengabaikan terhadap inovasi).
- i) Cara berprestasi (tidak mengabaikan terhadap aspek dan kemampuan).
- j) Daya ungut (tidak mengabaikan).
- k) Rasional dan Empower (tidak mengabaikan dan mengaitkan semua pihak).
- l) Berdik (jangka panjang yang juga mengaitkan ke-hawa Sunda tidak "kemah kerkas").

Sebagai gambaran masyarakat Jepang memiliki energi kemajuan yang besar karena memiliki rasa malu dan bangga diri yang tinggi. Kerja keras, tajam dan tinggi dan mengaitkan setiap kompetitif dan pertunjukan di arena pasar (Friedrich Weber (1964) menyatakan bahwa kemajuan masyarakat Eropa pada abad 19-20 sebagai ciri-ciri atau "budaya" (Friedrich Weber) bahwa kerja keras dan mandiri yang wajib bagi manusia yang mengembangkan kehidupan.

#### Keperluan

Dalam perspektif pembangunan atau perubahan sosial, Friedman (1986) menyatakan bahwa aspek kepemimpinan sangat menentukan kemajuan masyarakat (Friedrich Weber (1964) menyatakan bahwa kemajuan masyarakat Eropa pada abad 19-20 sebagai ciri-ciri atau "budaya" (Friedrich Weber) bahwa kerja keras dan mandiri yang wajib bagi manusia yang mengembangkan kehidupan.

ahil bukan disebabkan pada tipe kepemimpinannya sehingga dikategorikan sebagai Raja (1994), melainkan disebabkan tipe Raja yang menekankan aspek disiplin untuk memajukan masyarakat pertanian dan pedesaan. Komponen kepemimpinan yang dipelajari adalah:

- a) Melakukan personal yang tinggi (kepercayaan, jujur dan adil yang didapat pada pribadi seorang pemimpin yang sedang menjalankan kepemimpinannya.
- b) Visi & Misi yang jelas dan implementatif yang dimiliki seorang pemimpin.
- c) Memberikan seorang pemimpin memberi inspirasi (inspirasi) dan memotivasi (motivasi) anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- d) Memiliki kemampuan untuk mengatasi (mengatasi) pada masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian ini bisa dikatakan adanya "kemampuan kepemimpinan" yang dengan kepemimpinan ini seorang pemimpin bisa mengatasi masalah-masalah yang ada.
- e) Membangun hubungan yang baik, harmonis dan positif yang signifikan dan sangat interaktif dengan khalayak dan masyarakat.
- f) Memiliki kemampuan dalam pemrosesan konflik (konflik resolution) yang terjadi di masyarakat dan masyarakat bekerjasama (solidarity) antara sesama subareka untuk membangunnya dan salaman.
- g) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anggota masyarakat yang dipimpinnya.
- h. Mengajarkan penggunaan disiplinilah yang tinggi pada setiap pengambilan keputusan.
- ii. Menunjukkan tinggi kedisiplinan untuk melaksanakan semua kerja baik diri dan kolektif terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai hasil pengajaran belajar kepemimpinan dalam memajukan masyarakat terkandung erat dengan kandungan komponen kepemimpinan yang didapat pada diri seorang pemimpin. Dengan menggunakan komponen tersebut juga dapat untuk melakukan pelatihan sebagai hasil seorang pemimpin dapat menjadi penerbit kemampuan masyarakat pertanian dan pedesaan. Dengan bantuan komponen kepemimpinan dapat dilakukan pengendalian yang lebih tajam dan sebagai itu membuat pemukiman (pedesaan) sebagai hasil masyarakat akan menjalankan dan meningkatkan kesuksesannya di lingkungan seorang pemimpin.

#### Struktur dan Organisasi Sosial

Struktur sosial Salah satu kriteria serius dalam modernisasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan pada pertengahan pemikiran barat ("westernisasi") adalah kurang menekankan pada perubahan struktur sosial. Salah satu cara untuk melihat perubahan struktur sosial adalah dengan memperhatikan perubahan struktur lapisan atau sistem interdependensi yang terjadi pada hubungan antar pelaku dan sekelompok pelaku sosial yang terbentuk. Struktur sosial yang sehat adalah





kelembagaan. Aspek kelembagaan termasuk pengembangan nilai-nilai kepemimpinan dan perubahan struktur sosial kecil yang diteliti secara mendalam. Akibatnya, implikasi penelitian kelembagaan yang sebenarnya ditunjukkan tidak lebih dari sekedar sebagai "beban" untuk penelitian diri terhadap kegagalan penyelenggaraan pembangunan pertanian dan pedesaan. Suatu anggapan yang lebih positif dari penelitian kejiwaan agar suatu saat masalah kelembagaan lebih berkembang, malah ada dalam bentuk "mimpi" dan goadukan ke depan yang lebih optimis, secara terdistribusi ditubagi.

- (3) Penelitian keterlaksanaan, dengan fokus pengetahuan keahlihan. Akibatnya nilai dikembangkan lebih terus menerus sebagai yang digunakan dalam pembangunan pertanian ke depan. Sarat dengan aspek kelembagaan, masalah dalam keterlaksanaan dengan aspek keahlihan, kepemimpinan, manajemen sosial dan interdependensi akan pada pembangunan pertanian dan pedesaan. Berbagai permasalahan pertanian selanjutnya, bahwa untuk diwujudkan secara kritis dari aspek kelembagaan, sehingga upaya untuk permasalahan kelembagaan ke depan bisa lebih akurat dan berpengaruh besar bagi pembangunan daya yang masyarakat pertanian dan pedesaan.
- (4) Perspektif penelitian kelembagaan yang lebih dengan aspek pembangunan nilai-nilai. Oleh sebab itu dikehendaki. Misalnya jika ada keahlihan kelembagaan pertanian secara positif banyak digunakan untuk melihat sektor pertanian. Misalnya saja, penelitian kelembagaan aspek teknologi produksi padi sawah hanya melihat peningkatan produksi padi secara agribisnis nasional dalam jangka pendek, hanya melihat keterlaksanaan sosial yang ditunjukkan. Itu itu akan memberikan gambaran yang tidak lengkap. Dengan analisis kelembagaan bisa dibuka ruang analisis lebih lebar dan lebih relevan untuk menjelaskan keberhasilan, kegagalan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertanian dan pedesaan, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan nasional secara lebih luas.

2017.11.15

- [illegible]

- Pratt, H.D. 1991. *Gerbang ke Lapangan Gula: Masalah Kependidikan dan Sosial dalam Industri Gula*. CV Sinaru, Jakarta.
- Rachdy, M. 1988. Aspek aspek industri gula Perkebunan Industri Perikanan. Kadahul Seminar Nasional Industri Perikanan. Kegiatan Sosial dan Perikanan Nasional di Dalam Pembangunan Perikanan. 17-18 Januari 1988. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan, Bogor.
- Radcliffe, M. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Remaja, LT, Garut, Jakarta.
- Rachdy, A. 1988. *Kapal-kapal Perikanan: Sebuah Pengantar*. Jalas, Y. Suka, Yogyakarta: Suka SGA, Yogyakarta. 1988. Jakarta.
- Robinson, A. 1991. Dari Industri Perikanan dan Iak Sampai ke Society Perikanan. Dalam K. Hidayat, *Kelapa dan Perikanan: Mengungkap Dunia Perikanan dan Luluh*. Pusat Kambala Yogyakarta.
- Simon, H.D. 1986. *Systematic Models: A Framework for Decision Making*. The Companies/Consulting Profit-Ling Company, Inc. Kuala Lumpur.
- Cloudbury, L.R. 1987. *Sustainable Management of Coastal Mangrove Forest Development and Global Needs*. World Academy Congress, Bangkok 19-28 October 1987. Australia.
- Odum, H.T. 1977. *The Flow State in the Prehistory: Cosmopolitan and the Origin of Agriculture*. Yale University Press, New Haven and London.
- Jahin, R. dkk. 1988. *Studi Pengaruh-pengaruh, Persepsi, dan Perilaku Masyarakat Perikanan dan Kelangkaan Gula*. PIR B. Bogor.
- Dahuri, A. J. Raga dan A. J. Gungah. 1980. *Pengalaman South-East Asia Wilayah Perairan dan Lautan Karama Perairan*. PT Pustaka Pustaka, Cilacap.
- Dunn, C.H. and H.S. Gullberg. 1957. *A Concept of Agriculture*. Colorado School of Fisheries Administration, Third Edition, Edward.
- Dunn, C.H. 1962. *Modernization and Development: The Search for Alternative Paradigms*. The United Nations University, Technical Books Ltd, London.
- Dunn, C. 1971. *Agriculture as Man's Transformation of The Earth*. Environment, 1, 1. 58-64. Gull, Persons and Present Societies. Penguin Books Ltd, Middlesex.
- Forster, A. 1980. *The Problem of Labor in Society*. Free Press, New York.
- Forster, A. 1964. *The Rules in Sociological Research: The Case of the Social Study of the Application of Scientific Techniques to the Study of Social Phenomena*. Translated by S.A. Fawcett and A.H. Mueller and edited by G.E.G. Colling. The Free Press, Coler-Michael for Publishing, London.
- Forster, A. 1968. *The Rule of Sociological Method*. Translated by S.A. Fawcett and A.H. Mueller and Edited by G.E.G. Colling. The Free Press, London.
- Kosman, A. 1991. *A Comprehensive Analysis of Complex Organization in Social, Environmental, and Team Contexts*. The Free Press of Glenside, Inc. New York.
- Mahmud, A. 1988. *Korban Organisasi*. Pustaka Halim, Bandung dan CINA, New Jersey.
- Qasim, C. 1988. *Pengantar dan Raja*. Yayasan Gula Indonesia, Jakarta.
- Qasim, C. 1991. *Analisa Perikanan: Perikanan Perikanan: Tinjauan di Indonesia*. Pustaka Karya, Pustaka, Jakarta.
- Rachdy, M. 1988. *Sejarah dan Perkembangan Perikanan*. Gula Indonesia, Jakarta.

- Gardar, H.S. 1986. Teori Ekologi Tentang Pembangunan MPR Kemajlis Perikatan. *Akasia* El Saifin dan H. Marwanita (ed.). Penerbit Pustaka: Duri Tembuku Bina Pendidikan Perkutani. PT Gramedia Jakarta.
- Hagen, E. 1962. On The Theory of Social Change. New Economic Growth. Eighth. The Dorsey Press Inc Illinois.
- Hartman, A. 1988. The Sociology of Modernization and Development. Prentice Hall London.
- Haryati, Y. dan M. Khatun. 1987. *Uraian Khasanah Desa: Status Bangsa Bangsa Khasanah Berdasar Pendekatan Khasanah di Asia Tenggara Baru Indonesia*. Jilid II.
- Hidayat, S. 2001. Desentralisasi Negeri, Desa, dan Masyarakat: Alternatif Tawaran Ilmu Humanitas Indonesia. 19 Desember 2001. vol. 42.
- Haluyut. 1987. Petanian dan Buruh Sawah: Prospek Pertumbuhan Sektor Formal dan Informal Di Am Pemukiman. *Litana*, 22, (7):9-14. 1988. Jakarta.
- Hansen, G.C. 1930. The Human Group. Harcourt, Brace and Company, New York.
- Hoeggh, ALMA. 1976. Strategi Masyarakat Sejahtera Berkembang. (terjemah Sumardi). Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Jones, R. 1986. The Role of Intelligence in Modern Society. American Scientist. 84 July-August: 366-369.
- Kuslan, Firda, & Witer. 1988. Perkembangan Industri. Majalah Priema, XI 1988. Jakarta.
- Latipullah. 1979. Konsep-konsep Fundamental For the Country Studies of Rural Development. In Latipullah (ed.) Approaches to Rural Development from Asian Experiences. Asian and Pacific Development Administration Center, Kuala Lumpur.
- Nasir, C. 1978. Masalah Islam Tentang Sekolah: Pilihan dari Masjid-masjid Dan Khutbah, Muallafah M. Ali. (Sumardi ed.). Penerbit Intermex, Jakarta.
- Ogden, D.P. 1987. Two Struggles: Khasanah dan Modern. (terjemah R.K. Zuhairi). Pustaka PT Gramedia Jakarta.
- Salam, Ali. 1985. Organisasi Desa: Paul And Komunitas. P.T. Pusaka Utama Graha, Jakarta.
- Santiningtiyos. 1981. Kependudukan Dalam Dimensi Sosial. 1986. Jakarta.
- Priyanto, P. dan Pransaji. 1987. *Kemiskinan Sosial dan di Masa Depan di Sektor Pertanian dalam Perspektif dan Pengembangan Industri*. Yogyakarta Pustaka.
- Rodrik, D.M. 1975. On Groups and Social Structure. Holt, Reinhart and Winston, New York. Keajaiban tahun 1986. November 1986. 3. Edisi ke-1 Lembaga Penelitian Pendidikan Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rossini, M.J. 1986. Ecology of Indonesia. IRI Press, Boston.
- Shiddiq, L. 1978. Masalah Islam Tentang Sekolah: Pilihan dari Masjid-masjid (terjemah C. Ismail). Penerbit Intermex, Jakarta.
- Sudarmadityo. 1981. *Masyarakat Masyarakat Pembangunan: Pengantar Rongga Antropologi Tradisional*. 1985. Jakarta.
- Sugeng, R. 1980. Kependudukan dan Manusia Oriental Barat Berbudaya UI No. 28 Tahun 1980: Suatu Tinjauan Mengenai Kebangkitan Kebudayaan dan Kependudukannya. *Asiatika* 1985, 20(1):11-20-33. CGS, Jakarta.

- Porter, M.E. 1985. *Social Development: Putting People First*. In *Development and the World: Closing the Gap*. D.G. Warren and V.R. Adams (ed.). McGraw Hill International Book Company, London.
- Rachit Triandisman, J.V. 1988. *Kata Pengantar: Pendekatan Logis dan Politik Hukum*. Rast, Jakarta (Rast Gunung Jati). Indraloka dan Zekungkon. P.T. Graha Widada, Jakarta.
- Reber, H. 1988. *Sejarah dan Strategi Pembangunan Manusia di Dunia Ketiga*. Jember: Karl-Helm W. Dechert (ed.). Jember dan Subakshana Pembangunan dan Lahan, Yogyakarta dan Indonesia, Jakarta.
- Schultz, G.R. 1981. Market and State in Centrally Planned Economies. In G. Harborth and M.J. Smolin. *Economy and Society: Essays in Economic Sociology*. Current Sociology, 29(2/3):147-167. Sage Publications, London.
- Sumar, Y. 1990. *Eksploitasi Bumi Asia Tenggara*. (Jepang)Jil. LP005. Jakarta.
- Turner, R.H. 1982. *Processes of Social Change*. Allen and Unwin, Inc. Boston.
- Ussler, D. 1988. *The Peasantry and Social Change: Modernizing the Middle East*. The Free Press, Glencoe, Illinois.
- Mardiaty, W. d. dan I. d. 1995. Hubungan Petak-Daratan dalam Pembangunan Manusia dan Ruang. *Geografika Beranda*. Jakarta.
- Maxwell, R.H. and G.H. Page. 1982. *Society: An Introduction Analysis*. Methuen and Co. Ltd. London.
- McLellan, D.E. 1976. *An Essay on the Principle of Analysis, and A Summary View of the Principle of Politytics*. Penguin Press Ltd. Middlesex.
- Munawir, R. 1981. *Isilogi dan Ujung: Mengungkap Kerasan Politik dan Politik*. Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Murandi, C. and T.H. Idris. 1988. *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*. Gramedia PT. Pustaka Jaya, Jakarta.
- McHardy, A. and M.J. Smolin. 1990. Economic Sociology: Theories, Methods and Analysis. *Current Sociology*, 38(2/3): 3-19. Sage Publications, London.
- Maxwell, R.H. and G.H. Page. 1982. *Society: An Introduction Analysis*. Methuen and Co Ltd. London.
- McFarlane, B.H. and S. Toller. 1975. *Modern Political Systems: An Introduction to Economics*. McGraw Hill Book Co. Ltd. Tokyo.
- Marx, K. 1982. *Social Theory and Social Science*. The Free Press of Glencoe, New York.
- Moore, D. G. 1967. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Land and Power in the Making of the New World*. Beacon Press, Boston.
- Muradina, M. 1990. *Indigene and Economic Analysis*. Current Sociology, 38(2/3): 77. Sage Publications, London.
- Mulawati, L. dan W. D. D. 1991. *Manajemen dan Kebijakan Studi Ekonomi dan Sosiologi di Dili*. Raja Pustaka, Penerbit I.V. Hidayat, Jakarta.
- Mulyadi. 1990. *Dimensi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*. Jember: Presidial Seminar Nasional PERHUKU (Rast) Jember. Mengungkap Kerasan Politik dan Kerasan Politik. Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Mulyadi. 1990. *Dimensi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*. Jember: Presidial Seminar Nasional PERHUKU (Rast) Jember. Mengungkap Kerasan Politik dan Kerasan Politik. Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Mulyadi. 1990. *Dimensi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*. Jember: Presidial Seminar Nasional PERHUKU (Rast) Jember. Mengungkap Kerasan Politik dan Kerasan Politik. Penerbit Kanisius, Jakarta.

- Kusumadilaga, D.D. 1982. *Antropologi Masyarakat*. Edisi Revisi. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1996. *Esas dan Politik Kebijakan dalam Indonesia 1982-1990*. LAPSA, Jakarta.
- Kusumadilaga, D. 1993. *Sustainable Economy and Sustainable Development*. The World Bank, Washington, D.C.
- Kusumadilaga, D. 1998. *Asian Disaster: An Inquiry Into the Poverty of Nations*. Century Fund and East-West Books Ltd, New York.
- Kusumadilaga, D. 1999. *Kebijakan-kebijakan Pangan dan Agribisnis*. Pustaka Gramedia, Jakarta.
- Kusumadilaga, D. 2003. Studi Eksklusif dan Analisis dan Agribisnis Tanaman Pangan C. Diambil dari *Survei dan Kebijakan dalam Ujian Tanaman Pangan dan PT. Andal Agribisnis*. Pustaka Gramedia, Jakarta.
- Kusumadilaga, D. and D.A. Kusumadilaga. 1998. *Manpower New World Dictionary of Agriculture*. English. Webster's New World, New York.
- Kusumadilaga, D. 2000. *Pengembangan Ekonomi Indonesia Menuju Abad Baru*. Penerbit Graha GSI, (2000) 102-114. GSI, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1997. *Fundamentals of Biology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
- Kusumadilaga, D. 1999. *Economy and Energy in Sustainable Development*. In: SEPS (ed.), *Economy and Energy in Sustainable Development*. Gramedia, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1995. *Teknik Kelapa dan Kelapa: Politik Kelapa dan Pemasaran Agraris*. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1992. *Kemampuan Pemikiran Kritis dan Kemampuan Abad Kemajuan*. dalam: *Epigra* Vol. 1. Balai Pustaka, Pustaka Gramedia, Pustaka Yayasan Ober Indonesia dan Yayasan Agri Ekonomi, Bogor.
- Kusumadilaga, D.A. 1999. *Kemampuan dan Pemasaran dalam Pemasaran*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Kusumadilaga, D.A. 1998. *The Analysis of Social Change Reconsidered: A Sociological Study*. The Sage Press.
- Kusumadilaga, D. 1997. *The Great Transformation: The Political Economic Origins of Our Time*. Beacon Press, London.
- Kusumadilaga, D.A. 1998. *Communism: A Survey of Theories and Methods of Research*. McGraw-Hill Publishing Co Inc, New York.
- Kusumadilaga, D. 1991. *Friction Lumbago dan Osteoarthritis*. Masyarakat Tegal dan dalam: *Pembangunan, Berencana di Pedesaan: studi Kasus di Desa Kedondong dan Kelampayan*. Kecamatan Nglan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, Bogor. (Kusumadilaga, D.A. 1991).
- Kusumadilaga, D. 1991. *Ekonomi dan Pertanian*. Masyarakat Tegal dan dalam: *Pembangunan, Berencana di Pedesaan: studi Kasus di Desa Kedondong dan Kelampayan*. Kecamatan Nglan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, Bogor. (Kusumadilaga, D.A. 1991).
- Kusumadilaga, D. 1991. *Ekonomi dan Pertanian*. Masyarakat Tegal dan dalam: *Pembangunan, Berencana di Pedesaan: studi Kasus di Desa Kedondong dan Kelampayan*. Kecamatan Nglan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, Bogor. (Kusumadilaga, D.A. 1991).



- [illegible]

- Sigogno, 1992. *Things Empty: Frictionless Utopia*. Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Agri Ekonomika, Yogyakarta.
- Silalahi, 1982. *Blakang Pedeasaan: Sebuah Drama Rakyat*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sirgany, 1988. *Desain: Menemukan dan Bakuhi Masyarakat Pedesaan dalam Penelitian Sosial Nasional*. PUSKAP (Djaja) Bangka-Mengembangkan Berbagai Aspek Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Pertanian dan Kehutanan, dalam *Traseksi Budaya dan Eksploitasi Perhimpunan*. (Konsil Pertanian Indonesia) (PUSKAP), Jakarta.
- Schmidt, G. and E. Sahity, 1982. *Thoughts Regarding the Social Security of the Poor*. In: P. Sahity and G. Schmidt (ed.), *Improving Social Security: Searching Out of the Poor*. Asian and Pacific Development Centre, Kuala Lumpur.
- Smith, J.D. 1980. *Jurnal Ekonomi Pedesaan: Pengelolaan dan Kesejahteraan di Asia Tenggara*. ICR, Jakarta.
- Sellingman, L.G. 1974. *Perubahan Keturunan dan Pembangunan Politik dalam Negara B. Sellingman dan J.C. Kato dan Masyarakat*. Lentera Yogyakarta.
- Simon, J. 1973. *Food for The World*. Pocket Press, New York.
- Simon, J. 1975. *The Economics of Population Growth*. Princeton University Press, Princeton.
- Smith, J.R. 1979. *A Research Framework for Traditional Fisheries*. International Centre for Longstanding Resources Management, Manila.
- Sriharsono, H. 2005. *Hukum, Demokrasi, dan Hukum dan Kehutanan, Seminar Hukum: Indonesia Baru*. Amikom, 10-11 1945, *Trilogi dan Dialog*. (Konsil) 3 Agribisnis 2010). *Conservation Science* 191. *Conservation Science* 191-241 dan *Conservation Science* 191-241, *Conservation Science*, Jakarta.
- Solomon, R. 1966. *Contemporary Sociological Theories: The First Quarter of Twentieth Century*. Harcourt and Row Publishers, New York.
- Strom, J.H. 1983. *Theory of Cultural Change: The Microbiology of Cultural Change*. Cambridge University Press, London.
- Sudaryanto, T. dan E. Pasmakurni, 1995. *Aspek-aspek dalam Perspektif Konsep Ciptaan dan Bangunan Hasil Pembangunan dalam Perspektif Pembangunan Sektoral di Indonesia*. Pusat Penelitian Sosial Teori Perilaku, Yogyakarta.
- Sudharsono, H. dan T. Ibrahim, 1990. *Aspek Kesejahteraan dan Ketahanan: (Konsil) dalam Arifin dan Daya Saing Model Pertanian: Fokus Masalah, Simposium Pendidikan, Universitas Jember*. 17-22 Desember 1992. Jember, Jember.
- Sumardi, R. 1985. *Pembangunan Kewirausahaan: Melalui Gerakan Pembangunan Kewirausahaan dan Pembangunan Kewirausahaan*. (Konsil) dalam *Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Kewirausahaan*. Jakarta.
- Susilaningrum, G. E. Sontoso dan M. Khotan, 1985. *Gerakan Kewirausahaan dan Ketahanan: Perspektif Pembangunan*. PUSKAP, Jakarta.
- Susilaningrum, G. 1997. *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. PUSKAP, Bandung, Jakarta.

- Schwarz, S.H.Gel. 1985. Apa itu Manusia. *Terjem. PELITA* [14 Januari 1986], Jakarta.
- Simons, A.H. (ed.). 1968. *Aspek-aspek Pembangunan Bagi Hasil di Perikanan Laut*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Thoburn, J. 1988. Apakah Jawa akan Menjadi Paving Road? *Jawa Sejagad* (ed.). Ekologi Pedesaan. Sekolah Bangsa Tempel, Penedit G.V. Rajawali, Jakarta.
- Tundjunggoro, S.K.P. 1977. *The Organization, Planning and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Pakelak, West Java and Kecamatan Pandak, Central Java*. University of Indonesia, Jakarta. Direktorat Studi Kepulauan, Bandung.
- Tundjunggoro, S.K.P. 1978. *Modernisasi Pedesaan: Dalam Berbagai Dimensi Kewarga Swadayaan*. Lembar PROSIDI VI/88, 1978, L.P. 1978, Jakarta.
- Tundjunggoro, S.K.P. 1980. *Swadaya, Komunitas dan Reproduksi*. PROSIDI 1980, 1981, November 1980, L.P. 1981, Jakarta.
- Tundjunggoro, S.K.P. 1985. *Perilaku Sosial dan Pembangunan Sosial di Pedesaan Jawa*. *ASPIRA* 88/89 Ed. Juli 1986, L.P. 1986, Jakarta.
- Ukahl, H. 1985. *Local Environmental Development: An Analytical Framework With Cases*. Zumbach, Lucerne, Switzerland.
- Urry, J., 1. Askes, M. Elzaki, H. Suman, D. Njoto, M. Rahardjo, H. Kusubono, C. Mochlis, T. Kadirana, S. Kertih dan I. Sumantri. 1985. *Indahnya dan Kehidupan*. J.P. Gramedia, Jakarta.
- Van Dusen, W. 1966. *Taking Nature Into Account: A Report to The City of New York*. *Toward a Sustainable National Economy*. Capricorn, Springer Verlag New York Inc. New York.
- Von Blücher, G. 1978. *Two Teachers: Karl Barth and Hans Reuter* (ed.). *Social Research: Principles and Processes*. Longman Ltd. The Open University Press, New York.
- Waller, H. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. Translated by A.M. Halsey and T. Parsons. The Free Press, New York.
- Waller, M. 1983. *Modernisasi Desa dan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wirth, W.F. 1974. *Evolution and Revolution: The Rising Role of Entrepreneur*. Penguin Books, Hindawi.
- Wirth, W.F. 1977. *The Rising Role of Transpiration: From Contemporary Sources*. *Revista de Sociologia e Desenvolvimento*. Turbana, Yogyakarta, L.J. Laram.
- Wuljau A.W. 1990. *Pembangunan Desa dan Administrasi Desa*. *Wartana Ukur* (meng. Nana S. Lahir). 1978. Sekolah Ilmu, Majalah, F.I. Bap. Grefido Press, Jakarta.
- Wall, R.R. 1983. *Man: Social, Cultural, Anthropology*. Penerbitan 1985, Penerbitan, Bygonell, Jakarta.
- Yusuf, Y. 2001. *Perilaku, Dampak, dan Perilaku Manusia (UPN)*. *Aspek Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor.
- Zamora, P. 1985. *Social Organization and Evolution*. E.H. Gomberg and W.L. Stone (ed.). *Twentieth Century Sociology: The Philosophical Theory*. New York.

## BIODATA PENULIS



**Tri Pranadji** lahir di Surakarta, 30 Desember 1958. Menyelesaikan S-1 (Ir) dari Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1984). S-2 (MSi) pada Jurusan Sosiologi Pedesaan, Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini sedang menyelesaikan S-3 pada Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana IPB. Menjadi anggota PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) dan PERMETA (Perhimpunan Mekanisasi Pertanian Indonesia) sejak 1984, anggota PII (Persatuan Insinyur Indonesia) sejak 1989, Pengurus PERHEPI Bogor (awal 1990-an), Pengurus ISI (Ikatan

Sosiologi Indonesia) Cabang Bogor (akhir 1990-an), dan Pengurus ISI Pusat (2003-sekarang). Menjadi peneliti sosial ekonomi pertanian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian sejak 1984, diangkat sebagai Asisten Peneliti Madya pada 1987 dan Abdi Peneliti Utama dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada 1995. Beberapa kali menjadi Anggota Dewan Redaksi pada Forum Agro Ekonomi (FAE) dan Jurnal Agro Ekonomi (JAE) sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Menjadi Editor dan Penyunting sejumlah hasil penelitian yang dipublikasikan menjadi buku di LIPI, Puslitbang Sosek Pertanian, dan Badan Litbang Pertanian. Aktif meneliti dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah, antara lain: Jurnal Analisis-CSIS; Forum Ekonomi (ISEI); Forum Statistik (BPS); FAE, JAE dan Analisis Kebijakan Pertanian (Puslitbang Sosek Pertanian); dan Mimbar Sosek (Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian IPB). Beberapa kali memimpin kegiatan penelitian bidang sosial dan saat ini menjabat Ketua Kelompok Peneliti Kelembagaan dan Organisasi Pertanian di Puslitbang Sosek Pertanian.